

Nomor : 01/YukiFarm/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Arahan ANDALALIN

Lima Puluh Kota, 01 Februari 2026
Kepada Yth :
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Limapuluh Kota
Di

Tempat

Berdasarkan Peraturan menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). Diterangkan bahwa setiap rencana Pembangunan atau Kegiatan yang akan menimbulkan gangguan keselamatan, keamanan dan Ketertiban serta kelancaran lalu lintas wajib dilakukan Analisa Dampak Lalu Lintas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas,

Maka kami mengajukan permohonan arahan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) terkait dengan kegiatan yang akan kami lakukan dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon : Yon Fitri
NPWP Pemohon : 14.031.498.0 – 204.000
Alamat : Subarang Batuang Kec. Payakumbuh Barat
Nama Perusahaan : Yuki Farm
NIB Kegiatan : 0227010232523
Komoditas : Budidaya Ayam Ras Petelur
Lokasi Usaha : Jorong Solok Dalam Nagari Solok Bio Bio Kec. Harau
Kab. Limapuluh Kota
Luas Kegiatan : 12,7 Ha
Jumlah Kendaraan Angkut : 10 Colt Diesel / Hari

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Homat Kami,
Pemohon



Nomor : 006/AAP-Nuranbiya/II-2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Arahan ANDALALIN**

Lima Puluh Kota, 25 Februari 2026

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota
di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). Diterangkan bahwa setiap rencana Pembangunan atau kegiatan yang akan menimbulkan gangguan keselamatan, keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas wajib dilakukan Analisa Dampak Lalu Lintas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka kami mengajukan permohonan arahan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) terkait kegiatan yang akan kami lakukan dengan data sebagai berikut:

Nama Direktur : Wengki Poetra Chaniago
Nama Perusahaan : PT Andalas Anugerah Properti
Alamat : Komplek Perkantoran Digital Business Park, Sei Kamuyang,
Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota
NPWP Perusahaan : 62.946.385.2-204.000
NIB Kegiatan : 2402230088028
Komoditas : Kontruksi Gedung Hunian
Lokasi Usaha : Balai Tinggi, Nagari Gurun, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota
Luas Kegiatan : 19.272 m²
Jml Kendaraan Angkut:

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan, terima kasih.

Hormat Kami,
PT Andalas Anugerah Properti



WENGKI POETRA CHANIAGO
Direktur Utama



PT. NOFAREN KEMALA BAROKAH
KONTRAKTOR-DEVELOPER-REAL ESTAT

Jl. Jambu RT 005 / RW 002 Kotokaciak Kubu Tapakrajo Kec. Payakumbuh Utara
Kota Payakumbuh Sumatera barat
Telp/HP : 085263534405, E-Mail : ptnofarenkemalaharokah@gmail.com

Nomor	001/SR-III/ANDALALALIN/III/2026	Payakumbuh, 5 Maret 2026
Lampiran	1 Berkas	Kepada Yth.
Perihal	Permohonan Arah-an ANDALALIN	Kepala Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota Di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), diterangkan bahwa setiap rencana pembangunan atau kegiatan yang akan menimbulkan gangguan keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas wajib dilakukan Analisa Dampak Lalu Lintas.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka kami mengajukan permohonan arahan Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) terkait dengan kegiatan yang akan kami lakukan, dengan data sebagai berikut:

Nama Direktur	: Nadya Nofaren
Nama Perusahaan	: PT. Nofaren Kemala Barokah
Alamat	: Jl. Veteran, Bunian, Payakumbuh Utara
NPWP Perusahaan	: 90.045.780.6-204.000
NIB Kegiatan	: 9120100152299
Komoditas	: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau disewa
Lokasi Usaha	: Ketinggian, Sarilamak, Harau
Luas Kegiatan	: 12.278 m ²
Jumlah Kendaraan Angkut	: ±5 unit kendaraan proyek / hari (<i>Dump Truck, Concrete Mixer, Pick Up, Truk Material</i>)

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. NOFAREN KEMALA BAROKAH



NADYA NOFAREN
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460

Nomor : 100.3.12/5/UND/DPMPTSP/2026
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Pendampingan
Perizinan Berusaha**

Tanjung Pati, 27 Maret 2026

Kepada Yth Sdr:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kab.
Lima Puluh Kota
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum &
Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota
3. Kepala Dinas Perhubungan
Kab. Lima Puluh Kota
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kab. Lima Puluh Kota
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Kab. Lima Puluh Kota
6. Camat Lareh Sago Halaban
7. Wali Nagari Tanjung Gadang

di-

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Permohonan Direktur PT. Aura Mandiri Sejahtera Nomor 07/Spm/PPB/ARMS/III/2026 tanggal 09 Maret 2026 perihal Pendampingan Perizinan Berusaha yang bergerak di Sektor *Batching Plant* yang berlokasi di Jorong Taratak Nagari Tanjung Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban, untuk mendapatkan informasi faktual terhadap rencana kegiatan usaha, serta penyelarasan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu dilakukan pendampingan Perizinan bersama tim teknis.

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kepada Bapak/Ibuk/ Saudara untuk dapat menugaskan 1 (satu) orang yang berkompeten hadir dalam peninjauan lokasi pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 31 Maret 2026

Jam : 08.30 WIB

Tempat : Berkumpul di Mal Pelayanan Publik

(Camat dan Wali Nagari menunggu di lokasi)

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



DAVLI S.Sos, M.SI
NIP. 197007161992021001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Saudara Direktur PT. Aura Mandiri Sejahtera
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA No. 1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limau Kota Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

Sarilamak, 2 Januari 2026

Nomor : 000.2.5/15 /BPKPD-LK/2026
Lamp : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Penetapan Status Penggunaan
Barang Milik Daerah Tahun 2025

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
di -
Tempat

Memenuhi maksud Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya dengan Keputusan Bupati melalui usulan penggunaan dari Pengguna Barang.


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara :

1. Untuk dapat melaporkan barang milik daerah yang berada pada Perangkat Daerah Saudara beserta usulan penggunaannya yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya untuk Tahun 2025;
2. Untuk barang milik daerah yang sudah beralih penggunaannya pada Perangkat Daerah lain agar segera dibuatkan Berita Acara Serah Terima (mutasi antar Perangkat Daerah) dan agar diusulkan penggunaannya pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
3. Pengguna Barang selaku Kepala Perangkat Daerah agar menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpin kepada Kepala Daerah melalui Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 46 Ayat (2).

Usulan penetapan status penggunaan tersebut sudah kami terima paling lambat **minggu keempat bulan Februari 2026** berupa *hard copy* dan *soft copy* sebagaimana format terlampir di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q. Bidang Pengelolaan BMD.

Demikian kami sampaikan kepada Saudara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA No. 1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limau Kota Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

Sarilamak, 2 Januari 2026

Nomor : 000.2.5/16 /BPKPD-LK/2026
Lamp : 5 (Lima) Lembar
Perihal : Permintaan Usulan Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Daerah Tahun 2027

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
di -
Tempat

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 33 Ayat (3), Pengguna Barang menyampaikan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) kepada Pengelola Barang.

Sehubungan dengan hal diatas, diminta kepada Saudara untuk dapat mengirimkan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk Tahun 2027 yang sudah **ditelaah** di OPD dengan mempedomani :

1. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
2. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi :
 - a. Perencanaan pengadaan barang milik daerah;
 - b. Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c. Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - e. Perencanaan penghapusan barang milik daerah.
3. Draft Renja OPD Tahun 2027 (Pra RKA Tahun 2027).

Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) tersebut telah kami terima paling lambat **minggu keempat bulan Februari 2026** berupa *hard copy* dan *soft copy* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q. Bidang Pengelolaan BMD sebagaimana format terlampir atau dapat diunduh pada link <https://bit.ly/44OD6TB> {Klik file - download - microsoft excel (.xlsx)}.

Demikian kami sampaikan kepada Saudara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR, AP, MSi
NIP. 19730913 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Arsip

GABUNGAN REKONSILIASI PENGADAAN BARANG, JILID DAERAH
 (RENCANA PENGADAAN)
 PENGGUNA BARANG.....
 TAHUN 2027

PEMERINTAH PROVINSI
 KABUPATEN

No	Klasifikasi Barang/Program/ Kegiatan/ Output	Usulan Barang Milik Daerah			Kebutuhan Maksimum			Data Daftar Barang Yang Dapat Diopsionalisasikan			Kebutuhan Bal Barang Milik Daerah		Ket	
		Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah		Satuan
1	1. Kassa Penggalian Barang A. Program 1. Kegiatan a. Output	1	4	5	0	7	8	0	10	11	12	13	14	15
	2. Kegiatan a. Output													
	3. dan													
	B. Program 1. Kegiatan a. Output													
	2. Kegiatan a. Output													
	3. dan													
	2. Kassa Penggalian Barang A. Program 1. Kegiatan a. Output													
	2. Kegiatan a. Output													
	3. dan													
	3. dan													

..... 2026
 Petugas Harung

NIP.

INDIAN BERKASA KERITULAN PEMERIKSAAN BARANG HILAK DAENSAI
 (DISKAWA PEMERIKSAAN)
 PENGUSAHA BARANG
 30/01/2027

PEMERINTAH PROVINSI
 KAMPATAR

No	Nama Program Barang/ Program/ Kegiatan/ Output	Kode Barang	Barang Yang Digeluhari				Berkas/Barang				Ker		
			Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status Barang	B	III	III	III			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. Nama Program Barang A. Program 1. Kegiatan a. Output 3. det												
	B. Program 1. Kegiatan a. Output 3. det												
	2. Kegiatan a. Output 3. det												
	3. det												
	1. Nama Program Barang A. Program 1. Kegiatan a. Output 3. det												
	2. Kegiatan a. Output 3. det												
	3. det												

USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
 (RENCANA PENGHAPUSAN)
 PENCERITA BARANG
 TAHUN 2027

UNTUK PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PEMILIHAN BARANG MILIK DAERAH DAN
 PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PEMILIHAN BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN

No.	Kode Barang	Nomor Urut Penjelasan	Nama Barang	Tabung Pembelian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Milai Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Kondisi Barang (B/RR/RB)	Alasan Penghapusan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

.....
 Peggawa Barang 2026

.....
 RPP



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA No. 1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limau Kota Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

Sarilamak, 2 Januari 2026

Nomor : 000.2.5/12- /BPKPD-LK/2026
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengusulan Sertifikat Hak Pakai
Aset Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2026

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
di -
Tempat

Memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 296 Ayat (1), "Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara agar mengirimkan berkas usulan terhadap tanah yang berada dalam penguasaan Saudara namun belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak pakai. Adapun berkas kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan adalah sbb :


1. Surat usulan dari Perangkat Daerah;
2. Surat keterangan walinagari (format terlampir);
3. Surat permohonan hak pakai bermaterai 10.000 (format terlampir);
4. Surat permohonan pengukuran bermaterai 10.000 (format terlampir);
5. Surat pernyataan penguasaan fisik bermaterai 10.000 (format terlampir);
6. Surat pernyataan pertanggungjawaban bermaterai 10.000 (format terlampir);
7. Surat pengenaan tarif atas jenis PNBPD bermaterai 10.000 (format terlampir);
8. Surat pernyataan aset bermaterai 10.000 (format terlampir);
9. Surat pemasangan tanda batas bidang tanah bermaterai 10.000 (format terlampir);
10. Informasi Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. KIB A SIMDA;
12. Surat pelepasan hak/ alas hak/ surat perolehan tanah (asli).

Untuk kelengkapan sebagaimana format terlampir dapat diunduh pada link : <https://bit.ly/4aMOrYb> Klik file - download - microsoft word (.doc).

Seluruh berkas kelengkapan dokumen dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan fotocopy dan disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q. Bidang Pengelolaan BMD.

Demikian kami sampaikan kepada Saudara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA No. 1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limau Kota Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

Perihal : Permohonan Pengukuran

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lima Puluh Kota
di -

PAYAKUMBUH

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herman Azmar, AP, M.Si
Tempat/ Tgl. Lahir : Payakumbuh, 13 September 1973
NIK : 1376021309730004
Pekerjaan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat : Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA - Sarilamak

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ~~diri sendiri dan atas nama~~ :

Nama : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NIK : -
Tempat/ Tgl. Lahir : -
Suku : -
Pekerjaan : -
Alamat : -

Berdasarkan dengan ini mengajukan permohonan :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Pengukuran | 9. Pemecahan/ Penggabungan Hak |
| 2. Konversi/ Pendaftaran Hak | 10. Pendaftaran Hak Tanggungan |
| 3. Pendaftaran Hak Milik Sarusun | 11. Roya Atas Hak Tanggungan |
| 4. Pendaftaran Tanah Wakaf | 12. Penerbitan Sertipikat Pengganti |
| 5. Pendaftaran Peralihan Hak | 13. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah |
| 6. Pendaftaran Pemindahan Hak | 14. Pengecekan Sertipikat |
| 7. Pendaftaran Perubahan Hak | 15. Salinan |
| 8. Pemisahan Hak | 16. Pencatatan |
| | 17. Pengukuran Tunjuk Batas dan lain - lain |

Atas bidang tanah hak/ tanah negara :

Terletak di/ Jorong :
Nagari :
Kecamatan :
Kabupaten : Lima Puluh Kota

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal
2. Surat Keterangan Walinagari, No., Tgl.
3. Surat Pernyataan Aset No., Tgl.
4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban No., Tgl.
5. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanggal

Sarilamak,

2026

Pemohon,

(Materai 10rb)

Herman Azmar, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001
Qq. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA No. 1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limau Kota Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

Hal : Permohonan Hak Pakai Selama
Dipergunakan

Kepada Yth.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta
u.p.
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lima Puluh Kota
di Payakumbuh

Yang bertanda tangan dibawah ini Herman Azmar, AP, M.Si, alamat Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA – Sarilamak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang berkedudukan di Sarilamak, dengan ini mengajukan permohonan Hak Pakai dengan keterangan sebagai berikut :

A. MENGENAL DIRI PEMOHON

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | Herman Azmar, AP, M.Si |
| 2. NIK | : | 1376021309730004 |
| 3. Pekerjaan / Jabatan | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 4. Instansi | : | Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 5. Tempat Tinggal / Kedudukan | : | Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA - Sarilamak |

B. MENGENAL TANAH YANG DIMOHON

- | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|-----------------|
| 1. Letak | : | Jorong | : | |
| | | Nagari | : | |
| | | Kecamatan | : | |
| | | Kabupaten | : | Lima Puluh Kota |
| | | Provinsi | : | Sumatera Barat |
| 2. Luasnya | : | m ² | | |
| | | Gambar Situasi | : | |
| | | Tanggal | : | |
| | | Nomor | : | |
| 3. Batas-batas | : | Utara | : | |
| | | Selatan | : | |
| | | Barat | : | |
| | | Timur | : | |
| 4. Status Tanah | : | | | |
| (Hak yang melekat di atas Tanah) | : | SKPT/ Kemitir/ Surat Keterangan Wali Nagari | | |
| | | Tanggal | : | |
| | | Nomor | : | |
| 5. Jenis dan Keadaan Tanah | : | Tanah non pertanian | | |
| 6. Dasar Penguasaan | : | Permohonan dasar penguasaan terlampir dalam permohonan ini | | |
| | | (Siapa yang menguasai sekarang kalau pemohon, apa dasarnya sebutkan tanggal). | | |
| 7. Rencana Penggunaanya | : | Pembangunan | | |

C. SURAT-SURAT YANG DILAMPIRKAN

- | | |
|---|---|
| 1. Foto Copy KTP/ Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia/ Surat Bukti Identitas Lainnya | : Tanggal : 04 Oktober 2020
: Nomor : 1376021309730004 |
| 2. Foto Copy Akta atau Peraturan Pendirian Badan Hukum dan Pengesahannya | : Tanggal
: Nomor |
| 3. Sertipikat, Girik, Surat Kapling, Surat Bukti Pelepasan Hak dan Akta PPAT, Akta Pelepasan Hak, Putusan Pengadilan, Surat Bukti Peroleh | : Tanggal
: Nomor |
| 4. Surat Ukur/ Gambar Situasi | : Tanggal
: Nomor |
| 7. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah | : Tanggal
: Nomor |
| 8. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah | : Tanggal
: Nomor |
| 9. Surat Keterangan Lurah/Desa | : Tanggal
: Nomor |
| 10. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan | : Tanggal
: Nomor |
| 12. Surat Perunjukan atau Penyerahan Tanah dari Pemerintah | : Tanggal
: Nomor |
| 13. Surat Rencana Penguasaan Tanah Jangka Panjang/ Jangka Pendek | : Tanggal
: Nomor |
| 14. Surat Pernyataan atau Bukti Bahwa Seluruh Modalnya Dimiliki oleh Pemerintah | : Tanggal
: Nomor |
| 15. Surat | : Tanggal
: Nomor |

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, pemohon bersedia memenuhi syarat-syarat yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sarilamak, 2026
Pemohon,

(Materai 10rb)

Herman Azmar, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA No. 1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limas Kota Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman Azmar, AP, M.Si
NIK : 1376021309730004
Agama : Islam
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat : Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA - Sarilamak

Dengan ini menyatakan bahwa kami dengan itikad baik telah menguasai/ memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan :
Jorong :
Nagari :
Kabupaten/ Kota : Lima Puluh Kota
NIB :
Status Tanah : Non Pertanian
Dipergunakan Untuk :

Batas-batas tanah:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

1. Bidang tanah tersebut adalah benar milik PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, bukan milik orang lain dan statusnya adalah Tanah Negara/ Tanah Ulayat/ ...*);
2. Bidang tanah tersebut PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA kuasai secara fisik sejak tahun yang sampai saat ini masih dikuasai secara terus menerus;
3. Bidang tanah tersebut PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA peroleh dari sejak tahun
4. Penguasaan bidang tanah tersebut dengan itikad baik dan secara terbuka oleh PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sebagai yang berhak atas bidang tanah tersebut;
5. Perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata dikemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya dan tidak akan melibatkan Kementerian;
6. Bidang tanah tersebut tidak terdapat konflik/ sengketa/ perkara dan keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;
7. Bidang tanah tersebut tidak dijadikan/ menjadi jaminan sesuatu utang/ tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur (*apabila dijadikan/ menjadi jaminan sesuatu utang*)*);
8. Bidang tanah tersebut bukan aset *);
 - a. Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - b. Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah lain, untuk permohonan Hak Pengelolaan atau Hak Pakai selama dipergunakan yang dimohon oleh Instansi Pemerintah;
9. Bidang tanah tersebut berada di luar kawasan hutan, di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut;
10. Bersedia untuk tidak mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/ atau jalan air;
11. Bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya;

12. Bersedia dan sanggup untuk tetap melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, untuk permohonan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dengan jangka waktu yang diajukan oleh Pemohon Badan Hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak dibenarkan dalam Pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak akan melibatkan pihak lain dan kami bersedia sertipikat yang kami terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan disaksikan oleh:

1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Saksi-Saksi :

Sarilamak,

2026

Yang Membuat Pernyataan,

.....
(Materai 10rb)

Herman Azmar, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001
a.n. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

.....
Mengetahui,

Walinagari

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA No. 1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Lima Kota Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN
Nomor : 000.2.5/ /BPKPD-LK/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herman Azmar, AP, M.Si
NIK : 13760021309730004
Tempat/tanggal lahir : Payakumbuh, 13 September 1973
Suku : Pitopang
Pekerjaan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat : Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA - Sarilamak

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dengan ini menyatakan bahwa terhadap tanah yang saya ajukan atas nama tersebut diatas, saya nyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa
2. Bahwa tanah ini tidak dalam diborohkan/ digadaikan
3. Bahwa tanah ini tidak masuk dalam kawasan hutan
4. Bahwa tanah ini merupakan Aset Pemda
5. Bahwa tanah ini tidak merupakan Aset/ Milik Orang Lain
6. Bahwa tanah ini belum pernah dilekati dengan suatu hak

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila dikemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab saya dan bersedia di tuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidak akan melibatkan pihak lain dan saya bersedia sertifikat yang telah saya terima dibatalkan oleh pejabat berwenang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, 2026

Yang Membuat Pernyataan

(Materai 10rb)

Herman Azmar, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. H. Aziz Hally, MA No. 1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limau Kota Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

SURAT PERNYATAAN
PEMASANGAN TANDA BATAS DAN PERSETUJUAN PEMILIK YANG BERBATASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herman Azmar, AP, M.Si
Umur : 52 Tahun
NIK : 1376021309730004
Pekerjaan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat : Jl. Prof. H. Aziz Hally, MA - Sarilamak

Adalah pemilik tanah Kohir No. Persil Kelas..... seluas ±
..... m² yang terletak di Jorong Nagari Kecamatan
..... Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan dari
..... Tanggal

Dengan ini menyatakan bahwa tanah tersebut :

1. Telah dipasang patok/ tanda batas;
2. Terhadap patok yang dipasang tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
3. Apabila ternyata luas hasil ukur lebih kecil dari luas yang tertulis pada alas hak/akta peralihan hak/ surat-surat lain dalam berkas permohonan sertipikat, kami menerima luas hasil ukuran petugas Kantor Pertanahan; dan
4. Apabila luas hasil pengukuran ternyata lebih besar dari yang tertulis pada alas hak/ akta peralihan hak/ surat-surat lain dalam berkas permohonan sertipikat, saya tidak mengambil hak orang lain dan tidak ada perolehan lain selain bukti pemilikan tersebut di atas, apabila ada gugatan/keberatan dari pihak lain, saya akan bertanggung jawab.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan, apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di hadapan pihak yang berwenang.

Menyetujui pemilik yang berbatasan:
Sebelah Utara:

Sarilamak, 2026
Yang membuat pernyataan

(.....)
Sebelah Selatan:

(Materai 10rb)

(.....)
Sebelah Barat:

Herman Azmar, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001

(.....)
Sebelah Timur:

(.....)


***melampirkan fotokopi KTP para pihak yang bersebelahan/ berbatasan atau diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah/Wali Nagari**

SKETSA BIDANG TANAH

Informasi Sketsa:

1. Harus ada alamat jelas;
2. Gambaran lokasi tetangga batas;
3. Lokasi relatif dari tempat umum (contoh: Masjid, SPBU, dan lain-lain) atau unsurgeografi (jalan, sungai, jembatan).

Kolom Gambar Sketsa Bidang



Mengetahui,
Wali Nagari

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA No. 1 Komplek Kantor Bupsti, Bukik Limau Kota Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

Perihal : Pengenaan Tarif Atas Jenis Kepada Yth.
Penerimaan Negara Bukan Pajak Kepala Kantor Pertanahan
Terhadap Pihak Tertentu Kabupaten Lima Puluh Kota
di -
PAYAKUMBUH

Yang bertanda tangan dibawah ini, nama Herman Azmar, AP, M.Si, Alamat Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA - Sarilamak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *) PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dengan ini mengajukan permohonan Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu dengan keterangan sebagai berikut :

A. DATA DIRI PEMOHON

1. Nama : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
2. Tempat/ Tanggal Lahir :-
3. Nomor Identitas :-
4. Tempat Tinggal/ Kedudukan :-
5. Akta Pendirian Badan Hukum (Tanggal/ Nomor Akta **) :-
6. Pemohon Termasuk Pihak Tertentu ***) :-

B. MENGENAI JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF **)**

No.	Jenis Pelayanan	Besaran Tarif
1.	a. Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah b. Pemeriksaan Tanah Oleh Panitia A/ Petugas Konstatasi c. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali	Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah)
2.	Pendaftaran Hak Tanggungan/ Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan nilai Hak Tanggungan s.d. Rp. 250.000.000,-	Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah)
3.	Pelayanan Informasi Pertanahan	Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah)
4.	a. Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah b. Pemeriksaan Tanah Oleh Panitia A/ Petugas Konstatasi c. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali	Tarif 50% dari Tarif PNB Tarif 50% dari Tarif PNB Tarif 50% dari Tarif PNB
5.	a. Pelayanan Pendaftaran Tanah Berupa Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah b. Pelayanan Informasi Pertanahan c. Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965)	Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) Tarif Rp. 0,00 (nol rupiah)

C. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN

1. Fotokopi kartu identitas
2. Salinan akta pendirian badan hukum yang dilegalisir **)
3. Dokumen persyaratan lainnya (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif PNB terhadap pihak tertentu serta peraturan perundang-undangan mengenai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan)

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

Sarilamak,

2026

Pemohon,

(Materai 10rb)

Herman Azmar, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001
Qq. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA – Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota,
Sumatera Barat Telepon/ Fax. (0752) 7470725
Website : bpkpd.limapuluhkotakab.go.id, Email : bpkpd@limapuluhkotakab.go.id

SURAT PERNYATAAN ASET
Nomor : 000.2.5/ /BPKPD-LK/2026

Yang bertanda tangan ini :

Nama : **Drs. A. Zuhdi Perama Putra, M.Si**
 NIP : 19690218 199403 1 004
 Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah
 Alamat : Jln Prof.H. Aziz Haily, MA – Sarilamak
 Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Jorong :
 Nagari :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Lima Puluh Kota
 Seluas : ± M²
 Penggunaan Tanah : Non Pertanian

Batas-Batas sebagai berikut :
 Sebelah Utara dengan :
 Sebelah Selatan dengan :
 Sebelah Barat dengan :
 Sebelah Timur dengan :

- Bahwa tanah tersebut dikuasai sejak tanggal sesuai dengan kepada Pemerintah Kabupaten Lima Kota bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih tetap dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dipergunakan untuk Pembangunan yang dikuasai secara terus menerus, dipelihara dengan baik, tidak dijadikan jaminan hutang dan tidak dalam sengketa dan telah dicatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar kami bersedia dituntut dihadapan yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikianlah Surat Pernyataan Aset ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.

Sarilamak, 2026

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota**

(Materai 10rb)

Drs. A. Zuhdi Perama Putra, M.Si
NIP. 19690218 199403 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN
KANTOR WALI NAGARI

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Wali Nagari Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota setelah mengadakan pemeriksaan setempat dengan teliti, maka kami dengan ini menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di :

Jalan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Lima Puluh Kota
Seluas : ± M2
Pergunaan Tanah : Non Pertanian

Adalah benar dimiliki / dikuasai oleh :

Nama : Herman Azmar, AP, M.Si
Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh,
Suku : Pitopang
Pekerjaan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
No. KTP : 1376021309730004
Alamat : Jl. Prof. H. Aziz HAily, MA – Sarilamak
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang bersangkutan tanggal (*dikosongkan*) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :
Sebelah Timur :

Bahwa riwayat pemilik tanah diperoleh berdasarkan (*surat hibah/ jual beli*) yang bersangkutan tanggal, yang belum didaftarkan oleh siapapun pada Instansi yang terkait.

Bahwa tanah tersebut merupakan aset Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota dan tidak termasuk dalam kawasan hutan.

Bahwa tanah tersebut tidak ada pihak lain yang berhak, tidak sedang menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa.

Surat keterangan ini dibuat bukan merupakan bukti kepemilikan tanah tetapi hanya dipergunakan sebagai kelengkapan permohonan Pendaftaran Hak atas tanah bekas milik adat (sertipikat)

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Wali Nagari
Kecamatan

(.....)

[Kop Surat Instansi/Perusahaan (jika ada)]

[Kota], [Tanggal]

Nomor : [Nomor Surat]
Lampiran : [Jumlah lampiran]
Perihal : **Permohonan Informasi Ruang**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kab. Lima
Puluh Kota
di.-
Tabek Panjang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan informasi tata ruang dengan keterangan dengan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Pemohon

Nama : [Nama Lengkap Pemohon]
Alamat : [Alamat Lengkap Pemohon]
Pekerjaan : [Pekerjaan Pemohon]
No. KTP/NIK : [Nomor KTP/NIK Pemohon]
Telepon/HP : [Nomor Telepon/HP Pemohon]
Bertindak untuk dan
atas nama**(ditisi jika bukan*
pemilik lahan dan jika perusahaan
badan usaha) :

Keterangan tentang Tanah/lahan:

Lokasi Lahan : [Alamat Lengkap Lahan yang Dimohonkan]
Luas Lahan : [Luas Lahan dalam satuan (misalnya: meter persegi, hektar)]
Nama Pemilik Lahan :
Sertifikat/surat bukti tanah : [Sebutkan alas hak lahan, contoh: Sertifikat Hak Milik, Girik, dll.]
Penggunaan Tanah saat ini :
Rencana Penggunaan Tanah : [Jelaskan rencana penggunaan lahan, contoh: Pembangunan Perumahan, Pabrik, dll.]

Sebagai bahan pertimbangan, Bersama ini dilampirkan:

1. Foto lokasi dari 4 sisi/foto udara dari google maps
2. Koordinat lokasi (masing-masing dibatas lahan/tanah)
3. Fotocopy surat tanah/Bukti Penguasa Lahan
4. Fotocopy KTP yang masih berlaku

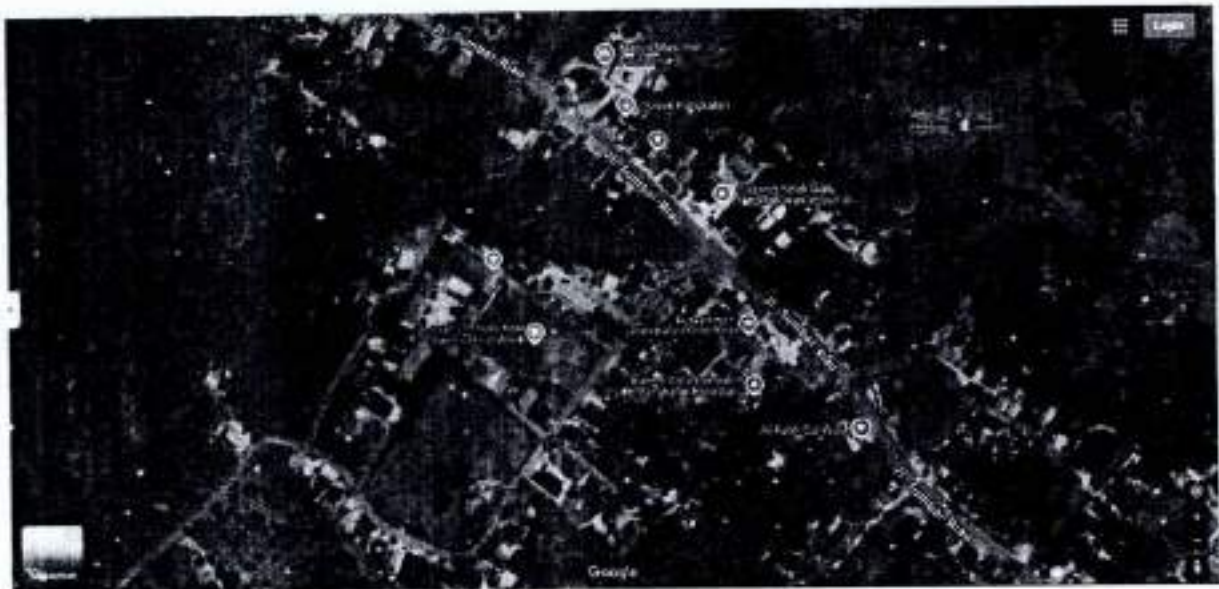
Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(.....)

CONTOH LAMPIRAN NOMOR 1 DAN NOMOR 2

Lampiran 1 Denah Lokasi



Lampiran 2 Titik Koordinat

Koordinat 1 : 0.07911797454397881, 100.73603435418231

Koordinat 2 : 0.07920002986905939, 100.73612685223003

Koordinat 3 : 0.07899148832091635, 100.73618183751634

Koordinat 4 : 0.07899148832091635, 100.73618183751634



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA No. 1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limau Kota Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

Sarilamak, 11 Maret 2026

Nomor : 000.2.5/22/BPKPD-LK/III/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Pengamanan Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
di -

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI bersama ini kami sampaikan kepada saudara untuk dapat melakukan langkah-langkah penertiban dan penyelamatan terhadap barang milik daerah berupa tanah, bangunan maupun kendaraan dinas yang berada dalam penguasaan saudara selaku Pengguna Barang pada Perangkat Daerah, yang saat ini sedang dikuasai oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Serta berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menguasai barang milik daerah tersebut secara melawan hukum.

Untuk kemudian dapat menyampaikan laporan terkait dengan penertiban dan penyelamatan barang milik daerah tersebut kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**Sekretaris Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota,**



HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197309131993111001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA No. 1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limau Kota Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

Sarilamak, 11 Maret 2026

Nomor : 000.2.5/21/BPKPD-LK/III/2026
Sifat : PENTING
Lampiran : 2 Lembar
Hal : Laporan Penggunaan/ Pemakaian Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI bersama ini kami sampaikan kepada saudara untuk menginventarisasi barang milik daerah berupa peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan berupa rumah dinas yang berada dalam penguasaan saudara selaku Pengguna Barang Milik Daerah. Untuk Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki Kuasa Pengguna Barang agar dapat mengkoordinir penyampaian laporan dimaksud.

Usulan penggunaan/ pemakaian tersebut sudah kami terima paling lambat **minggu ketiga bulan Maret 2026** berupa *hard copy* dan *soft copy* sebagaimana format terlampir di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q. Bidang Pengelolaan BMD.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**Sekretaris Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota,**



HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 197309131993111001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.



PEMUDA PEMUDI JORONG LAREH NAN PANJANG
REMAJA REMAJI MASJID HIDAYATUL ABIDIN
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN NUZUL QUR'AN

Jorong Lareh Nan Panjang, Kecamatan Labuah Gunuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota
 Instagram: @pemuda.l.larehnpanjangbg Instagram: @remaja.masjid.hidayatul.abidin



2 Maret 2026

Nomor : 007/PAN-PEL-NZQ/III/2026
 Lampiran : 1 (Satu)
 Perihal : Mohon Bantuan Dana

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Bapak/Ibu senantiasa berada dalam keadaan sehat wal'afiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari.

Dalam rangka akan dilaksanakannya kegiatan Peringatan Nuzul Qur'an oleh Remaja Remaji Masjid Hidayatul Abidin, Jorong Lareh Nan Panjang dengan tema **"Kemilau Ramadhan: Hafal Al-Qur'an, Fasih Berpidato, Merdu Beradzan"** yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin-Selasa / 16-17 Maret 2026
 Waktu : 22.00 – 03.00 WIB
 Tempat : Masjid Hidayatul Abidin, Jr. Lareh Nan Panjang, Nag. Labuah Gunuang

maka dari itu kami panitia pelaksana bermaksud Mohon Bantuan Dana dari Bapak/Ibu demi kelancaran kegiatan yang akan kami laksanakan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kemurahan hati Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Billahitaufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua Panitia

Dicky Saputra, S.H



Ketua Pemuda



Mengetahui,

Pengurus Masjid



Kepala Jorong

Jafri



PEMUDA PEMUDI JORONG LAREH NAN PANJANG

REMAJA REMAJI MASJID HIDAYATUL ABIDIN

PANITIA PELAKSANA PERINGATAN NUZUL QUR'AN

Jorong Lareh Nan Panjang, Kecamatan Labuah Gantang, Kecamatan Lareh Sago Hilaher, Kabupaten Uluh Paluh Kota
Instagram: @pemuda_larehnanpanjangbg

Instagram: @remaja.masjid.hidayatul.abidin



A. LATAR BELAKANG

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang penuh berkah dan menjadi momentum istimewa bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Di dalam bulan suci ini terdapat peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai peristiwa Nuzulul Qur'an. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh umat Islam akan pentingnya Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan sumber inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi penerus, remaja memiliki peran penting dalam menjaga dan menghidupkan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Namun, di era modern saat ini, remaja dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat memengaruhi moral dan karakter mereka. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan yang positif, edukatif, dan bernilai islami untuk membina serta mengarahkan potensi remaja ke arah yang lebih baik.

Dalam rangka memperingati Nuzulul Qur'an dan mengisi bulan Ramadhan dengan kegiatan yang bermanfaat, Remaja Masjid berinisiatif menyelenggarakan serangkaian perlombaan Islami, yaitu lomba tahfiz Al-Qur'an, lomba adzan, dan lomba pidato Islami. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Qur'an, melatih keberanian dan kepercayaan diri, serta meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan syair Islam. Melalui lomba tahfiz, para peserta didorong untuk lebih giat menghafal dan memahami Al-Qur'an. Lomba adzan menjadi wadah untuk melatih kemampuan dan kesiapan generasi muda dalam mengumandangkan panggilan shalat dengan baik dan benar. Sementara itu, lomba pidato Islami bertujuan untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum sekaligus menyampaikan pesan-pesan dakwah yang membangun.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan Remaja Masjid dapat berkontribusi dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Momentum Nuzulul Qur'an ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempererat ukhuwah islamiyah dan menghidupkan semangat keagamaan di lingkungan masyarakat.

B. TUJUAN

Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan Peringatan Nuzulul Qur'an ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui penghayatan makna Nuzulul Qur'an di bulan suci Ramadhan.
2. Menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap Al-Qur'an sebagai pedoman hidup.
3. Mendorong semangat remaja dan anak-anak dalam menghafal serta memahami ayat-ayat suci Al-Qur'an melalui lomba tahfiz.
4. Melatih kemampuan dan keberanian peserta dalam mengumandangkan adzan dengan baik dan benar sesuai syariat Islam.
5. Mengembangkan kemampuan public speaking dan dakwah Islami melalui lomba pidato.
6. Membangun karakter generasi muda yang berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab.
7. Mempererat ukhuwah islamiyah antar remaja dan masyarakat di lingkungan masjid.
8. Menghidupkan suasana Ramadhan dengan kegiatan yang positif, edukatif, dan bernilai ibadah.



PEMUDA PEMUDI JORONG LAREH NAN PANJANG

REMAJA REMAJI MASJID HIDAYATUL ABIDIN

PANITIA PELAKSANA PERINGATAN NUZUL QUR'AN

Jorong Lareh Nan Panjang, Kecamatan Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sagu Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota
Instagram: @pemuda_l_jorohnanpanjangfbg

Instagram: @remaja.masjid.hidayatul.abidin



C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari/Tanggal: Senin-Selasa / 16-17 Maret 2026

Waktu : 22.00-03.00 WIB

Tempat : Masjid Hidayatul Abidin, Jr. Lareh Nan Panjang, Nag. Labuah Gunung

Acara : Lomba Tahfiz, Lomba Pidato dan Lomba Adzan

D. SUSUNAN KEPANITIAAN KEGIATAN PERINGATAN NUZUL QUR'AN 2026

Penanggung Jawab : Jafril

Penasehat : Syapriadi, S.Pd dan Maizar, S.Ag.MM.Pd

Ketua Panitia : Dicky Saputra, S.H

Wakil Ketua Panitia : Ferdy Ramdhan Oktori

Sekretaris Panitia : Rizka Putri Juliani

Bendahara Panitia 1 : Anisa Juniati

Bendahara Panitia 2 : Asyifa Syahira

Devisi Acara : Koor: Nurhasni

: Anggota:

1. Syafira Fitria Yoni

2. Nabila Sifa

Devisi Kestari : Koor: Reva Alleta

: Anggota:

1. Putri Zaisi

2. Nesa

3. Salsa Elfiona

4. Kanaya

5. Saskya Putri

Devisi Humas : Koor: Dani

: Anggota:

1. Ramos

2. Farid Kurniawan

3. Habib Al Farizy

4. Muhamad Beril

5. Muhamad Riva'i

Devisi Perlengkapan : Koor: Muhammad Zaki

: Anggota:

1. Adrian Maulana

2. M. Delviano Handika Putra

3. M. Fadil Aryuda

4. Farel

5. Abil

Devisi Konsumsi : Koor: Siska Putri

: Anggota:

1. Kesa Ramadani

2. Rasti Andini

3. Pri Laodya Mitra



PEMUDA PEMUDI JORONG LAREH NAN PANJANG
REMAJA REMAJI MASJID HIDAYATUL ABIDIN
PANITIA PELAKSANA PERINGATAN NUZUL QUR'AN

Jorong Lareh Nan Panjang, Kecamatan Lohbua Gunung, Kecamatan Lareh Sago Hilahar, Kabupaten Lima Puluh Kota
Instagram: @pemuda_lorhnanpanjangbg



E. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

NO	URAIAN	HARGA @Rp	JUMLAH @Rp
1	Reward juara 1, 2 dan 3 (tiga lomba)	1.800.000	1.800.000
2	Trophy 3 lomba	800.000	800.000
3	Snack peserta dan juri (2 hari)	500.000	500.000
4	Spanduk dan kokarde	300.000	300.000
5	Honor 2 orang juri	600.000	600.000
6	Dekorasi	500.000	500.000
7	Dana tak terduga	200.000	200.000
8	Administrasi	200.000	200.000
9	Konsumsi panitia (2 hari)	200.000	200.000
	JUMLAH		Rp. 5.100.000

Ketua Panitia

Dicky Saputra, S.H

Hormat Kami,
Panitia Pelaksana
Sekretaris Panitia



Rizka Putri Juliani

Contact Person:

Dicky Saputra (0813-6534-6101)

Rizka Putri Juliani (0812-7556-1159)



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Bukit Limau Jalan Raya Negara Km.10 Sarilamak Kode Pos 26271
Email : ukpbj50kota@gmail.com Telp (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495

Nomor : 800.1.11.1/ 09 /BPBJ-LK/II/2026
Lamp. : -
Perihal : Pengiriman Personil Pejabat
Pengadaan

Sarilamak, 8 Januari 2026

KEPADA YTH :

Bpk. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Lima Puluh Kota
di-

Sarilamak

Memenuhi maksud surat Nomor 000.3.1/21/DISHUB-LK/2026 Tanggal 6 Januari 2026, dengan ini kami kirimkan nama personil dimaksud dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

No	Nama / Nip / Gol	Jabatan	Keterangan
1.	DINDA RAHMI PUTRI, ST, MT Nip. 19950407 202203 2 007 / III.b	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Pengadaan Outsourcing TA 2026

Untuk tugas dan penempatan personil dalam tim berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta peraturan petunjuk pelaksanaannya dengan Surat Keputusan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. Dapat juga Kami sampaikan kepada Bapak bahwa Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2026 agar terlebih dahulu **dilakukan penetapan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)** oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa.

Demikian kami sampaikan untuk dapat diproses selanjutnya. Terima kasih.

a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
u.b.
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SETDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Bpk. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lima Puluh Kota
3. Arsip



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

SURAT EDARAN NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, maka dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*) sesuai dengan prinsip dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 9 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa diantaranya adalah **menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)** serta melaksanakan **konsolidasi pengadaan barang/jasa**.
2. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa mengamanatkan bahwa tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi: **perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan**.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diminta kepada Saudara hal sebagai berikut :
 - a. Kepala OPD selaku PA segera mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2026 melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan alamat : <https://sirup.inaproc.id/>. Pengumuman RUP untuk pelaksanaan **E-Purchasing yang mendahului tahun anggaran, pelaksanaan tender dini, dan/atau Pengadaan Langsung dini sudah dapat** dilakukan setelah RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 **disetujui** sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan pengumuman seluruh RUP sesuai DPA SKPD TA 2026 dilakukan paling lambat **Tanggal 28 Februari 2026**.
 - b. PA menetapkan dan mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa ke dalam Aplikasi SIRUP. Sedangkan yang termasuk dalam **Belanja Non Pengadaan** adalah Honorarium/Narasumber, Perjalanan Dinas/Uang Harian, Hibah dalam bentuk uang, dan Bantuan Operasional/Sosial dll dalam bentuk uang.

- c. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa **Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara Elektronik** menggunakan **Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)** dan Sistem Pendukung. Oleh karena itu seluruh proses pengadaan barang/jasa baik yang diproses dengan metode pemilihan **E-Purchasing, Tender, Tender Cepat, Seleksi, Penunjukan Langsung** dan/atau **Pengadaan Langsung** dilaksanakan secara elektronik.
- d. Khusus untuk jenis pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan 50 juta rupiah agar dilaksanakan pencatatan secara elektronik melalui akun PPK Kegiatan pada *website* : **<http://lpse.limapuluhkotakab.go.id>**.
- e. Untuk percepatan kegiatan persiapan pemilihan, maka setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyiapkan dan menetapkan dokumen persiapan pengadaannya, selanjutnya agar dilakukan **penginputan HPS, pengunggahan dokumen** spesifikasi teknis/KAK, Gambar/DED dan rancangan kontrak Pada Aplikasi SPSE melalui akun PPK Kegiatan.
- f. Berdasarkan huruf a s.d huruf e tersebut diatas, maka kiranya Perangkat Daerah agar memanfaatkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), antara lain seperti: **Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Aplikasi Katalog, dan Aplikasi Daftar Hitam.**
- g. Untuk Jenis Pekerjaan Konstruksi (fisik) yang membutuhkan waktu pelaksanaannya minimal selama 6 (enam) bulan yang akan diproses oleh UKPBJ melalui metode tender, maka penyampaian dokumen persiapan pengadaannya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat pada **Bulan April 2026**.
- h. Khusus untuk kegiatan yang bersumber dari dana yang diarahkan (DAK) yang akan diproses oleh UKPBJ melalui metode pemilihan tender dan/atau seleksi, maka penyampaian dokumen persiapan pengadaannya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat pada **Bulan Mei 2026**.
- i. Untuk Jenis Pekerjaan Konstruksi (fisik) yang membutuhkan waktu pelaksanaannya kurang dari 5 (lima) bulan yang akan diproses oleh UKPBJ melalui metode pemilihan tender, maka penyampaian dokumen persiapan pengadaannya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat pada **Bulan Juni 2026**.
- j. Jika ada terdapat *Detail Engineering Design* (DED) dan kegiatan fisiknya dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2026, agar dilakukan **percepatan pelaksanaan Perancangan/DED pada awal tahun anggaran**, dengan demikian diharapkan pelaksanaan pekerjaan fisiknya diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- k. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Ayat 5 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa : ***Pelaksanaan E-purchasing WAJIB dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing, dalam hal: a. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan; atau b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing.***
- l. Setiap Perangkat Daerah agar memanfaatkan informasi yang tayang dalam katalog elektronik untuk melakukan penetapan barang/jasa dan penyusunan spesifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Belanja secara *e-purchasing* harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi, memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK) dan pelaku usaha lokal, serta mengutamakan barang/jasa produk dalam negeri.

- m. Untuk mengimplementasikan penggunaan metode *E-Purchasing* melalui katalog elektronik sebagai salah satu kewajiban dalam belanja pengadaan barang/jasa pemerintah, maka diminta kepada Perangkat Daerah untuk **menyebarkan informasi ini** kepada para pelaku usaha termasuk pelaku UMKK yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa yang ada di Perangkat Daerah Saudara untuk mendorong Penyedia Barang/Jasa menayangkan produknya ke kategori produk yang tersedia di Katalog Elektronik Versi 6.
- n. Proses pemilihan penyedia dengan metode *E-Purchasing* melalui katalog elektronik ini adalah **salah satu pilihan metode pemilihan penyedia yang dapat digunakan** oleh pelaku pengadaan di Perangkat Daerah. Disamping itu juga terdapat metode lain seperti Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat dan Tender. Metode Pemilihan Penyedia dilakukan berdasarkan pertimbangan ruang lingkup pengadaan yang memenuhi tujuan, prinsip dan etika pengadaan.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 66 Ayat (1) dan (5) mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah dalam menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) **wajib menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN)** termasuk Pekerjaan rancang bangun. Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal barang yang dibutuhkan tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
 5. Setiap Perangkat Daerah **wajib mencadangkan** paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran PBJ-nya **untuk produk Usaha kecil serta koperasi hasil PDN**. Setiap Perangkat Daerah **wajib belanja PDN** pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terutama apabila terdapat produk PDN dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) **paling sedikit 40% (empat puluh persen)**. Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota atau melalui tautan **<http://tkdn.kemenperin.go.id/>**.
 6. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 67 Ayat (2) dan (3) mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, maka **preferensi harga** diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan Barang/Jasa dengan **nilai HPS paling sedikit diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
 7. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan di Perangkat Daerah, harus memastikan implementasi kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini, **mulai dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak sampai dengan pelaksanaan serahterima hasil pekerjaan.**
 8. Setiap Perangkat Daerah yang memiliki tupoksi pembinaan kepada pelaku usaha, khususnya bagi pelaku UMK dan Koperasi (UMKK) agar melakukan langkah-langkah untuk **memberikan kemudahan** dalam hal penerbitan perizinan (NIB), penayangan produk dalam katalog elektronik pemerintah, serta sertifikasi produk (TKDN/Halal/higienis, dll).
 9. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, **bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban** terdiri atas **bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan** sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, sebagai berikut:
 - a. **Bukti pembelian/pembayaran**, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- b. **Kuitansi**, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - c. **Surat Perintah Kerja (SPK)**, digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - d. **Surat Perjanjian**, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - e. **Surat/bukti pesanan**, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.
10. Terhadap transaksi pengadaan barang/jasa lainnya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bentuk Kontrak cukup berupa bukti pengeluaran/pembelian, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PPTK dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu **tidak perlu** meminta bukti pendukung pertanggungjawaban kepada penyedia barang/jasa, berupa: Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian dan kontrak; materai; cap penyedia; dan tanda tangan penyedia.
 11. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia mengamanatkan bahwa Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi dilakukan **untuk Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Pelaku Usaha. Dalam melakukan pemesanan Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh tenaga pendukung.
 - b. Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
 - c. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK; dan/atau
 - d. PPK melakukan pembayaran.
 12. Untuk pelaksanaan proses pemilihan penyedia melalui metode Pengadaan Langsung atau *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka Kepala Perangkat Daerah mengajukan **permintaan personil Pejabat Pengadaan** kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagai pejabat pengadaan di OPD.
 13. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 11 Ayat 1 huruf k, mengamanatkan bahwa salah satu tugas dari PPK Adalah **mengendalikan kontrak**. Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh : **a. Pejabat Penandatanganan Kontrak; b. pihak ketiga yang independen; c. Penyedia; dan/atau d. pengguna akhir.**

14. Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan **Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM)**. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan **Surat Peringatan (SP)** kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan **pemutusan Kontrak** secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 56 Ayat 1, 2 dan 3 mengamanatkan bahwa Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK **memberikan kesempatan Penyedia** untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.
16. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 56 Ayat 1, 2 dan 3 mengamanatkan bahwa Setelah pekerjaan **selesai 100% (seratus persen)** sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
17. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa, dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, **PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. Jika OPD yang memiliki KPA, maka dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, **KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh **Tim Teknis, Tim Ahli/Tenaga Ahli, dan atau Tim Pendukung atau tenaga pendukung**. Keanggotaan tim dapat berasal dari instansi/Perangkat Daerah/Unit kerja terkait yang dianggap memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan. Tugas dan kewenangannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
19. Sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa bentuk pembinaan kepada Pelaku Usaha antara lain **pemberian peningkatan kapasitas, pemberian dukungan untuk meningkatkan kemampuan, penilaian kinerja sebagai evaluasi sekaligus umpan balik kepada Pelaku Usaha, serta pengenaan Sanksi Daftar Hitam**. Oleh karena itu, maka diminta dan diingatkan kepada PPK Kegiatan untuk segera mengisi penilaian kinerja penyedia di **dalam aplikasi LPSE dan/atau aplikasi e-katalog** atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Penilaian kinerja penyedia ini adalah salah satu hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi Saudara dalam proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan selanjutnya yang ada di OPD Saudara.

20. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengamanatkan bahwa:
- a. Jenis BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN, yakni barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: ***makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.***
 - b. Jenis JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
 - 1) ***jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;***
 - 2) ***jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;***
 - 3) ***jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;***
 - 4) ***jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;***
 - 5) ***jasa boga atau catering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.***
21. Pelaku usaha **tidak perlu** membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Daerah/Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR) Daerah, apabila sudah memiliki NPWP.
22. Berdasarkan Surat Edaran LKPP Republik Indonesia Nomor 18634/D.2.3/08/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Pemberitahuan Kewajiban Mini Kompetisi untuk Proses Purchasing Katalog Elektronik Sektor Konstruksi, maka Seluruh transaksi pengadaan produk sektor konstruksi melalui Katalog Elektronik tidak diperkenankan lagi menggunakan metode negosiasi, **WAJIB menggunakan metode Mini Kompetisi**. Penerapan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk memastikan setiap proses purchasing telah **memberi kesempatan yang sama bagi seluruh Penyedia Mitra Katalog Elektronik**, sekaligus mendukung penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat.

23. Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan pendampingan kepada UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota yang berfungsi untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di OPD masing-masing, seperti untuk kegiatan penyusunan dan pengumuman RUP, pelaksanaan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan kontrak dan serahterima hasil pekerjaan.
24. Untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik secara swakelola maupun melalui penyedia seperti proses E-Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, tender cepat dan/atau seleksi, maka diminta kepada Saudara agar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta tim teknis yang terkait yang ada di unit kerja masing-masing OPD untuk **melakukan komunikasi/koordinasi bersama Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)** di Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
25. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan tupoksinya agar melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan surat edaran ini.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 23 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA No. 1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limau Kota Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

Sarilamak, 2 Januari 2026

Nomor : 000.2.5/13 /BPKPD-LK/2026
Lamp : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Permintaan Personil Tim Penyusunan
Standar Harga Barang dan Jasa
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
(Terlampir)
di -
Tempat

Untuk kelancaran penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 perlu disusun Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara agar dapat mengirimkan 1 (satu) orang personil yang memahami standar harga barang dan jasa di unit kerja Saudara untuk ikut dalam penyusunan standar harga barang dan jasa Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 sebagai berikut :

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan

Usulan personil standar harga barang dan jasa tersebut sudah kami terima paling lambat **minggu keempat bulan Januari 2026** di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q. Bidang Pengelolaan BMD.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Arsip

Lampiran : Permintaan Personil Tim Penyusunan
Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2027
Nomor : 000.2.5/ /BPKPD-LK/2026
Tanggal : Januari 2026

1. Sekretariat Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Dinas Tanaman Pangan hortikultura dan Perkebunan
4. Dinas Perikanan
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Perdagangan, Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Susi Febriyanti, SE
NIP. 19750202 201001 2006



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. H. Aziz Haily, MA No. 1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limau Kota Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Kode Pos 26271

Sarilamak, 7 Januari 2026

Nomor : 000.2.5/14 /BPKPD-LK/2026
Lamp : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Usulan Standar Harga Barang
dan Jasa Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2027

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
di -
Tempat


Dalam rangka penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 dan untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengusulkan Standar Harga Barang dan Jasa untuk pengadaan Tahun 2027;
2. Standar Harga Barang dan Jasa yang diusulkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2027;
3. Spesifikasi barang yang diusulkan harus jelas dan rinci;
4. Satuan barang harus jelas (tidak dalam bentuk satuan paket);
5. Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk barang yang diusulkan dalam Standar Harga Barang dan Jasa adalah minimal 40%;
6. Harga satuan barang yang diusulkan harus melampirkan brosur dan hasil survey toko (minimal 2 toko) atau lampiran dari e-katalog;
7. Kami tidak lagi menerima usulan standar harga barang dan jasa setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027.

Usulan Standar Harga Barang dan Jasa tersebut telah kami terima paling lambat **minggu keempat bulan Februari 2026** berupa *hard copy* dan *soft copy* sebagaimana format terlampir di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q. Bidang Pengelolaan BMD.

Demikian kami sampaikan kepada Saudara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEKRETARIAT DAERAH

Bukit Limau Jalan Raya Negara Km. 10 Sarilamak Kode Pos 26271
Telp (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495
E-Mail : kab50kota@gmail.com Website : www.limapuluhkota.go.id

Nomor : 000.3/84.1 /BPBJ-LK/III/2026
Lampiran : -
Sifat : **Biasa**
Perihal : **Pemberitahuan Perubahan**
Regulasi Penyusunan Perkiraan
Biaya Pekerjaan Konstruksi untuk
HPP, RAB dan/atau HPS

Sarilamak, 27 Februari 2026

Kepada Yth Sdr.:
Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota
di-

Tempat

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 47/SE/Dk/2026 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Tanggal 13 Februari 2026, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 182/SE/Dk/2025 Tanggal 19 September 2025 Tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum **Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku**. Namun demikian, untuk Paket Pekerjaan Konstruksi yang telah diumumkan dalam Aplikasi SIRUP dan masih menggunakan AHSP berdasarkan Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2023 dan SE Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 182/SE/Dk/2025, maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah berlakunya Surat Edaran ini, tetap dilaksanakan prosesnya sampai selesai.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dokumen Pengadaan Barang/Jasa TA 2026 dan seterusnya untuk proses penyusunan HPP, RAB dan/atau HPS dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, khususnya pada sektor **Jasa Konstruksi (Jasa konsultansi konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi)** agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Perangkat Daerah meminta Penyedia Jasa Konsultansi yang ada di OPD Saudara **agar menyesuaikan dan berpedoman** pada SE Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia tersebut diatas. Untuk pengunduhan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 47/SE/Dk/2026 beserta lampirannya dapat diunduh pada fitur produk hukum Web Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Dapat juga disampaikan kepada Saudara bahwa SE tersebut juga sudah di sinkronkan dengan Master Produk yang tercantum dalam Katalog Elektronik Versi 6. Oleh karena itu, SE ini juga menjadi acuan bagi pemesan (Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan/atau PPK) dalam pelaksanaan *e-purchasing* pada katalog elektronik versi 6. Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR, A.P., M.Si.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP 19730913 199311 1 001

Tembusan:

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota
2. Bpk. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya, serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

A. Perencanaan

1. Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka Perangkat Daerah segera menyusun dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merinci langkah-langkah dan tahapan-tahapan, yang disertai dengan target fisik dan keuangan untuk kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a, serta target fisik dan keuangan untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b. sehingga dengan perencanaan yang matang, diharapkan pada akhir tahun realisasi dapat tercapai sesuai rencana. Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q. Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat tanggal 24 April 2026 dan *softcopy* dikirimkan melalui email: edmpemb.50kotakab@gmail.com.

2. Setiap kegiatan/sub kegiatan dan/atau pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang telah disusun sesuai huruf A angka 1 diatas, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta aturan lain yang mengikat dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis.
3. Jika ada pembangunan fisik di Perangkat Daerah, dokumen perencanaannya agar dikoordinasikan dan dikonsultasikan oleh Perangkat Daerah Pelaksana dengan Perangkat Daerah Pengguna serta Perangkat Daerah Teknis.
4. Terhadap penyampaian dokumen perencanaan, Perangkat Daerah Pelaksana terlebih dahulu harus memastikan status kepemilikan lahan dalam penetapan lokasi, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan fisik tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat realisasi pekerjaan di lapangan.
5. Dalam hal Perangkat Daerah Pelaksana yang dalam melaksanakan pekerjaan memerlukan pembongkaran/penghapusan aset milik daerah, agar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan/aset daerah dan/atau instansi terkait.

B. Pelaksanaan

1. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat Pembuat Komitmen agar melakukan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pemilihan penyedia barang dan jasa.
3. Kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun-tahun sebelumnya agar dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2026, dan Perangkat Daerah mengantisipasi kendala dan permasalahan, antara lain belum siapnya Kerangka Acuan Kerja dan/atau Rencana Anggaran Biaya, masih dilakukannya penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri, adanya perubahan nama paket, adanya kesalahan dalam rekening belanja serta belum siapnya lahan.
4. Batas akhir waktu kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik agar diupayakan paling lambat minggu terakhir November 2026, guna memberikan kesempatan pada masing-masing pihak pelaksana pekerjaan dapat memenuhi hak dan kewajiban secara optimal, kecuali bagi kegiatan yang dianggarkan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
5. Proses Registrasi Tahap I:
 - a. Setiap kontrak pengadaan barang dan jasa dengan bentuk kontrak: Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Surat Pesanan harus diregistrasi oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan mengantarkan dokumen kontrak bermaterai ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja setelah Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Surat Pesanan ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- b. Khusus untuk Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 5 huruf a, yang akan diregistrasi adalah Pengadaan Barang dan Jasa melalui *E-Purchasing* dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - c. Lembaran Registrasi Tahap I digunakan pada saat Penyedia Barang dan Jasa mengajukan permintaan pembayaran uang muka atau pembayaran untuk tahap awal. Lembaran Registrasi Tahap I termasuk salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Proses Registrasi Tahap II:
- a. Setiap Adendum Kontrak yang terakhir (apabila dilakukan adendum), dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan harus diregistrasi oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan mengantarkan dokumen-dokumen tersebut setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bermaterai ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. Lembaran Registrasi Tahap II digunakan pada saat Penyedia Barang dan Jasa mengajukan permintaan pembayaran tahap akhir. Lembaran Registrasi Tahap II termasuk salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah agar meminta Perangkat Daerah melampirkan Lembaran Registrasi Tahap I (pembayaran uang muka atau tahap awal) dan Lembaran Registrasi Tahap II (pembayaran tahap akhir) saat pengajuan pencairan dana untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan bentuk kontrak Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Surat Pesanan.
8. Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen di Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas isi dan legalitas Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Surat Pesanan/Adendum Kontrak/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah diregistrasi.

C. Evaluasi dan Pelaporan

1. Perangkat Daerah agar menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Laporan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya kepada Sekretaris Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota c.q Bagian Administrasi Pembangunan dan *softcopy* dikirimkan melalui email: minbang50kota@gmail.com.

2. Untuk kegiatan/sub kegiatan yang realisasi fisik dan keuangannya lebih rendah dari target pada Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan/atau memang mengalami kendala dan/atau hambatan, Perangkat Daerah wajib mengisi kolom permasalahan dan kolom upaya penyelesaian pada Laporan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan.
3. Perangkat Daerah agar menyampaikan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q Bagian Administrasi Pembangunan dan *softcopy* dikirimkan melalui email: admpemb.50kotakab@gmail.com.
4. Khusus untuk Laporan Pengadaan Barang dan Jasa Akhir Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.b, disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q Bagian Administrasi Pembangunan dan *softcopy* dikirimkan melalui email: admpemb.50kotakab@gmail.com paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
5. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan evaluasi dan monitoring internal yang intensif terhadap pelaksanaan masing-masing kegiatan/sub kegiatan, serta segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait bila ditemukan kendala dan/atau hambatan yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
6. Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah difasilitasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan rapat yang membahas capaian Relisasi Fisik dan Keuangan serta memetakan permasalahan yang dialami oleh Perangkat Daerah. Data pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis ini berdasarkan pada Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Perangkat Daerah setiap bulan.
7. Rapat Koordinasi Teknis pada huruf C angka 6 diatas dilaksanakan paling tidak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yang harus dihadiri langsung oleh Kepala Perangkat Daerah tanpa diwakilkan.
8. Setelah tahun anggaran berakhir, Pengguna Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Pekerjaan Yang Tidak Selesai Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan/Pekerjaan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.a serta Berita Acara Serah Terima Hasil Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.b dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q Bagian Administrasi Pembangunan.

D. Pengendalian

1. Tim Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, untuk melakukan monitoring, pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Akan dilaksanakan Rapat-rapat Koordinasi Terbatas yang dihadiri oleh Tim sesuai huruf D angka 1 di atas, dan jika perlu menghadirkan Kepala Perangkat Daerah.
3. Rapat-rapat Koordinasi Terbatas tersebut sebagaimana huruf D angka 2 akan difasilitasi oleh Bagian Administasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Anggota Tim sesuai huruf D angka 1 di atas mengumpulkan data dan informasi terkait kendala dan/atau hambatan dalam hal pelaksanaan program pembangunan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai tugas pokok masing-masing anggota Tim. Jika anggota Tim menemukan adanya kendala dan/atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau pekerjaan, dapat mengusulkan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Terbatas, sehingga cepat dalam mengantisipasi kendala dan/atau hambatan.
5. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengusulkan diadakan Rapat Koordinasi Terbatas, berdasarkan data Laporan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana huruf C angka 3, dengan menghadirkan seluruh tim dan Kepala Perangkat Daerah.
6. Khusus untuk Proyek Strategis Nasional, Proyek Strategis Daerah dan Program Unggulan, jika ada permasalahan pada kegiatan dan/atau pekerjaan, maka Tim akan turun penuh, disertai oleh pihak Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan/atau pekerjaan tersebut.
7. Untuk kegiatan dan/atau pekerjaan lain, jika ada permasalahan pada kegiatan dan/atau pekerjaan, maka Bagian Administasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa akan turun bersama-sama, disertai oleh pihak Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan/atau pekerjaan tersebut.

E. Pengawasan

Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 19 Februari 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



2. Bab II Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Indikator Kinerja: menyediakan ukuran untuk menilai keberhasilan kegiatan/sub kegiatan.
- b. Masukan/Input: berisi uraian tentang unsur-unsur yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, antara lain jumlah sumberdaya manusia dan sarana-prasarana yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan dimaksud sesuai yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan/sub kegiatan.
- c. Keluaran/Output: berisi hasil atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan/sub kegiatan, bisa berupa barang atau jasa, dan diukur dengan satuan fisik atau kuantitas.
- d. Hasil/Outcome: berisi dampak atau hasil yang dicapai dari penggunaan output, bisa bersifat positif atau negatif, serta bisa diukur dengan satuan kualitatif.
- e. Anggaran: berisi rincian biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.
- f. Target Fisik dan Keuangan: menetapkan target untuk setiap tahap-tahap kegiatan. Untuk target keuangan, dapat mengikuti aliran kas yang disusun untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan/sub kegiatan.

3. Bab III Penutup

Tempat dan tanggal
Kepala Perangkat Daerah

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

LAMPIRAN II.a : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 7 TAHUN 2026
 TANGGAL : 19 Februari 2026
 TENTANG : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
 TARGET FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Perangkat Daerah : _____

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana ¹⁾	Nama PPTK	Persentase	Rencana / Target bulan ke- (dalam %)												Ket.	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Program:																		
a	Kegiatan:																		
1.	Sub Kegiatan:				% Fisik														
					% Keu														
2.	Sub kegiatan:				% Fisik														
					% Keu														
3.	Sub kegiatan:				% Fisik														
					% Keu														
	dst...																		

Tempat dan tanggal
 Kepala Perangkat Daerah _____

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP

Catatan:

1. Sumber Dana yang dipilih: DAK Fisik/DAK Non Fisik/DAUDAU Diarahkan/BLUD/Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya/Hibah/Transfer, dll
2. Persentase keuangan untuk sub kegiatan dapat sama dengan Alokasi Kas DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Sub Kegiatan tersebut

LAMPIRAN III : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 7 TAHUN 2026
 TANGGAL : 19 Februari 2026
 TENTANG : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

**LAPORAN BULANAN
 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
 PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Perangkat Daerah :
 Bulan :
 Jumlah Program :
 Jumlah Kegiatan :
 Jumlah Sub Kegiatan :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Bobot Perangkat Daerah	Realisasi												Kat.
				s. d Bulan Lalu				Bulan ini				s. d Bulan Ini				
				Keuangan	% Keu	% Fisik	NT	Keuangan	% Keu	% Fisik	NT	Keuangan	% Keu	% Fisik	NT	
1	Program	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	a. Kegiatan															
	1. Sub Kegiatan															
	dst...															

Tempat dan tanggal
 Kepala Perangkat Daerah
 Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP

Catatan:
 1. Format akan disiapkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan

LAMPIRAN IV : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 7 TAHUN 2026

TANGGAL : 19 Februari 2026

TENTANG : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah : 2026
Bulan :

No	Kegiatan/Pekerjaan	Masalah	Upaya Penyelesaian	Usul/Saran
1	2	3	4	5

Tempat dan tanggal
Kepala Perangkat Daerah

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Catatan:
1. Wajb diisi oleh Perangkat Daerah dengan kegiatan/sub kegiatan yang realisasi fisik dan keuangannya lebih rendah dari target pada RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN dan/atau memang mengalami keterlambatan dan/atau hambatan dalam pelaksanaan.

LAMPIRAN V a : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 7 TAHUN 2026

TANGGAL : 19 Februari 2026

TENTANG : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2026

Parangkat Daerah : 2026
Bulan :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Sumber Dana ¹⁾	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Nilai Kontrak (Rp.)	Lokasi	Jenis Pengadaan Barang dan Jasa ²⁾	Metode pemilihan Penyedia ³⁾	Nama Pengelola Kegiatan		Kontrak				Ket	
								PPK	PPTK	Nomor	Tanggal	Masa Pelaksanaan (hari)	Pelaksana		Kemajuan Pekerjaan Minggu Terakhir (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Program:														
	Kegiatan:														
	Sub Kegiatan:														
	Pekerjaan:														
	1.														
	2. dst														

Tempat dan tanggal
Kepala Perangkat Daerah

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Catatan:

- Sumber Dana yang dipilih
 - Jenis Pengadaan Barang dan Jasa dipilih
 - Metode pemilihan Penyedia dipilih
 - Kemajuan Pekerjaan Minggu Terakhir
- (Laporan Pengadaan Barang dan Jasa ini merupakan pembaharuan dan Laporan Data Kontrak)
- DAK Fisik/DAK Non Fisik/DAU/DAU Dierahkan/BLUD/Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya/Hibah/Transfer, dll
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi Non-Konstruksi/Jasa Lainnya
E-Purchasing/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/Tender/Seleksi Tender/Seleksi Cepat
Bobot kemajuan pekerjaan pada minggu terakhir bulan yang dilaporkan

LAMPIRAN V.b : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 7 TAHUN, 2026
 TANGGAL : 19 Februari 2026
 TENTANG : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA AKHIR TAHUN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah :
 Bulan : Desember 2026

No	Program/Kegiatan/Subsumber Dana ¹⁾	Nilai Pagu Anggaran (Rp.)	Nilai Kontrak (Rp.)	Lokasi	Jenis Pengadaan Barang dan Jasa ²⁾	Metode pemilihan penyedia ³⁾	Nama			Kontrak			Adendum ⁴⁾						
							PPK	PPTK	PPK	Nomor	Tanggal Pelaksanaan (hari)	Masa Pelaksanaan	Bobot Akhir (%)	Nomor	Tanggal	Nilai	Tanggal Selesai		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Program:																		
	Kegiatan:																		
	Sub Kegiatan																		
	Pekerjaan																		
	1.																		
	2.																		
	3. dst																		

Tempat dan tanggal
 Kepala Perangkat Daerah

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP

Catatan:

1. Sumber Dana yang dipilih
2. Jenis Pengadaan Barang dan Jasa dipilih
3. Metode pemilihan Penyedia dipilih
4. Adendum

1. DAK Fisik/DAK Non Fisik/DAL/DAU Diarahkan/BLUD/Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya/Tabung Transfer, dll
2. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi Non-Konstruksi/Jasa Lainnya
3. E-Purchasing/Pengadaan Langsung/Perunjukan Langsung/Tender/Seleksi/Tender Cepat/Seleksi Cepat
4. Disir apabila disetujui Adendum/CCO, jika ada lebih dari 1 kali adendum, maka yang disikan adalah adendum terakhir

LAMPIRAN VI : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 7 TAHUN 2026

TANGGAL : 19 Februari 2026

TENTANG : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN PEKERJAAN YANG TIDAK SELESAI
PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah :

No.	Program/Kegiatan/Belanja/Pekerjaan	Dana (Rp)	Realisasi			Sisa			Ket.	
			Keuangan (Rp)	% Keu	% Fisik	NT	Keuangan (Rp)	% Keu		% Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program:									
	Kegiatan:									
	Sub Kegiatan:									
	Pekerjaan:									
	1. ...									
	2. ...									
	3. dst									

Tempat dan tanggal
Kepala Perangkat Daerah :

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

LAMPIRAN VII.a : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 3 TAHUN 2026
TANGGAL : Februari 2026
TENTANG : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN/PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : 900.1.6.4/ /Bag.AP-LK/I-2027

Pada hari ini tanggal bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Kedudukan dalam :
Pengelolaan Anggaran :
Diangkat berdasarkan SK : Nomor :
Bupati Lima Puluh Kota : Tanggal :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Kedudukan dalam : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Tahun
Pengelolaan Anggaran : Anggaran 2026
Alamat : Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Sarilamak

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026 pada dengan anggaran seluruhnya sebesar Rp.....,-
(.....Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.....,-
(.....Rupiah) dengan sisa dana sebesar Rp.....,-
(.....Rupiah) sesuai dengan rincian Kegiatan sebagaimana terlampir.
2. PIHAK KEDUA selanjutnya berkewajiban dalam penentuan penggunaan dan pemanfaatan hasil program tersebut.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan/Pekerjaan Tahun Anggaran 2026 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, tanggal tersebut di atas

Yang Menerima :
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
Selaku Koordinator Pengelola Keuangan
Daerah

Yang Menyerahkan :
PIHAK PERTAMA
Kepala Perangkat Daerah
Selaku Pengguna Anggaran

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP.19730913 199311 1 001

NAMA
Pangkat / Golongan
NIP

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)				Aset (Sarana/Prasarana/Barang) Yang Diserahkan				
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran Awal	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Lebih	Nama Aset/Barang	Jenis/Merk/ Type	Volume (Unit/Bh)	Spesifikasi	Nilai Aset (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Kegiatan :									
a.	Sub Kegiatan :									
b.	Sub Kegiatan :									
	J U M L A H									

Tempat dan tanggal
Kepala Perangkat Daerah

Nama
Pangkat/Golongan
NIP



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 67/II-10/0126
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Informasi Penyesuaian Iuran
JKN-KIS Tahun 2026

Payakumbuh, 12 Januari 2026

Yth. Bapak/Ibu Satuan Kerja
Se-Kantor Cabang Payakumbuh
di-
Tempat

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama Bapak/Ibu di Satuan Kerja terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan mendaftarkan pekerjajanya sebagai peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tanggal 24 Oktober 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan telah ditetapkannya Upah Minimum Propinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2026, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan rincian:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja.
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
2. Batas paling tinggi Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta PPU sebanyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan batas paling rendah Gaji yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota.
3. Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi Peserta PPU adalah Gaji atau Upah pokok dan tunjangan tetap yang dibayarkan kepada Pekerja tanpa memperhitungkan kehadiran Pekerja.
4. Dalam hal pemerintah Daerah tidak menetapkan upah minimum kabupaten/kota maka yang menjadi dasar perhitungan besaran iuran yaitu sebesar upah minimum Provinsi.
5. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 562-851-2025 tanggal 22 Desember 2025 Tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, maka disampaikan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat Tahun 2026 adalah sebesar Rp.3.182.955,00- (Tiga juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) per bulan.
6. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan UMP, maka batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Peserta akan mengikuti ketentuan UMP terbaru tersebut.

Kantor Cabang Payakumbuh
Jl. Ade Irma Suryani No. 10 Koto Kociak
Kubu Tapak Rajo Payakumbuh Utara (0752) 95818
www.bpjs-kesehatan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

7. Berkenaan hal tersebut diatas, BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh akan melakukan penyesuaian iuran Jaminan Kesehatan Nasional segmen PPU berdasarkan UMP Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan.
8. Jika terdapat selisih perhitungan iuran JKN-KIS dikarenakan adanya perubahan UMP, maka akan dilakukan penyesuaian iuran yang akan dikompensasikan pada tagihan iuran bulan selanjutnya atau pada saat dilakukan rekonsiliasi data peserta dan iuran.
9. Konfirmasi dan informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi petugas kami yaitu Sdr.Yomi Gunawan (Hp.0811-660-9056) atau Sdri. Syarifah Mahami (Hp.0852-1797-7900).

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala Cabang



Defiyanna Sayodase

IA/at/PS0201

Tembusan :

1. Walikota/Bupati
2. Kepala Badan Keuangan Daerah
3. Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tanah Datar

Lampiran Surat Nomor: 67/II-10/0126

Tanggal 12 Januari 2026

**Simulasi Perhitungan Iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan
Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Tahun 2026**

Penetapan Batas Dasar Pemotongan Iuran

- Batas Bawah = Rp. 3.182.955,00- (UMP Sumbar Tahun 2026)
- Batas Atas = Rp. 12.000.000,-

Penentuan Kelas Rawatan

Kelas 2 = Rp. 3.182.955,00- (UMP merupakan batas bawah) s/d Rp. 4.000.000,-

Kelas 1 = Rp. 4.000.001,- s/d Rp. 12.000.000,- (Merupakan batas atas)

Ketentuan Pembayaran Iuran

- a. 4% (empat persen) ditanggung oleh pemberi kerja
- b. 1% (satu persen) ditanggung oleh pekerja

Contoh perhitungan iuran jika upah yang diterima adalah UMP :

Per 1 Jan 2026 = Rp. 3.182.955,00- x 5% = Rp. 159.148,-

Dengan ketentuan (4% = Rp. 127.318,- & 1% = Rp. 31.830,-)

Tanggungans Keluarga Inti

1 Peserta dapat menanggung = 1 Suami/Istri + 3 Anak (Maksimal usia anak 21 Tahun)

Note : untuk anak berusia >21 tahun wajib melampirkan surat keterangan aktif kuliah



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Negara KM. 10 Bukik Limau Sarilamak

Sarilamak, 12 Februari 2026

Nomor : 900.1.12/12/BPKPD-LK/II/2026
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Hal : Standar Harga Satuan

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tempat

Dengan telah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan yang ada. Dalam hal ini Pemerintah Daerah telah melaksanakan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Sehubungan belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan yang baru maka dengan ini di beritahukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk tetap menggunakan standar harga satuan yang sebelumnya yaitu Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Biaya sebagai dasar dalam melakukan pembayaran untuk setiap belanja yang dilakukan sepanjang tidak diatur dan bertentangan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Penata Utama Madya/ IV.d
NIP. 197309131993111001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan) di Sarilamak
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau Jalan Raya Negara KM. 10 Sarilamak, Provinsi Sumatera Barat
Telp. (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495
Email: kab50kota@gmail.com Website: www.limapuluhkota.go.id

Sarilamak, 13 Februari 2026

Nomor : 000.7/ 82 /Bappelitbangda-LK/II/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Jadwal Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Yth. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tempat

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Forum PD/Lintas PD dilaksanakan untuk menyelaraskan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
2. Menjaring aspirasi dari pemangku kepentingan dalam mempertajam program/ kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka PD harus melaksanakan Forum PD/Lintas PD sesuai dengan jadwal dan pedoman umum (terlampir).

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, terima kasih.



Sekretaris Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota

Herlan Azmar, Ap., M.Si
Bebina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197309131993111001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak sebagai laporan

JADWAL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

No	Hari/ Tanggal	Perangkat Daerah	Ket
1.	Kamis/ 19 Februari 2026	1. Bappelitbangda	
2.	Senin/ 23 Februari 2026	1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Dinas Komunikasi Dan Informatika 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
3.	Selasa/ 24 Februari 2026	1. Dinas Perikanan 2. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Dan Kawasan Pemukiman 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	
4.	Rabu/ 25 Februari 2026	1. Dinas Pangan 2. Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Achmad Darwis 3. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
5.	Kamis/ 26 Februari 2026	1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2. Sekretariat DPRD 3. Satuan Polisi Pamong Praja	
6.	Jumat/ 27 Februari 2026	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Perhubungan	
7.	Senin/ 2 Maret 2026	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan 3. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
8.	Selasa/ 3 Maret 2026	1. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 3. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
9.	Rabu/ 4 Maret 2026	1. Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga 2. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 3. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	

No	Hari/ Tanggal	Perangkat Daerah	Ket
10.	Kamis/ 5 Maret 2026	1. Inspektorat 2. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah 3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
11.	Jumat/ 6 Maret 2026	1. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Dinas Sosial	

PANDUAN PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH

A. Latar Belakang

Forum Perangkat Daerah (PD)/ Lintas Perangkat Daerah (PD) merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum PD/Lintas PD juga merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan pemangku kepentingan, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Hal ini menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi. Forum PD/Lintas PD membahas rancangan Renja PD dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja PD, yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

C. Tujuan dan *output* Forum PD/Lintas PD

Tujuan dari pelaksanaan Forum PD/Lintas PD adalah:

1. Menyelaraskan program/kegiatan/subkegiatan PD dengan usulan program/kegiatan hasil musrenbang di tingkat kecamatan
2. Mempertajam indikator serta target program/kegiatan/sub kegiatan PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD
3. Menyelaraskan program/kegiatan/sub kegiatan antar PD dengan PD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
4. Menyesuaikan pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD.

Output Forum PD/Lintas PD adalah:

1. Rancangan Renja PD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan
2. Matrik prioritas program, kegiatan, sub kegiatan memuat indikator kinerja, kelompok sasaran, prakiraan maju dan sumber pendanaan.
3. Berita Acara Forum PD/Lintas PD .

D. Tahapan Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD

a. Tahap Persiapan

1. Pembentukan Tim Penyelenggara Forum PD/Lintas PD oleh Kepala PD yang memuat susunan panitia penyelenggaraan Forum PD/Lintas PD beserta tugasnya masing-masing (tim notulensi, moderator, dokumentasi, pembawa acara dll).
2. Menyusun agenda acara pelaksanaan Forum PD.
3. Mempersiapkan kelengkapan pelaksanaan Forum PD secara daring dan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo
4. Menyiapkan rancangan Renja PD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum.
5. Penyampaian undangan kepada narasumber, fasilitator, peserta Forum PD/Lintas PD sebelum acara diselenggarakan.
6. Mempersiapkan paparan memuat sekurang-kurangnya:
 - Profil PD sesuai dengan TUSI PD
 - Evaluasi kinerja PD tahun 2025 dan tahun berjalan 2026 (TW I)
 - Paparan rancangan Renja PD untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi usulan program dan kegiatan masing-masing PD untuk menghindari tumpang tindih kegiatan sehingga terjadi sinkronisasi usulan antar PD
 - Program Pembangunan Daerah yang terkait dengan Kebijakan pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten (SPM, penanggulangan kemiskinan, pencegahan dan percepatan penurunan stunting, inflasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, IKU Kepala Daerah, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Kabupaten

Sehat, KLA, PUG, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), PKK)

- Tanggapan atas usulan Musrenbang Kecamatan yang telah diverifikasi PD.

b. Tahap Pelaksanaan

1. Pembukaan secara resmi Forum PD/Lintas PD oleh Kepala PD
2. Sidang Pleno I yaitu:
 - Paparan oleh Kepala PD dan Eselon III
3. Sidang Pleno II antara lain:
 - Tanggapan dan masukan dari peserta
 - Pembacaan rangkuman keputusan yang dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan hasil Forum PD/Lintas PD
 - Penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Forum PD/Lintas PD oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang hadir pada Forum PD/Lintas PD
4. Penutupan Forum PD/Lintas PD
5. Rumusan kesepakatan hasil Forum PD/Lintas PD terdiri dari lampiran sebagai berikut:
 - Daftar hadir peserta Forum PD/Lintas PD
 - Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan PD
 - Daftar kegiatan lintas PD
 - Penyampaian kompilasi usulan program, kegiatan dan sub kegiatan serta Rancangan Renja PD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ke Bappelitbangda dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

E. Peserta Forum PD/Lintas PD

Peserta dari Forum PD/Lintas PD adalah para pemangku kepentingan terkait dengan tugas dan fungsi PD yang terdiri dari unsur:

- Perangkat Daerah, Kecamatan
- Unsur masyarakat dan organisasi/ kelembagaan kemasyarakatan di tingkat kabupaten

Peserta diharapkan dapat berperan aktif dalam proses musyawarah sampai pengambilan keputusan Forum PD/Lintas PD

F. Jadwal Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD

Forum PD/Lintas PD akan dilaksanakan pada Minggu IV Februari s/d Minggu I Maret 2026.

**1. Format Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum
PD/Lintas PD**

BERITA ACARA

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/
Lintas Perangkat Daerah

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pada hari tanggal sampai dengan hari
tanggalbulan tahun telah diselenggarakan
Forum PD/Lintas PD Kabupaten Lima Puluh Kota yang
dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir
sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan
mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama
pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat
Daerah/kabupaten terhadap materi yang dipaparkan oleh
masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah
dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi,
maka pada:

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Forum PD/ Lintas PD.....Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2026

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan

indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Kabupaten

- KEDUA : Menyetujui rancangan Renja PD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyetujui daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini
- KEEMPAT : Menyetujui berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum PD/Lintas PD..... Kabupaten Lima Puluh Kota ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026

Pimpinan Sidang
(Nama Jabatan)

Tanda tangan

(Nama)

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum PD/Lintas PD Kabupaten Lima
Puluh

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.		Unsur Bappelitbangda		
2.		Unsur PD		
3.		Unsur Kecamatan		
4.		Unsur Masyarakat		
5.		dst		

**2. Format Daftar Hadir Peserta Forum PD/Lintas PD
Kabupaten Lima Puluh Kota**

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT
DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PD/LINTAS PD

Kabupaten :

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat	L/P	Tanda tangan

3. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT
DAERAH/ LINTAS
PERANGKAT DAERAH
PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :

Rumusan Rencana Program/ Kegiatan /Sub Keg Perangkat
Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Keg	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun n	Tahun n+1	Tahun n	Tahun n+1

4. Format Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN III : BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT
DAERAH /LINTAS
PERANGKAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/
KOTA
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah
Perangkat Daerah.....Tahun 2027

No	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Cara Pengisian Form sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana;

Kolom (2) diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari Provinsi/Kabupaten/Kota;

Kolom (3) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tsb;

Kolom (4) diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya contoh:10 km², 100 orang, dsb; dan

Kolom (5) diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

1. Berita acara kesepakatan hasil Forum PD/Lintas PD Kabupaten Lima Puluh Kota, menjadi bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah..... Kabupaten Lima Puluh Kota dan selanjutnya diserahkan ke BAPPELITBANGDA untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Berita acara kesepakatan hasil Forum PD/Lintas PD, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD....Kabupaten Lima Puluh Kota.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dr. Aziz Haily, MA No.1, Bukik Limau Sarilamak Kecamatan Harau 26271
Telp. (0752) 7750551, Fax. (0752) 7750554, Email: limapuluhkota@telkom.net

Nomor : 000.7.3/2025/4/Bappelitbangda-LK/XI/2025
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Penyampaian Tabel Rencana Implementasi
Prioritas Pembangunan Daerah**

Sarilamak, 28 November 2025
Kepada Yth.:
Sebagaimana Daftar terlampir
di -
Tempat

Sehubungan dengan telah dirumuskannya Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (RPJMD), maka telah disusun Tabel Rencana Implementasi Kegiatan Tahun 2025-2030.

Adapun tabel rencana implementasi kegiatan tersebut terdiri atas:

1. Tabel Rencana Implementasi Prioritas 8 RPJMD: Penataan Infrastruktur Dasar, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
2. Tabel Rencana Implementasi Prioritas 9 RPJMD: Penataan Infrastruktur Strategis dan terpadu; dan
3. Tabel Rencana Implementasi Pengusulan Kegiatan ke Pemerintah Pusat

Tabel ini disusun sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan Program Prioritas yang ada di RPJMD. Untuk itu bersama ini disampaikan kepada Saudara Tabel Rencana Implementasi dimaksud, untuk dijadikan sebagai panduan dalam penyusunan penganggaran 5 (lima) tahun ke depan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP.19730913 199311 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth.:

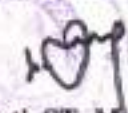
1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai Laporan);
2. Arsip.

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor : 000.7.3/218 a /4/Bappelitbangda-LK/XI/2025
Tanggal : 28 November 2025
Perihal : Penyampaian Tabel Rencana Implementasi Prioritas
Pembangunan Daerah

Daftar Penerima Surat

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Kepala Dinas Perhubungan;
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
7. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM; dan
8. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Daerah

Plt. Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Lima Puluh Kota,


Dian Permatati, ST, M.SE, M.Sc, Ph.D
Pembina Tk. I/V.b
Nip.19810419 2002 2 2 005

Rencana Implementasi

Prioritas 8 RPJMD: Penataan Infrastruktur Dasar, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penggulangan Bencana

No	Judul	Skala/Volume	Kewenangan	Standar Saat Ini	PD	Tahapan Pembangunan				Indikator Anggaran APBD					Pendanaan	
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Pembangunan TPST	3 unit	Kabupaten	Terdapat lahan di Jorong Tigo delin, Nagari Lubok Betingkok, dengan luas 4 hektar namun belum ada sertifikat tanah, hanya ada akta jual beli. Untuk pengukuran di lapangan hanya ada 2,8 hektar.	DUPKP	1. Pembuatan Sertifikat	1. Pengadaan Dump Truck 1 unit	Pengasukan Bantuan Convoy Pemilih Sampah	1. Truck Arm Roll 1 unit	Pengadaan Dump Truck/ Truck Arm Roll Sert (jika belum beroperasi 2026)	20 jt	800 jt	100 jt	800 jt	800 jt	APBD/APBN
						2. Pengalihan Indikator	2. Operasional TPST (Gaji Outsourcing 3 orang)	2. Operasional TPST (Gaji Outsourcing 3 orang)	2. Operasional TPST (Gaji Outsourcing 3 orang)	2. Operasional TPST (Gaji Outsourcing 3 orang)	3,6 jt	108 jt	108 jt	108 jt	108 jt	APBD
						3. Pengadaan Motor 5 Unit					250 jt					APBD/APBN
					DUPK	1. Pembangunan Mangrove TPST	Pengasukan Bantuan Pembangunan TPST ke Pemerintah Pusat	Pembangunan TPST oleh Pemerintah Pusat	Pembangunan TPST oleh Pemerintah Pusat (jika diperlukan)		1 jt	50 jt	60 jt	60 jt	APBD/APBN	
						2. Penyusunan DCD untuk TPST					250 jt					
						3. Penyusunan Dokumen Lingkungan/UKL-UPL					100 jt					
						4. Pengumpulan Informasi terkait Sambutan Pembangunan TPST oleh Pemerintah Pusat					20 jt					
						5. Penyusunan Dokumen PS					100 jt					
2	Pembangunan TPS SR	8 Unit			DUPKP	1. Koordinasi dengan DPMON, Dinas PU, dan Disperwilbang untuk vertikal	1. Penelusuran dan Proses Sertifikat Lahan TPS SR untuk 2 lokasi (sesuaikan dengan RTM)	1. Penelusuran dan Proses Sertifikat Lahan TPS SR untuk 2 lokasi (sesuaikan dengan RTM)	1. Penelusuran dan Proses Sertifikat Lahan TPS SR untuk 2 lokasi (sesuaikan dengan RTM)	1. Penelusuran dan Proses Sertifikat Lahan TPS SR untuk 2 lokasi (sesuaikan dengan RTM)	20 jt	20 jt	50 jt	10 jt	20 jt	
						2. Penelusuran dan Proses Sertifikat Lahan TPS SR untuk 2 lokasi	2. Pengasukan Pembangunan TPS SR ke Kementerian	2. Pengasukan Pembangunan TPS SR ke Kementerian	2. Pengasukan Pembangunan TPS SR ke Kementerian	1. Pengasukan Pembangunan TPS SR ke Kementerian	20 jt	50 jt	50 jt	50 jt	50 jt	
						3. Pengasukan Pembangunan TPS SR ke Kementerian					50 jt					

No	Judul	Lokasi/Volume	Keterangan	Kondisi Saat Ini	PD	Tahapan Pembangunan				Indikator Anggaran APBD					Pembinaan	
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2030		
					DPUR	Menyiapkan Perijinan Lainnya terkait pengajuan TPS SR ke Kementerian PU untuk 2 lokasi TPS SR (Sepanjang sertifikat lahan sudah ada)	1. Menyiapkan Perijinan Lainnya terkait pengajuan TPS SR ke Kementerian PU untuk 2 lokasi TPS SR (Sepanjang sertifikat lahan sudah ada)	1. Menyiapkan Perijinan Lainnya terkait pengajuan TPS SR ke Kementerian PU untuk 2 lokasi TPS SR (Sepanjang sertifikat lahan sudah ada)	1. Menyiapkan Perijinan Lainnya terkait pengajuan TPS SR ke Kementerian PU untuk 2 lokasi TPS SR (Sepanjang sertifikat lahan sudah ada)	1. Menyiapkan Perijinan Lainnya terkait pengajuan TPS SR ke Kementerian PU untuk 2 lokasi TPS SR (Sepanjang sertifikat lahan sudah ada)	25.11	25.2	25.3	25.11	25.2	APBD
							2. Pembangunan Unit TPS-SR oleh Kementerian	2. Pembangunan Unit TPS-SR oleh Kementerian	2. Pembangunan Unit TPS-SR oleh Kementerian	2. Pembangunan Unit TPS-SR oleh Kementerian		1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	APBN
					Beperbita ngdi	Menyampaikan Usulan Pembangunan TPS SR melalui Aplikasi Sippa (Sepanjang bahan kelengkapan telah diselesaikan oleh DUHPP dan DPUR, dan kelengkapan bahan berurusan dengan jadwal penginputan Sippa)	Menyampaikan Usulan Pembangunan TPS SR melalui Aplikasi Sippa (Sepanjang bahan kelengkapan telah diselesaikan oleh DUHPP dan DPUR, dan kelengkapan bahan berurusan dengan jadwal penginputan Sippa)	Menyampaikan Usulan Pembangunan TPS SR melalui Aplikasi Sippa (Sepanjang bahan kelengkapan telah diselesaikan oleh DUHPP dan DPUR, dan kelengkapan bahan berurusan dengan jadwal penginputan Sippa)	Menyampaikan Usulan Pembangunan TPS SR melalui Aplikasi Sippa (Sepanjang bahan kelengkapan telah diselesaikan oleh DUHPP dan DPUR, dan kelengkapan bahan berurusan dengan jadwal penginputan Sippa)	Menyampaikan Usulan Pembangunan TPS SR melalui Aplikasi Sippa (Sepanjang bahan kelengkapan telah diselesaikan oleh DUHPP dan DPUR, dan kelengkapan bahan berurusan dengan jadwal penginputan Sippa)						
3	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT)				DPUR	1. Pembelian Lahan PLT	1. Pengurusan Sertifikat	1. Pengujian Ragitan ke Kementerian dengan melibatkan Smart Administrasi Lainnya	2. Pembangunan PLT oleh Kementerian	Pengadaan PLU oleh lembaga Pengelola	2,5 M	50.8	25.8	80.8	250.8	
						2. Penyusunan Dokumen RSPN (Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah)	2. Penyusunan RS	2. Menyusun Lembar Pengalok	2. Pembelian Lembar Pengalok	500.8	100.8	50.8	50.8			
							3. Penyusunan DED	3. Pembelian 1 unit Truk Tinja		300.8			500.8			

No	Jenis	Sesuai/Valid	Kawasan	Kondisi Saat Ini	PD	Tahapan Pembangunan				Indikasi Anggaran APBD					Pembinaan
						2026	2027	2028	2029	2020	2026	2027	2028	2029	
							4. Penyusunan Dokumen Lingkungan (LUG-IP/LA/Sm3on30 m3/ha)		4. Penyusunan Kebijakan terkait Pengelolaan IPT oleh Lembaga pengelola		150 jt		50 jt		
4	Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perumahan			1. SPAM IKK Hamu (Lubuk Sari), R10 (2020) Surat izin Pengawasan SDA (2024) PS (2020)	DPUPR	1. Serifikat Lahan SPAM IKK Hamu (Batang Rebo/Lubuk Sari)	1. Penyusunan dan Pengiriman Proposal SPAM IKK Hamu (Batang Rebo/Lubuk Sari) ke BWS V dan/atau	1. Proses Pelaksanaan Pembangunan Instalasi IKK Hamu (Batang Rebo/Lubuk Sari) oleh BWS V	1. Pembangunan IPA, di untuk IKK Hamu (Batang Rebo/Lubuk Sari) oleh BWS V	1. Lanjutan Pemasangan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM IKK Hamu (Batang Rebo/Lubuk Sari)	50 jt	20 jt	640	148	148
						2. Dokumen lingkungan SPAM IKK Hamu (Batang Rebo/Lubuk Sari)/UKL-UPJL		2. Lanjutan Proses Pengurusan Perizinan IPA, di SPAM IKK Hamu (Batang Rebo/Lubuk Sari) ke BWS V			100 jt		20 jt		
				2. SPAM IKK Kapur II (Batang Simonsi), R10 (2020) Surat izin Pengawasan SDA (2020)		2. Serifikat Lahan SPAM IKK Kapur II (Batang Simonsi)	2. Penyusunan dan Pengiriman Proposal SPAM IKK Kapur II ke BWS V dan/atau Kementerian	2. Proses Pelaksanaan Pembangunan Instalasi IKK Kapur II (Batang Simonsi) oleh BWS V	2. Pembangunan IPA, di untuk IKK Kapur II (Batang Simonsi) oleh BWS V			50 jt	20 jt	148	148
						3. Penyusunan PS dan Dokumen Lingkungan SPAM IKK Kapur II (Batang Simonsi)/UKL-UPJL		3. Lanjutan Proses Pengurusan Perizinan IPA, di SPAM IKK Kapur II (Batang Simonsi) ke BWS V	3. Pemasangan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM IKK Kapur II (Batang Simonsi) oleh DPLP		100 jt		20 jt	148	
								4. Pemasangan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM IKK Hamu (Batang Rebo/Lubuk Sari) oleh DPLP						148	
				3. SPAM Regional, Provinsi telah menugaskan ke RC yang ditunjuk/kan (set ini memutuskan apakah berlanjut dengan melaksana Regional atau Kawasan)		3. Melakukan uji ke provinsi untuk bisa memanfaatkan RC SPAM Regional yang telah dican oleh Provinsi					20 jt				

No	Judul	Status/Volume	Kawasan	Kondisi Saat Ini	PD	Tahapan Pembangunan			Indikator Anggaran APBD					Pondokan		
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2027	2028		2029	2030
							1. Penyusunan dan Pengiriman Proposal SPAM Maek Kurang ke BWS V dan/atau Kementerian Lulab Provinsi Berhasil	4. Proses Perbaikan Intake SPAM Maek Kurang oleh BWS V (Lulab Provinsi Berhasil)	5. Pembangunan IPA, dll untuk SPAM Maek Kurang oleh DPPT (Lulab Provinsi Berhasil)	4. Lanjutan Pemasangan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Maek Kurang oleh DPUR (Lulab Provinsi Berhasil)		20 R	RAB	RAB	RAB	
							5. Perolehan Lahan (Lulab Provinsi Berhasil)	5. Lanjutan Proses Pengurusan Perizinan IPA, dll SPAM Maek Kurang ke DPPT (Lulab Provinsi Berhasil)	6. Pemasangan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Maek Kurang oleh DPUR (Lulab Provinsi Berhasil)			1 M	20 R	RAB		
							4. Penyusunan IS (jika Lulab tidak berhasil)	4. Penyusunan dan Pengiriman Proposal SPAM Maek Kurang ke BWS V dan/atau Kementerian (jika Lulab Provinsi TDE Berhasil)	5. Lanjutan Proses Pengurusan Perizinan IPA, dll SPAM Maek Kurang ke DPPT (jika Lulab Provinsi TDE Berhasil)	4.a. Pembangunan IPA, dll untuk SPAM Maek Kurang oleh DPPT (jika Lulab Provinsi TDE Berhasil)		200 R	20 R	RAB	RAB	
							5. Penyusunan DED (jika Lulab tidak berhasil)		6. Proses Perbaikan Intake SPAM Maek Kurang oleh BWS V (jika Lulab Provinsi TDE Berhasil)	6. Pemasangan Pipa Distribusi dan Sambungan Rumah SPAM Maek Kurang oleh DPUR (jika Lulab Provinsi TDE Berhasil)		200 R		RAB	RAB	
							6. Appraisal (Lulab Provinsi Berhasil)					50 R				
							7. Perolehan Lahan (jika Lulab tidak berhasil)					1 M				
							8. Sertifikat Lahan (jika Lulab tidak berhasil)					50 R				
							9. Dokumen Lingkungan/Verbal (jika Lulab tidak berhasil)					500 R				
					Superblok		6. Input RC SPAM Blok Harau ke Aplikasi Slope DPPT	6. Input RC RC Kaur X ke Aplikasi Slope DPPT	7. Pengawasan Uraian SPAM RC Kapur 15 di Slope							

No	Judul	Materi/Volume	Kewenangan	Kendali Saat ini	PG	Tahapan Pembangunan				Indikator Anggaran APBD					Pondasi	
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024		
							1. Instalasi SPAM Mak. Lintang ke Kiprah Sopo SPAM Lintang Pipanis (berhad)		2. Pengadaan Kuliter SPAM ke Pipanis Sopo							
									3. Pengadaan Kuliter SPAM Mak. Lintang ke Sopo Lintang Pipanis (berhad)							



Rencana Implementasi

Prioritas 9 RPJMD: Peningkatan Infrastruktur Strategis dan Terpadu

No	Jenis	Luas/Volume	OPD	Kategori	Mandat justifikasi	Tahapan Pelaksanaan					Estimasi Anggaran APBD					Pembinaan	
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
1	Pembangunan jalan 2x2 Kota Kabupaten	1 unit	Dinas Perencanaan, Logistik, Uptak Road dan Menengah	Kabupaten			pembelian tanah dengan luas ± 5.000 m ²	penyusunan dokumen ajukan DED serta dokumen lainnya	1. pelaksanaan pembangunan	1. melanjutkan pelaksanaan						APBD/APBN	
2	Pembangunan Rambu Salih Uraian Daerah	1 unit	Dinas Kesehatan	Kabupaten	1. tersedia jalan dengan luas 37.940 m ² di Jongg लग्गल, Negeri Berlimuk 2. tersedia anggaran tahun 2025 untuk pembelian tanah untuk akses jalan masuk ke lahan, dan penyusunan Dokumen Areal	penyusunan DED dan pembangunan Areal UOP	penyusunan DED dan pembangunan infrastruktur lainnya	1. sosialisasi awal RUD 2. penyusunan DED dan pembangunan infrastruktur lainnya 3. melakukan upaya untuk mendapatkan anggaran dari lembaga III	1. penyusunan DED dan pembangunan infrastruktur lainnya 2. melakukan upaya untuk mendapatkan anggaran dari lembaga III	1. penyusunan DED dan pembangunan infrastruktur lainnya 2. melakukan upaya untuk mendapatkan anggaran dari lembaga III	1 M	17 M	18 M	19 M	20 M	APBD/APBN	
3	penataan jalan umum/ pembangunan trotoar dan drainase	6 km	Dinas PUPR	Kabupaten/Pusat		penyusunan DED dan dokumen lainnya terkait pembangunan drainase dan trotoar	melakukan upaya untuk mendapatkan anggaran dari Kementerian PUPR	1. melakukan upaya untuk mendapatkan anggaran dari Kementerian PUPR 2. pembangunan drainase dan trotoar di Kementerian PUPR	1. melakukan upaya untuk mendapatkan anggaran dari Kementerian PUPR 1. pembangunan drainase dan trotoar di Kementerian PUPR	penyusunan drainase dan trotoar di Kementerian PUPR	500 jt	300 jt	7 M	7 M	7M	APBD/APBN	
4	Pembangunan drainase kawasan IKK	25.000 m		Kabupaten	Ikahel kawasan IKK Serilantik			penyusunan masterplan	penyusunan DED	pembangunan selang drainase			700 jt	100 jt	1,8 M	APBD/WPB	
5	pembangunan jalan lingkar	1 km		Kabupaten			penyusunan DED dan dokumen kelengkapan lainnya	pelebaran 1 km jalan lingkar	lanjutan pelebaran jalan lingkar sepanjang 1 km	lanjutan pelebaran jalan lingkar sepanjang 1 km	200 jt	1 M	1 M	1 M	APBD/APBN		
6	pembangunan gorong perkerabatan	2 unit		Kabupaten	Ikahel di komplek perkotaan serilantik			1. pemertingan lahan 2. penyusunan DED dan dokumen kelengkapan lainnya 3. pembangunan 1 unit gorong	1. pemertingan lahan 2. penyusunan DED dan dokumen kelengkapan lainnya	pembangunan 1 unit gorong			200 jt	200 jt	200 jt	APBD/APBN	
		1 unit	Bagian Uraian, Setda	Kabupaten	Tanah belum tersedia (Penyediaan Tanah Melalui Bagian Uraian Setda)		Pengadaan tanah ruzah dinas	Penyusunan DED dan dokumen kelengkapan lainnya	Pembangunan ruzah dinas				3,5 M	200 jt	2,5 M	-	APBD

No	Arah	Rencana/Teknis	OPD	Kewenangan	Ewalidasi	Tahapan Pelaksanaan					Indikator Anggaran APBD				Pembinaan		
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019		2020	
7	penyusunan RDR	1 dokumen	Dinas PUPR	Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. validasi data pada dasar yang telah mendapatkan rekomendasi dari badan independen tanggal 1 oktober 2014 2. tahun 2025 ini ditambah lagi dan untuk konsep rencana pengembangan kawasan 3. akan dilakukan penyusunan konsep RDR & Peraturan daerah (mei-juli 2015) 4. koordinasi dengan DPRD (juni 2015) 5. finalisasi konsep rencana dan integrasi RUMAH SAKIT (juli - Agustus 2015) 6. Proses koordinasi dengan Kementerian ATR/SPH (juli-September 2015) 7. Koordinasi dengan OPD pengprov terkait (juli - Oktober 2015) 8. Realisasi dokumen (september 2015) 9. Harmonisasi dengan Kementerian (september - Oktober 2015) 10. Finalisasi final akhir (November 2015) 11. Proses final akhir hingga terbit surat (November - Desember 2015) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengisian dokumen RDR/ peninjauan Raperfor RDR (Maret 2016) 2. Integrasi RDR ke Aplikasi GIS 3. Socialisasi kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan Ruang 						500 0					APSD/A-GR
8	penataan baling batu	20 km		Pusat			penyusunan DID dan dokumen studi kelayakan	1. penyusunan dokumen lingkungan 2. peninjauan lahan	1. peninjauan lahan 2. studi kelayakan 3. peninjauan proyek untuk mendapatkan anggaran dari Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Semarang (BWS V)	1. peninjauan penataan jalan Kementerian PUPR / BWS V 2. pelaksanaan oleh dinas APBD Kab. Lima Puluh Kota		1,3 M	200 0	100 M	100 M	APSD/AMN	

Pt. Kepala Dapetbangga,
Kabupaten Lima Puluh Kota

(Dan Permis, ST, M. Sc, M. Sc, Ph.D
NIP. 198204020120122 3 000



Rencana Implementasi

Pengusulan Kegiatan ke Pemerintah Pusat

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kegiatan/RC	Rencana Aksi						Jadwal Pengusulan	Mekanisme Penyampaian	Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Inpres No 3 Tahun 2023 dan Inpres No 11 Tahun 2025	Koordinasi dengan BPJN Sumbar terkait Jadwal dan Syarat Pengusulan	Koordinasi dengan BPJN Sumbar terkait Jadwal dan Syarat Pengusulan	Koordinasi dengan BPJN Sumbar terkait Jadwal dan Syarat Pengusulan	Koordinasi dengan BPJN Sumbar terkait Jadwal dan Syarat Pengusulan	Koordinasi dengan BPJN Sumbar terkait Jadwal dan Syarat Pengusulan	Koordinasi dengan BPJN Sumbar terkait Jadwal dan Syarat Pengusulan	Biasanya Pertengahan Tahun	Aplikasi SITIA (akun pada DPLUPR Bidang BM)	1. RC disiapkan Daerah 2. Biasanya DED disusun untuk lebar Badan Jalan 6 m 3. Finalisasi Usulan dan DED akan disitensi oleh BPJN Sumbar 4. Biasanya pengusulan dilakukan pada Tahun pelaksanaan 5. Setidaknya diusulkan sebanyak 5 Ruzat setiap tahunnya dengan besaran anggaran @ Rp. 20.000.000.000,- 6. Perlu dicadangkan dana untuk menyiapkan RC setiap tahunnya
	RC berupa: 1. DED 2. Dokumen Lingkungan 3. Ketersediaan Lahan	Menyapkan RC sesuai persyaratan Inpres setiap tahunnya (Juknis Tahun Berkenaan)	Menyapkan RC sesuai persyaratan Inpres setiap tahunnya (Juknis Tahun Berkenaan)	Menyapkan RC sesuai persyaratan Inpres setiap tahunnya (Juknis Tahun Berkenaan)	Menyapkan RC sesuai persyaratan Inpres setiap tahunnya (Juknis Tahun Berkenaan)	Menyapkan RC sesuai persyaratan Inpres setiap tahunnya (Juknis Tahun Berkenaan)	Menyapkan RC sesuai persyaratan Inpres setiap tahunnya (Juknis Tahun Berkenaan)			
2	Inpres No 2 Tahun 2025	Koordinasi dengan BWSS V Sumbar terkait Jadwal dan Syarat Pengusulan	Koordinasi dengan BWSS V Sumbar terkait Jadwal dan Syarat Pengusulan	Koordinasi dengan BWSS V Sumbar terkait Jadwal dan Syarat Pengusulan	Koordinasi dengan BWSS V Sumbar terkait Jadwal dan Syarat Pengusulan	Koordinasi dengan BWSS V Sumbar terkait Jadwal dan Syarat Pengusulan	Koordinasi dengan BWSS V Sumbar terkait Jadwal dan Syarat Pengusulan		Aplikasi SIPURI (akun pada DPLUPR Bidang PSDA)	1. RC disiapkan Daerah 2. Finalisasi Usulan dan DED akan disitensi oleh BWSS V Sumbar 3. Biasanya pengusulan

No.	Kegiatan/RC	Rencana Aksi						Jadwal Pengusulan	Mekanisme Penyempulan	Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	RC berupa: 1. DED 2. Dokumen Lingkungan 3. Ketersediaan Lahan	Menyiapkan RC sesuai persyaratan Inpres setiap tahunnya (Juknis Tahun Berkenaan)	Menyiapkan RC sesuai persyaratan Inpres setiap tahunnya (Juknis Tahun Berkenaan)	Menyiapkan RC sesuai persyaratan Inpres setiap tahunnya (Juknis Tahun Berkenaan)	Menyiapkan RC sesuai persyaratan Inpres setiap tahunnya (Juknis Tahun Berkenaan)	Menyiapkan RC sesuai persyaratan Inpres setiap tahunnya (Juknis Tahun Berkenaan)	Menyiapkan RC sesuai persyaratan Inpres setiap tahunnya (Juknis Tahun Berkenaan)			dilakukan pada Tahun pelaksanaan 4. Setidaknya akan diusulkan untuk 10 DI setiap tahunnya dengan rata usulan anggaran @ Rp.1.000.000.000,- 5. Perlu dicadangkan dana untuk menyiapkan RC setiap tahunnya
3	Normalisasi Batang Sinamar	Saat ini telah ada;	Berkoordinasi dengan BWSS V terkait langkah2 pengusulan	Berkoordinasi dengan BWSS V dalam rangka pengawalan Proposal					Renstra Kementerian PU	1. Berdasarkan RAB yang ada saat ini, perkiraan biaya pekerjaan lebih dari Rp.70 Milyar 2. Untuk melakukan proses pengusulan perlu dilipatkan anggaran yang diperlukan
		1. DED 2. UKL-UPL 3. Sertifikat Lahan 4. Proposal Tahun 2022	Memperbaharui kembali Proposal Usulan							
			Menyampaikan Proposal Kepada Kementerian melalui BWSS V							
4	P3-TGAI	Sedang berjalan di 36 lokasi (Tahap I: 34 lokasi dan Tahap II: 2 lokasi)	Menelusuri Lokasi yang memenuhi kriteria	Menelusuri Lokasi yang memenuhi kriteria	Menelusuri Lokasi yang memenuhi kriteria	Menelusuri Lokasi yang memenuhi kriteria	Menelusuri Lokasi yang memenuhi kriteria		Aplikasi P3-TGAI (akan pada DPUPR Bidang PSDA)	1. Direncanakan akan diusulkan setidaknya 50 lokasi untuk setiap tahunnya

No.	Kegiatan/RC	Rencana Aksi						Jadwal Pengusulan	Mekanisme Penyempalan	Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	RC berupa: 1. Akta Notaris P3A 2. NPWP P3A 3. Rekening Bank P3A		Memantau proses penginputan usulan pada lokasi yang memenuhi syarat	Memantau proses penginputan usulan pada lokasi yang memenuhi syarat	Memantau proses penginputan usulan pada lokasi yang memenuhi syarat	Memantau proses penginputan usulan pada lokasi yang memenuhi syarat	Memantau proses penginputan usulan pada lokasi yang memenuhi syarat			
			Memantau dan mengawal proses verifikasi usulan oleh Kementerian/BWS S V	Memantau dan mengawal proses verifikasi usulan oleh Kementerian/B WSS V	Memantau dan mengawal proses verifikasi usulan oleh Kementerian/B WSS V	Memantau dan mengawal proses verifikasi usulan oleh Kementerian/BW SS V	Memantau dan mengawal proses verifikasi usulan oleh Kementerian/BW SS V			
			Memonitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pekerjaan di Lokasi terpilih	Memonitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pekerjaan di Lokasi terpilih	Memonitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pekerjaan di Lokasi terpilih	Memonitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pekerjaan di Lokasi terpilih	Memonitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pekerjaan di Lokasi terpilih			

2. Dinas Perhubungan

No.	Kegiatan/RC	Rencana Aksi						Indwal Pengajuan	Mekanisme Penyampaian	Dasar Pelaksanaan	Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Peranganan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) pada Ruas Jalan Nasional (Simpang Lembang Harau)		Menyapkan RC							Resolusi Kementerian Perhubungan	
	RC yang dibutuhkan: 1. Surat Usulan Pemda 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pimpinan Daerah 3. Data Usulan LRK dari sat lintas		Menyampaikan Usulan kepada Kementerian								
2	Bantuan Teknis Perengkapan Jalan Ruas Jalan Protokol Provinsi/Kabupaten/Kota di Prov. Sumatera Barat										
a	Rambu, Warning Light, Marka		Menyapkan RC							Resolusi Kementerian Perhubungan	
	RC yang dibutuhkan: 1. Surat Usulan Pemda 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pimpinan Daerah 3. Proposal / Kajian Manfaat Bantuan Teknis Perengkapan Jalan 4. DPA 5. Rerata Dinas Perhubungan 6. SK Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan		Menyampaikan Usulan kepada Kementerian								

No.	Kegiatan/RC	Rencana Awal					Judul Pengusulan	Mekanisme Penyempalan	Dasar Pelaksanaan	Kat.
		2025	2026	2027	2028	2029				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
b	Lampu FRU		Menyapkan RC							Renstra Kementerian Perhubungan
	RC yang dibutuhkan: 1. Surat Usulan Pemda 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pimpinan Daerah 3. Proposal / Kajian Manfaat Bantuan Teknis Perencanaan Jalan 4. DPA 5. Renstra Dinas Perhubungan 6. SK Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan		Menyampaikan Usulan kepada Kementerian							
3	Subsidi Operasional Layanan Bus Periodis (Kantor Bupati-RSUO Sukki)		Menyapkan RC							Renstra Kementerian Perhubungan
	RC yang dibutuhkan: 1. Surat Usulan Pemohonan 2. Surat Pernyataan Pimpinan Daerah 3. Kajian Manfaat		Menyampaikan Usulan kepada Kementerian							
4	Pembangunan ATCS				Menyapkan RC					Renstra Kementerian Perhubungan
	RC yang dibutuhkan: 1. Surat Usulan Pemohonan 2. Surat Pernyataan Pimpinan Daerah 3. Kajian Manfaat 4. DED ATCS				Menyampaikan Usulan kepada BPTD kelas II Sumbar					
5	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZSS) (Sekolah Negeri di Jalan Nasional)				Menyapkan RC					Renstra Kementerian Perhubungan

No.	Kegiatan/RC	Rencana Aksi						Jadwal Pengusulan	Melalui Penyempulan	Dasar Pelaksanaan	Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	RC yang Dibutuhkan: 1. Surat Usulan Permohonan 2. Surat Pernyataan Pimpinan Daerah 3. Justifikasi Teknis				Menyampaikan Usulan kepada BPTD						
6	Pembangunan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda: (Pedestrian Ruas Jalan Syahrudin Prawira Nagara)						Menyampaikan RC			Renstra Kementerian Perhubungan	
	RC yang Dibutuhkan: 1. Surat Usulan Permohonan 2. Surat Pernyataan Pimpinan Daerah 3. Kajian Manfaat 4. DED Jalan Pedestrian 5. ANDALALIN						Menyampaikan Usulan kepada BPTD				
7	Bus Keur Keffing			Menyampaikan RC						Renstra Kementerian Perhubungan	
	RC yang Dibutuhkan: 1. Surat Usulan Permohonan 2. Surat Pernyataan Pimpinan Daerah 3. Kajian Manfaat			Menyampaikan Usulan kepada Kementerian							

3. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman


No.	Regiatan/BC	Rencana Aksi						Jadwal Pengusuln	Melaksanakan Penyampaian	Daerah Pelaksanaan	Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pembangunan 3 juta rumah									RPJMN 2025-2029	1. Semua kegiatan pembangunan rumah termasuk ke dalam pembangunan 3 juta rumah yang dianggarkan tidak melalui APBN 2. Target 3 jt/per tahun 3. yang dibangun oleh APBN tidak terhitung 4. BNSA yang diminta adalah BNSA hasil pelaksanaan pekerjaan yang didanai Non APBN
	a. Meminta data BNSA										
2	Bantuan Stimulan Perusahaan Swadaya (BSPS)										
	a. Usulan Data	Saat ini diusulkan secara manual, berupa Tabel Excel, sambil menunggu Aplikasinya Dibuka	Akan diusulkan	Akan diusulkan	Akan diusulkan	Akan diusulkan	Akan diusulkan	Aplikasi dioptimalkan dahulu sebelum pengrusakan	aplikasi SIRARI	Jenis Penyelenggaraan Program Pembangunan Rumah Swadaya (SE Dirjen)	1. Menggunakan Data Tungga Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) 2. YANG UTAMA MELALUI POKIR DPR-RI 3. Peran Daerah sebagai tim verifikasi 4. Perwakilan Kementerian PEP adalah Satker Perumahan di Padang 5. Dana pendampingan untuk monitoring tidak diwajibkan

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Kegiatan/RC	Rencana Aksi						Jadwal Pengusulan	Melalui Penyempulan	Dasar Pelaksanaan	Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bantuan Pasca rehap/rekonstruksi infrastruktur pasca bencana	Peluang nya terkait Bahang Harau	Memastikan lokasi	Memastikan lokasi	Memastikan lokasi	Memastikan lokasi	Memastikan lokasi	sewaktu-waktu	E proposal dan/atau dantar		1. Proposal disampaikan ke BAPP 2. BNPB meneruskan ke Kementerian Keuangan (Dana berada di Kementerian Keuangan) 3. Beraku untuk Rencana maksimal 2 Tahun ke belakang
	RC yang diperlukan: 1. Proposal oleh BPBD 2. BAB oleh DPUPR 3. SK Bencana		Mengusulkan Menyesuaikan	Mengusulkan Menyesuaikan	Mengusulkan Menyesuaikan	Mengusulkan Menyesuaikan	Mengusulkan Menyesuaikan				

5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Kegiatan/RK	rencana Aksi						Jadwal Pelaksanaan	Mekanisme Penyediaan	Dasar Pelaksanaan	KRL
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Penyediaan bantuan hibah mobil armada Pemadam Kebakaran	Pembuatan/ pengajuan proposal	Pembuatan/ pengajuan proposal					Setiap tahun	Proposal diserahkan langsung ke Dirjen Bina Administrasi Kepolisian Kemendagri atau ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kepolisian Provinsi DKI Jakarta	Rendia Kementerian	1. Peluang hibah ada 2 tempat yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Anggaran yang harus dibayar sebesar 400 juta untuk masing-masing kendaraan, termasuk di OPA. Anggaran anggaran ini untuk biaya bongkar muat di pelabuhan, biaya angkut kendaraan ke bengkel rekondisi, biaya rekondisi, biaya angkut kendaraan ke Daerah, dan biaya perjalanan dinas koordinasi langsung ke Kemendagri/ Pemprov DKI Jakarta 3. Sebagai pembanding, jika mobil dibeli dengan kondisi baru, membutuhkan anggaran hampir 2 Milyar Rupiah
1	Penyediaan bantuan hibah peralatan Pemadam Kebakaran		Pembuatan/ pengajuan proposal	Pembuatan/ pengajuan proposal	Pembuatan/ pengajuan proposal	Pembuatan/ pengajuan proposal	Pembuatan/ pengajuan proposal	Setiap tahun	Proposal dan persyaratan lainnya di input ke dalam sistem yang disiapkan Kemendagri	Rendia Kementerian	1. Peralatan Damkar berupa pompa air portabel, baju tahan panas Damkar, bendera Damkar, dll. Jenis peralatan tidak setiap tahun 2. Jika diasumsikan semua peralatan dibantu, maka jika di nilai secara normal akan bernilai sekitar 350 juta Rupiah
3	Penyediaan bantuan pembangunan Posko Pemadam Kebakaran untuk tingkat kecamatan		Penyajian RC yang dibutuhkan	Pembuatan/ pengajuan proposal	Pembuatan/ pengajuan proposal	Pembuatan/ pengajuan proposal	Pembuatan/ pengajuan proposal	Setiap tahun	Proposal dan persyaratan lainnya di input ke dalam sistem yang disiapkan Kemendagri	Rendia Kementerian	1. Program dalam skala DAK sebagai skala lainnya 2. Perlu disediakan dana untuk menyusut RC yang dibutuhkan
	RC yang dibutuhkan 1. Sertifikat Tanah 1. DED 3. lain-lain		Penyajian RC yang dibutuhkan	Penyajian RC yang dibutuhkan	Penyajian RC yang dibutuhkan	Penyajian RC yang dibutuhkan					



 Pl. Kepala Bappalit/ingit
 Kabupaten Dima Putih Kota,
 Dian Formatted, ST, M.Si, M.Sc, Ph.D
 NIP. 19810419 200003 0 005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Jl. Panglima Sulung Nomor : 09 Pasir Pengaraian Kode Pos : 28557
Telp. (0762) - 91460 Faks : (0762) - 91460
Website : www.dprdrohul.go.id Email : dprdrohul@gmail.com

Pasir Pengaraian, 23 Februari 2026

Nomor : 400.14.14/DPRD-ROHUL/149
Sifat : Penting
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : **Mohon kesediaan
Menerima Komisi IV
DPRD Kab. Rokan Hulu**

Kepada Yth ;
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Di -
Sarilamak

Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, peran dan fungsi pengawasan Komisi IV DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di bidang perhubungan, maka Komisi IV DPRD Kabupaten Rokan Hulu bermaksud untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota yang akan di adakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Februari 2026

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Acara : Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Rokan Hulu Dalam Rangka Evaluasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuannya untuk dapat menerima Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Rokan Hulu tersebut. (*Daftar Nama Terlampir*).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU



Wakil Ketua,

H. PORKOT LUBIS, SH., MH

**DAFTAR NAMA
PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI IV
DPRD KABUPATEN ROKAN HULU**

NO	NAMA	JABATAN
1.	KARNENG DIMARA LUBIS, SH	Wakil Ketua Komisi IV DPRD
2.	EMON CASMON	Sekretaris Komisi IV DPRD
3.	HARDE YANTO, SH	Anggota Komisi IV DPRD
4.	DAULAT SINAGA	Anggota Komisi IV DPRD
5.	PATUAN CHANDRA HRP	Anggota Komisi IV DPRD
6.	SAIFUL ADNAN, SH	Anggota Komisi IV DPRD
7.	RIO NOVENDRA, S.Psi	Anggota Komisi IV DPRD

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**



Wakil Ketua,

H. PORLOT LUBIS, SH., MH

Kontak Person :

Musa Rahman 0823 1515 1177



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Lingkar (STA. 7 + 800) Bangkinang (28412) Riau
Telepon (0762) 7320097 Email: sekretariatdprdkab.kampar@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 000.1.2.2/DPRD – Komisi IV/.....

- Dasar :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kampar tanggal 26 Januari 2026, tentang Penetapan Program Kerja Alat Kelengkapan DPRD Bulan Februari 2026.
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 Sub. Kegiatan 4.02.4.02.01.02.2.08.0001, Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Kode Rekening 5.1.02.04.01.0001

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

No.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	HABIBURRAHMAN, M.Pd	Anggota Komisi IV DPRD Kab. Kampar

- Untuk :
1. Melaksanakan Sharing Informasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat terkait Pengaturan Alur Lalu Lintas di masa Liburan Idul Fitri 2026, selama 03 (tiga) hari PP, terhitung mulai tanggal 02 s/d 04 Maret 2026.
 2. Biaya Pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
 3. Setelah melaksanakan perjalanan dinas tersebut, agar membuat laporan yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar.

Demikian Surat Tugas ini dikeluarkan untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bangkinang
Pada Tanggal : 02 Maret 2026
KETUA DPRD KABUPATEN KAMPAR

AHMAD TARIDI, S.H.I



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

Nomor : 503/040/SP-MP/DPMPSTSP/II/2026 Tanjung Pati, 09 Februari 2026
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Penelitian

Kepada
Yth

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Zakiah Asti Anandas
Tempat/ Tanggal Lahir : Sopan Goduang, 30 Desember 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Gurun Nagari gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Akan melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk Tugas Akhir/Skripsi Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang Padang dengan Judul Penelitian "*Pengaruh Perceived Career Development Terhadap Quiet Quitting Dengan Job Satisfaction Sebagai Variabel Mediasi Pada ASN Generasi Z Di Instansi Pemerintahan*". untuk itu kami harapkan kiranya bapak/ibu berkenan menerima yang bersangkutan untuk melakukan studi penelitian yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lima Puluh Kota



Davli, S.Sos.M.Si
NIP. 19700716 199202 1 001

Tembusan:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai Laporan).
2. Ka. Bagelitang Kab. Lima Puluh Kota.
3. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang
Telepon. (0751) 445089, Fax. (0751) 447366,
Website: <https://feb.unp.ac.id/> e-mail : info@fe.unp.ac.id

Nomor : 642/UN35.7/TU/2026
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

28 Januari 2026

Kepada : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan Tugas Akhir/Skripsi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Zakiah Asti Anandas
BP/NIM : 2022/ 22059208
Departemen : Manajemen
Prodi / Keahlian : Manajemen / Manajemen Sumber Daya Manusia

bermaksud akan melakukan Penelitian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai : Pengaruh *Perceived Career Development* terhadap *Quiet Quitting* dengan *Job Satisfaction* sebagai Variabel Mediasi pada ASN Generasi Z.

selama 2 Bulan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melakukan Penelitian dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Mahasiswa dan Alumni,

Dr. Marwan, S.Pd, M.Si
NIP. 19750309 200003 1 002

STOP
GRATIFIKASI



Commitment is Our Tradition

○ Legacy ○ Improvement ○ Future



Certificate 1024/00000277



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT
DAN JAMBI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH

JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 35, PAYAKUMBUH 26224
TELEPON (0752) 796933, 82281 FAKSIMILE (0752) 90773; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-25/KPP.2705/2026 14 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pembuatan Bukti Potong A2 (BPA2) dan Pelaporan SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025

Yth. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Di JL SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA K 7 TANJUNG PATI, KOTO TUO, HARAU,
KAB. LIMA PULUH KOTA

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan efisien, kami mengajak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan pembuatan Bukti Potong A2 (BPA2) atas penghasilan Pegawai pada Tahun Pajak 2025 dan melakukan imbauan kepada Pegawai untuk segera melakukan aktivasi akun Wajib Pajak serta registrasi kode otorisasi atau sertifikat digital pada sistem Coretax DJP melalui laman <https://coretaxdjp.pajak.go.id>.

Langkah ini sangat penting untuk memastikan kelancaran dalam penyampaian kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 yang akan dilakukan pada tahun 2026, serta layanan administrasi perpajakan lainnya. Aktivasi akun dan registrasi kode otorisasi atau sertifikat digital juga menjadi kunci untuk menggunakan tanda tangan elektronik, yang saat ini telah diterapkan untuk seluruh administrasi perpajakan di Coretax DJP misalnya untuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Dengan melakukan aktivasi akun dan registrasi kode otorisasi atau sertifikat digital, Wajib Pajak (Pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)) di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan memperoleh berbagai manfaat, seperti kemudahan akses layanan perpajakan secara elektronik, kecepatan dalam proses administrasi, dan terhindar dari kendala saat masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 pada tahun 2026 dan administrasi perpajakan lainnya, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Bagi Pegawai yang belum melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP agar segera melakukan pemadanan;
2. Pegawai agar melakukan aktivasi akun Coretax sekaligus membuat Kode Otorisasi untuk keperluan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 di Tahun 2026;
3. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera membuat Bukti Potong A2 (BPA2) atas penghasilan Pegawai pada Tahun Pajak 2025 dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Januari sampai dengan Desember 2025 agar data bukti potong tersebut dapat digunakan oleh Pegawai dalam melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.
4. Untuk petunjuk resmi pemadanan NIK sebagai NPWP, aktivasi akun Coretax, pembuatan Kode Otorisasi, pembuatan bukti potong Instansi Pemerintah dan panduan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi – Karyawan dapat dilihat pada halaman www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan atau pada tautan berikut:

No.	Petunjuk Resmi	Tautan
a.	Pemadanan NIK sebagai NPWP	s.kemenkeu.go.id/NIKNPWP
b.	Aktivasi Akun Coretax	s.kemenkeu.go.id/aktivasicoretax1
c.	Pembuatan Kode Otorisasi atau Sertifikat Digital	s.kemenkeu.go.id/KodeOtorisasiDJP
d.	Pembuatan Bukti Potong Instansi Pemerintah	s.kemenkeu.go.id/BPA2InstansiPemerintah1
e.	Panduan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi - Karyawan	s.kemenkeu.go.id/SPTTahunanOPKaryawan

5. Apabila mengalami kendala terkait hal tersebut dapat mengunjungi KPP Pratama Payakumbuh atau dapat menghubungi di nomor telepon (0752) 796933, 92281.
6. Mohon kewaspadaan terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan implementasi Coretax DJP. Pastikan Wajib Pajak hanya berinteraksi melalui saluran resmi Direktorat Jenderal Pajak; dan
7. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyampaikan Bukti Potong A2 (BPA2) dan informasi tersebut kepada seluruh Pegawai.

Kami sangat mengapresiasi partisipasi Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi akun, registrasi kode otorisasi atau sertifikat digital maupun penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 tepat waktu. Terima kasih atas kerja sama dan komitmen Wajib Pajak dalam mendukung kelancaran administrasi perpajakan yang lebih baik bagi kita semua.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Payakumbuh



Ditandatangani secara elektronik
Susi Deliyarti





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Aziz Haily, Bukik Limau, Sarilamak

Sarilamak, 12 Januari 2026

Nomor : 700.1.2/ 2.5 /Insp-LK/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Lima Puluh Kota
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) sebagaimana terlampir, serta sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Saudara menginstruksikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan unit kerja masing-masing untuk melakukan pelaporan LHKAN (Melalui aplikasi coretax.djp.pajak.go.id)
2. Pelaporan LHKAN dilakukan secara mandiri oleh ASN sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
3. Agar Saudara melakukan pemantauan serta memastikan kepatuhan ASN atas penyampaian LHKAN di lingkungan kerja masing-masing.
4. Inspektorat Daerah / APIP agar melakukan pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN kepada kementerian PAN-RB paling lambat tanggal 30 April 2026.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HERMAN AZMAR, AP, M.SI
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP.197309131993111001

Tembusan :

1. Bupati Lima Puluh Kota di sarilamak (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Arsip

Lampiran Sekretariat Daerah Kabupaten Lima puluh Kota

Nomor : 700.1.2/As /Insp-LK/2026

Tanggal : 11 Januari 2026

Hal : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Daftar Perangkat Daerah

1. Sekretaris Daerah
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektur Daerah
4. Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kepala Dinas Kesehatan
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Dinas Perhubungan
11. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
20. Kepala Dinas Sosial
21. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
23. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
24. Kepala Satuan Polisi dan Pamong Praja
25. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
26. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
27. Kepala Dinas Perikanan
28. Kepala Dinas Pangan
29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Direktur RSUD Achmad Darwis
31. Camat Harau
32. Camat Luak
33. Camat Lereh Sago Halaban
34. Camat Situjuh
35. Camat Akabiluru
36. Camat Payakumbuh
37. Camat Guguk
38. Camat Bukik Barisan
39. Camat Sulid
40. Camat Gunung Omeh
41. Camat Mungka
42. Camat Pangkalan Koto Baru
43. Camat Kapur IX





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jln Kelinggian GOR Singa Hantu Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Telepon (0762) 7750555 – 7750555 Faks (0762) 7750555
Pos – el : inspektorat@50bukitbarat.com

SURAT TUGAS

NOMOR: 700 / 2026/INSP-LK/2026

I. Dasar :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
- 4) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyempaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN),
- 5) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Podoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,
- 6) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 102 Tahun 2021 tentang kedudukan , Susunan Organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat,
- 7) Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 700/01/BUK-LK/2025 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025,
- 8) Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 700/49/BUK-LK/2026 Tentang Penetapan Penyelenggaraan Negara, Pejabat/ Pegawai Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

II. Ditugaskan Kepada

Tin Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan Monitoring terhadap kewajiban ASN untuk menyampaikan SPT Tahunan melalui aplikasi Coretax di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Susunan Personil sebagai berikut :

No	Nama	NIP / Pangkat/Gol	Jabatan	Jumlah Hari
1	Irwandi, S.Sos, MM, CGCAE, CGRE	19660913 198603 1 009 Pembina Utama Muda / IV.c	Peranggung Jawab	12 Hari
2	Muzli Firman, S.I.P M.Si	19780821 200501 1 009 Pembina Tk I/IV a	Wakil Peranggung Jawab	12 Hari
3	Andriadi, S.T., CGRA	19770506 200312 1 005 Pembina / IV a	Pengendali Teknis	12 Hari
4	Das Apriyul Putra S.Sos	19750424 200604 1 012 Penata TK I / III d	Ketua Tim	12 Hari
5	Agus Purwanto, S.Kom	19740828 200212 1 005 Penata Tk. II/III d	Anggota Tim	12 Hari
6	Rizyend Badwiga, ST	19901004 201912 1 004 Penata Muda Tk.I / III b	Anggota Tim	12 Hari
7	Andri Anugrah, S.E	19961026 202506 2 012 Penata Muda / III a	Anggota Tim	12 Hari
8	Eri Walandari, S.H	19901220 202506 2 010 Penata Muda / III a	Anggota Tim	12 Hari

1. Objek : ASN Wajib SPT Tahunan sebagai WP-OP
 2. Jenis Pengawasan : Monitoring/ Penertauan
 3. Sasaran : Meningkatkan kepatuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyampaikan SPT Tahunan melalui aplikasi Coretax.
 4. Masa yang dimonitoring : Tahun Pelaporan 2025
- Monitoring dilakukan dengan indiat :
- a. Pelaksanaan : 27 Januari s.d 11 Februari 2026 (12 hari)
 - b. Penyelesaian : 12 dan 13 Februari 2026
- Laporan

- III. Kepada Tim Pejabat/Instansi/ lembaga/Perorangan serta pihak terkait lainnya diharapkan bantuannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas ini
- IV. Kepada Tim diminta Melaksanakan tugas ini dengan baik secara efektif dan efisien,
Demikian untuk dilaksanakan

Sialitmak, 27 Januari 2026

Inspektur Daerah,



IRWANDI, S.Sos, M.M, CGCAE, CGRE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.196609131586031009

Terbusan

1. Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Asip. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Dasar Sertifikasi Elektronik (BDS-E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA BARAT
DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAYAKUMBUH

JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 35, PAYAKUMBUH 26224
TELEPON (0752) 796933, 92261 FAKSIMILE (0752) 93773; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200; SUREL
pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-97/KPP.2705/2026 25 Februari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 kepada ASN dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Yth. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
JL SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA K 7 TANJUNG PATI, KOTO TUO, HARAU, KAB. LIMA PULUH KOTA

Sehubungan dengan monitoring capaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi masih rendah khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023:
 - a. Pasal 1 angka 11 dan angka 13 yaitu Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 - b. Pasal 3 ayat (1) yaitu setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas ke Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. Pasal 3 ayat (3) huruf b yaitu batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau dalam hal ini **batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 adalah sampai dengan 31 Maret 2026**.
 - d. Pasal 7 ayat (1) yaitu apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Coretax DJP (<https://coretaxdjp.pajak.go.id/>) dengan terlebih dahulu Wajib Pajak memastikan telah melakukan Aktivasi Akun Coretax DJP dan Pembuatan Kode Otorisasi. Petunjuk resmi Aktivasi Akun Coretax DJP, Pembuatan Kode Otorisasi, dan panduan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat dilihat pada halaman www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan atau pada tautan berikut:

No	Petunjuk Resmi	Tautan
1.	Aktivasi Akun Coretax	s.kemenkeu.go.id/aktivasicoretax1
2.	Pembuatan Kode Otorisasi atau	s.kemenkeu.go.id/KodeOtorisasiDJP

	Sertifikat Digital	
3.	Panduan SPT Tahunan Coretax DJP	www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan

3. Kami mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar melakukan percepatan penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 BPA2 (untuk ASN) dan BPA1 (untuk PPPK) di bawah unit kerja masing-masing dikarenakan Bukti Pemotongan merupakan salah satu dasar ASN dan PPPK dalam melakukan pelaporan penghasilan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
4. Kami mengimbau kepada seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP, agar segera melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 lebih awal untuk menghindari sanksi keterlambatan.
5. Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi merupakan kewajiban pribadi setiap Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga konsekuensi atas keterlambatan/tidak lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melekat kepada pribadi masing-masing ASN dan PPPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Payakumbuh



Ditandatangani secara elektronik
Nunung Gondowati

Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Indarung Padang Besi Km. 12 Telp. (0751) 71860, 727370 Fax (0751) 72370
http://bpsdm.sumbarprov.go.id e-mail: bpsdm@sumbarprov.go.id

Padang, 23 Februari 2026
5 Ramadhan 1447 H

Nomor : 800.2.4.1/159/PKTI/BPSDM/II-2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pemberitahuan Pelatihan Aparatur Digital

Kepada Yth:

1. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat

di-

Tempat

Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang komunikasi dan digital, Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BBLSDM Komdigi) Medan akan menyelenggarakan Pelatihan Aparatur digital Tahun 2026. Kegiatan ini ditujukan bagi Aparatur sipil Negara (ASN) serta pegawai perangkat daerah.

Sesuai Surat Kepala BBLSDM Komdigi Medan Nomor: B-82/BBLSDM.12/LT.02.02/02/2026 tanggal 18 Februari 2026 Perihal, Permohonan Peserta Pelatihan Aparatur Digital dan mengingat pentingnya kebutuhan SDM Komunikasi dan Digital agar menugaskan pegawai masing-masing OPD sebagai peserta pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

No	Skema Pelatihan	Metode Pelaksanaan	Tanggal Kegiatan
1	Social Media Analyst	Online	2-9 Maret 2026
2	Pemanfaatan AI di Pemerintahan	Online	10-13 Maret 2026
3	AI for Content Creator	Online	10-13 Maret 2026

Mengenai prosedur pendaftaran telah disampaikan pada lampiran surat ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Eki Yoan Meydora No. HP 0812-6590-3887 dan Vuthia Dewitama No. HP 0852-7496-9800.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPSDM
Provinsi Sumatera Barat



Drs. Barlius, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196606301991031006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).
2. Kepala BBLSDM Komdigi Medan

Lampiran I: Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 800.2.4.1/159/PKTI/BPSPDM/II-2026
Tanggal : 23 Februari 2026
5 Ramadhan 1447 H
Perihal : Pemberitahuan Pelatihan Aparatur Digital

Daftar Instansi

1. Sekretariat DPRD
2. Inspektorat Daerah
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Badan Pendapatan Daerah
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Badan Kepegawaian Daerah
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Badan Penghubung
12. Dinas Pendidikan
13. Dinas Kesehatan
14. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi
16. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
17. Dinas Sosial
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
20. Dinas Pangan
21. Dinas Lingkungan Hidup
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24. Dinas Perhubungan
25. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
26. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28. Dinas Pemuda Dan Olahraga
29. Dinas Kebudayaan
30. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
31. Dinas Kelautan Dan Perikanan
32. Dinas Pariwisata
33. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
34. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
35. Dinas Kehutanan
36. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
37. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
38. Satuan Polisi Pamong Praja
39. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
40. Biro Hukum
41. Biro Kesejahteraan Rakyat
42. Biro Perekonomian
43. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
44. Biro Administrasi Pembangunan
45. Biro Organisasi
46. Biro Umum
47. Biro Administrasi Pimpinan
48. RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi
49. RSUD Pariaman
50. RSUD M. Natsir
51. RSJ Prof. HB. Saanin Padang

Lampiran II: Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 800.24.1/159/PKT/BPSPDM/II-2026
Tanggal : 23 Februari 2026
5 Ramadhan 1447 H
Perihal : Pemberitahuan Pelatihan Aparatur Digital

BKPSDM Kab/Kota di Sumatera Barat

1. Kabupaten Agam
2. Kabupaten Dharmasraya
3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Kabupaten Padang Pariaman
6. Kabupaten Pasaman
7. Kabupaten Pasaman Barat
8. Kabupaten Pesisir Selatan
9. Kabupaten sijunjung
10. Kabupaten Solok
11. Kabupaten Solok Selatan
12. Kabupaten Tanah Datar
13. Kota Bukittinggi
14. Kota Padang
15. Kota Padang Panjang
16. Kota Pariaman
17. Kota payakumbuh
18. Kota Sawahlunto
19. Kota Solok

Lampiran III: Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 800.2.4.1/159/PKT/BPSDM/II-2026
Tanggal : 23 Februari 2026
5 Ramadhan 1447 H
Perihal : Pemberitahuan Pelatihan Aparatur Digital

PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Membuat akun Digitalent melalui digitalent.komdigi.go.id atau aplikasi DIGITALENT (bagi yang belum memiliki akun) dengan melengkapi data diri.
2. Menyelesaikan *mikroskill* sesuai tema pelatihan yang dipilih sebelum melakukan pendaftaran.
3. Melanjutkan pendaftaran pelatihan melalui tautan berikut:

Skema Pelatihan	Link Mikroskill	Link Pendaftaran
Social Media Analyst	Dasar-dasar Implementasi Kecerdasan Artifisial digitalent.komdigi.go.id/pelatihan/9748	digitalent.komdigi.go.id/pelatihan/12011
Pemanfaatan AI di Pemerintahan	Dasar-dasar Implementasi Kecerdasan Artifisial digitalent.komdigi.go.id/pelatihan/9748	digitalent.komdigi.go.id/pelatihan/12015
AI for Content Creator	Dasar-dasar Keamanan AI digitalent.komdigi.go.id/pelatihan/9752	digitalent.komdigi.go.id/pelatihan/12012

Lampiran IV: Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 800.2.4.1/159/PKTI/BPSDM/II-2026
Tanggal : 23 Februari 2026
5 Ramadhan 1447 H
Perihal : Pemberitahuan Pelatihan Aparatur Digital

KETENTUAN PESERTA PELATIHAN

1. ASN/Pegawai Pemerintah Non-ASN;
2. Usia maksimal 55 tahun pada saat mendaftar;
3. Pendidikan Minimal SMA;
4. Memiliki laptop dengan spesifikasi minimal: *Operating System Windows/MacOS*;
5. *Web browser: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dll*;
6. Laptop yang terinstall aplikasi *Zoom* dan dapat melakukan *browsing* dengan lancar



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1 Telp/Wa 08117538111
<http://dishub.sumbarprov.go.id>
PADANG

Nomor : 000/26/Dishub-SB/I/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Dukungan Pembayaran
Tagihan Listrik Alat Penerangan Jalan
(APJ)

Padang, 12 Januari 2026
Rajab 1447 H

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota
di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan pemasangan Alat Penerangan Jalan (APJ) disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Pada tahun anggaran 2026, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat akan melakukan Pemasangan Alat Penerangan Jalan pada Ruas Payakumbuh – Suliki – Koto Tinggi (P.069).
2. Pemasangan Alat Penerangan Jalan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan keamanan dan keselamatan lalu lintas, sekaligus memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan serta masyarakat di lingkungan sekitar.
3. Sehubungan dengan Pemasangan Alat Penerangan Jalan dimaksud, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Saudara agar dapat memberikan dukungan dalam pemenuhan pembayaran tagihan listrik yang timbul akibat pengoperasian Alat Penerangan Jalan tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Dedy Diantolani, S.Sos.MM



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH
NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG
Sekretariat Jln Kt Baru Smlg -Kt Tengah Smlg

Nomor : 500.0 / 34 / Pem-2026
Lamp : -
Hal : Permohonan Mengaktifkan
Penerangan Jalan Umum (PJU)

Koto Baru Simalanggang, 14 Januari 2026
K e p a d a
Yth. Bapak Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tanjung Pati

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tidak berfungsinya Penerangan Jalan Umum (PJU) kembali di Nagari Koto Baru Simalanggang, sedangkan kami masyarakat Nagari Koto Baru Simalanggang sangat membutuhkan lampu jalan tersebut demi kenyamanan masyarakat dalam berkendara di malam hari. Maka bersama ini kami bermohon kepada Bapak agar dapat mengaktifkan kembali penerangan jalan umum di Nagari Koto Baru Simalanggang.

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan Bapak terlebih dahulu kami ucapkan terimakasih.

Wali Nagari Koto Baru Simalanggang

REZKI YUANDA PUTRA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala PLN Ranting Kota Payakumbuh di Kota Payakumbuh
2. Kepala PLN Ranting Lima Puluh Kota di Tanjung Pati
3. Camat Payakumbuh di Koto Baru Simalanggang
4. Bamus Nagari Koto Baru Simalanggang di Koto Baru Simalanggang
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH
NAGARI TAEH BARUAH

Jl. Raya Payakumbuh-Mungka KM 10, Kode Pos 26251, ☎ 082390826672
✉ pctmngtaehbaruah@gmail.com 🌐 taehbaruah-limapuluhkotakab.desa.id

Nomor : 550/ 15 /Pem-TB/2026

Lampiran : -

Perihal : *Permohonan Perbaikan Lampu Jalan*

Taeh Baruah, 15 Januari 2026

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota
di

Tanjung Pati

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mendo'akan semoga Bapak/Ibu selalu berada dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam segala aktivitas, Aamiin.

Bersama ini kami sampaikan bahwa terdapat lampu jalan di wilayah Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh yang mengalami kerusakan, baik lampu bertenaga surya maupun Listrik. Schubungan dengan itu kami bermohon kepada Bapak/Ibu agar dapat memperbaiki lampu dimaksud demi lancarnya aktivitas masyarakat terutama pada malam hari.

Adapun data yang diperlukan akan kami lengkapi kemudian.

Demikian *Surat* ini kami sampaikan, atas bantuan dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pj Wali Nagari Taeh Baruah
HASRUL



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

NAGARI HALABAN

Alamat : Jalan Raya Payakumbuh – Halaban Km. 20,5 – Tembok.

No : 621.62/021/NH-2026
Lamp : -
Hal : **Permohonan**

Halaban, 22 Januari 2026

Kepada Yth :
**Bapak Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Lima
Puluh Kota**
Di
Tanjung Pati

Dengan Hormat,

Sebelumnya kami do'akan semoga Bapak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin....

Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang berlokasi di Jorong Padang Tengah, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban (*foto lokasi terlampir*) sudah tidak berfungsi lagi semenjak 21 Desember 2026, maka bersama surat ini kami bermohon kepada Bapak untuk memperbaiki Lampu PJU tersebut mengingat masyarakat sangat bergantung pada penerangan lampu tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kemurahan hati Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wali Nagari Halaban


M. FAKHRURAZI, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Camat Lareh Sago Halaban di Pakan Raba'a (*sebagai laporan*)
2. Arsip...



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH
NAGARI TAEH BUKIK**

Nomor : 500.10.1/015 /Pem-Tbk / I / 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan untuk
menghidupkan kembali PJU**

Taeh Bukik, 23 Januari 2026

Kepada Yth :
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tanjung Pati

Dengan Hormat,

Terlebih dahulu kami do'akan semoga Bapak dan staf berada dalam keadaan sehat serta sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari, aamiin.

Sehubungan dengan kondisi PJU di Nagari Taeh Bukik sudah tidak berfungsi (tidak hidup) baik yang di tiang maupun yang tenaga surya dan berhubung Bulan Suci Ramadhan sudah semakin dekat maka bersama ini kami mohon kepada Bapak untuk menghidupkan kembali PJU tersebut .

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak dan atas perhatian dan kesediaan Bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Wali Nagari Taeh Bukik

H. DIMAS





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN HARAU

NAGARI KOTO TUO

Alamat : Jln. Tanjung Pati-Lubuak Batingkok Kode Pos. 26671

Nomor : 500.10.17.3/49/PEM/2026

Tanjung Pati, 04 Februari 2026

Lamp : 1 berkas

Hal : Permohonan Perbaikan Lampu Penerangan
Jalan Umum di Nagari Koto Tuo

Kepada Yth :

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota

Di

Tanjung Pati

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mendoakan Bapak beserta jajaran dalam keadaan sehat dan sukses dalam menjalani Aktifitas sehari-hari. Aamiin Ya Rabbal Alamin

Sehubungan dengan adanya lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tidak berfungsi di wilayah kami, tepatnya di Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau, bersama ini kami mengajukan permohonan perbaikan lampu penerangan jalan tersebut.

Adapun kondisi lampu penerangan jalan di lokasi tersebut saat ini dalam keadaan mati/tidak berfungsi, sehingga menyebabkan jalan menjadi gelap pada malam hari. Hal ini berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan bagi pengguna jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kriminal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menindaklanjuti permohonan ini dan melakukan perbaikan secepatnya demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan dengan harapan Bapak/Ibuk bisa menghibahkannya atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.



Lampiran : Data Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
Nagari : Koto Tuo

No	Jorong	Meteran			Total PJU (5+8)
		Hidup	Mati	Jumlah	
1	Jorong Tanjung Pati	0	23	23	23
2	Jorong Simpang Ompek	0	23	23	23
3	Jorong Taratak Padang Rajo	3	8	11	11
4	Jorong Koto Tuo	1	10	11	11
5	Jorong Pulutan	2	12	14	14
6	Jorong Padang Rantang	0	0	0	0
Jumlah Total					82

Tanjung Pati 04 Februari 2026
WALIKOTA KOTO TUA
NAGARI
KOTO TUA
KECAMATAN HARAU
DION ISNAINI, S.E



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN HARAU
NAGARI SARILAMAK

Jl. Prof. HAMKA KM 10 Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota – 26271

Email : nagarisarilamak@gmail.com Website : www.sarilamak-limapuluhkotakab.desa.id

Nomor : 500.10.17.2/67 /Kesra-2026 Sarilamak, 04 Februari 2026

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Perbaikan Lampu Jalan**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

di

Tanjung Pati

Dengan Hormat,

Sebelumnya kami mendoakan semoga Bapak dalam Keadaan sehat dan lancar dalam menjalankan Aktivitas Sehari-hari. Amin.

Bersama ini kami sampaikan bahwa terdapat beberapa titik lampu jalan di Wilayah Nagari Sarilamak Kecamatan Harau yang mengalami kerusakan, baik lampu bertenaga surya maupun listrik. Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermohon kepada Bapak untuk dapat memperbaiki lampu jalan dimaksud demi kelancaran dan keamanan jalan di malam hari dan juga kelancaran ibadah dibulan suci Ramadhan 1447 H mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadhan.

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Wali Nagari Sarilamak

OLLY WIJAYA SE DT. KALI NAN PUTIAH



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH
NAGARI TAEH BARUAH

Jl. Raya Payakumbuh - Mungka KM 10. Kode Pos 26251. ☎ 082390826672

✉ taehbaruah-limapuluhketakab.desa.id

Nomor : 550/67/Pem-TB/II/2026

Lampiran : -

Perihal : *Permohonan Pemasangan Lampu
Lalu Lintas*

Taeh Baruah, 06 Februari 2026

Kepada Yth.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota
di

Tanjung Pati

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mendo'akan semoga Bapak/Ibu selalu berada dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam segala aktivitas, Aamiin.

Sehubungan dengan meningkatnya volume kendaraan yang melewati ruas jalan Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh saat ini yang mengakibatkan rawan terjadi kecelakaan terutama pada persimpangan jalan di Nagari Taeh Baruah. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan masyarakat pengguna jalan raya.

Oleh karena itu, kami bermohon kepada Bapak/Ibu agar sekiranya berkenan memasang penanda daerah rawan kecelakaan dengan rincian sebagai berikut :

Nama Rambu	Jumlah	Lokasi Pemasangan
Lampu lalu lintas penanda hati-hati (Kuning-kuning)	1 Set	- Simpang 4 Durian Bungkuak; - Simpang 3 SD N 01 Taeh Baruah; - Simpang 3 SD N 03 Taeh Baruah.

Demikian *Permohonan* ini kami sampaikan, atas kemurahan hati Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

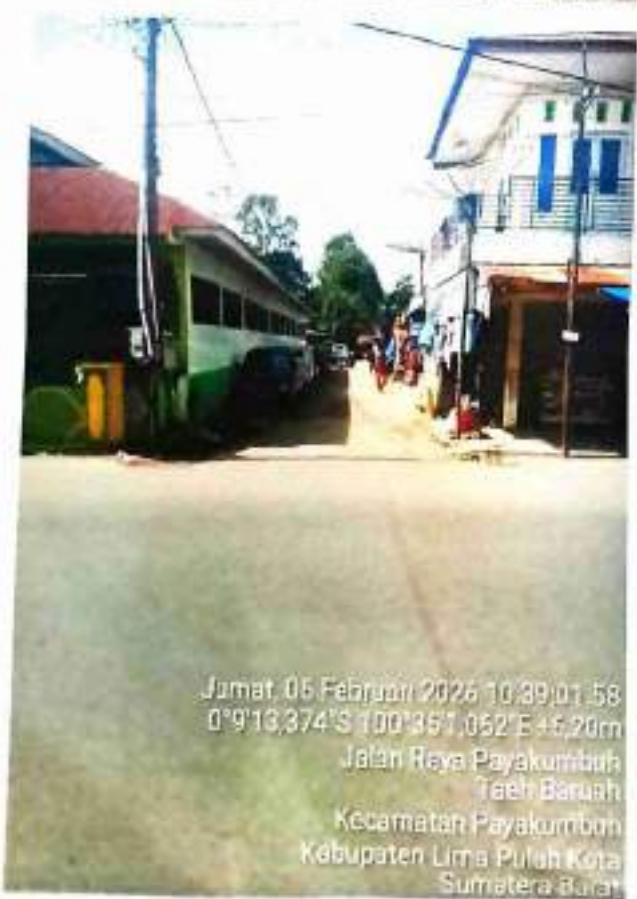




11 Feb 2026 16:32:31
0°10'25.1005947E
-191.5
Jalan Taeh Mungka
Taeh Baruah
Kecamatan Payakumbuh
Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumatera Barat
Altitude: 738.0m
Speed: 0 km/h
Jasi 54 Jorong Koto Kaciak, nagari nagari taeh baruah
Index number: 53



Jamat, 05 Februari 2026 10:35:55.72
0°8'59.02671, 100°34'51.1557E 42.00m
Taeh Baruah
Kecamatan Payakumbuh
Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumatera Barat



Jamat, 05 Februari 2026 10:39:01.58
0°9'13.374'S 100°36'1.052'E 45.20m
Jalan Raya Payakumbuh
Taeh Baruah
Kecamatan Payakumbuh
Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumatera Barat



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN HARAU

NAGARI SOLOK BIO-BIO

Jalan No. Kode Pos 26271 Telepon. Fak.
E-mail : Website :

**SURAT PERMOHONAN PEMASANGAN/PERBAIKAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM
(LPJU)**

Nomor : 145/ 29 /Pem-SBB/II/2026
Perihal : Permohonan Pemasangan/Perbaikan Lampu
Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Solok Bio-Bio, 25 Februari 2026
Kepada Yth. :
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb,
Dengan Hormat..

Melalui surat ini saya do'akan semoga Bapak/Ibuk selalu dalam lindunganNya dan sukses menjalankan aktifitas sehari-hari, Amin...

Melalui surat ini kami sampaikan permohonan kami, sehubungan dengan upaya meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan Masyarakat, khususnya dalam berkendara di malam hari serta meminimalisir rawan kriminalitas, kami Pemerintah Nagari Solok Bio Bio mengajukan permohonan pemasangan/perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Nagari Solok Bio Bio.





YAYASAN AKADEMI SURAU INDONESIA
SMP ISLAM DARUL HAKIM

Jalan Jurdil No. 4 Tengah Padang, Jorong Bumbang,
Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari
Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26250
Email: officialsmpislamdarulhakim@gmail.com

Situjuh Batua, 11 Maret 2026

Nomor : 004/SMPIDH/PERM/III/2026
Lampiran : 4 lembar
Perihal : Permohonan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tanjung Pati

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kondisi jalan di sekitar lingkungan SMP Islam Darul Hakim Situjuh Batua, khususnya pada akses jalan menuju sekolah yang masih minim penerangan pada malam hari, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memasang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di lokasi tersebut.

Adapun kondisi saat ini adalah:

1. Jalan menuju sekolah sering dilalui oleh siswa, guru, dan masyarakat sekitar.
2. Pada malam hari kondisi jalan cukup gelap sehingga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan serta mengurangi keamanan lingkungan.
3. Penerangan jalan sangat dibutuhkan terutama untuk menunjang aktivitas masyarakat dan kegiatan sekolah yang terkadang berlangsung hingga sore atau malam hari.

Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kiranya Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mempertimbangkan pemasangan beberapa titik lampu penerangan jalan di sekitar akses menuju SMP Islam Darul Hakim, Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

Adapun titik lokasi lampu yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

1. 1 titik di persimpangan jalan masuk utama ke SMP Islam Darul Hakim dari jalan Kabupaten
2. 3 titik sepanjang jalan arah SMP Islam Darul Hakim
3. 1 titik di depan SMP Islam Darul Hakim
4. 1 titik di jalan kawassan SMP Islam Darul Hakim

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar permohonan ini dapat dipertimbangkan dan direalisasikan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepala Sekolah SMP Islam Darul Hakim



Jasmeri, S.Pd

LAMPIRAN 1 (TITIK LOKASI PEMASANGAN LAMPU JALAN)

1. Titik 1 (persimpangan jalan masuk ke SMP Islam Darul Hakim dari jalan Kabupaten)



2. titik 2 (jalan arah SMP Islam Darul Hakim)



3. Titik 3 (jalan masuk SMP Islam Darul Hakim)



4. Titik 4 (jalan masuk SMP Islam Darul Hakim)



5. Titik 5 (depan SMP Islam Darul Hakim)



6. Titik 6 (jalan Kawasan SMP Islam Darul Hakim)





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Rawa Neera KM 8 Sariilamak Telp. 07521 7750560 Fax. 07521 7750291 Kode Pos 26271

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN

NO: 600.1.11.1/4303/3/DPK-LK/XI-2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permohonan Izin Operasional, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota memberi Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan, Kepada :

1. Nama	: SMP ISLAM DARUL HAKIM
2. Alamat	: Jln. Jurdil No. 4 Tengah Padang Jr. Bumbang Nagari Situjuh Batua Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota
2. NPSN	: -
3. NIB	: -
4. Nama Yayasan	: YAYASAN AKADEMI SURAU INDONESIA
5. Alamat Yayasan	: Situjuh Batua Desa/Kelurahan Situjuh Batua, Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota
6. Akta Pendirian	
• Notaris	: Rizky Rahmadani, SH, M.Kn
• SK Pengesahan Akta Yayasan	: 05.
• Tanggal Pengesahan	: 09 Agustus 2021
7. Akta Perubahan Nomor	
• Notaris	: UMMUL HUSNA, SH, MKn
• SK Pengesahan Akta Yayasan	: 05.-
• Tanggal Pengesahan	: 28 Juni 2023
8. Tahun Pendirian	: 2021
9. Masa Berlaku Izin	: Mulai Tanggal 17 November 2025 s.d 17 November 2028

Dengan ketentuan :

1. Izin Operasional ini diberikan selama lembaga tersebut memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis.
2. Izin ini dapat dicabut sewaktu-waktu apabila lembaga ini dianggap tidak memenuhi persyaratan dan atau melanggar ketentuan peraturan perundangan atau sesuai dengan perjanjian.
3. Lembaga ini bersedia dan sanggup melaksanakan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan izin operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya terimakasih.

Sariilamak, 17 November 2025



Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

AUFIAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 197612201995111001



YAYASAN AKADEMI SURAU INDONESIA
SMP ISLAM DARUL HAKIM

Jalan Jurdil No. 4 Tengah Padang, Jorong Bumbang,
Nagari Situjuh Batua, Kecamatan Situjuh Limo Nagari
Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26250
Email: officialsmislamdarulhakim@gmail.com

SURAT TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
No HP :

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____, telah menerima penyerahan dokumen _____ dari SMP Islam Darul Hakim dengan nomor surat/dokumen _____.

Adapun isi dan kelengkapan dokumen tersebut adalah:

- 1.
- 2.
- 3.

Dokumen tersebut diterima dalam keadaan baik dan lengkap untuk digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ Maret 2026

Yang menyerahkan

Yang menerima

(_____)

(_____)



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN PAYAKUMBUH
NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG

Sekretariat Jln. Koto Baru Simalanggang – Koto Tengah Simalanggang

Koto Baru, 16 Maret 2026

Nomor : 671 / 197 / Pem-2026
Lamp : -
Hal : **Mohon Menghidupkan Lampu**
Jalan

Kepada Yth :
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh
Kota
di-
Tanjung Pati

Dengan hormat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu untuk dapat melakukan pengecekan bahwa Lampu Jalan yang ada di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, ada yang tidak hidup lagi (mati). Diantaranya dari Simpang Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota sampai ke simpang Kuranji Nagari Guguak VIII Koto dan sekitar wilayah Jorong Tabek Panjang Nagari Koto Baru Simalanggang.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

A/n. Wali Nagari Koto Baru Simalanggang
Sekretaris Nagari



BUSTANUL ARIFIN

Tembusan disampaikan pada

- Yth : 1. DPRD Lima Puluh Kota
2. CAMAT Payakumbuh di Koto Baru Simalanggang
3. BAMUS Koto Baru Simalanggang
4. Arsip



LEMBAR DISPOSISI
PEMERINTAH KABUPATEN LIMPULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Ass T

Indeks : g-3-2026	Kode :	No. Urut : 435	Tgl. Penyelesaian :
----------------------	--------	-------------------	---------------------

Perihal
Isi Ringkas : Pengaturan lalu lintas jalan selama Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran tahun 2026/1447 Hijrah di provinsi Sumatera Barat

Asal Surat : Gubernur Sumatera Barat	Tanggal 6-3-2026	Nomor : SSO/86/nishub-SR/111/2026	Lampiran -
---	---------------------	--------------------------------------	---------------

Di ajukan / diteruskan	Instruksi / Informasi
<p>ya. Kadis hub akan diteruskan info ini ke masyarakat pihak terkait lainnya 29/3</p>	



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PENGUMUMAN

NOMOR : 550 / 06 / DISHUB-SB/III/2026

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS JALAN SELAMA ARUS MUDIK DAN ARUS BALIK ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2026/1447 HIJRIAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Berdasarkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Bina Marga dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : KP-DJRD 854 Tahun 2026, Nomor : HK.201/1/21/DJPL/2026, Nomor : Kep/43/II/2026, dan Nomor 20/KPTS/Db/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah, serta Rapat Forum Lalu Lintas tentang Rapat Persiapan Angkutan lebaran 2026, hari Senin, tanggal 02 Maret 2026, maka diumumkan kepada seluruh masyarakat/pengguna lalu lintas di Wilayah Provinsi Sumatera Barat bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas selama masa Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah.

Sehubungan hal tersebut diatas, pengaturan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik masa Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah dilakukan melalui :

1. Pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan dengan ketentuan :
 - a. Waktu Pengaturan Lalu Lintas diberlakukan mulai hari Jumat, 13 Maret 2026 pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB.
 - b. Diberlakukan pada ruas jalan :
 - 1) Padang - Solok - Kiliran Jao - Batas Provinsi Jambi (Kabupaten Dharmasraya) dan sebaliknya; dan
 - 2) Padang - Padang Panjang - Bukittinggi - Batas Provinsi Riau (Kabupaten Lima Puluh Kota) dan sebaliknya.
2. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan dan mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan minyak mentah sawit (CPO), hasil galian (tanah, pasir, batu), hasil tambang dan bahan bangunan.
3. Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hewan ternak, pupuk, bantuan korban bencana alam, dan barang pokok (beras, tepung terigu, tepung gandum, tepung tapioka, jagung, gula, sayur, buah-buahan, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan metega, susu, telur, garam, kedelai, bawang dan cabai)

4. Pemberlakuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Sistem Satu Arah (Oneway) Berbasis Waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemberlakuan Sistem Satu Arah (Oneway) Berbasis Waktu dilaksanakan pada periode sebelum dan setelah Hari Lebaran, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebelum Hari Lebaran, diberlakukan mulai hari Kamis, 19 Maret 2026 sampai dengan hari Jumat, 20 Maret 2026 (H-2 s/d H-1)
 - Setelah Hari Lebaran, diberlakukan mulai hari Minggu, 22 Maret 2026 sampai dengan Hari Selasa 24 Maret 2026 (H+1 s/d H+3)
 - Pelaksanaan Sistem Satu Arah (Oneway) Berbasis Waktu diberlakukan berdasarkan pembagian waktu sebagai berikut:
 - Pukul 10.00 - 14.00 WIB untuk arus Padang menuju Padang Panjang
 - Pukul 14.00 - 18.00 WIB untuk arus Padang Panjang menuju PadangPada setiap pergantian rentang waktu tersebut diterapkan *Clearance Time* (Waktu Steril), yaitu jeda waktu penghentian sementara arus kendaraan dari kedua arah untuk memastikan ruas jalan dalam kondisi kosong dan steril sebelum diberlakukan arus berikutnya
 - Sistem Satu Arah (Oneway) Berbasis Waktu diberlakukan untuk arus Padang - Padang Panjang Via Lembah Anai dan sebaliknya, dengan titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas di Kayu Tanam (Simpang Exit Tol Tarok City) dan Padang Panjang (Simpang Padang) sebagai batas segmen pelaksanaan rekayasa lalu lintas:
 - Ketentuan Sistem Satu Arah (Oneway) Berbasis Waktu dikecualikan terhadap kendaraan dengan tingkat *urgensi* tinggi terhadap kebutuhan masyarakat (kendaraan tangki Pertamina yang membawa BBM, pemadam kebakaran dan kendaraan ambulance) dengan pengawasan Polri.
5. Pembukaan jalur Lembah Anai dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam pada masa Angkutan Lebaran 2026, mulai hari Rabu, 11 Maret 2026 sampai dengan hari Selasa, 31 Maret 2026 (H-10 s/d H+10), baik pada saat pelaksanaan rekayasa lalu lintas sistem satu arah (one way) maupun di luar pelaksanaan one way. Pemberlakuan jalur tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan ringan roda 4 (R4) serta sepeda motor (R2).
6. Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian bersama dan terima kasih.

Dikeluarkan di Padang
Pada Tanggal, 06 Maret 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Negara Tanjung Pati Km. 7 Sarilamak Kode Pos 26271

Sarilamak, 2 April 2026

Nomor : 400.14.1.1/ 325 /1/DPK-LK/IV-2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Personil
Petugas Pengamanan Jalan**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tanjung Pati

Dengan hormat,
Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota akan melaksanakan peresmian gedung kantor baru pada :

Hari / Tanggal : Selasa/ 7 April 2026
Pukul : 07.30 WIB
Tempat : Gedung Kantor Baru Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan di Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak
Kecamatan Harau

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon kepada Saudara untuk dapat menugaskan Personil Petugas Pengamanan Jalan sebanyak 5 (lima) orang pada acara dimaksud.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuan Saudara terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota



ANTONI, S.Pd. M.Pd.T
NIP. 19710408 199512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ketinggian GOR Singa Harau, Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271,
Laman inspektorat.limapuluhkotakab.go.id, Pos-el inspektur@limapuluhkotakab.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR 700.1.2/29/INSP-LK/2026

I. Dasar :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Daerah Kabpaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 102 Tahun 2021 tentang kedudukan , Susunan Organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat;
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2017 Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
13. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 700/03/BUP-LK//2025 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025;
14. Keputusan Bupati Lima Puluh kota Nomor 700/440/BUP-LK//2025 tentang Penetapan Penyelenggara Negara, Pejabat/Pegawai Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota.

II. Ditugaskan kepada:

1. Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan monitoring / pendampingan wajib lapor LHKPN tahun 2025 dengan Susunan Personil sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP / PANGKAT/GOL	JABATAN	JUMLAH HARI
1	Irwandi, S.Sos, MM, CGCAE, CGRE	19660913 198603 1 009 Pembina Utama Muda / IV.c	Penanggung Jawab	12 Hari
2	Nuzul Firman, S.IP, M.Si	19780821 200501 1 009 Pembina Tk.I / IV.b	Wakil Penanggung Jawab	12 Hari
3	Yusrizal, SE, Ak. CA, CGRA	19750415 200803 1 001 Pembina Utama Muda / IV.c	Pengendali Teknis / Supervisor	12 Hari
4	Dewi Elfina, S.Pd., M.MPd	19811007 200801 2 011 Pembina / IV.a	Ketua Tim	12 Hari
5	Jhon Kenedi, S.Ak	19840706 201001 1 012 Penata Muda Tk.I / III.b	Anggota Tim	12 Hari
6	Zulfi Harioni, A.Md	19890710 202203 1 001 Pengatur / II.c	Anggota Tim	12 Hari
7	Has Chietha Vatie, ST	19922805 202506 2 003 Penata Muda / III.a	Anggota Tim	12 Hari
8.	M. Aulia Ichsan, ST	20000905 202506 1 002 Penata Muda / III.a	Anggota Tim	12 Hari

2. Objek : Wajib Lapor LHKPN
3. Jenis Pengawasan : Monitoring dan Pendampingan
4. Sasaran : Memastikan kepatuhan wajib lapor penyelenggara negara dalam melaporkan kekayaannya secara jujur, transparan, dan tepat waktu.
5. Masa yang di Monitoring : Tahun 2025
6. Monitoring dilakukan dengan rincian
 - a. Pelaksanaan : 27 Januari s/d 11 Februari 2026 (12 hari kerja)
 - b. Penyelesaian laporan : 12 s/d 13 Februari 2026

III. Kepada Pejabat/Instansi/Lembaga/Perorangan seta pihak terkait lainnya diharapkan bantuannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas ini.

IV. Kepada tim diminta melaksanakan tugas ini dengan baik secara efektif dan efisien.

V. Mohon untuk tidak memberi imbalan, hadiah, atau pemberian dalam bentuk apapun atas pelayanan yang kami berikan. Pelayanan terbaik adalah kewajiban kami, hasil pelayanan terbaik adalah hak anda.

Demikian untuk dilaksanakan

Sarilamak, 27 Januari 2026
Inspektur Daerah,



IRWANDI, S.Sos, M.M, CGCAE, CGRE

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.196609131986031009

Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 700/ **49** /BUP-LK/I/2026

TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARA NEGARA, PEJABAT/ PEGAWAI YANG WAJIB
MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pencegahan korupsi adalah melalui kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Pejabat/ Pegawai yang dinilai memiliki kerawanan korupsi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana Penyelenggara Negara, Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Kota wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENYELENGGARA NEGARA, PEJABAT/ PEGAWAI YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025.
- KESATU : Penyelenggara Negara, Pejabat/ Pegawai Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, dengan nama-nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Negara, Pejabat/ Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2025 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret 2026.
- KETIGA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pejabat/ Pegawai selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Pejabat/ Pegawai dapat disampaikan melalui e-LHKPN dan menyerahkan hard copy nya kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat tanggal 31 Maret 2026.
- KELIMA : Penyelenggara Negara, Pejabat/ Pegawai yang diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara diberikan sanksi atas ketidakpatuhan dan ketidakbenaran pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 700/ 49 /BUP-LK/1/2026
 TANGGAL : 8 JANUARI 2026
 TENTANG : PENETAPAN PENYELENGGARA NEGARA, PEJABAT/
 PEGAWAI YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA
 KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH
 KOTA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	SAFNI	BUPATI	KEPALA DAERAH
2	AHLUL BADRITO RESHA , SH, MM	WAKIL BUPATI	WAKIL KEPALA DAERAH
3	HERMAN AZMAR, A.P., M.Si.	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
4	ALFIAN, S.S.T.P., M.Si.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
5	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
6	WIN HARI ENDI, SE,MM	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
7	ADRIAN WAHYUDI, SH, MH	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMBANGUNAN, KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIAT DAERAH
8	SYUKRI ANDA, SH,MH	STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH
9	YULIA MASNA, M.M.Kes	STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DAERAH
10	IRWANDI, S.Sos, MM	INSPEKTUR DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH
11	AFRI EFENDI, S.PD.SD, MM	KEPALA DINAS	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
12	DRS AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.SI	KEPALA BADAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
13	Drs. DEDDY PERMANA, M.M.	KEPALA BADAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
14	AYU MITRIA FADRI, S.SI , M.MPd	KEPALA DINAS	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
15	DAVLI, S.Sos., M.Si.	KEPALA DINAS	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16	DIAN PERMATATI, ST, M.SE, Msc	KEPALA BADAN	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
17	ELSIWA FAJRI, S.STP	KEPALA DINAS	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
18	ENDRA AMZAR, SH	KEPALA DINAS	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

19	FERY CHOFA, S.H., LL.M	KEPALA DINAS	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
20	FIDDRIA FALA, A.P, M.Si.	KEPALA DINAS	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
21	Ir. INDRA SURIANI	KEPALA DINAS	DINAS SOSIAL
22	MOHAMMAD SISWANTO, S.Pi., M.Si.	KEPALA DINAS	DINAS PERIKANAN
23	Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si.	KEPALA DINAS	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
24	WILDA REFLITA, S.ST MM	KEPALA DINAS	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
25	WIRADINANTA. F, S.STP, M.Si	KEPALA DINAS	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
26	WITRA PORSEPWANDI, SPI	KEPALA DINAS	DINAS TANAMAN PANAGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
27	YUNIRE YUNIRMAN, ST.MSi	KEPALA DINAS	DINAS PANGAN
28	drh. DEVI KUSMIRA	KEPALA DINAS	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
29	MUHAMMAD DARMAWIJAYA, SH	KEPALA DINAS	DINAS PERHUBUNGAN
30	NOPRIYADI SYUKRI, ST.	KEPALA DINAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
31	ANETA BUDI PUTRA, AP, Msi	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD
32	RAHMADINOL, S.Pd	KEPALA SATUAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
33	dr. RATMI	DIREKTUR	RSUD DR. ACHMAD DARWIS
34	KHRIS LA DEVA, S.STP	KEPALA BAGIAN	SEKRETARIAT DPRD
35	RONNY MUHAMAD NUR, S.SOS, M.E	KEPALA BAGIAN	SEKRETARIAT DPRD
36	SUHERMAN, S.E.	KEPALA BAGIAN	SEKRETARIAT DPRD
37	OKA PRASETIA LUBIS, ST	KEPALA BAGIAN	SEKRETARIAT DPRD
38	ANDRI YASMEN, S.Sos.	KEPALA BAGIAN	SEKRETARIAT DAERAH
39	Dra. LINA MEDONA, M.M.	KEPALA BAGIAN	SEKRETARIAT DAERAH
40	MUHAMMAD ABRAR, S.Sos	KEPALA BAGIAN	SEKRETARIAT DAERAH
41	SYUKRALDI ARLEN, S.PD.SD	KEPALA BAGIAN	SEKRETARIAT DAERAH
42	YUZA VANTORI SAKTI, S.SOS	SEKRETARIS	INSPEKTORAT DAERAH
43	ARIFFADILLAH, SE	INSPEKTUR PEMBANTU	INSPEKTORAT DAERAH
44	ELFITRIA, A.P.	INSPEKTUR PEMBANTU	INSPEKTORAT DAERAH
45	NUZUL FIRMAN, S.IP, M.Si	INSPEKTUR PEMBANTU	INSPEKTORAT DAERAH
46	RICKY EDWAR, S.Sos.	INSPEKTUR PEMBANTU	INSPEKTORAT DAERAH
47	NOFRIZEN, S.T	DIREKTUR UTAMA	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LUAK NAN BUNGSU
48	LINDAWATI	KEPALA BAGIAN	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LUAK NAN BUNGSU
49	NOVIARDI, ST	KEPALA BAGIAN	PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA LUAK NAN BUNGSU

50	AGUS PURWANTO, S.KOM	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
51	ANDRIALDI, S.T.	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
52	BAYU ANGGARA, SE	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
53	DAS APRIYUL PUTRA, S.Sos.	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
54	DESI ARISANTI, SE	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
55	DIO APRI MAISYA, ST	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
56	DIO SEPTIAWAN, SE	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
57	HAFIZUL IHSAN, A.MD.T	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
58	IHSAN KEMAL, SE	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
59	IRMA SURYANI, SE	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
60	IVA AMELYA PUTRI, SE	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
61	IZA NUDIA, S.T.	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
62	JHON KENEDI, S.Ak	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
63	MAISYA RAHMI, SE	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
64	NADIATI, SE	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
65	NASVI YARDI, SE M.SI	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
66	NOVIOLA WULANDARI, SE	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
67	NOVYARDI SAMRY, A.Md.	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
68	RAHMA DEWI, S,S, M.PA	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
69	RAHMI AWALUL MASHA, A.Md.T	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
70	RANI ZULFATRINO, A.MD	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
71	RENI ZA NATALYA, S.Sos	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
72	RESYA REGINA HADI, SE	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
73	REZYAND BICDWIGA, ST	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
74	RIO PRESTO MALPEN, ST	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
75	RIZA FEBRI, SE	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
76	SARNELLI, S.Sos.	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
77	SRI FEBRYENI, ST	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
78	TRI DIA HAPSARI, SE	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
79	TRI OKTARINA, S.E	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
80	WEDSY EFRIWATI, A.Md	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
81	WIRA JUITA, S.Sos	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
82	WIRA LOVERIANTI, SH	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
83	YOSI ANHAR, A.MD	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
84	YUDA OKTRINI, SE	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
85	YULFINA, S.IP	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
86	YUSRIZAL, S.E., Ak.,CA	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
87	ZULFI HARIONI, A.MD	AUDITOR	INSPEKTORAT DAERAH
88	ALDESRA, SKM	PPUPD	INSPEKTORAT DAERAH
89	ASIH INSANI, S.Tr.I.P	PPUPD	INSPEKTORAT DAERAH
90	DEWI ELFINA, S.PD	PPUPD	INSPEKTORAT DAERAH
91	Drs. EDWIN MUHAMAD SAPUTRA, M.Si	PPUPD	INSPEKTORAT DAERAH
92	ELITA YANTI HUTAPEA, SKM	PPUPD	INSPEKTORAT DAERAH
93	HERMANSYAH, S,SOS	PPUPD	INSPEKTORAT DAERAH
94	INDAH SUCI ANI, SE	PPUPD	INSPEKTORAT DAERAH
95	MOHD. ALI AKBAR, SKM	PPUPD	INSPEKTORAT DAERAH
96	SAPRONI, SE	PPUPD	INSPEKTORAT DAERAH
97	YESI ASISTA, S,SOS	PPUPD	INSPEKTORAT DAERAH
98	ZAIMAR HAKIM, SH	PPUPD	INSPEKTORAT DAERAH
99	ZAINUL ASMI, ST, M.SC	PPUPD	INSPEKTORAT DAERAH
100	ZULNAIDI, S.P., M.Si.	PPUPD	INSPEKTORAT DAERAH

101	AULIA JENICA G	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
102	DELTA REZKI, ST	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
103	DINDA RAHMI PUTRI	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
104	ENGGA PRIMA PUTRA, S.T	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
105	FATHIN RA'ID	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
106	HENDRA PERMANA, S.SOS	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
107	JUSLINARTI, ST	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
108	NELSI	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
109	RAHMI PRAMETA	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
110	RAHMI WAHYUNI	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
111	RENI FITRI, S.SI M.SI	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
112	SYUKRI BADRI, S.SOS	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
113	RIZKY GUSRIDEL	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
114	RUDI FEBRIAN	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
115	YEZI AFRIYATI	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)	SEKRETARIAT DAERAH
116	BOBBY IRWANTO, SE	SEKRETARIS	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
117	Drs. AIMEL NAZRA, M.Si	SEKRETARIS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
118	RIFKI SATRIA, ST	SEKRETARIS	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
119	ISMAWARNI, S.SOS	SEKRETARIS	DINAS SOSIAL
120	ORLANDA, ST. MT	SEKRETARIS	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
121	ANTON	KEPALA BIDANG	RSUD DR. ACHMAD DARWIS
122	ALI HASAN	KEPALA BIDANG	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
123	ELSI RISALMA PUTERI	KEPALA BIDANG	DINAS KESEHATAN
124	DR. ERDISON	KEPALA BIDANG	DINAS KESEHATAN
125	IRWAN FAIZAL, SKM	KEPALA BIDANG	DINAS KESEHATAN

126	MUHAMMAD RIZAL	KEPALA BIDANG	RSUD DR. ACHMAD DARWIS
127	NELDAWATI	KEPALA BIDANG	DINAS KESEHATAN
128	HARRY WIRYATAMA ARMA	KEPALA BIDANG	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
129	ANA KARINA, S.H	KEPALA BIDANG	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
130	WIWING NOFRI, SE, MM	KEPALA BIDANG	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
131	ENDRI MULYADI, ST, M.T.	KEPALA BIDANG	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
132	HARNIETI, S.PD, M.PD	KEPALA BIDANG	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
133	YOLLANDA FERRY	KEPALA BIDANG	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
134	JONI INDRA	KEPALA BIDANG	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
135	FAHMIRIDHO. MZ, SKM	KEPALA BIDANG	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
136	SUSI NOFIANTI, SKM	KEPALA BIDANG	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
137	WIRAWATI	KEPALA BIDANG	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
138	ASRULSYAH	KEPALA BIDANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
139	FERRI YULIAN	KEPALA BIDANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
140	RISMAN, ST	KEPALA BIDANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
141	SALMAN, S.T.,M.H	KEPALA BIDANG	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
142	DHARMA HERI PUTRA	KEPALA BIDANG	DINAS SOSIAL
143	WANDI PUTRA	KEPALA BIDANG	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
144	FATMA NOVITA, ST	KEPALA BIDANG	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
145	RAHMAT FAJRI, S.H.,M.M	KEPALA BIDANG	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
146	ICHWAN HAFNI	KEPALA BIDANG	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
147	NINING EKA FITRIA, S.H	KEPALA BIDANG	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
148	ROZA EMILDAWATI, S.PI	KEPALA BIDANG	DINAS PERIKANAN
149	YULVA ROZA	KEPALA BIDANG	RSUD DR. ACHMAD DARWIS
150	ADITIYA PUTRA WIDARMA, S.STP	SUB PROTOKOLER	SEKRETARIAT DAERAH
151	INDAH SUSANTI	SUB RUMAH TANGGA	SEKRETARIAT DAERAH
152	IRMAN SUHITA	SUB PERLENGKAPAN	SEKRETARIAT DAERAH

153	YOLLA DESVIRA, S.SOS	SUB KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
154	SRI YANTI HANDAYANI	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SEKRETARIAT DAERAH
155	MAIKALSUM, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
156	YUNITA DELANI	KEPALA SUB BAGIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
157	ILDA NOVITA	KEPALA SUB BAGIAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
158	DEVI RAHMADINI, A.Md	KEPALA SUB BAGIAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
159	SUSI NAFIARTI	KEPALA SUB BAGIAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
160	AR EDO SAMARA	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS PERHUBUNGAN
161	MADHUMITA	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
162	HASANATUL HAYATI S.PSI	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
163	FEBLA TRIANA	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
164	YUNI ASTRI, A.MD	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
165	WILDAYATI	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
166	MISBAH FAUZI	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
167	DINA AGUSTINA, A.Md.	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
168	LUCKY SETIAWAN, S.PAR	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
169	NURLAILI	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
170	EKA YULIA FAJAR RIANTI, SH	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
171	DESMAWATI	KEPALA SUB BAGIAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
172	HENDRI PUTRA, SKM	KEPALA SUB BAGIAN	RSUD DR. ACHMAD DARWIS
173	NELWATI	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
174	NOVRI YOGA	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
175	ADMAL	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS PERIKANAN
176	MARTA ALDILA	KEPALA SUB BAGIAN	DINAS PANGAN
177	NURANITA, SKM	SUB UMUM DAN HUMAS	RSUD DR. ACHMAD DARWIS
178	DEWI ERIZANDI	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS BANJA LAWEH
179	DINA LUCIA VERMANA	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS PILADANG
180	ERMALIFIA NORA	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS HALABAN

181	FEBRIANDI	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS TANJUNG PATI
182	HADI OKTAFIANO	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS BARUAH GUNUANG
183	IMRIZAL	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS GUNUANG MALINTANG
184	LELY EKARITA	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS DANGUNG- DANGUNG
185	MEILITA WISE UTAMI	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS MUNGO
186	NADYA PRATIWI UTAMI	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS SIALANG
187	PARTI YASMI , S.ST, BD	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS PAKAN RABAA
188	PUTRI NILAM SARI NAZIR	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS MUARO PAITI
189	RENY HESTUTI	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS KOTO TINGGI
190	SILVIA ROSJA	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS SITUJUAH
191	TRI MUJIATI	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS TARAM
192	TUTI DWI PUTRI	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS PANGKALAN
193	YANTI SUSILOWATI	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS SULIKI
194	YOBI SYUMARTA	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS PADANG KANDIS
195	YON APRIANTO	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS MAEK
196	YUFLIDA, SP	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS MUNGKA
197	drg. YULIA ROZI PERWITA	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS KOTO BARU SIMALANGGANG
198	MASRIL	KEPALA UPTD PUSKESMAS	PUSKESMAS BATU HAMPAR
199	ABDI RIZKI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS PANGKALAN
200	ARVANIDA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS BANJA LAWEH
201	AULIA REIHAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS PADANG KANDIS
202	FATMA HASVARINA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS SIALANG
203	FELANI MUCHLIS, AMD.KEB	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS BATU HAMPAR
204	FITRI AYU RAMADONA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS PAKAN RABAA
205	HANIFA RIZKI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS KOTO BARU SIMALANGGANG
206	IGA YOLANDA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS DANGUNG- DANGUNG
207	IVVA YUNITA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS BARUAH GUNUANG
208	LUSTIAWATI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS SITUJUAH
209	MAULIDYA RAHMI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS MUNGKA
210	MERI ARNILAWATI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS MAEK

211	MERI RAHMI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS GUNUANG MALINTANG
212	NICE FORESA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS PILADANG
213	RAHMA YANI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS MUARO PAITI
214	RAHMAWATI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS TARAM
215	RIFKI SYAIFA	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS KOTO TINGGI
216	RURY FITRIANA, A	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS TANJUNG PATI
217	SHAFIRA FAUZIAH	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS SULIKI
218	SILFIA APRIYANTI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS HALABAN
219	WILDA NUGRAHMI	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PUSKESMAS MUNGO
220	RAHMAD SANTOSO	KEPALA SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
221	TOLAN , SPD. GR	KEPALA SEKOLAH	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
222	ADRI YANTO	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SULIKI
223	ALEX ACHMADI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SARIAK LAWEH
224	ALFIS	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SITUJUAH GADANG
225	ANA LESTARI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI RIMBANG
226	ANDI ALTONI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI TANJUANG BALIK
227	APRIONAL	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI BARUAH GUNUANG
228	ASRA ARAFAT	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI BATUHAMPAR
229	ASRIZAL	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI AMPALU
230	BENI EKA PUTERA	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI KURAI
231	BUDI MARGANA	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI BUKIK SIKUMPA
232	DALPEN APERTA	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI TANJUANG PAUH
233	DARMISATA	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI PIOBANG
234	DASRIL SYOFIADI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI BATU BALANG
235	DEDI HENIDAL	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI BALANTIAK
236	DEVI SURYA	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI PANDAM GADANG
237	DIAN DAVID	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI TALANG
238	DION ISNAINI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI KOTO TUO
239	DODI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI BUKIK LIMBUKU
240	EDISON	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI PAUH SANGIK
241	EFRIZAL HENDRI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI MAEK
242	EKO SUSMADI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI DURIAN TINGGI
243	EMIL NOVRI IRSYAN	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SITUJUAH BATUA
244	ENDI REFLI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI PILUBANG

245	EPI ADRI, SKM, M.MKES	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI MUNGKA
246	EVA MARIA DIRBAS	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI BATU PAYUANG
247	FADLI. K	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI KOTO BANGUN
248	FELLIADI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SIMPANG KAPUAK
249	GUSFIALDI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI ANDIANG
250	H. ZAMHAR	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI TANJUANG GADANG
251	HARDIMUS	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI TAEH BUKIK
252	HARDISON	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SITANANG
253	HARIZAL	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI NANIANG
254	HASRUL	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI TAEH BARUAH
255	HENDRA M	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI KOTO TANGAH SIMALANGGANG
256	HERI NELSON	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI KUBANG
257	IDRIS	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI BALAI PANJANG
258	INSANUL RIJAL	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI KOTO TINGGI
259	IRMAN	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI GURUN
260	IRWANUL FUAD	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SUAYAN
261	ISRAL	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI KAMUYANG
262	JASRIL	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI JOPANG MANGANTI
263	JHON HENDRA	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI LUBUAK ALAI
264	KHAIRUL HADI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI LABUAK GUNUANG
265	LAKON SISKA	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SITUJUAH BANDA DALAM
266	LISMAN	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI KOTO LAMO
267	LUKMAN HAKIM	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI BERINGIN
268	M. FAKHRURAZI, SH	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI HALABAN
269	M. YUNUS	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SOLOK BIO-BIO
270	MALKISRAN	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SIMPANG SUGIRAN
271	MARSIS	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI MUARO PAITI
272	MAWARDI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH
273	MUHAMMAD SUHARDI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI MUNGO
274	MULYADI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI GUGUAK VIII KOTO
275	NANANG ANWAR	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI TARAM
276	NANDA. S	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI DURIAN GADANG
277	NOFRIZAL	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI TANJUANG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG
278	Drs. NOVIARDI, Apt.	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI MANGGILANG

279	NUSDA ANANDES	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI TALANG ANAU
280	OLLY WIJAYA	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SARILAMAK
281	RAFLES	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI ANTUAN
282	RAIS	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SIALANG
283	REZKI YUANDA PUTRA	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG
284	RIFDAL	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI PANGKALAN
285	RIKI FRIZAL SAPUTRA	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI TALANG MAUA
286	SUDAHRI. S	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI TARANTANG
287	SULMARNI, S.A.P	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI KOTO ALAM
288	SYAIFUL WAHID	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI ANDALEH
289	SYAMSUL AKMAL. A	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI KOTO TANGAH BATU HAMPA
290	SYUKRIANDI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI HARAU
291	WENDRIADI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI GALUGUA
292	WIDO PUTRA	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI GUNUANG MALINTANG
293	YEFRIANDI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARITANJUANG BUNGO
294	YON ELVI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI LUBUAK BATINGKOK
295	YON HENDRI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI VII KOTO TALAGO
296	YONDRIVEL	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI SIMALANGGANG
297	YONEFRI	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI BANJA LOWEH
298	YORI NOVIOLA	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI LIMBANANG
299	YULIZAR	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI KOTO TANGAH
300	YUSRIZAL	WALI NAGARI	PEMERINTAH NAGARI TUNGKA
301	IDRUS SYAH	AJUDAN BUPATI	SEKRETARIAT DAERAH
302	YULIA DEFIRA	AJUDAN BUPATI	SEKRETARIAT DAERAH
303	MUHAMMAD HAKIKI	AJUDAN WAKIL BUPATI	SEKRETARIAT DAERAH



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**LAPORAN HASIL EVALUASI DAN PENDAMPINGAN
TERHADAP PENILAIAN RISIKO KECURANGAN/
FRAUD RISK ASSESSMENT (FRA)
DINAS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026**

NOMOR : 700.1.2.1/456/INSP-LK/LHP/2025

TANGGAL : 31 DESEMBER 2025



Nomor : 700.1.2.1/456/INSP-LK/LHP/2025
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi dan Pendampingan terhadap Penilaian Risiko Kecurangan/Fraud Risk Assessment (FRA) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2026.

Sariamak, 31 Desember 2025

Kepada Yth :
Kepala Dinas Perhubungan
di
Sariamak

Dengan ini disampaikan kepada Saudara laporan hasil Evaluasi dan Pendampingan terhadap Penilaian Risiko Kecurangan/Fraud Risk Assessment (FRA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

I. INFORMASI UMUM

A. Dasar Pelaksanaan Monitoring/Pemantauan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
2. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kecurangan.
3. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
4. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 700/3/BUP-LK/2025 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025;
7. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 700/233/BUP-LK/VIII/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Risiko Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 700.1.2/393/INSP-LK/2025.

B. Tujuan Pendampingan dan Evaluasi

Memberikan pendampingan Perangkat Daerah dalam penyusunan kerangka kerja penilaian mandiri risiko kecurangan dan menyusun rencana tindak pengendalian risiko kecurangan secara mandiri, yang meliputi identifikasi risiko kecurangan, analisis kemungkinan terjadinya risiko kecurangan dan dampak risiko kecurangan serta respon terhadap risiko kecurangan dengan melakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri dan memberikan pendapat terbaik kepada Perangkat Daerah agar dapat mengidentifikasi area rawan kecurangan dan menilai tingkat kecurangan sehingga perangkat daerah dapat menentukan prioritas pengendalian risiko kecurangan dan mencegah kerugian sejak dini.

C. Objek Pendampingan dan Evaluasi

Objek Pendampingan dan Evaluasi adalah Dinas Perhubungan sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan Program Strategis Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, diantaranya:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

D. Sasaran Pendampingan dan Evaluasi

Pemahaman perangkat daerah dalam penyusunan kertas kerja Penilaian secara Mandiri Risiko Kecurangan dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Kecurangan yang terkait langsung dengan program-program strategis Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Ruang Lingkup Pendampingan dan Evaluasi

Ruang lingkup Pendampingan dan Evaluasi ini adalah mendampingi Perangkat Daerah dalam pengisian Kertas Kerja Penilaian secara mandiri Risiko Kecurangan dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Kecurangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu perangkat daerah yang terkait langsung dengan program-program strategis pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.

F. Pola Pelaporan

Laporan Hasil Pendampingan disajikan dalam bentuk Surat.

G. Susunan Tim

Susunan Tim Evaluasi/Pendampingan penilaian Risiko Kecurangan, sebagai berikut:

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggungjawab	Inwandi, Sos, MM, CGCAE, CGRE
2	Wakil Penanggungjawab	Nurul Firman, S.IP, M.Si
3	Pengendali Teknis	Zamar Hakim, SH
4	Ketua Tim	Das Apriyul Putra, S. Sos
5	Anggota	Agus Purwanto, S. Kom
6	Anggota	Azwirman, SKM
7	Anggota	Jhon Kenedi, S. W

H. Jadwal Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi

Jadwal pelaksanaan pendampingan dan evaluasi dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 31 Desember 2025 (7 hari kerja).

II. Hasil Pendampingan dan Evaluasi

Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.

Penilaian risiko kecurangan/Fraud Risk Assessment (FRA) adalah proses terstruktur dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisa dan memprioritaskan risiko kecurangan dalam suatu organisasi perangkat daerah agar dapat menetapkan pengendalian yang tepat untuk mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan.

Terdapat beberapa alasan penting, mengapa perlu menerapkan penilaian risiko kecurangan/Fraud Risk Assessment (FRA), yaitu:

1. FRA menghasilkan peta risiko kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif;
2. FRA merupakan instrumen deteksi dini risiko kecurangan serta sebagai sarana analisis dan evaluasi kelemahan-kelemahan program pencegahan sehingga dapat menjawab dan mencari solusi atas kecurangan-kecurangan yang masih terjadi.

Selain perannya dalam mendukung pencapaian tujuan pengendalian intern, menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) sebagai organisasi anti kecurangan terbesar di dunia, FRA perlu diterapkan oleh instansi pemerintah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap organisasi selalu memiliki risiko kecurangan;
2. Mengidentifikasi aktivitas yang paling rentan terhadap kecurangan;
3. Mengetahui pihak yang menyebabkan organisasi mempunyai risiko terbesar;

4. Membuat perencanaan untuk memitigasi risiko;
5. Melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian;
6. Meningkatkan komunikasi dan kepedulian terhadap kecurangan;
7. Mematuhi peraturan dan standar profesi yang ada.

Penilaian risiko kecurangan pada instansi pemerintah dilakukan dengan tingkatan sebagai berikut:

1. **Strategis** yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab menteri, kepala lembaga, gubernur atau bupati/walikota;
2. **Organisasional** yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon I dan Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan);
3. **Operasional** yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

Hasil Evaluasi dan Pendampingan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Penilaian Risiko Kecurangan dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Kecurangan secara mandiri pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 terdapat 7 (tujuh) skenario kecurangan dan dipandang perlu melakukan beberapa perbaikan, penambahan dan penyempurnaan terhadap FRA yang telah dibuat antara lain :

1. Pada Aspek/Tahapan Kegiatan "**Perencanaan dan Penganggaran**" yaitu pada :
 - a. Pemilik Risiko perlu penambahan "**tim penyusunan anggaran**".
 - b. Penyebab perlu penambahan "**Program dan kegiatan yang tingkat urgennya lebih rendah namun tetap dilaksanakan karena adanya kepentingan**".
 - c. Respon terhadap Risiko Kecurangan perlu penambahan "**Membuat regulasi yang jelas agar program dan kegiatan yang telah terencana dan telah diprioritaskan dari awal**".
2. Pada Aspek/Tahapan Kegiatan "**Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)**" yaitu pada :
 - a. Pemilik Risiko perlu penambahan "**tim petugas uji**".
 - b. Penyebab perlu penambahan "**(1) Petugas uji KIR belum sepenuhnya mentaati aturan yang berlaku (2) Pelanggan KIR melakukan praktek suap dan sejenisnya**".
 - c. Respon terhadap Risiko Kecurangan perlu penambahan "**(1) Memberikan sanksi bagi petugas uji KIR apabila melanggar aturan (2) Melaksanakan**".

Imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan praktek-praktek suap dan sejenisnya melalui media sosial, spanduk, banner dan lain sebagainya".

3. Pada Aspek/Tahap Kegiatan "**Pengelolaan Parkir**" yaitu pada :
 - a. Pemilik Risiko perlu penambahan "**Petugas parkir dan koordinator lapangan**".
 - b. Penyebab perlu penambahan "**Belum adanya SOP yang mengatur tentang tata kelola perparkiran**".
 - c. Respon terhadap Risiko Kecurangan perlu penambahan "**Membuat SOP yang mengatur tentang tata kelola perparkiran**".

Untuk Penilaian Risiko Kecurangan dan Respon terhadap Risiko Kecurangan Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota secara keseluruhan dapat disajikan *sebagaimana terlampir*.

III. Catatan dan Saran

a. Catatan

Berdasarkan hasil Evaluasi/Pendampingan yang dilakukan oleh tim Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat beberapa catatan yang perlu untuk perbaikan, penambahan yaitu belum semua kategori klasifikasi kecurangan yang dilakukan penilaian risiko kecurangan pada Dinas Perhubungan.

Hal ini belum memenuhi maksud dari Peraturan Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Deputy Investigasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penilaian Risiko Lampiran BAB II huruf E. Kecurangan/ Fraud di Sektor Pemerintahan yang menyatakan bahwa Berdasarkan klasifikasi kecurangan menurut ACFE, ada tiga kategori kecurangan yaitu:

1. Kesalahan pencatatan laporan keuangan;
2. Penyalahgunaan aset; dan
3. Korupsi.

b. Saran

Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menyarankan kepada Kepala Dinas Perhubungan agar :

1. Melengkapi penilaian risiko kecurangan pada Aspek/Tahap Kegiatan "**Kesalahan Pencatatan Laporan Keuangan**".
2. Menambahkan beberapa perbaikan, penambahan dan penyempurnaan terhadap Kecurangan/Fraud Risk Assessment (FRA) sesuai dengan hasil Evaluasi dan Pendampingan dari Tim Inspektorat Daerah.

Demikian laporan Hasil pendampingan dan evaluasi penilaian risiko kecurangan pada Dinas Perhubungan Tahun 2026 ini disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.



INSPEKTUR DAERAH
IRWANI S. S. S. MM, CGCAE, CGRE
Pembina Utama Muda/NIP. 19660913 198603 1 009

RAHASIA

No	Nama & Tanggal Kegiatan	Tempat/Tempat Kegiatan	Isi Materi/Kejuruan	Indikator	Penilaian	Penyediaan	Indikator Kegiatan/Aspek	Aliran/Orang	Penyediaan yang Tidak Ada	Nilai	Nilai	Nilai	Aspek/Urutan/Tempat Kegiatan
1										10	10	10	
2										10	10	10	
3										10	10	10	
4										10	10	10	
5										10	10	10	
6										10	10	10	
7										10	10	10	
8										10	10	10	
9										10	10	10	
10										10	10	10	
11										10	10	10	
12										10	10	10	
13										10	10	10	
14										10	10	10	
15										10	10	10	
16										10	10	10	
17										10	10	10	
18										10	10	10	
19										10	10	10	
20										10	10	10	
21										10	10	10	
22										10	10	10	
23										10	10	10	
24										10	10	10	
25										10	10	10	
26										10	10	10	
27										10	10	10	
28										10	10	10	
29										10	10	10	
30										10	10	10	
31										10	10	10	
32										10	10	10	
33										10	10	10	
34										10	10	10	
35										10	10	10	
36										10	10	10	
37										10	10	10	
38										10	10	10	
39										10	10	10	
40										10	10	10	
41										10	10	10	
42										10	10	10	
43										10	10	10	
44										10	10	10	
45										10	10	10	
46										10	10	10	
47										10	10	10	
48										10	10	10	
49										10	10	10	
50										10	10	10	

RAHASIA

No	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
	1. Berupa/berbentuk...	2. Berupa/berbentuk...	3. Berupa/berbentuk...	4. Berupa/berbentuk...	5. Berupa/berbentuk...	6. Berupa/berbentuk...	7. Berupa/berbentuk...	8. Berupa/berbentuk...	9. Berupa/berbentuk...





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau Jl. Raya Negara KM.10 Sarilamak 26271

Sarilamak, 25 Februari 2026

Nomor : 100.1.6.1/060/Pem/II/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Perihal : Jadwal Reviu LPPD Tahun 2025.
Kepada Yth:
Kepala Perangkat Daerah (terlampir)

di

tempat

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor 700.1.2/59/INSP-LK/2026 tanggal 23 Februari 2026, bahwa Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota akan melakukan Reviu terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis s/d Jum'at/ 26 Februari - 6 Maret 2026

Pukul : (jadwal terlampir)

Tempat : Ruang Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lima Puluh Kota

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon kepada Saudara menugaskan Pejabat yang melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Reviu tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH



HERMAN AZMAR, AP, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 197309131993111001

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

- Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan) di Sarilamak

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nomor : 100.1.6.1/ 060 /Pem/II/2026
 Tanggal : 25 Februari 2026
 Perihal : Jadwal Reviu LPPD Tahun 2025

JADWAL REVIU LPPD TAHUN 2025

No.	Hari/tanggal/jam	PD	URUSAN	Tim Reviu
1.	Kamis /26 Februari 2026 09.00 Wib s/d 10.30 Wib	1. DLHPRP	Perumahan Rakyat Lingkungan Hidup	Saproni, SE Deril Nurzafti,S.IP
		2. Dinas Perikanan	Perikanan dan Kelautan	Tri Dia Hapsari, SE Dizza Yolanda, SE
		3. Satpol PP	Trantibumlinmas	Aldesra, SKM Asih Insani, S.Tr.IP
	13.30 Wib s/d 14.30 Wib	4. DP2KBP3A	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Saproni, SE Deril Nurzafti,S.IP
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		5. Disparpora	Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata	Tri Dia Hapsari, SE Dizza Yolanda, SE
2.	Jum,at/27 Februari 2026 09.00 Wib s/d 10.30 Wib	6. BPBD	Trantibumlinmas	Aldesra, SKM Asih Insani, S.Tr.IP
		7. Dinas Damkar	Trantibumlinmas	Saproni, SE Deril Nurzafti,S.IP
		8. Dinas Pangan	Pangan	Tri Dia Hapsari, SE Dizza Yolanda, SE
	10.30 Wib s/d 11.30 Wib	9. DPMPTSP	Penanaman Modal	Aldesra, SKM Asih Insani, S.Tr.IP
		10. Setwan	Bid. Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Saproni, SE Deril Nurzafti,S.IP
	11. Dinas Sosial	Sosial	Tri Dia Hapsari, SE Dizza Yolanda, SE	

		12. Dinas Kominfo	Komunikasi dan Informatika	Aldesra, SKM Asih Insani, S.Tr.IP
			Statistik	
			Persandian	
	13.30 Wib s/d 14.30 Wib	13. Dispusip	Perpustakaan	Saproni, SE
			Kearsipan	Deril Nurzafti,S.IP
		14. Disdukcapil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tri Dia Hapsari, SE Dizza Yolanda, SE
3.	Senin/2 Maret 2026 09.00 Wib s/d 10.30 Wib	15. Dinas PUPR	Pekerjaan Umum	Saproni, SE Deril Nurzafti,S.IP
			Pertanahan	
		16. Distanhortbun	Pertanian	Aldesra, SKM Asih Insani, S.Tr.IP
		17. BKPSDM	Bid. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Tri Dia Hapsari, SE Dizza Yolanda, SE
	10.30 Wib s/d 11.30	18. DPMDN	Pemberdayaan Masyarakat	Saproni, SE Deril Nurzafti,S.IP
		19. Disnakeswan	Pertanian	Tri Dia Hapsari, SE Dizza Yolanda, SE
		20. Inspektorat Daerah	Bid. Pengawasan	Aldesra, SKM Asih Insani, S.Tr.IP
	13.30 Wib s/d 13.30 Wib	21. Dinas Perhubungan	Perhubungan	Saproni, SE Deril Nurzafti,S.IP
		22. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan	Tri Dia Hapsari, SE Dizza Yolanda, SE
4.	Selasa/ 3 Maret 2026 09.00 Wib s/d 10.30 Wib	23. Bagian PBJ	Bid. Pengadaan	Saproni, SE Deril Nurzafti,S.IP
		24. Dinas Pendidikan	Pendidikan Kebudayaan	Tri Dia Hapsari, SE Dizza Yolanda, SE
	10.30 Wib s/d 11.30 Wib	25. Dinas Kesehatan	Kesehatan	Aldesra, SKM Asih Insani, S.Tr.IP

		26. BPKPD	Bid. Keuangan	Saproni, SE
			Bid. Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Deril Nurzafti,S.IP
	13.30 Wib s/d 14.30	27. Bagian Organisasi	Bid. Pelayanan Publik	Aldesra, SKM Asih Insani, S.Tr.IP
5.	Rabu/4 Maret 2026 09.00 Wib s/d 10.30 Wib	Bapelitbangda	Bid. Perencanaan	Saproni, SE
			Bid. Penelitian dan Pengembangan	Deril Nurzafti,S.IP
		Disperinaker	Tenaga Kerja	Tri Dia Hapsari, SE
			Perindustrian	Dizza Yolanda, SE
6.	4 s/d 6 Maret 2026	Verifikasi Ulang Perbaikan LPPD 2025 (bagi PD yang perbaikan)		



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

Bukit Limau Jalan Raya Negara Km. 10 Sarilamak, Provinsi Sumatera Barat
Telp. (0752) 7750503 Faks. (052) 7750494 – 7750495
Email: kab50kota@gmail.com Website: www.limapuluhkota.go.id

Sarilamak, 9 Februari 2026

Nomor : 000.7/73/Bappelitbangda-LK/II/2026
Sifat : PENTING
Lamp : 3 (tiga) berkas
Hal : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Kegiatan Kabupaten Sehat Tahun 2027

Yth. Sdr/i Kepala Perangkat Daerah

(Daftar Terlampir)

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah yang juga mendukung terlaksananya program-program nasional.
2. Untuk mengoptimalkan pencapaian target indikator 9 (sembilan) tatanan Kabupaten Sehat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Perangkat Daerah agar memprioritaskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang capaian target indikator tatanan Kabupaten Sehatnya belum tercapai atau belum terpenuhi (Lampiran II).
3. Sehubungan dengan hal diatas, Perangkat Daerah agar menyampaikan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung Kabupaten Sehat Tahun 2027 yang akan dimuat dan ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2027 berdasarkan format matrik terlampir (Lampiran III), untuk dilengkapi dan diserahkan ke Bappelitbangda Cq. Bidang SSP dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat hari **Rabu tanggal 11 Februari 2026**.

Demikian disampaikan, untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri Selfinia (No. Hp: 085274675813). Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota,



HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP. 197309131993111001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak

Lampiran I Surat Nomor : 000.7/73/Bappelitbangda-LK/II/2026

Kepada Yth. Sdr/i Kepala Perangkat Daerah:

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Dinas Perikanan
7. Dinas Pangan
8. Dinas Sosial
9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
10. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15. Satuan Polisi Pamong Praja
16. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

No	Tatanan	Indikator	Perangkat Daerah	Catatan
1	Sehat Mandiri	Jumlah Kematian Ibu	Dinas Kesehatan	Jumlah Kematian Ibu Meningkat
		Jumlah Kematian Neonatus	Dinas Kesehatan	Jumlah Kematian Neonatus Meningkat
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Dinas Kesehatan	AHH masih rendah
		Prevalensi Stunting pada Balita	Dinas Kesehatan	Angka Prevalensi Stunting belum tercapai
		Cakupan Penemuan Kasus TBC	Dinas Kesehatan	Pengobatan TBC belum optimal
		Persentase Pangan Segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	Dinas Pangan	Masih belum tercapai syarat keamanan pangan segar
		Prevalensi Obisitas pada penduduk usia lebih 18 tahun	Dinas Kesehatan	Masih tinggi angka Obisitas
		Persentase Posyandu aktif di Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan	Cakupan posyandu aktif belum tergambar pada microsite
		Persentase puskesmas minimal yang melaksanakan pelayanan ramah anak (PRAP)	Dinas Kesehatan	SK belum terbaru
		2	Perumahan dan Permukiman	Jumlah rumah tangga memiliki akses sanitasi aman
Jumlah rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah	DLHPP			Rata-rata pengelolaan sampah dKab. Lima Puluh Kota masih dibakar
Luas kawasan permukiman kumuh dalam kewenangan pemerintah kota/kabupaten yang tertangani (luasan di bawah 10 hektar)	DLHPP			Belum ada SK Kawasan Kumuh Kab. Lima Puluh Kota
Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan	Dinas Kesehatan			Pemanfaatan Aplikasi e-Satu dalam inspeksi kesehatan lingkungan

No	Tatanan	Indikator	Perangkat Daerah	Catatan
		Adanya implementasi program langit biru	DLHPP	Belum ada SK tentang Program Langit Biru
		Pelaksanaan <i>car free day</i>	Dinas Perhubungan	Belum ada pelaksanaan <i>car free day</i>
		Adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Program Kali Bersih (PROKASIH)	DLHPP/ DPUPR	Belum ada SE terkait Prokasih
		Adanya pemisahan peran Operator dan Regulator dalam kelembagaan pengelola persampahan	DLHPP	Belum ada Perkada terkait pembentukan kelembagaan pengelolaan persampahan
		Terdapat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dengan layanan penyedotan lumpur tinja serta truk tinja yang beroperasi	DPUPR	Belum ada kegiatan terkait ini
		Implementasi ketersediaan/akses tempat pengumpulan limbah B3 yang memenuhi syarat di tingkat Kabupaten/Kota	DLHPP	Belum ada pengolahan limbah B3 ini
3	Satuan Pendidikan	Keberadaan regulasi daerah tentang pelaksanaan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)	Bag Kesra	Belum ada Regulasi terkait UKS/M
		Persentase Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren yang menerapkan Satuan Pendidikan Ramah Anak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum semua sekolah memiliki SK ramah anak
		Keberadaan Tim Pembina UKS/M tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan	Bag Kesra	Belum ada SK Tim Pembina UKS tingkat Kecamatan
		Persentase sekolah/madrasah yang melakukan pengawasan internal	Dinas Kesehatan	Hanya baru ada kegiatan pengawasan air
		Persentase sekolah/madrasah yang menyelenggarakan skrining kesehatan	Dinas Kesehatan	Belum semua sekolah yang menyelenggarakan skrining kesehatan. Kegiatan biasanya ada

No	Tatanan	Indikator	Perangkat Daerah	Catatan
				dipuskesmas melalui dana BOK dan APBD.
		Persentase anak usia sekolah dasar dan sederajat yang mendapatkan Imunisasi Sekolah Lengkap (ISL)	Dinas Kesehatan	Masih rendahnya capaian anak kelas yang mendapatkan imunisasi MR 1 kali, DT 1 kali
4	Pasar	Adanya regulasi daerah tentang pasar sehat	DisperdagkopUKM	Belum adanya Perda/ Perbub terkait program pasar sehat
		Adanya regulasi penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Satpol PP	Belum adanya Perda/ Perbub terkait penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL)
		Persentase pasar yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	DisperdagkopUKM	Data jumlah seluruh pasar belum ada data pasar yang menerapkan KTR belum ada
		Persentase pasar melakukan pengawasan internal terkait kesehatan (contoh : pengawasan bahan pangan berbahaya atau uji kelayakan air bersih)	DisperdagkopUKM/ Dinas Pangan/ Dinas Perikanan/ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan/ Dinas Kesehatan	Monev baru dilakukan pada pasar tradisional Taram (belum dilaksanakan menyeluruh diseluruh pasar)
		Persentase pasar memiliki fasilitas ruang ASI	Dinas Kesehatan/ DisperdagkopUKM	Belum semua pasar memiliki fasilitas ruang ASI
5	Perkantoran dan Perindustrian	Angka kecelakaan kerja di tempat kerja setahun terakhir	Disperinaker	Tidak ada data terkait tempat kerja tingkat Kabupaten
		Jumlah perusahaan mendapatkan penghargaan dibidang kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah	Disperinaker	Penghargaan yang diberikan belum diketahui dasar hukum petunjuk pelaksanaannya
6	Pariwisata	Kabupaten/Kota memiliki Desa/Kampung Wisata	Disparpora	Belum semua objek wisata memiliki SK pembentukan desa/ kampung wisata
7	Transportasi dan Tertib Lalu Lintas	Adanya regulasi terkait penyediaan layanan transportasi jalan,	Dinas Perhubungan	Belum ada dokumen regulasi terkait penyediaan

No	Tatanan	Indikator	Perangkat Daerah	Catatan
	Jalan	kawasan tertib lalu lintas, sistem manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan		layanan transportasi jalan kawasan tertib lalu lintas, sistem manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan lainnya
		Adanya sistem layanan pertolongan kecelakaan yang cepat dan terintegrasi kesiapsiagaan dalam penanganan korban kecelakaan	Dinas Perhubungan/ Dinas Kesehatan	Belum ada MoU antara Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan terkait rekayasa lalu lintas
		Adanya program pemeriksaan NAPZA atau narkoba terhadap pengemudi	Dinas Perhubungan/ Dinas Kesehatan	Belum ada kegiatan rutin pemeriksaan NAPZA atau narkoba terhadap pengemudi
		Terminal yang memenuhi syarat kesehatan	Dinas Perhubungan/ Dinas Kesehatan	Keberadaan terminal di Kab. Lima Puluh Kota hanya ada type C
		Keberadaan fasilitas jalur pejalan kaki (trotoar) bagi masyarakat umum dan penyandang disabilitas	Dinas Perhubungan/ DPUPR	Belum ada fasilitas jalur pejalan kaki (trotoar) bagi masyarakat umum dan penyandang disabilitas
		Jumlah titik fasilitas lajur sepeda	Dinas Perhubungan	Belum ada Jalur Sepeda
		Adanya Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Dinas Perhubungan/ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum banyak sekolah yang belum memiliki Zona Selamat Sekolah (ZoSS)
8	Perlindungan Sosial	Adanya layanan pengaduan terkait permasalahan sosial	Dinas Sosial	Belum efektif layanan pengaduan. Dibuktikan dengan tempat pengaduan ada seperti di <i>instagram</i> namun sudah tidak aktif dan kondisinya pengaduan tidak ada yang masuk.
		Adanya penggiat	DP2KBP3A/ Dinas	Belum semua

No	Tatanan	Indikator	Perangkat Daerah	Catatan
		penanganan kekerasan terhadap anak, perempuan, dan Lansia baik secara individu/kelompok	Sosial	KPAN yang memiliki SK
9	Penanggulangan Bencana	Adanya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah disahkan oleh Kepala Daerah	BPBD	Belum ada dokumen KRB
		Adanya sistem peringatan dini yang berfungsi dengan baik sesuai potensi ancaman bencana wilayahnya (EWS longsor, EWS banjir, EWS tsunami, SKDR, EWS Karlahut, EWS Bencana Nuklir, Biologi, Kimia, dll)	BPBD	Kurangnya alat peringatan dini
		Adanya Tim Koordinasi Daerah dalam Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru di Daerah dengan SK Bupati/ Walikota	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belum adanya SK TIM
		Kabupaten/Kotamemiliki dokumen Rencana Kontingensi penyakit potensi wabah	Dinas Kesehatan	Belum ada Dokumen rencana kontigensi penyakit potensi wabah.
		Adanya dokumen rencana kontingensi daerah yang telah disahkan oleh Kepala Daerah	BPBD	Konidi terakhir: Sedang Proses Penyusunan Renkon

**Matrik Pendukung Program, Kegiatan Sub Kegiatan
Kabupaten Sehat Tahun 2027**

OPD :

No	Indikator	Bentuk Pekerjaan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1							
2							
3			Dst.....				

KEPALA OPD

.....

Pangkat/Golongan

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Drs. H. Aziz Haily, MA No.1 Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota

Sarilamak, 11 Januari 2026

Nomor : 130.042 / 034/5/Diskominfo-LK/2026
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permintaan Data Publikasi Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2026.

Yth. Kepala Perangkat Daerah
(Daftar terlampir)
di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor B-7/13086/KS-200/2026 Tanggal 05 Januari 2026 perihal Koordinasi Terkait Permohonan Menghimpun Data Publikasi Lima Puluh Kota Dalam Angka dari Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota maka Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan publikasi tahunan yang merupakan publikasi sejenis pada tahun sebelumnya. Data yang disajikan dalam publikasi terdiri dari data sekunder yang bersumber dari berbagai instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta dan Data Primer hasil Sensus/Survei yang dilakukan BPS Kabupaten Lima Puluh Kota yang akan di rilis pada **Tanggal 28 Februari 2026.**

Berdasarkan hal tersebut diatas, mengingat pentingnya data tersebut untuk penyediaan data perencanaan pembangunan, diharapkan data dimaksud dikumpulkan dan diserahkan kepada BPS Kabupaten Lima Puluh Kota untuk rilis Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka (KDA) Tahun 2026 paling lambat **Tanggal 31 Januari 2026.**

Untuk memudahkan dalam pengelolaan data, berikut kami lampirkan permintaan data berupa softcopy yang dapat di akses pada link berikut: https://s.bps.go.id/50kota_2026. Bagi Perangkat Daerah yang belum berkontribusi pada tabel Lima Puluh Kota Dalam Angka 2025 yang lalu, untuk tahun 2026 ini sudah bisa menambahkan tabel pada link tersebut, Jika Perangkat Daerah membutuhkan informasi dan konsultasi terkait tabel yang akan disampaikan dapat menghubungi *contact person*: 0853-4150-9789 (Harrya).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
HERWAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.197309131993111001

Lampiran 1.

Surat Nomor : 130 042 / 094/5/Diskominfo-LK/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH UNTUK PERMINTAAN DATA PUBLIKASI
LIMA PULUH KOTA DALAM ANGKA TAHUN 2026**

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Kesehatan
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Satuan Polisi Pamong Praja
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
10	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
12	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman
13	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15	Dinas Pemadam Kebakaran
16	Dinas Sosial
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
18	Dinas Perhubungan
19	Dinas Perikanan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	Dinas Pangan
22	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
24	Badan Keuangan
25	Badan Kesbangpol
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	Sekretariat DPRD
28	Inspektorat
29	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
30	Perumda Air Minum Tirta Luak Nan Bungsu Kab. Lima Puluh Kota



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Bukit Limau, Jl. Raya Negara Payakumbuh – Pekanbaru KM. 10 Sarilamak

Sarilamak, 15 Januari 2026

Nomor : 800.1.10.3 / 50 /BKPSDM-LK/2026
Lamp. : 2 (dua) berkas
Perihal : **Daftar ASN yang belum menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2024**

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
(Sesuai daftar terlampir)

di
Tempat

Dengan hormat,

Memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa dokumen kinerja (SKP dan hasil evaluasi) merupakan dasar penting dalam seluruh proses Manajemen ASN.
2. Surat Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Nomor : 17279/BM.01.01/SD/C/2025 Tanggal 24 September 2025 Tentang Penyelesaian Disparitas Data Kinerja Instansi Tahun 2022, 2023 dan 2024, dimana penyelesaian disparitas kinerja Tahun 2024 dilakukan melalui 2 mekanisme, yaitu via layanan e-Kinerja BKN dan Peremajaan SIASN.
3. Penyelesaian Disparitas Data Kinerja Tahun 2024 dibatasi hingga tanggal 31 Januari 2026.
4. Berdasarkan data Disparitas Data SKP Tahun Sebelumnya yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara, terdapat 174 Orang ASN Kab. Lima Puluh Kota yang belum menyampaikan data SKP Tahun 2024.
5. Bersama ini kepada Saudara disampaikan daftar nama ASN pada Instansi Saudara yang belum memiliki data riwayat SKP tahun 2024 (daftar terlampir).

6. Kepada pegawai yang bersangkutan melalui Saudara diminta untuk menuntaskan SKP Tahun 2024 pada aplikasi e-Kinerja BKN atau menyusun SKP secara manual dan menyampaikan dalam bentuk soft copy (file pdf) SKP Tahun 2024 yang telah dinilai dan ditanda tangani oleh pejabat penilai dan disampaikan secara kolektif ke Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN BKPSDM untuk dapat dilakukan penginputan dan peremajaan data pada SIASN.

Diminta pegawasan dan perhatian penuh Saudara agar penilaian SKP 2024 pada e-Kinerja BKN dapat dituntaskan dan/atau menyampaikan dokumen soft copy SKP Tahun 2024 tersebut hingga dapat diterima paling lambat pada tanggal **23 Januari 2026**, sehingga disparitas data dapat diselesaikan dan ASN yang bersangkutan tidak terkendala dalam urusan administrasi kepegawaian.

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya disparitas data kinerja pada SKP periode mendatang, diperlukan pemahaman yang utuh dan konsisten mengenai pengelolaan Kinerja ASN sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022. Perlu adanya penguatan peran pimpinan sebagai pembina dan penilai kinerja yang menjadi kunci utama dalam memastikan validitas dan konsistensi data. Dengan pemahaman yang komprehensif dan penerapan disiplin yang tegas, data kinerja yang tercatat akan menjadi lebih akurat, terstandar dan mencerminkan kontribusi nyata ASN terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan Kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

HERMAN AZMAR, A.P, M.Si

Pembina Utama Madya / NIP. 19730913 199311 1 001

Tembusan:

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sanitamak (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran I

Nomor : 800.1.10.3 / 50 /BKPSDM-LK/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Daftar Kepala Perangkat Daerah

- 1 Sekretaris Daerah
- 2 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 3 Kepala Dinas Kesehatan
- 4 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5 Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- 6 Kepala Dinas Perhubungan
- 7 Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
- 8 Kepala Dinas Pangan
- 9 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 10 Direktur RSUD dr. Achmad Darwis
- 11 Camat Mungka
- 12 Camat Akabiluru
- 13 Camat Pangkalan Koto Baru

Lampiran II

Nomor : 800.1.10.3 / 50 /BKPSDM-LK/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

DAFTAR NAMA ASN YANG BELUM MEMILIKI RIWAYAT SKP 2024

NO	NIP	NAMA	UNIT ORGANISASI	TAHUN SKP BELUM
1	198805092014032002	ENGLA WARIZKI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	2024
2	199309102022032008	REFI YANE	BAGIAN HUKUM	2024
3	199909012023081001	HARTA DENAY	BAGIAN ORGANISASI	2024
4	196808081989121001	FIRDAUS	BAGIAN TATA USAHA	2024
5	199605022022032008	FEBY NEDIA PUTRI	BAGIAN TATA USAHA	2024
6	197012151998031008	EFRINAL FIRMAN	BIDANG BINA MARGA	2024
7	198009122007011002	SEPRIADI	BIDANG OLAHRAGA	2024
8	197711152009012001	WIDYA HANDAYANI	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF	2024
9	197006301992011001	JHON FADLI PILIANG	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2024
10	196801121989032006	RAMADANI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2024
11	197003232008011001	HAMDI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2024
12	197709072008011004	PRA AIDIL	DINAS PERHUBUNGAN	2024
13	199705202020032001	ZHRUNNISA FAWZIA	DINAS PERHUBUNGAN	2024
14	196609072021212001	SUSNI NOFRIANTI	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2024
15	197306132021211001	YEFRI HARDI	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2024
16	197407202021211001	AZHAR	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2024
17	197507292021212001	SUSTRI ANDRIANI	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2024
18	198205142021212001	HENI KARMILA	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2024
19	198609072009011002	REDNO JUANDA	KECAMATAN MUNGKA	2024
20	199310032019022002	RAHMI DINA INDRA	PUSKEMAS KOTO BARU SIMALANGGANG	2024
21	199305192020122006	NADYA LOVIANDA	PUSKESMAS BARUAH GUNUNG	2024
22	197810272010012002	DEBI SINTIA TARMANA	PUSKESMAS HALABAN	2024

23	199507082020122006	PUTRI KHAIRUN NISA	PUSKESMAS HALABAN	2024
24	196708101988032003	TRI HASTUTI	PUSKESMAS MUNGKA	2024
25	199212122019021003	ADI NUGRAHA	PUSKESMAS MUNGO	2024
26	199709132020121004	NANDA	PUSKESMAS PAKAN RABAA	2024
27	199009202019022003	SUCI UTHARI	PUSKESMAS SULIKI	2024
28	199104232019021002	RULLY PERDANA	PUSKESMAS TANJUNG PATI	2024
29	196607011987032005	NOFIATI	PUSKESMAS TARAM	2024
30	197803142009012003	DELTRI SYAHRIZA	RSUD DR. ACHMAD DARWIS	2024
31	197811172024212007	HAMDA WAHDIAS AZANI	RSUD DR. ACHMAD DARWIS	2024
32	197902132024211003	ISWANDI	RSUD DR. ACHMAD DARWIS	2024
33	197908312009011006	HISTAWARA SUBROTO	RSUD DR. ACHMAD DARWIS	2024
34	198102122024212009	RITA BASRIL	RSUD DR. ACHMAD DARWIS	2024
35	198503232024212012	RAHMA SRI DEWI	RSUD DR. ACHMAD DARWIS	2024
36	198505042023212003	RIKA MAILASTRI	RSUD DR. ACHMAD DARWIS	2024
37	198512192023212002	RICHI KHAIRUL	RSUD DR. ACHMAD DARWIS	2024
38	198712312020122003	RISKI NOFANI	RSUD DR. ACHMAD DARWIS	2024
39	199102262023212003	VIVI HASTUTI	RSUD DR. ACHMAD DARWIS	2024
40	199805202024212026	SRI INTAN	RSUD DR. ACHMAD DARWIS	2024
41	198112222005011004	MEDIA PURNAMA	SEKRETARIAT DAERAH	2024
42	198309142006042005	ELINDA WAHYU LESTARI	SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN	2024
43	197305011993032005	ERNAYUSI	SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2024
44	197003041993011003	ALIJASMI	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2024
45	198104292008012011	AFRINANIJAR	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2024
46	197711062007012018	YELSI EKAPUTRI	SEKRETARIAT KECAMATAN AKABILURU	2024
47	198511052014082004	DEOSI NOVIZA	SEKRETARIAT KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	2024
48	197102151989031002	IBNU MARDHATILLAH	SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN	2024
49	198011232005011001	FETHRA MULA KURNIA	SEKSI PERAWATAN PRASARANA	2024
50	197209242006041007	PUTRA ILLAH KHAIR	SEKSI PTK SMP	2024
51	198207252009011004	EDRIFAL M	SEKSI SENI DAN PERFILEMAN	2024
52	198604152014082002	INDRA MAHA MULIA	SUB BAGIAN UMUM DAN HUMAS	2024

53	196902091990071001	DELYUTAKEMRI	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2024
54	197007201990071001	PAIDAL ASRI	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2024
55	197201201990091001	JANUAR	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2024
56	197503242002122002	ROZA LESWIRNA	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2024
57	197704122014082001	RESMITA YENTI	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2024
58	196804081990051001	ALI JASMI	UPT PENDIDIKAN KEC. KAPUR IX	2024
59	197203051996031001	MASPELTA	UPT PENDIDIKAN KEC. PANGKALAN KOTO BARU	2024
60	198904232019022001	NADIA PUTRI RAHMADHANI	UPTD PUSKESMAS BATU HAMPA	2024
61	198808102022031003	MUHAMMAD RIZKI AIDILLAH	UPTD PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG	2024
62	196904102014081001	IRWAS	UPTD SD NEGERI 01 LIMBANANG	2024
63	197405032000031003	YONDRA DEDI	UPTD SD NEGERI 01 LUBUAK ALAI	2024
64	196711101988101001	PENDRI ZULFIKAR	UPTD SD NEGERI 01 SUNGAI RIMBANG	2024
65	196906072008012004	MARSEDES	UPTD SD NEGERI 02 TALANG ANAU	2024
66	198208282007011002	WAWAN KURNIA	UPTD SD NEGERI 03 DURIAN TINGGI	2024
67	197005052012121003	SYAKBAN	UPTD SD NEGERI 03 GALUGUA	2024
68	197602112008011001	MUHAMMAD AKHIAR	UPTD SD NEGERI 03 KOTO TANGAH BATU HAMPA	2024
69	196708222007012005	MASNIWATI	UPTD SD NEGERI 03 LUBUAK BATINGKOK	2024
70	197312022007011005	DON MAHATA PUTRA	UPTD SD NEGERI 03 MAEK	2024
71	198210162005011004	AZIZUL RAHMAN	UPTD SD Negeri 03 Talang Maur	2024
72	196906012008012001	ROSMIATI	UPTD SD NEGERI 03 TANJUANG GADANG	2024
73	197508152000031002	USDEDI	UPTD SD NEGERI 04 KOTO TANGAH BATU HAMPA	2024
74	196702021999031004	ALISMAR	UPTD SD NEGERI 05 TUJUAH KOTO TALAGO	2024
75	196708211988022001	DAHRIAL	UPTD SD NEGERI 07 SARILAMAK	2024
76	197404062008012005	RATNI SATIA PUTRI	UPTD SD NEGERI 07 SARILAMAK	2024
77	196604031988061001	ASRIL	UPTD SDN 01 ANDALEH	2024
78	200104012024212002	ZUHAIRA	UPTD SDN 01 BANJA LAWEH	2024
79	199606282024212022	WELLYZA PUTRI	UPTD SDN 01 BATU BALANG	2024
80	200101092024212003	ANNISA' FIRDAUS	UPTD SDN 01 GUGUAK VIII KOTO	2024
81	198907122024212045	IGIS FITRI	UPTD SDN 01 KOTO TANGAH	2024

82	197502112000121001	ELKURNIA PUTERA	UPTD SDN 01 KUBANG	2024
83	199406232024211007	DERI PEDRI	UPTD SDN 01 MANGGILANG	2024
84	199905312024212011	ZULFA ASTUTI	UPTD SDN 01 MUNGKA	2024
85	199907192024211005	MUHAMMAD LATIEF	UPTD SDN 01 PILUBANG	2024
86	196903252008011004	SYAFNIWARMAN	UPTD SDN 01 SARIAK LAWEH	2024
87	198112182022212006	ELVINAS	UPTD SDN 01 SITUJUAH BATUA	2024
88	197004042010011004	NURSAM	UPTD SDN 01 SITUJUAH LADANG LAWEH	2024
89	198901292019022001	RIKA WIDIA	UPTD SDN 01 SITUJUAH LADANG LAWEH	2024
90	197303282007011003	YONEDI	UPTD SDN 01 SULIKI	2024
91	198410062009012002	RIZANTI FITRIA	UPTD SDN 01 SUNGAI KAMUYANG	2024
92	198411142023212022	FADILA WINDA	UPTD SDN 01 SUNGAI RIMBANG	2024
93	199910132024212012	SRI VAILA PUTRI	UPTD SDN 01 SUNGAI RIMBANG	2024
94	199511152024212066	NUR'IZZATI DINILLAH	UPTD SDN 02 BARUAH GUNUANG	2024
95	196712111988022001	DESNITA	UPTD SDN 02 DURIAN TINGGI	2024
96	197107122008011002	SYAMSUARDI S	UPTD SDN 02 GALUGUA	2024
97	196803052007011010	IRUSLI	UPTD SDN 02 HARAU	2024
98	196704032014081003	SAPRIZAL	UPTD SDN 02 KOTO TANGA BATU HAMPA	2024
99	196507102006041004	MUHAMMAD NAZAR	UPTD SDN 02 MUARO PAITI	2024
100	199704142024212062	RANTI KARMILA	UPTD SDN 02 SUNGAI BERINGIN	2024
101	198610182024212013	SILVIANA	UPTD SDN 02 SUNGAI KAMUYANG	2024
102	199811022024212017	OLIVIA RIZALINA	UPTD SDN 03 HALABAN	2024
103	198201102006042010	DESMAWATI	UPTD SDN 03 KOTO TANGAH SIMALANGGANG	2024
104	196709072014081003	ARLISMAN	UPTD SDN 03 KUBANG	2024
105	199707012024212038	FRISKA INDRAWATI	UPTD SDN 03 KUBANG	2024
106	199904162024212012	DANIA PUTTY RANCHANI	UPTD SDN 03 KUBANG	2024
107	196910211990071001	NEKFAKRI	UPTD SDN 03 LIMBANANG	2024
108	199808172024212031	MOREN MONERI	UPTD SDN 03 SARILAMAK	2024
109	198401312006041004	RONI JALYUDA	UPTD SDN 03 SITUJUAH BATUA	2024
110	199212122020122007	MEGAWATI	UPTD SDN 03 TANJUNG BALIK	2024
111	196808171988101001	AFRIZAL	UPTD SDN 03 TARANTANG	2024
112	198711272024211006	NOVERA EKA MELDI	UPTD SDN 03 TARANTANG	2024
113	198203112023211008	ADEL ARIANTO PUTRA	UPTD SDN 04 SARILAMAK	2024

114	198511262022212004	YUSMANETI	UPTD SDN 04 SARILAMAK	2024
115	199506122024211012	RIO SATRIA	UPTD SDN 04 SARILAMAK	2024
116	198008132021212002	ASRI FITRIA	UPTD SDN 04 TANJUANG GADANG	2024
117	198605312024212015	FAFIA NORA	UPTD SDN 05 KOTO TUO	2024
118	199808172024211011	MHD. AGUS SAPUTRA	UPTD SDN 05 TUJUAH KOTO TALAGO	2024
119	198004292024211007	ADI WARMA	UPTD SDN 06 GUGUAK VIII KOTO	2024
120	197110182022212001	NELWATI	UPTD SDN 06 GUNUANG MALINTANG	2024
121	197011151990071001	ENDRI EFENDI	UPTD SDN 06 SARIAK LAWEH	2024
122	196702171986121001	EFRIZAL	UPTD SDN 06 SARILAMAK	2024
123	198407022022212011	IKE YULIA	UPTD SDN 07 SUNGAI KAMUYANG	2024
124	198606302022212011	PUTRI YANE MAHEZI	UPTD SDN 07 SUNGAI KAMUYANG	2024
125	198610102023212039	ELFIRA PUTRI UTAMI	UPTD SDN 07 SUNGAI KAMUYANG	2024
126	199008092022212018	SISKA SILVIA	UPTD SDN 07 SUNGAI KAMUYANG	2024
127	199701202024212019	HIDAYATUL DINA	UPTD SDN 07 SUNGAI KAMUYANG	2024
128	199803222024212019	MONNA DINI ANGRAINI	UPTD SMPN 1 KEC. AKABILURU	2024
129	196808111999031005	ARNOL	UPTD SMPN 1 KEC. HARAU	2024
130	198812102024212033	PATMAWATI	UPTD SMPN 1 KEC. HARAU	2024
131	199203222024212028	YONA FITRA UTAMI	UPTD SMPN 1 KEC. HARAU	2024
132	199605202024212035	MIRSE AYURILA	UPTD SMPN 1 KEC. HARAU	2024
133	199611142024212037	IFNI ULFA RANI	UPTD SMPN 1 KEC. HARAU	2024
134	199710092024212042	HAYATUL AZMI	UPTD SMPN 1 KEC. HARAU	2024
135	199806082024211006	HARY PRATAMA	UPTD SMPN 1 KEC. HARAU	2024
136	199903122024211003	ARIEF RAHMAN RIDHA	UPTD SMPN 1 KEC. HARAU	2024
137	199912032024212022	ADHIRA PUTRI	UPTD SMPN 1 KEC. HARAU	2024
138	199210142024211013	ROBBI OKTAFIANDI	UPTD SMPN 1 KEC. LAREH SAGO HALABAN	2024
139	199907012024212029	YULIA ELSA PUTRI	UPTD SMPN 1 KEC. LAREH SAGO HALABAN	2024
140	199610302024212017	SILATUR RAHMI	UPTD SMPN 1 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	2024
141	196801021986021001	RISWAN	UPTD SMPN 1 KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI	2024
142	197108182014081001	ZULLUTHFI	UPTD SMPN 1 KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI	2024
143	197202051991032002	FEBRIANTI	UPTD SMPN 1 KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI	2024

144	196812031999032004	LATIFAH	UPTD SMPN 2 KEC. AKABILURU	2024
145	197004171999031004	AFRIZAL ZAINUR	UPTD SMPN 2 KEC. AKABILURU	2024
146	199309092024211021	RODHANIL WAN JOHAR	UPTD SMPN 2 KEC. GUGUAK	2024
147	197502032014082001	FITRIA ISMARENTI	UPTD SMPN 2 KEC. GUNUANG OMEH	2024
148	199309032024212039	A.FANI RAHAYU	UPTD SMPN 2 KEC. GUNUANG OMEH	2024
149	199408172024211032	AMBRAN	UPTD SMPN 2 KEC. GUNUANG OMEH	2024
150	199809062024212022	TRI SEPTIA LARAS	UPTD SMPN 2 KEC. HARAU	2024
151	197008101991031007	AFRIANDI	UPTD SMPN 2 KEC. KAPUR IX	2024
152	197104011990031002	AMRI SYARIF	UPTD SMPN 2 KEC. KAPUR IX	2024
153	197201091990031001	ARZEN	UPTD SMPN 2 KEC. KAPUR IX	2024
154	196606032014082001	TAUFIK DERMITA	UPTD SMPN 2 KEC. LAREH SAGO HALABAN	2024
155	196808121992031009	JONI DAMON	UPTD SMPN 2 KEC. LAREH SAGO HALABAN	2024
156	196804171994121002	MUHAMMAD YUSUF LUBIS	UPTD SMPN 2 KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI	2024
157	198202222014081003	BUDI	UPTD SMPN 2 KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI	2024
158	198810042024212026	NAJMI HILALIATI SYAN	UPTD SMPN 2 KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI	2024
159	199710152024211014	ZIKRI CHAIRONI	UPTD SMPN 2 KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI	2024
160	199803252024212035	RISKA KURNIA	UPTD SMPN 2 KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI	2024
161	199201052024212034	ANNISA LESTARI	UPTD SMPN 2 KEC. SULIKI	2024
162	198204182010012015	EFI YANTI	UPTD SMPN 3 KEC. AKABILURU	2024
163	199109142020121004	ISRAK AL QADRI	UPTD SMPN 3 KEC. BUKIK BARISAN	2024
164	199706282024212028	ROVI FRICIA YUNISA	UPTD SMPN 3 KEC. BUKIK BARISAN	2024
165	199708172024211013	GUSMAN HIDAYAT	UPTD SMPN 3 KEC. BUKIK BARISAN	2024
166	200002122024212006	FEBRI YELMI	UPTD SMPN 3 KEC. KAPUR IX	2024
167	196612312007011676	DASRIWAN	UPTD SMPN 3 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	2024
168	198404182008012002	MARDIA HAYATI	UPTD SMPN 3 KEC. PAYAKUMBUH	2024
169	199104012024212035	ANDIKA NIA SARI	UPTD SMPN 3 KEC. PAYAKUMBUH	2024
170	199906172024211007	AINAL FIKRI	UPTD SMPN 3 KEC. PAYAKUMBUH	2024
171	199902252024212018	NUR IFANI RIZKITA	UPTD SMPN 4 KEC. BUKIT BARISAN	2024
172	198707282020121002	SURYA TRA YULIANDRISA	UPTD SMPN 4 KEC. KAPUR IX	2024

173	198212292009012002	YESVITA DEWI	UPTD SMPN 5 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	2024
174	200003262024212004	DEBY MARLINA	UPTD SMPN 5 KEC. PANGKALAN KOTO BARU	2024

**PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si

Pejabat Utama Muda / NIP. 19660828 199803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Prof. H Aziz Haily, MA No. 01 Komplek Kantor Bupati,
Bukik Limau Kota Sarilamak Kode Pos 26271

Sarilamak, 15 Januari 2026

Nomor : 800.1/ 49 /BKPSDM-LK/2026
Lamp : -
Perihal : Permintaan Rekapitulasi Data
Jabatan Fungsional

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta dalam rangka pemutakhiran data Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang berguna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bersama ini dimohon kepada Saudara agar mengirimkan data Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional di unit kerja Saudara sesuai format terlampir dalam bentuk soft copy dan hard copy.

Data tersebut sudah diterima di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 23 Januari 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



HERMAN AZMAR, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19730913 199311 1 001

Tembusan: disampaikan Yth.

1. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan) di Sarilamak
2. Arsip



Sarilamak, 9 Januari 2026

Nomor : 800.1.4.1/ 31 /BKPSDM-LK/2026
Lamp. :
Perihal : **Permintaan usulan dan bahan
PNS yang akan mengikuti Ujian
Dinas dan Penyesuaian Kenaikan
Pangkat (UPKP) Tahun 2026**

Kepada Yth Sdr. :

Kepala Perangkat Daerah

Di

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan kepada saudara sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT).
- b. Sehubungan dengan hal di atas, diharapkan kepada Saudara kiranya dapat menginformasikan kepada calon peserta yang berada pada Perangkat Daerah Saudara yang akan mengikuti ujian dimaksud dengan syarat sebagai berikut:

1. Ujian Dinas

a) Ujian Dinas Tk. I :

- Pangkat Pengatur Tk. I (II/d);
- Tidak menduduki jabatan fungsional tertentu;
- Belum memperoleh ijazah Sarjana S.1 atau Diploma IV;
- Softcopy Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli;
- Softcopy legalisir SK pangkat terakhir;
- Softcopy legalisir SK Jabatan terakhir/ SPT jabatan terakhir
- Softcopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;

b) Ujian Dinas Tk. II :

- Pangkat Penata Tk. I (III/d);
- Tidak menduduki jabatan fungsional tertentu;
- Softcopy Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli;
- Softcopy legalisir SK pangkat dan jabatan terakhir;
- Softcopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
- Belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Administrasi (PKA);
- Belum memperoleh ijazah Magister (S.2) dan Ijazah lain yang setara
- Makalah tentang tugas pokok dan fungsi terkait jabatan masing-masing yang dikaitkan dengan kondisi saat ini dan dikumpulkan paling lambat sebelum pelaksanaan ujian;

2. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)

- Softcopy SK CPNS dilegalisir;
- Softcopy SKP 1 (satu) tahun terakhir;
- Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- Softcopy legalisir SK pangkat terakhir;
- Softcopy legalisir SK Jabatan terakhir/ SPT jabatan terakhir;

- Dokumen Peta Jabatan yang menyatakan kebutuhan formasi atau jabatan yang mempersyaratkan pendidikan atau ijazah yang dimiliki yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - Tidak menduduki jabatan fungsional tertentu
 - Softcopy SK Izin Belajar atau Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan;
 - Softcopy asli ijazah dan transkrip nilai, akreditasi prodi minimal **"Baik Sekali"** dan tangkap layar data yang tercantum pada forlapdikti dengan alamat web : www.forlapdikti.go.id pada menu pencarian data dan sub menu profil mahasiswa dengan keterangan lulus.
 - Softcopy dokumen uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Eselon II), uraian tugas harus sesuai antara jabatan dan ijazah yang diperoleh ;
 - Softcopy uraian tupoksi atasan langsung sesuai dengan Peraturan Bupati;
 - PNS fungsional yang sudah memiliki Ijazah S1 tapi belum tercapai angka kredit pada periode kenaikan pangkat tahun berjalan
 - Makalah tentang permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada jabatan masing-masing dengan menjadikan disiplin ilmu pendidikan terakhir sebagai referensi pembahasan masalah bagi yang melakukan ujian penyesuaian kenaikan pangkat.
- c. Makalah untuk ujian dinas Tk. II dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dikumpulkan paling lambat sebelum pelaksanaan ujian yang nantinya akan diuji, dengan format penulisan sebagai berikut :
- Cover
 - Daftar isi
 - Kata pengantar
 - Latar belakang permasalahan
 - Kondisi saat ini
 - Pemecahan masalah
 - Analisis
 - Kondisi yang diinginkan
 - Saran
 - Penutup
- d. Teknik penulisan makalah sebagai berikut :
- Diketik 1,5 spasi
 - Jenis huruf arial font size 12
 - Menggunakan kertas A4
 - Minimal 15 (lima belas) halaman
 - Dijilid rapi rangkap 2 (dua).
 - Untuk Ujian Dinas Tk.II map warna Biru
 - Untuk Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) map warna Kuning
- e. Bagi yang akan mengikuti ujian dimaksud diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah serta melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

- f. Nama dan bahan-bahan sebagaimana tersebut diatas diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota dalam bentuk soft copy paling lambat tanggal **23 Januari 2026** serta di scan dalam file pdf.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Kepala BKN Jakarta
3. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru
4. Kepala UPT BKN Padang
5. Arsip

Lampiran Surat Sekretariat Daerah

Nomor : 800.1.4.1/31 / BKPSDM-LK/2026

Tanggal : 9 Januari 2026

Perihal : Permintaan usulan dan bahan PNS yang akan mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tahun 2026

Yth Kepala Perangkat Daerah terkait :

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat Daerah
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah
4. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Sekretariat DPRD
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
12. Dinas Perikanan
13. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16. Dinas Sosial
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari
19. Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
20. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Dinas Komunikasi dan Informatika
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Satuan Polisi Pamong Praja
26. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
27. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
28. Dinas Pangan
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30. RSUD dr Achmad Darwis
31. Kecamatan Suliki
32. Kecamatan Guguk
33. Kecamatan Payakumbuh
34. Kecamatan Luak
35. Kecamatan Harau
36. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
37. Kecamatan Kapur IX
38. Kecamatan Gunung Omeh
39. Kecamatan Larch Sago Halaban
40. Kecamatan Situjuh Limo Nagari
41. Kecamatan Mungka
42. Kecamatan Bukik Barisan
43. Kecamatan Akabiluru



PT. DHARMA CAHAYA MULIA

Jln. Raya Bulittinggi-Payakumbuh KM. 21

Kenagarian Koto Tengah Batu Hampa, Kab. 50 Kota, Sumatera Barat

Mobile: 082384969877, Email: dharmacahayamulia@gmail.com

Lima Puluh Kota, 14 Januari 2026

Nomor : 001 / DCM / 1 / 2026
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perhitungan Jarak SPPBE PT. Dharma Cahaya Mulia ke Terminal PT. Pertamina (Persero)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota
Di
Tempat

Dengan hormat,
Kami dari SPPBE PT. Dharma Cahaya Mulia, memohon kesediaan Dishub Kabupaten Lima Puluh Kota untuk membantu perhitungan Pengukuran Jarak SPPBE PSO PT. Dharma Cahaya Mulia ke Terminal PT. Pertamina (Persero). Mengingat pada kondisi saat bencana dan post bencana ini telah dilakukan alih lalu lintas sementara jalur pengangkutan LPG dari terminal Pertamina ke SPPBE PT. Dharma Cahaya Mulia.

Berikut ini kami detailkan kebutuhan pengukuran jarak SPPBE PSO PT. Dharma Cahaya Mulia ke Terminal PT. Pertamina (Persero) dengan melalui rute dan tujuan :

SPPBE PT. Dharma Cahaya Mulia – Terminal Teluk Kabung dengan perjalanan melalui Sitinjau Laut

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Dharma Cahaya Mulia

Eky Anas
Manager



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. H.Aziz Haily, MA No.01 Komplek Kantor Bupati
Bukik Limau Kota Sarilamak Tlp. (0752) 7750552 Kode Pos 26271

Nomor : 800/ 106 /BKPSDM-LK/2026
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Data PNS Jabatan Pelaksana
dengan Nomenklatur Baru

Sarilamak, 30 Januari 2026

Kepada Yth :
Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tempat

Berdasarkan PermenPAN RB No. 45 Tahun 2022 mengatur tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa Instansi harus melakukan konversi Jabatan Pelaksana dari Nomenklatur lama ke Nomenklatur baru, Bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Telah diterbitkan Surat Rekomendasi Menteri PANRB Nomor B/1816/M.SM.02.00/2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020, menjelaskan bahwa pengangkatan, pemindahan, serta perubahan Jabatan PNS wajib ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Berdasarkan ketentuan nomor 1 dan 2 diatas Kami minta Saudara untuk menyampaiakn data PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana pada unit kerja Saudara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Nomenklatur Jabatan baru berdasarkan Rekomendasi MenPANRB Nomor B/1816/M.SM.02.00/2024 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (surat terlampir).
 - Peta Jabatan masing-masing Perangkat Daerah (termasuk UPTD Sekolah dan UPTD Puskesmas) yang telah di setujui (ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan diketahui oleh Kepala Bagian Organisasi).
 - Data tersebut disampaikan paling lambat di Minggu Kedua bulan Februari tahun 2026 dalam bentuk *hardcopy* ke BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota dan dalam bentuk *softcopy* dengan mengisi tabel pada link yang tertara dibawah ini:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jhrQxXcWz2bFdCAYtVgTVzYGjtROIXD7pV93S1d72IU/edit?hl=id&gid=1875923325#gid=1875923325>

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Person In Charge (PIC): Septiawati, SE (hp/wa : 08111945471)

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Madya / NIP. 19730913 199311 1 001

Tembusan, Yth

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau Jl. Raya Negara KM.10 Sarilamak 26271

Sarilamak, 19 Februari 2026

Nomor : 100.1.6.1/047 /Pem/II/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Data dan Dokumen
LPPD 2025 sesuai dengan
Kepmendagri Nomor: 100.2.1.7-
109 Tahun 2026

Kepada Yth:

Kepala Perangkat Daerah (terlampir)

di
tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan perubahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Penyusunan IKK LPPD Tahun 2025 disesuaikan kembali dengan Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025 yang telah dikeluarkan oleh Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terkait Data dan Dokumen LPPD Tahun 2025 tersebut disampaikan ke Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Bagian Pemerintahan paling lambat tanggal 25 Februari 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan: disampaikan kepada Yth.

- Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan) di Sarilamak

Nomor : 100.1.6.1/ *047* /Pem/II/2026
 Tanggal : 18 Februari 2026
 Perihal : Permintaan Data dan Dokumen LPPD Tahun 2025 sesuai dengan
 Kepmendagri Nomor: 100.2.1.7-109 Tahun 2026

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH
 BERDASARKAN IKK PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2025**

NO		URUSAN	PD
LPPD	SILPP		
Urusan Pemerintah Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1	1.a	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
2	1.b	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
3	1.c	PEKERJAAN UMUM	DINAS PUPR
4	1.d	PERUMAHAN RAKYAT	DLHPP
5	1.e	TRANTIBUNLIMAS	SATPOL PP
			BPBD
			DAMKAR
6	1.f	SOSIAL	DINAS SOSIAL
Urusan Pemerintah Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
7	2.a	TENAGA KERJA	DISPERINAHER
8	2.b	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP2KBP3A
9	2.c	PANGAN	DINAS PANGAN
10	2.d	PERTANAHAN	DINAS PUPR
11	2.e	LINGKUNGAN HIDUP	DLHPP
12	2.f	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL
13	2.g	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DPMDN
14	2.h	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP2KBP3A
15	2.i	PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
16	2.j	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMINFO
17	2.k	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
18	2.l	PENANAMAN MODAL	DPMPSTP
19	2.m	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DISPARPORA
20	2.n	STATISTIK	DINAS KOMINFO
21	2.o	PERSANDIAN	DINAS KOMINFO
22	2.p	KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN
23	2.q	PERPUSTAKAAN	DISPUSIP
24	2.r	KEARSIPAN	DISPUSIP
Urusan Pilihan			
25	3.a	PERIKANAN DAN KELAUTAN	DINAS PERIKANAN

26	3.b	PARIWISATA	DISPARPORA
27	3.c	PERTANIAN	DIATANHOLBUN
			DISNAKESWAN
28	3.d	PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
29	3.e	PERINDUSTRIAN	DISPERINAKER
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJIANG			
30	4.a	BIDANG PERENCANAAN	BAPELITBANGDA
31	4.b	BIDANG KEUANGAN	BPKPD
32	4.c	BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BKPSDM
33	4.d	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BAPELITBANGDA
34	4.e	BIDANG PENGAWASAN	INSPEKTORAT DAERAH
35	4.f	BIDANG PENGADAAN	BAGIAN PBI
36	4.g	BIDANG HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH	BPKPD
			SETWAN/BAGIAN HUKUM
37	4.h	BIDANG PELAYANAN PUBLIK	BAGIAN ORGANISASI



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Prof. H. Aziz Haily, MA, No. 01 Komplek Kantor Bupati,
Bukit Limau Kota Sarilamak Kode Pos 26271

Sarilamak, 23 Februari 2026

Nomor : 800/85/BKPSDM-LK/2026
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Bahan Kelengkapan
DMS (Document Management
System)

Kepada Yth. : Kepala Perangkat Daerah
se – Kabupaten Lima Puluh Kota

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara. Telah dilakukan implementasi aplikasi Document Management System (DMS-SIASN) yang bertujuan sebagai Arsip Digital PNS masing-masing. Berkenaan hal tersebut seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan *update* dokumen pada Akun MyASN masing-masing.

Untuk kelancaran proses penginputan DMS dapat melihat panduan teknis pada link berikut: <https://bit.ly/PanduanTeknis-DMS>. Proses penginputan dilaksanakan sampai dengan tanggal **13 Maret 2026**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP. 197309131993111001

Tembusan :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai Laporan)
2. Arsip

Tanjung pati, 10 Januari 2026

Lampiran :-

Perihal : **Pengaturan Lalu Lintas**

Kepada Yth,

Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

Di Tanjung pati

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami harapkan Bapak dalam keadaan sehat selalu amiin. Dalam hal ini kami yang akan melaksanakan resepsi pernikahan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 yang bertempat di GEDUNG SERBAGUNA IPHI CENTER KOTO TUO KEC.HARAU oleh karena itu kami membutuhkan personel Bapak sebanyak 4 orang untuk mengatur kelancaran berlalu lintas di lokasi resepsi pernikahan.

Demikian disampaikan atas bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Orang tua



Alpa Edison



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Prof. H Aziz Haily, MA No.1 Komplek Kantor Bupati, Bukik Limau Sarilamak
Telepon (0752) 7750501 Website : www.setda.limapuluhkotakab.go.id

Sarilamak, 12 Januari 2026

Nomor : 000.8.3.4/ 005/Org-Setda/I/2026
Lampiran : -
Hal : **Permintaan Nama Admin SIPPN
dan Admin SKM Online**

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se- Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Direktur RSUD Dr. Achmad Darwis
3. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Lima Puluh Kota

di-
Tempat

Dalam rangka percepatan transformasi digital pelayanan publik serta untuk pemutakhiran data pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan menindaklanjuti Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/239/PP.00.01/2025 tanggal 24 Desember 2025 Hal Pemanfaatan Bersama Aplikasi SKM Online dan Pembentukan Tim Pengelola, maka disampaikan kepada Saudara hal – hal berikut :

1. Masih banyak Perangkat Daerah yang belum menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014. Setiap Perangkat Daerah **wajib** memiliki dokumen Standar Pelayanan, dokumen tersebut merupakan salah satu acuan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada pengguna layanan/ masyarakat serta **wajib** diinputkan dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (sippn.menpan.go.id)
2. Seluruh Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah **diwajibkan** memanfaatkan aplikasi SKM Online (skm.go.id) sebagai *platform* berbagi pakai. Penggunaan aplikasi ini bertujuan untuk menjamin validitas data, efisiensi anggaran, serta ketersediaan data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang real-time dan terintegrasi.
3. Oleh karena itu, diminta kepada Saudara untuk mengirimkan **Nama Admin SIPPN dan Admin SKM Online** melalui tautan <https://bit.ly>NamaAdminSIPPNdanSKMOnline> paling lambat tanggal **14 Januari 2026**. Dan selanjutnya akan dibuatkan Surat Keputusan (SK) Tim Pengelola SIPPN dan SK Tim Pengelola SKM Online.
4. Akses panduan penggunaan Aplikasi SIPPN (terlampir) sedangkan untuk SKM Online akan dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis sesuai dengan jadwal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

5. Untuk informasi lebih lanjut kiranya dapat menghubungi narahubung Fitria Yunifia (WA : 081363335703) dan Reza (WA : 08116681986).

Demikianlah disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian diucapkan terima kasih.





Perhubungan

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Pahlawan No. 5 Payakumbuh, Telp. Fax (0752) 94155 / 94097

Payakumbuh, 7 Januari 2026

Nomor : 200.1.2.3/20 /BKBP-LK/1/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas**

Kepada Yth. Sdr : _____

- ① Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Kasat Pol-PP Kabupaten Lima Puluh Kota

di -

Tempat.

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Upacara Peringatan Peristiwa Situjuh ke-77 Tahun 2026, untuk itu dimohon bantuan dan kerjasama Saudara agar dapat menugaskan personilnya untuk Pengaturan Lalu Lintas, Parkir dan Pengamanan pada:

Hari/tanggal : Kamis/15 Januari 2026
J a m : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Lapangan Bola Kaki Khatib Sulaiman Situjuh Batua
Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Demikianlah disampaikan kepada Saudara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DEDDY PERMANA, MM
NIP. 19670810 198809 1 002

Tembusan disampaikan Kepada: Yth.:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Arsip.



PENGURUS KABUPATEN
FEDERASI OLAHRAGA KARATE-DO INDONESIA (FORKI)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Makodim 0306/ 50 Kota, Jln. Raya Negara KM 7 Tanjung Pati

Nomor : 16/ FORKI-LK/ 1/ 2026
Lampiran : -
Perihal : **MOHON PETUGAS LALIN**

Kepada Yth:
Kepala Dinas Perhubungan
Lima Puluh Kota
di
Tanjung Pati

Dengan hormat,
Oss...!!!

Dalam rangka meningkatkan mutu dan prestasi Atlet FORKI se Kabupaten 50 Kota Newcomer tahun 2026, maka akan digelar Event Kejuaraan Karate se Kabupaten Lima Puluh Kota, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ Tanggal : **Sabtu/ 31 Januari 2026**
Pukul : 07.00 Wib s.d 09.00 Wib
Tempat : Makodim 0306/ 50 Kota

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, demi keamanan dan ketertiban lalu lintas dimohon bantuan petugas Lalin guna pada pintu masuk (piket) dan pintu masuk (ATM) Kodim 0306/ 50 Kota.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Tanjung Pati, 28 Januari 2026

KETUA UMUM,



NURKHALIS DT. BIJO DIRAJO, S.Pt

Nomor : 14 / PANP-PB / PKL / 1 / 2026
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Bantuan Personil

Pangkalan, 30 Januari 2026

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Tanjung Pati

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROTA YUDISTIRA**
Tempat / Tgl. Lahir : Pangkalan / 15 April 1985
Pekerjaan : Polri
Jabatan : Ketua Umum
No. HP : 0823 8786 1777
Alamat : Jorong Pasar Baru, Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru
Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Keputusan Wali Nagari Pangkalan Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Panitia Pelaksana Kegiatan Alek Nagari Pangkalan " Potang Balimau " 1447 H / 2026 M, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Bantuan Personil untuk pengamanan kegiatan Alek Nagari Pangkalan " Potang Balimau " 1447 H / 2026 M yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 18 Februari 2026
Pukul : 10.00 wib s/d selesai
Tempat : Nagari Pangkalan.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak dengan ini kami lampirkan :

1. SK Panitia ;
2. Foto Copy KTP Ketua Umum / Penanggungjawab;
3. Surat Dukungan dan Izin Tempat Kegiatan dari Wali Nagari; dan
4. Rundown Acara.

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak kiranya Bapak dapat memberi kami izin. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih.

Diketahui oleh,
WALI NAGARI PANGKALAN

RIFDAL LAKSAMANO

Kami yang bermohon,
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
KETUA UMUM


ROTA YUDISTIRA



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
NAGARI SITUJUH BATUA**

Jalan Khatib Sulaiman Nomor 1

Kode Pos. 26263

Nomor : 500.11.28.1/57/PEMNAG-SB/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tenaga Pengatur Lalu Lintas

Situjuh Batua, 06 Februari 2026

Kepada Yth. :

Bapak Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Lima Puluh Kota

Di

Sarilamak

Dengan hormat,

Pertama-tama kami mendoakan semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin Ya Rabbal Alamin.

Kemudian dari itu kami sampaikan kepada Bapak bahwa situasi lalu lintas dekat Persimpangan Jalan Pasar Nagari Situjuh Batua, menimbulkan kemacetan bahkan sering terjadi kecelakaan, terutama di pagi hari yang diakibatkan banyaknya anak sekolah yang lalu lalang di persimpangan Pasar Nagari tersebut.

Oleh sebab itu kami Pemerintah Nagari bermohon kepada Bapak agar menempatkan Personil Bapak di pagi hari sebanyak 2 orang untuk mengatur lalu lintas agar kemacetan dan kecelakaan bisa dihindari.

Demikianlah kami sampaikan atas bantuan dan perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.



Pada Hari Nagari Situjuh Batua,

EMIL NURY IRSYAN, SE. MM

NIP. 19861122 201001 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Drs. H. Aziz Haily, MA - Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
Website : bpkd.limapuluhkotakab.go.id, e-mail : bpkd@limapuluhkotakab.go.id

Sarilamak, 06 Maret 2026

Nomor : 900.1.13.1/ 116 /BPKPD-LK/III/2026
Lampiran : -
Perihal : Permintaan Nama Tim Penyusun
Ranperbup PDRD

Kepada Yth :
Kepala Perangkat Daerah
(daftar terlampir)

di
Tempat

Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai ketentuan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara untuk menyampaikan nama dan jabatan personil yang akan ditugaskan sebagai anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Usulan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 11 Maret 2026 untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
SELAKUPPKD



Drs. A. ZUHDI PERAMA PUTRA, M. Si
NIP. 19690218 199403 1 0091


Tembusan :

1. Bupati Lima Puluh Kota;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Lampiran : Daftar Kepala Perangkat Daerah Penerima Surat Permintaan Nama Tim Penyusunan
Ranperbup Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
4. Kepala Dinas Perhubungan;
5. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. Kepala Dinas Perikanan;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
10. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
11. Direktur RSUD dr. Achmad Darwis.

**Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota**



INDRA ATMAJA, S. Sos
NIP. 19750121 200003 1 001



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR 50 KOTA

Jalan Raya Negara Sumbar-Riau Km. 12 Sarilamak 26271

Sarilamak, 10 Maret 2026

Nomor : B/ 89 /III/OPS.1.2.3./2026
Klasifikasi: Biasa
Lampiran : satu lembar
Hal : permintaan pasukan Apel Gelar Pasukan Operasi
Ketupat Singgalang 2026 Polres 50 Kota.

Kepada

Yth. DAFTAR NAMA
PEJABAT TERLAMPIR

di

Tempat

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri;
 - c. Surat Telegram Kapolda Sumbar Nomor: STR/57/III/OPS.1.2.3./2026 tanggal 27 Februari 2026 tentang Rencana Garis Besar Operasi Ketupat Singgalang Tahun 2026 Polda Sumbar;
 - d. Surat Telegram Kapolres 50 Kota Nomor: STR/19/III/OPS.1.2.3./2026 tanggal 28 Februari 2026 tentang Rencana Garis Besar Operasi Ketupat Singgalang Tahun 2026 Polres 50 Kota;
 - e. Rencana Kerja Polres 50 Kota Tahun 2026.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Polres 50 kota akan melaksanakan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi "KETUPAT SINGGALANG 2026" yang pelaksanaannya dibantu oleh Instansi terkait serta mitra kamtibmas lainnya dalam rangka Pengamanan perayaan Idul Fitri 1447 H / 2026 di wilayah hukum Polres 50 Kota yang dilaksanakan mulai tanggal 13 s/d 25 Maret 2026, yang diawali dengan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Singgalang 2026 Polres 50 Kota.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, dimohon kepada Komandan/Bapak/Ibu berkenan mengirimkan personel (jumlah terlampir) untuk mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Singgalang 2026 Polres 50 Kota yang akan dilaksanakan pada:
 - a. hari / tanggal: Kamis/12 Maret 2026;
 - b. pukul : 08.30 Wib;
 - c. tempat : Lapangan Apel Bhayangkara Polres 50 Kota;
 - d. pakaian : PDL masing-masing instansi.

4. Demikian.....

2

SURAT KAPOLRES 50 KOTA
NOMOR : B/89/III/OPS.1.2.3/2026
TANGGAL: 10 MARET 2026

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

1. Kapolda Sumbar.
2. Inwasa Polda Sumbar.
3. Karoops Polda Sumbar.





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR 50 KOTA
Jalan Raya Negara Sumbar-Riau Km. 12 Sarilamak 26271

LAMPIRAN SURAT KAPOLRES 50 KOTA
NOMOR : B/ 89 /III/OPS.1.2.3./2026
TANGGAL: 10 MARET 2026

DAFTAR PERMINTAAN PASUKAN
APEL GELAR PASUKAN OPERASI KETUPAT SINGGALANG 2026 POLRES 50 KOTA
HARI KAMIS TANGGAL 12 MARET 2026

NO	KESATUAN/INSTANSI	KUAT PERS	KET
1	KODIM 0306 / 50 KOTA	10 PERSONEL	A. TANPA SENJATA, B. MEMBAWA RANMOR DINAS, C. 1 PERS SEBAGAI PERWAKILAN PEMASANGAN PITA TANDA OPERASI
2	SUBDENPOM II/4-3 PAYAKUMBUH	1 PERSONEL	A. MEMBAWA RANMOR DINAS, B. 1 PERS SEBAGAI PERWAKILAN PEMASANGAN PITA TANDA OPERASI
3	BPBD KAB 50 KOTA	10 PERSONEL	A. MEMBAWA RANMOR DINAS
4	DINAS PERHUBUNGAN KAB 50 KOTA	10 PERSONEL	A. MEMBAWA RANMOR DINAS, B. 1 PERS SEBAGAI PERWAKILAN PEMASANGAN PITA TANDA OPERASI
5	SATPOL-PP KAB 50 KOTA	10 PERSONEL	A. MEMBAWA RANMOR DINAS, B. 1 PERS SEBAGAI PERWAKILAN PEMASANGAN PITA TANDA OPERASI
6	DAMKAR KAB 50 KOTA	10 PERSONEL	A. MEMBAWA RANMOR DINAS



RESOR 50 KOTA POLDA SUMBAR

AKHIL WACHID, S.H., S.I.K., M.H.

INSPEKTUR BESAR POLISI NRP 83021101



PANITIA PELAKSANA
HALAL BI HALAL PENDIDIK KECAMATAN HARAU
Sekreteriat Kantor Korwil Pendidikan Kecamatan Harau Jl.Raya Negara KM.7 Tj.Pati

Tanjung Pati, 09 Maret 2026

Nomor : 03 /PANPEL.HBH.HR/III-2026
Lamp : -
Perihal : permintaan anggota Pengaturan Lalu Lintas

Kepada
Yth : Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Sarilamak

Sehubungan akan dilaksanakan acara Halal Bihalal Pendidik dan Tenaga Kependidikan se Kecamatan Harau, kami memohon izin kepada Bapak untuk permintaan 6 (enam) orang anggota Pengaturan Lalu Lintas untuk acara yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :Kamis / 02 April 2026
Waktu :09.00 WIB - selesai
Tempat :Pendopo RTH Mahkota Berlian

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Panitia Pelaksana Halal Bi Halal

Ketua

HARLISNAWATI, S.Pd. M.Pd.
NIP. 19720307 200604 2 011

Sekretaris

RAHMAT FAJRI, S.Pd.M.Pd.
NIP. 19910525 202312 1 011

Mengetahui Ketua KKKS Kecamatan Harau

GITA RISTRALIA, S.Pd. M.Pd.
NIP. 19830423 200604 2 016



PANITIA PELAKSANA
HALAL BI HALAL PENDIDIK KECAMATAN HARAU
Sekreteriat Kantor Korwil Pendidikan Kecamatan Harau Jl.Raya Negara KM.7 Tj.Pati

Tanjung Pati, 09 Maret 2026

Nomor : 03 /PANPEL.HBH.HR/III-2026
Lamp : -
Perihal : permintaan anggota Pengaturan Lalu Lintas

Kepada
Yth : Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota
di
Sarilamak

Sehubungan akan dilaksanakan acara Halal Bihalal Pendidik dan Tenaga Kependidikan se Kecamatan Harau, kami memohon izin kepada Bapak untuk permintaan 6 (enam) orang anggota Pengaturan Lalu Lintas untuk acara yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :Kamis / 02 April 2026
Waktu :09.00 WIB - selesai
Tempat :Pendopo RTH Mahkota Berlian

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Panitia Pelaksana Halal Bi Halal

Ketua

HARLISNAWATI, S.Pd. M.Pd.
NIP. 19720307 200604 2 011

Sekretaris

RAHMAT FAJRI, S.Pd.M.Pd.
NIP. 19910525 202312 1 011

Mengetahui Ketua KKKS Kecamatan Harau

GITA RISTRALIA, S.Pd. M.Pd.
NIP. 19830423 200604 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Pahlawan No. 5 Payakumbuh Telp. Fax (0752) 94155 / 94097

Payakumbuh, 13 Maret 2026

Nomor : 200.1.2.2/146 /BKBP-LK/III/2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Izin**

Kepada Yth. Sdr. :

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota
di -

Tempat.

Dengan hormat,

Dalam rangka mempersiapkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan melaksanakan Seleksi Calon Paskibraka Tahun 2026 sebagaimana jadwal terlampir. Untuk itu kami menunjuk salah seorang Purna Paskibraka Kabupaten Lima Puluh Kota a.n **Qatrunnada Aino** yang saat ini berdinasi di instansi yang Saudara pimpin sebagai Tim Seleksi Paskibraka Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohonkan kepada Saudara untuk dapat memberikan izin kepada yang bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan kepada Saudara, atas izin dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


**KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**Lrs. DEDDY PERMANA, MM
NIP. 19670810 198809 1 002**

Tembusan disampaikan Kepada: Yth.:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak *(sebagai laporan)*
2. Arsip.

Lampiran

Nomor : 200.1.2.3/ 146 /BKBP-LK/III/2026

Tanggal : 13 Maret 2026

Perihal : Permohonan Izin

JADWAL SELEKSI PASKIBRAKA TAHUN 2026**1. SELEKSI KE SEKOLAH-SEKOLAH**

No.	LOKASI	HARI/TANGGAL
1.	Sekolah - sekolah di Kec. Harau	Senin /30 Maret 2026
2.	Sekolah - sekolahdi Kec. Payakumbuh	Selasa / 31 Maret 2026
3.	Sekolah - sekolahdi Kec. Guguk	Rabu / 1 April 2026
4.	Sekolah - sekolahdi Kec. Mungka	Kamis / 2 April 2026
5.	Sekolah - sekolahdi Kec.Suliki	Senin / 6 April 2026
6.	Sekolah - sekolahdi Kec. Gunung Omeh	Selasa / 7 April 2026
7.	Sekolah - sekolahdi Kec. Bukit Barisan	Rabu / 8 April 2026
8.	Sekolah - sekolah di Kec. Akabiluru	Kamis / 9 April 2026
9.	Sekolah - sekolahdi Kec. Situjuh	Jum'at / 10 April 2026
10.	Sekolah - sekolahdi Kec. Lareh Sago Halaban dan Luak	Senin / 13 April 2026
11.	Sekolah - sekolah di Kec. Pangkalan	Selasa / 14 April 2026
12.	Sekolah - sekolah di Kec. Kapur IX	Rabu / 15 April 2026

2. SELEKSI TINGKAT KABUPATEN

- Seleksi TIU & TWK : Senin / 20 April 2026
- Seleksi Kesehatan : Selasa / 21 April 2026
- Seleksi Parade, Kesamaptaan & PBB : Rabu / 22 April 2026



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : Bukit Limau, Jl. Negara Payakumbuh – Pekanbaru Km 10 Sarilamak

Sarilamak, 6 April 2026

Nomor : 800.24/ 276 /BKPSDM-LK/2026
Lampiran : -
Perihal : Mohon Bantuan Pengamanan,
Penertiban Parkir dan Lalu Lintas

Kepada :
Yth. 1. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kab. Lima Puluh Kota
2. Kepala Dinas Perhubungan
Kab. Lima Puluh Kota

di
Sarilamak

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya Pembukaan Pelatihan Dasar (Latsar) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan III dengan metode Pembelajaran *Blended Learning* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 09 April 2026
Pukul : 08.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Kantor Bupati Lima Puluh Kota Lantai. 2

Maka untuk kelancaran acara tersebut kami mohon bantuan Saudara menugaskan personil untuk pengamanan dan ketertiban lalu lintas peserta Latsar CPNS Tahun 2026 beserta ketertiban parkir kendaraan tamu

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sarilamak, 6 April 2026

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

MUHAMMAD RIFKI, S.STP., M.H
Pembina Tk.4 / NIP. 19770924 199703 1 002

Tembusan :

- Yth. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI KELAS II**

Jl. Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati Kab. Lima Puluh Kota
Telp. (0752) 7754184 – 7754229
Website : www.pn-tanjungpati.go.id

Nomor : 69 /SEK.PN.W3-U12/RT1.1.1/2026 Tanjung Pati, 8 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penilaian Kendaraan
Dinas Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Yth.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Limapuluh Kota
Di-


Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penataan dan penilaian kelayakan Barang Milik Negara (BMN) berupa Kendaraan Dinas di Pengadilan Negeri Tanjung Pati, bersama ini kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menugaskan staf dari Dinas Perhubungan untuk dapat melakukan penilaian terhadap kendaraan dinas milik Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebagai pedoman dalam penetapan status kendaraan dinas.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris
Pengadilan Negeri Tanjung Pati,


Supituarman

Kabid. Pras

Pemerintah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SIS PERHUBUNGAN

Jl. Wira Negara KM 7 Tanjung Pati Telp. (0752) 7754203 Fax. (0752) 7750136



LEMBAR DISPOSISI

- Pelembaga
- Disposisi
- Lembar
S/S,

Diterima tgl ; 08 Januari 2026

1-01 / P09030000

No. Anggota : -

2026

Sifat : Biasa

Hal: PKS anten Pemerintah daerah Kab. 12 Kota dg PT PLN (Persero) untuk induk distribusi Sumatra barat UPS P. Sumatera

Disposisi Kepala Dinas

- 1. Sekretariat :
- 2. Bid. P.S.P. :
- 3. Bid Lalin :
- 4. Bid. Angkutan :

Dengan Hormat

Kabid. Pras
- Pelembaga dan PKS
Kopi Kembalikan
ini sesuai arahan
S/S,

Disposisi Sekretaris

Tgl. Disposisi:

Disposisi Kabid

Tgl. Disposisi:



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA BARAT
UP3 PAYAKUMBUH
TENTANG



PEMBAYARAN LISTRIK PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) PEMERINTAH DAERAH

Nomor Pihak I : .Pj/AGA.04.01/F09030000/2026
Nomor Pihak II : /01/Dishub-Lk/XI/2026

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (02- 01 - 2025)**, Bertempat di Tanjung Pati, oleh pihak – pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat UP3 Payakumbuh, dalam hal ini diwakili **YESSI INDRA** selaku Manager PT PLN (Persero) UP3 Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Nomor 0013.Sku/HKM.02.01/F09000000/2025, tanggal 01 Oktober 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Payakumbuh yang berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin No 52 Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini diwakili oleh **M. DARMAWIJAYA, SH** selaku Kepala Dinas / Pengguna Anggaran, berdasarkan keputusan Bupati Lima Puluh Kota No. 900.1.3.5/424/BUP-LK/XII/2024, tanggal 30 Desember 2024 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan beralamat di Jalan Mr. Syafruddin Prawira Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempertimbangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

1. Undang – Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya;
3. Undang – Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;
7. Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 973/014/KEDUA tanggal 09 Januari 2012 perihal Pemungutan Pajak oleh PT PLN (Persero);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksana Program dan kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145);
12. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019.

Bahwa Berdasarkan hal – hal tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat;
2. Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat Pemda adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. PLN adalah PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Payakumbuh;
4. Penerangan Jalan Umum selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya dilakukan atas persetujuan Pemerintah Daerah;

5. Penerangan Jalan Umum Tidak Resmi selanjutnya disingkat PJU Tidak Resmi adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya belum atas persetujuan Pemerintah Daerah;
6. Rekening Listrik PJU adalah Tagihan Listrik PJU yang disampaikan kepada Pemda yang harus dilunasi setiap bulan;
7. Pelanggan PLN adalah Pelanggan PLN UP3 Payakumbuh di Wilayah Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota;
8. PPJ atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi Tenaga Listrik;
9. Laporan Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (PBJT-TL) / Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah Rekapitulasi Rekening Listrik pelanggan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Payakumbuh sesuai kedudukan pelanggan di Wilayah Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota;
10. Instalasi PJU adalah Instalasi Listrik yang khusus dipergunakan untuk PJU;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Tujuan Perjanjian Kerjasama.
2. Hak dan Kewajiban Pemda dan PLN.
3. Mekanisme Pembayaran Rekening Listrik PJU.
4. Penertiban PJU Tidak Resmi.
5. Meterisasi PJU.
6. Pembangunan dan Pemeliharaan PJU.

Pasal 3

TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Untuk menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik PJU Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada PIHAK PERTAMA
2. Untuk melakukan pengawasan dan penertiban PJU tidak resmi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak :
 - a) Menerima pembayaran tagihan rekening listrik PJU dari PIHAK KEDUA, setiap bulan

- b) Memutus aliran listrik apabila PIHAK KEDUA tidak membayar tagihan rekening listrik PJU sampai batas akhir masa pembayaran (tanggal 20 tiap bulan) dan atau yang dinyatakan bukan objek kewajiban PIHAK KEDUA
 - c) Menerima informasi perubahan wilayah administrasi dari PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA wajib :
- a) .PIHAK PERTAMA bersama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan pemeriksaan lapangan / uji petik untuk mengetahui kebenaran data PJU minimal satu kali pertahun yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan lapangan / uji petik yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
 - b) Memberikan data – data terkait titik – titik Lokasi PJU dan data – data yang berhubungan dengan tagihan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak :
Menerima data – data terkait titik – titik Lokasi PJU dan data – data yang berhubungan dengan tagihan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA wajib :
 - a) Memberikan informasi perubahan wilayah administrasi kepada PIHAK PERTAMA.
 - b) Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan PJU secara rutin.
 - c) Melunasi tagihan rekening listrik PJU, yang merupakan tagihan rekening listrik sesuai kewenangan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan.
 - d) Apabila Daya Lampu PJU melebihi Daya Terkontrak, maka PIHAK KEDUA melakukan Penambahan Daya dengan Biaya dibebankan kepada PIHAK KEDUA yang pembayarannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. PIHAK KEDUA mempersyaratkan lunas tagihan listrik bagi masyarakat yang meminta perizinan ke PEMDA guna percepatan penerimaan pendapatan asli daerah melalui PBJT atas Tenaga Listrik
4. Pelunasan Kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan melalui Payment Point Online Bank (PPOB) dan segala biaya yang timbul selama proses pelunasan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. Apabila PIHAK KEDUA meminta penambahan daya dan atau permintaan penyambungan sementara, maka biaya untuk pelaksanaan hal tersebut dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
6. Data yang diperoleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA hanya dapat digunakan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian ini.

Pasal 6

MEKANISME PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PJU PEMDA

1. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan tagihan rekening listrik PJU.
2. Berdasarkan tagihan rekening listrik PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran / Surat Perintah Membayar (SPP/SPM) untuk melunasi tagihan rekening listrik PJU **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum melunasi tagihan rekening listrik PJU sampai dengan tanggal 20 setiap bulan berjalan, maka **PIHAK PERTAMA** tidak boleh melakukan kompensasi langsung terhadap penerimaan Pajak Penerangan Jalan atau PBJT atas Tenaga Listrik yang merupakan hak **PIHAK KEDUA** untuk tagihan rekening listrik PJU **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

PENERTIBAN PENERANGAN JALAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** melakukan penertiban penerangan jalan umum yang dipasang secara tidak resmi, baik perorangan, kelompok masyarakat, maupun swasta.
2. Untuk menertibkan penerangan jalan umum tidak resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban Penerangan Jalan Umum yang anggotanya terdiri dari Unsur **PIHAK PERTAMA** dan Unsur **PIHAK KEDUA**.
3. Hasil dari penertiban penerangan jalan umum tidak resmi dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

METERISASI PJU

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi perhitungan pemakaian energi listrik (kWh) PJU, **PIHAK KEDUA** melaksanakan Kegiatan Meterisasi PJU secara bertahap dengan Biaya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memasang instalasi PJU dan Alat Pembatas dan Pengukur (APP).
3. Untuk melakukan Meterisasi PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Meterisasi PJU yang terdiri dari unsur **PIHAK PERTAMA** dan unsur **PIHAK KEDUA**.

4. Biaya yang dibutuhkan untuk Meterisasi PJU (biaya pasang baru, SLO, NIDI dan Instalasi), pengembangan PJU dan biaya Meterisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sepenuhnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sedangkan untuk pemasangan APP dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PJU

Pembangunan dan Pemeliharaan lampu PJU adalah tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

Pasal 10

VERIFIKASI DAN SURVEY BERSAMA PJU

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan verifikasi setiap bulan terkait jumlah titik PJU non-meterisasi.

Pasal 11

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang ditetapkan di Pengadilan Negeri setempat/terdekat.

Pasal 12

BERLAKUNYA DAN BATALNYA SURAT PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
2. Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 kitab Undang – Undang Hukum Perdata, PARA PIHAK sepakat :
 - a. Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu pihak tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut – turut.
 - b. Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang – undangan atau kebijaksanaan baru dari Pemerintah

yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan.

3. Pembatalan Perjanjian Kerjasama secara sepihak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak minimal 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat teguran (somasi) yang ketiga.

Pasal 13 **PENUTUP**

Apabila dalam Tahun anggaran berkenan telah ditetapkan ketentuan perundang – undangan baik tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perjanjian ini akan ditinjau kembali dalam bentuk perjanjian Tambahan (Addendum) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 3 (tiga) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan bukti yang sah.

**Pemerintah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Dinas Perhubungan**

**PT. PLN (Persero)
Unit Induk Distribusi Sumatera Barat
UP3 Payakumbuh
Manager**

M. DARMAWIJAYA, SH
NIP: 19690606 200003 1 006

YESSI INDRA
NIP: 7902011R

Nomor : **0003** /AGA.04.02/F09030200/2026
Sifat : Penting
Hal : Tagihan Rekening Listrik bulan **Januari 2026**

08 Januari 2026

Kepada Yth:
Kepala Kantor Dinas Pehubungan
Kab. 50 Kota
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan tagihan Listrik Kantor Dinas Pehubungan bulan Januari tahun 2026 (daftar terlampir).

Total tagihan : **Rp. 8.910.747,-**

Terbilang : ***Delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah,-***

Besar harapan kami agar tagihan rekening listrik tersebut dapat dilakukan pembayaran sebelum tanggal **20 Januari 2026**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MANAGER



RAVI FERNANDES

Tembusan :

PLN UP3 Payakumbuh

Paraf _____

TAGIHAN REKENING LISTRIK BEBAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. LIMA PULUH KOTA
 BULAN JANUARI 2026

NO	TOBEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP TAGIHAN	BULAN REF.	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	REK
1	13280000191	WARING LIGHT	XX SIMPANG POLTANI NO 0	P5	1300	88.376	JANUARI	1	-	88.376	
2	132800015678	KANTOR LAJAR	XX TANGUNG PATI NO 0	P1	6000	1.526.178	JANUARI	1	-	1.526.178	
3	132800071677	WARING LIGHT SMP TIGA H	DS SIMPANG TIGA BARAT NO 0	P3	1300	88.376	JANUARI	1	-	88.376	
4	13280214848	WARING LIGHT SMP TIGA	DS M U N G R A NO 0	P3	1300	88.376	JANUARI	1	-	88.376	
5	134310000337	WARING LIGHT	XX SIMPANG PANGKALAN NO 0	P5	1300	88.376	JANUARI	1	-	88.376	
6	134330000349	WARING LIGHT	XX SIMPANG KUBANG NO 0	P5	1300	88.376	JANUARI	1	-	88.376	
7	134330014950	WARING LIGHT	IL KAMPUNG DALAM SELING NO 0	P3	900	61.183	JANUARI	1	-	61.183	
8	13280000288	RNH DINAS LAJAR	XX TANGUNG PATI NO 0	R1	2300	127.134	JANUARI	1	-	127.134	
9	134330041889	DINAS PERHUBUNGAN	TANGUNG PATI KM 7	P1	62500	5.608.449	JANUARI	1	10.000	5.618.449	
10	13212144261	WARING LIGHT	KOTO BAREKT BR SEMALANGGANG	P3	1300	88.376	JANUARI	1	-	88.376	
11	132362809102	WARING LIGHT	BATANG TAJIT	P3	900	61.183	JANUARI	1	-	61.183	
12	134330180041	WARING LIGHT BR SIKUMPA	BR SIKUMPA	P1	1300	54.548	JANUARI	1	-	54.548	
13	132800015724	KANTOR LAJAR	TANGUNG PATI	P1	2300	931.816	JANUARI	1	-	931.816	
14	142929091434	WARING LIGHT SMP 4 TI	TANGUNG PATI - KOTO TUO	P3T	1300						PRADAYAR
15	86615282284	WARING LIGHT	LARER SMOO HALABAN	P3T	1300						PRADAYAR
Jumlah Total Tagihan						8.906.747		13	10.000	8.916.747	

Tanjung Pail, 08 Januari 2026

RAVI FERNANDES




Nomor : 0107/LIT.00.04/F37000000/2026
Lampiran : 1 Set
Sifat : Segera - Terbatas
Hal : Penyampaian Laporan Pelaksanaan Persetujuan Lingkungan Transmisi & Gardu Induk di Provinsi Sumatera Barat

15 Januari 2026

Kepada
Yth. Terlampir

Sehubungan dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah sebagai Pemrakarsa dalam Persetujuan Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Persetujuan Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada instansi terkait.

Berdasarkan hal di atas, dengan ini Kami menyampaikan 1 (satu) set Laporan Pelaksanaan Persetujuan Lingkungan **Periode Semester-2 Tahun 2025** untuk kegiatan/usaha Ketenagalistrikan (jaringan transmisi dan gardu induk) yang berlokasi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan daftar sebagaimana terlampir.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
GENERAL MANAGER,
PLN HENDRO PRASETYAWAN



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran Surat No : 0107/LIT.00.04/F37000000/2026
Tanggal : 15 Januari 2026

**DAFTAR PENERIMA LAPORAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN
SEMESTER-2 TAHUN 2025 WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	URAIAN NAMA KEGIATAN / USAHA	INSTANSI TUJUAN PENYAMPAIAN DOKUMEN	JUMLAH LAPORAN (SET)
1	SUTT 150 kV Simpang Empat - Ujung Gading	1 DLH Prov. Sumatera Barat	1
		2 DLH Kab. Pasaman Barat	1
2	GIS 150 kV Kota Padang	1 DLH Kota Padang	1
		2 Dinas ESDM Prov. Sumatera Barat	1
		3 Bapedalda Prov. Sumatera Barat/DLH Prov. Suma	1
3	SUTET 275 kV Payakumbuh - NGS (T. 70)	1 DLH Prov. Sumatera Barat	1
		2 DLH Prov. Riau	1
		3 DLH Kab. Lima Puluh Kota	1
		4 DLH Kota Payakumbuh	1
		5 DLH Kab. Kampar	1
		6 DLH Kota Pekanbaru	1
		7 Disnakertrans Kab. Lima Puluh Kota	1
		8 Disnakertrans Kota Payakumbuh	1
		9 Disnaker Kab. Kampar	1
		10 Disnaker Kota Pekanbaru	1
		11 Dishub Kab. Lima Puluh Kota	1
		12 Dishub Kota Payakumbuh	1
		13 Dishub Kab. Kampar	1
		14 Dishub Kota Pekanbaru	1
		15 Dinas ESDM Kab. Lima Puluh Kota	1
		16 Dinas ESDM Kab. Kampar	1
		17 Ditjen Ketenagalistrikan	1
4	SUTT 150 kV Kambang - Tapan - Mukomuko	1 DLH Kab. Pesisir Selatan	1
		2 DLH Kab. Mukomuko	1
		3 DLH Prov. Sumatera Barat	1
		4 DLH Prov. Bengkulu	1
5	SUTT 150 kV Pasaman - Simpang Empat	1 DLH Prov. Sumatera Barat	1
		2 DLH Kab. Pasaman Barat	1
		3 Dinas PRKPPL/DLH Kab. Pasaman	1
		4 Disnakertrans Kab. Pasaman Barat	1
		5 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tenaga Kerja Kab. Pasaman	1
6	SUTT 150 kV Phi Incomer PLTU Sumatera Barat SUTT 150 kV PLTU Teluk Sirih - Inc. 2 Phi (Bungus - Kambang)	1 DLH Kota Padang	1
7	SKTT GIS 150 kV Padang - Inc. Single Phi (Lubuk Alung/PIP - Pauh Limo)	1 DLH Prov. Sumatera Barat	1
		2 DLH Kota Padang	1
Total Dokumen Laporan (set)			34

Nomor : 006/AGA.04.02/F09030200/2026
Sifat : Penting
Hal : Tagihan Rekening Listrik bulan Februari 2026

03 Februari 2026

Kepada Yth:
Kepala Kantor Dinas Pehubungan
Kab. 50 Kota
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan tagihan Listrik Kantor Dinas Pehubungan bulan Februari tahun 2026 (daftar terlampir).

Total tagihan : Rp. 8.545.238,-
Terbilang : *Delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah,-*

Besar harapan kami agar tagihan rekening listrik tersebut dapat dilakukan pembayaran sebelum tanggal 20 Februari 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MANAGER



RAVI FERNANDES

Tembusan :


PLN UP3 Payakumbuh

Paraf _____

TAGIHAN REKENING LISTRIK BEBAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. LIMA PULUH KOTA
BULAN FEBRUARI 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP TAGIHAN	BULAN REK	LBR	Biaya Meterai	TOTAL TAGIHAN	KET
1	13280000191	WARNING LIGHT	XX SIMPANG POLITANI NO 0	P3	1300	88.376	FEBRUARI	1	-	88.376	
2	132800015678	KANTOR LLAJR	XX TANJUNG PATI NO 0	P1	6600	1.169.277	FEBRUARI	1	-	1.169.277	
3	132800013677	WARNING LIGHT SIMP. TIGA H	DS SIMPANG TIGA HARAU NO 0	P3	1300	88.376	FEBRUARI	1	-	88.376	
4	132862314848	WARNING LIGHT SIMP. TIGA	DS M U N G K A NO 0	P3	1300	88.376	FEBRUARI	1	-	88.376	
5	134310000337	WARNING LIGHT	XX SIMPANG PANGKALAN NO 0	P3	1300	88.376	FEBRUARI	1	-	88.376	
6	134330000349	WARNING LIGHT	XX SIMPANG KUBANG NO 0	P3	1300	88.376	FEBRUARI	1	-	88.376	
7	134530014950	WARNING LIGHT	JL KAMPUNG DALAM SULIKI NO 0	P3	900	61.183	FEBRUARI	1	-	61.183	
8	132800009288	RMB.DINAS LLAJR	XX TANJUNG PATI NO 0	R1	2200	127.134	FEBRUARI	1	-	127.134	
9	134510041889	DINAS PERHUBUNGAN	TANJUNG PATI KM 7	P1	82500	5.608.449	FEBRUARI	1	10.000	5.618.449	
10	132312144261	WARNING LIGHT	KOTO BARU-KT BR SIMALANGGANG	P3	1300	88.376	FEBRUARI	1	-	88.376	
11	132362809102	WARNING LIGHT	BATANG TABIT	P3	900	61.183	FEBRUARI	1	-	61.183	
12	134520180041	WARNING LIGHT BK SIKUMPA	BK SIKUMPA	P1	1300	54.548	FEBRUARI	1	-	54.548	
13	132800015724	KANTOR L L A J R	TANJUNG PATI	P1	2200	923.208	FEBRUARI	1	-	923.208	
14	14292995434	WARNING LIGHT SIMP. 4 T1	TANJUNG PAJI - KOTO TUO	P3T	1300						PRABAYAR
15	86015289284	WARNING LIGHT	LAREH SAGO HALABAN	P3T	1300						PRABAYAR
JUMLAH TOTAL TAGIHAN						8.535.238	-	13	10.000	8.545.238	

Tanjung Pati, 03 FEBRUARI 2026


RAVI FERNANDES

Nomor : **0033** /AGA.04.02/F09030000/2025
Lampiran : 1 Set
Sifat : Segera - Terbatas
Perihal : Tagihan Rekening Listrik PJU Beban
Pemkab Lima Puluh Kota Bulan Januari
dan Februari 2026

3 Februari 2026

Kepada :

Kepala Dinas Perhubungan
Kab. 50 Kota
Di
Tanjung Pati

Dengan hormat,

Terlampir disampaikan Daftar Tagihan Rekening Listrik beban Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bulan Januari dan Februari 2026 :

URAIAN	TAGIHAN	TERBILANG
REKENING LISTRIK BULAN JANUARI 2026	Rp 466.402.902,-	"Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah"
REKENING LISTRIK BULAN FEBRUARI 2026	Rp 467.096.318,-	"Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah"
TOTAL TAGIHAN	Rp 933.499.220,-	"Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah"

Agar saudara dapat melakukan verifikasi terhadap data tagihan PJU terlampir, dan demi kelancaran proses administrasi, pembayaran rekening listrik tersebut dapat disetorkan ke :

- Nama Bank : BANK TABUNGAN NEGARA
- Nomor Rekening : 9999801345300100
- Nama Rekening : LPJU PEMDA 50 KOTA

Diharapkan pembayaran rekening listrik PJU tersebut dapat disetor sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari pemutusan aliran listrik, dan juga dapat kami sampaikan bahwa PLN telah menyetorkan Pajak Penerangan Jalan bulan Januari s.d Desember 2025 ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp 15.079.034.410,- (Lima Belas Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

MANAGER UNIT PELAKSANA
PELAYANAN PELANGGAN
PAYAKUMBUH



Tembusan :

1. Bupati Lima Puluh Kota
2. Sekretaris Daerah Kab. Lima Puluh Kota
3. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lima Puluh Kota

TAGIHAN REKONING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN FEBRUARI 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
1	13280000013	P.JU	XX BULIKI	P3	320	531.953	Feb-2026	1	-	531.953	
2	13280000021	P.JU	XX DANGUNG DANGUNG	P3	320	531.953	Feb-2026	1	-	531.953	
3	13280000047	PENERANGAN JALAN	XX MUNGA	P3	450	880.357	Feb-2026	1	-	880.357	
4	13280000054	PENERANGAN JALAN	XX PANOKALAN	P3	450	880.357	Feb-2026	1	-	880.357	
5	13280000062	PENERANGAN JALAN	XX LIMBANONG	P3	450	880.357	Feb-2026	1	-	880.357	
6	13280000070	PRU	XX TARAM	P3	450	880.357	Feb-2026	1	-	880.357	
7	13280000088	PJU	XX PK RABAA SML0	P3	450	880.357	Feb-2026	1	-	880.357	
8	13280000096	PRU	XX TAEH BARUH	P3	450	880.357	Feb-2026	1	-	880.357	
9	13280000118	P. J. U	XX KT TINDGI SULIKI	P3	900	1.760.713	Feb-2026	1	-	1.760.713	
10	13280000134	PJU GOR	XX KETINGOHAN	P3	10.600	23.664.256	Feb-2026	1	10.000	23.674.256	
11	13280000167	PRU GUNTING	XX GUNTING SULIKI	P3	450	880.357	Feb-2026	1	-	880.357	
12	13280000175	PRU ANDING	XX ANDING	P3	2.200	4.398.384	Feb-2026	1	-	4.398.384	
13	13280000204	PRU GARDU 105	XX KETINGOHAN	P3	6.600	518.357	Feb-2026	1	-	518.357	
14	13280000212	PRU GARDU 183	XX HARAU	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
15	13280000220	PRU GARDU 78	XX SARILAMAK	P3	6.600	793.681	Feb-2026	1	-	793.681	
16	13280000238	PRU GARDU 294	XX KANDANG LAMO	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
17	13280000246	PRU GARDU 47	XX KOMPLEK KODDM	P3	7.700	523.455	Feb-2026	1	-	523.455	
18	13280000253	PRU GARDU 283	XX TANJUNG PATI	P3	7.700	1.063.906	Feb-2026	1	-	1.063.906	
19	13280000309	PJU KEC HARAU GD 182	XX PULUTAN TANJUNG PATI	P3	4.400	688.310	Feb-2026	1	-	688.310	
20	13280000317	PJU KEC HARAU GD 77	XX SIMPANG TANJUNG PATI	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
21	132800068542	PJU HARAU-DEPAN POLRES	DS H A R A U	P3	10.600	720.601	Feb-2026	1	-	720.601	
22	132800072244	PJU. PASAR TARAM	DS PASAR TARAM	P3	10.600	23.664.256	Feb-2026	1	10.000	23.674.256	
23	132800073693	PJU OMBEK WISATA LEMBAH H	DS LEMBAH HARAU	P3	10.600	23.664.256	Feb-2026	1	10.000	23.674.256	
24	132800074248	PJU BUKIT LIMBUKU	DS BUKIT LIMBUKU	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
25	132800074255	PJU BATU BALANG	DS BATU BALANG	P3	10.600	23.664.256	Feb-2026	1	10.000	23.674.256	
26	132811029865	PJU PAUH ANOK	DS PAUH ANOK PANOKALAN	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
27	132811029873	PJU PASAR MANGGILANG	DS PSR MANGGILANG	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
28	132821283154	PJU PASAR KOTO BANGUN	DS KOTO BANGUN	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
29	132831562892	PJU PSR DANGUNG DANGUNG	DS DANGUNG-DANGUNG	P3	10.600	23.664.256	Feb-2026	1	10.000	23.674.256	
30	132841806851	PJU PASAR SULIKI	DS S U L I K I	P3	10.600	23.664.256	Feb-2026	1	10.000	23.674.256	
31	132841809244	PJU ANDIANG	DS ANDING	P3	10.600	720.601	Feb-2026	1	-	720.601	
32	132852009177	PJU TANJUNG BALIK/RIMBO D	DS TJ BALIK RIMBO DATA	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
33	132862310616	PJU MUNGA TENGAH	DS MUNGA TENGAH	P3	10.600	23.762.828	Feb-2026	1	10.000	23.772.828	
34	132862315094	PJU PAKAN RABAA SIMALANG	DS PAKAN RABAA SIMALANGGANG	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
35	134000079241	PJU KANTOR BUPATI	DS SARILAMAK	P3	23.000	50.618.604	Feb-2026	1	10.000	50.618.604	
36	134000080734	PJU SEPATAJ-TARAM	DS SEPATAJ-TARAM	P3	4.400	623.728	Feb-2026	1	-	623.728	
37	134000080767	PJU KANTOR BUPATI	DS SARILAMAK	P3	5.500	1.908.572	Feb-2026	1	-	1.908.572	

21

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN FEBRUARI 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
38	134300057875	PJU SIMP 4 TJ PATI	DS SIMP 4 TJ PATI	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
39	134310012307	PJU PANGKALAN	XX PANGKALAN KOTO BARU	P3	10.600	720.601	Feb-2026	1	-	720.601	
40	134321286223	PJU PASAR MUARO PAITI	DS PASAR MUARO PAITI	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
41	134321291716	PJU	DS LUBUK ALAI	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
42	134321291724	PJU	DS MUARO PAITI	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
43	134331568009	PJU MESJID KUBANG	DS KUBANG	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
44	134331568017	PJU PASAR LIMBANANG	DS LIMBANANG	P3	10.600	23.664.256	Feb-2026	1	10.000	23.674.256	
45	134341810674	PJU KTR CAMAT KOTO TINGGI	DS KOTO TINGGI	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
46	134352010150	PJU PASAR R-DATA	DS PASAR RIMBO DATA	P3	4.400	299.117	Feb-2026	1	-	299.117	
47	134341817791	PJU KTR CAMAT GUNTUNG	DS GUNTUNG	P3	4.400	494.563	Feb-2026	1	-	494.563	
48	134530007081	PJU	DS SUANGKANG TARANTANG	P3	10.600	720.601	Feb-2026	1	-	720.601	
49	134530014042	PJU LUBUK ALAI	DS LUBUK ALAI	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
50	134530014529	PJU MDN BAPANEH TARANTANG	DS TARANTANG	P3	10.600	720.601	Feb-2026	1	-	720.601	
51	134530018480	PJU GANTLANG TARAM	DS GANTLANG TARAM	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
52	134530020735	PJU KOTO LAMO	DS KOTO LAMO	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
53	134530021400	PJU GUNUNG MALINTANG	DS GUNUNG MALINTANG	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
54	134530033411	PJU PASAR BARIUAH GUNUNG	DS BARUAH GUNUNG BKT BARIBAN	P3	3.500	237.934	Feb-2026	1	-	237.934	
55	134530033437	PJU TANJUNG BUNGO	DS TANJUNG BUNGO KOTO LAMO	P3	3.500	237.934	Feb-2026	1	-	237.934	
56	134530034099	PJU KOTO ALAM	DS KOTO ALAM	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
57	134530035889	PJU KOTO TUO HARAU	DS KOTO TUO HARAU	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
58	134530036483	PJU LUBUK ALAI	DS LUBUK ALAI	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
59	134530036596	PJU PURWAJAYA	DS PURWAJAYA	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
60	134530037892	PJU KURANJI	DS KURANJI	P3	3.500	237.934	Feb-2026	1	-	237.934	
61	134530037906	PJU GUGUAK	DS GUGUAK	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
62	134530037963	PJU TIAKAR GUGUAK	DS TIAKAR GUGUAK	P3	3.500	237.934	Feb-2026	1	-	237.934	
63	134530038725	PJU KOTO TUO MUNGE	DS KOTO TUO MUNOKA	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
64	134530039903	PJU TJ BARULAK KUBANG	DS TANJUNG BARULAK KUBANG	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
65	134530039689	PJU JOPANG MANGANTI	DN JOPANG MANGANTI	P3	3.500	846.366	Feb-2026	1	-	846.366	
66	134530042779	PJU KORONG KOTO KOZIAK	DS KOTO KOZIAK	P3	6.600	1.558.469	Feb-2026	1	-	1.558.469	
67	134530043038	PJU BELLUBUS	DK KORONG BELLUBUS	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
68	134530043706	PJU BANJA LAWEH	DS BANJA LAWEH	P3	3.500	508.159	Feb-2026	1	-	508.159	
69	134530063044	PJU KORONG KOTO TANGAH	DS NAGARI KOTO LAMO	P3	3.500	237.934	Feb-2026	1	-	237.934	
70	134530065638	PJU NAGARI SUNGAI ANTUAN	DK MUNOKA	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
71	134530066352	PJU NAGARI KOTO BANGUN	DS KOTO BANGUN MUARO PAITI	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
72	134530066934	PJU KOTO ALAM	DS KOTO ALAM	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
73	134530067219	PJU TANJUNG PAUH	DS TANJUNG PAUH	P3	10.600	20.912.717	Feb-2026	1	10.000	20.922.717	

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN FEBRUARI 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
74	134530067243	PJU MANGGILANG	DS MANGGILANG	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
75	134530088036	PJU TAEH BUKIK I	DS TALAGO TAEH BUKIT	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
76	134530088044	PJU SIALANG I	DS SIALANG	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
77	134530088051	PJU GN MALINTANG II	DS GN MALINTANG	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
78	134530088069	PJU TARATAK SARILAMAK	DS TARATAK SARILAMAK	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
79	134530088077	PJU SIALANG III	DS SIALANG	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
80	134530088085	PJU GN MALINTANG I	DS GN MALINTANG	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
81	134530088197	PJU TAEH BARUAH	DS KUBU GADANG TAEH BARUAH	P3	1.300	190.347	Feb-2026	1	-	190.347	
82	134530088115	PJU TAEH BUKIK II	DS BUKIT TAPUANG TAEH BUKIK	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
83	134530088123	PJU BANJARANAH	DS BANJARANAH PANGKALAN	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
84	134530088149	PJU SIALANG II	DS SIALANG	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
85	134530088284	PJU KOTO TANGAH SMLGO	DS KOTO TANGAH SIMALANGGANG	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
86	134530088363	PJU GUGUAK	DS GUGUAK	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
87	134530088371	PJU TARATAK	DS TARATAK KUBANG	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
88	134530088389	PJU NAGARI TARAM	DS TARAM	P3	1.300	115.568	Feb-2026	1	-	115.568	
89	134530088397	PJU MAEK	DS SULIKI	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
90	134530109649	PJU SIALANG ATAN - BAWAH	DS SIALANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
91	134530109656	PJU SIMP SMPN 2 SIALANG	DS SIALANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
92	134530109664	PJU LUBUK ALAI	DS LUBUK ALAI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
93	134530145957	PJU NAGARI SIALANG I	DS SIALANG	P3	2.200	294.019	Feb-2026	1	-	294.019	
94	134530145965	PJU NAGARI SIALANG V	DS SIALANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
95	134530145973	PJU NAGARI SIALANG II	DS SIALANG	P3	4.400	299.117	Feb-2026	1	-	299.117	
96	134530145981	PJU NAGARI SIALANG IV	DS SIALANG	P3	2.200	203.944	Feb-2026	1	-	203.944	
97	134530145999	PJU NAGARI SIALANG III	DS SIALANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
98	134530146510	PJU TARATAK	DS TARATAK	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
99	134530146528	PJU PILUBANG	DS PILUBANG	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
100	134530146536	PJU KANDANG LAMO	DS KANDANG LAMO	P3	1.300	193.746	Feb-2026	1	-	193.746	
101	134530146544	PJU PURWAJAYA	DS PURWAJAYA	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
102	134530147994	PJU KP TANGAH TI MAUR	DS KP TANGAH MAUR	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
103	134530148004	PJU TAEH BARUAH	DS TAEH BARUAH	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
104	134530148158	PJU LABUAM LENTANG	DS SEI ANTUAN	P3	2.200	254.930	Feb-2026	1	-	254.930	
105	134530148166	PJU MAEK	DS MAEK	P3	900	61.183	Feb-2026	1	-	61.183	
106	134530154436	PJU TAEH BUKI	DS TAEH BUKIK	P3	2.200	200.545	Feb-2026	1	-	200.545	
107	134530166007	PJU JLN LINGKAR HARAU II	DS JLN LINGKAR HARAU	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
108	134530166015	PJU JLN LINGKAR HARAU I	DS JLN LINGKAR HARAU	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
109	134530166144	PJU KOTO TANGAH 2	DS JORONG DATAR	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	

**TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TAGIHAN BULAN FEBRUARI 2026**

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
110	134530166151	PJU KOTO TANGAH 3	DS JORONG DATAR	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
111	134530166169	PJU KOTO TANGAH	DS JORONG DATAR	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
112	134530166185	PJU LABUAH LINTANG 1	DS JORONG LABUAH LINTANG	P3	2.200	185.249	Feb-2026	1	-	185.249	
113	134530166193	PJU KOTO PUJI 2	DS JORONG KOTO PUJI	P3	2.200	375.596	Feb-2026	1	-	375.596	
114	134530166206	PJU TAEH BARUAH	DS JORONG PADANG PARIK PANJA	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
115	134530166214	PJU SUNGAI ANTUAN	DS JORONG SUNGAI ANTUAN	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
116	134530166222	PJU LABUAH LINTANG 2	DS JORONG LABUAH LINTANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
117	134530166230	PJU GUGUAK VIII KOTO	DS JORONG GUGUAK VIII KOTO	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
118	134530166248	PJU KOTO PUJI 1	DS JORONG KOTO PUJI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
119	134530166325	PJU GALUGUA	DS GALUGUA	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
120	134530166343	PJU LUBUK ALAI 1	DS JORONG SUKA KARYA	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
121	134530166350	PJU GUNUNG MALINTANG 2	DS JORONG SUNGAI PIMPING	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
122	134530166368	PJU LUBUK ALAI 2	DS JORONG RUMBAI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
123	134530166376	PJU GUNUNG MALINTANG 1	DS JORONG BUKIT TALAU	P3	2.200	322.911	Feb-2026	1	-	322.911	
124	134530167282	PJU HARAU 2 PADANG TAROK	DS PADANG TAROK	P3	2.200	571.042	Feb-2026	1	-	571.042	
125	134530167290	PJU TAEH BUKIK PABATUANGA	DS PABATUANGAN TAEH BUKIK	P3	2.200	261.728	Feb-2026	1	-	261.728	
126	134530167304	PJU BULUH KASOK	DS BULUH KASOK	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
127	134530167312	PJU HARAU 1 PADANG TAROK	DS PADANG TAROK	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
128	134530178856	PJU TRAN LUBUK ALAI I	JL LUBUK ALAI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
129	134530178864	PJU ATEH KOTO	JL ATEH KOTO	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
130	134530178872	PJU BALAI CUBADAK TARAM	JL BALAI CUBADAK TARAM	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
131	134530178880	PJU BALAI TALANG	JL BALAI TALANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
132	134530178898	PJU PANGKALAN III	JL LUBUK LANTAN	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
133	134530178902	PJU BANJALAWEH	JL BANJALAWEH	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
134	134530178910	PJU BELUBUS GUGUAK NUNANG	JL BELUBUS GUGUAK NUNANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
135	134530178928	PJU PANGKALAN II	JL PANGKALAN	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
136	134530178936	PJU TRAN LUBUK ALAI III	JL LUBUK ALA	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
137	134530178944	PJU MAEK II	JL MAEK	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
138	134530178951	PJU SUNGAI TALANG	JL SUNGAI TALANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
139	134530178969	PJU KALUDAN	JL KALUDAN	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
140	134530178977	PJU LIMBANANG II	JL LIMBANANG	P3	2.200	151.258	Feb-2026	1	-	151.258	
141	134530178985	PJU PARIK PANJANG	JL PARIK PANJANG	P3	2.200	164.854	Feb-2026	1	-	164.854	
142	134530178993	PJU JORONG TALAWI	JL MUARO PAITI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
143	134530179003	PJU KUBANG TUNGKEK I	JL KUBANG TUNGKEK	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
144	134530179011	PJU PERUM PTPN VI	JL GUNUNG MALINTANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
145	134530179029	PJU SMPN 5 LUBUK ALAI	JL LUBUK ALAI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	



TAGIHAN REKONING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN FEBRUARI 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KEY
146	134530179037	PJU KAMPUNG DURI	JL MU'ARO PAITI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
147	134530179052	PJU TIGO ALUR	JL TIGO ALUR	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
148	134530179060	PJU LUBUK GODANG II	JL LUBUK GODANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
149	134530179078	PJU BINTUNGAN SAKTI	JL BINTUNGAN SAKTI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
150	134530179086	PJU MUDI'AK LEKI	JL MUDI'AK LEKI	P3	2.200	169.953	Feb-2026	1	-	169.953	
151	134530179094	PJU TIGO BALAI	JL TIGO BALAI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
152	134530179108	PJU KUBANG TUNOKEK II	JL KUBANG TUNOKEK	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
153	134530179116	PJU SULIKI BARUAH	JL SULIKI BARUAH	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
154	134530179124	PJU KURAYA	JL LUBUK BANGKU	P3	2.200	1.033.314	Feb-2026	1	-	1.033.314	
155	134530179132	PJU CINTA MARU	JL DURIAN TINGGI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
156	134530179140	PJU DURIAN TINGGI	JL DURIAN TINGGI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
157	134530179157	PJU TANJUNG ATEH TARAM I	JL TANJUNG ATEH TARAM	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
158	134530179165	PJU KAMPUNG DALAM	JL KAMPUNG DALAM	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
159	134530179173	PJU LUBUK BANGKU	JL LUBUK BANGKU	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
160	134530179181	PJU SD 02 DURIAN TINGGI	JL DURIAN TINGGI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
161	134530179199	PJU SOLOK BIO-BIO	JL SOLOK BIO-BIO	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
162	134530179202	PJU KOTO LAMO	JL KOTO LAMO	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
163	134530179210	PJU TARANTANG DALAM	JL TARANTANG DALAM	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
164	134530179228	PJU LIMBANANG	JL LIMBANANG	P3	2.200	1.046.910	Feb-2026	1	-	1.046.910	
165	134530179236	PJU TANJUNG ATEH TARAM II	JL TANJUNG ATEH TARAM	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
166	134530179244	PJU LUBUK NAGO	JL LUBUK NAGO	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
167	134530179251	PJU MAEK III	JL MAEK	P3	2.200	197.145	Feb-2026	1	-	197.145	
168	134530179269	PJU TRAN LUBUK ALAI II	JL LUBUK ALAI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
169	134530179277	PJU PANGKALAN I	JL PJU PANGKALAN I	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
170	134530179293	PJU LUBUK GODANG I	DK LUBUK GODANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
171	134530179307	PJU BALAI TINGGI	JL BALAI TINGGI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
172	134530179315	PJU PANGKALAN IV	JL GUNUANG MALINTANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
173	134530179331	PJU SUBARANG TARAM I	JL PJU SUBARANG TARAM I	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
174	134530179349	PJU KURAI	JL KURAI	P3	2.200	1.159.079	Feb-2026	1	-	1.159.079	
175	134530179356	PJU PULUTAN	JL PULUTAN	P3	2.200	158.056	Feb-2026	1	-	158.056	
176	134530179364	PJU PADANG LAWEH	JL PADANG LAWEH	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
177	134530179372	PJU TANJUNG ATEH TARAM II	JL TANJUNG ATEH TARAM	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
178	134530179380	PJU SUBARANG TARAM II	JL SUBARANG TARAM	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
179	134530179398	PJU JORONG PASAR USANG PA	JL PASAR USANG PANGKALAN	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
180	134530179401	PJU KURANJI SIMP BELUBUS	JL KURANJI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
181	134530179419	PJU LIMBANANG I	JL LIMBANANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN FEBRUARI 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
182	134530179427	PJ/ KAMPUNG BARU	JL. KAMPUNG BARU	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
183	134530179435	PJ/ KANDANO LAMO	JL. KANDANO LAMO	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
184	134530179443	PJ/ PASAR DURIAN TINGGI	JL. DURIAN TINGGI	P3	2.200	260.028	Feb-2026	1	-	260.028	
185	134530179450	PJ/ MAEK IV	JL. MAEK	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
186	134530179468	PJ/ LUBUK JANTAN HARAU	JL. LUBUK JANTAN	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
187	134530179476	PJ/ BUNDA MOTOR	JL. PANGKALAN	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
188	134530179484	PJ/ PINTU KOTO	JL. PINTU KOTO	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
189	134530179492	PJ/ TABEK PANJANG	JL. TABEK PANJANG	P3	2.200	548.948	Feb-2026	1	-	548.948	
190	134530179506	PJ/ PASAR LUBUK ALAI	JL. LUBUK ALAI	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
191	134530179514	PR/ KOTO BANGUN	JL. KOTO BANGUN	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
192	134530179522	PR/ KAMPUNG PANJANG	JL. KAMPUNG PANJANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
193	134530179530	PR/ SUNGAI RIMBANG	JL. SUNGAI RIMBANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
194	134530179548	PR/ BUKIK LIMBUKU	JL. BUKIK LIMBUKU	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
195	134530179555	PR/ PADANG AMBACANG	JL. PADANG AMBACANG	P3	2.200	203.944	Feb-2026	1	-	203.944	
196	134530179563	PR/ KOTO KOZIAK	JL. KOTO KOZIAK	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
197	134530179571	PR/ LABUAH TIMBUN	JL. LABUAH TIMBUN	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
198	134530179589	PR/ MAEK I	JL. MAEK	P3	2.200	311.014	Feb-2026	1	-	311.014	
199	134530179597	PR/ MAEK	JL. MAEK	P3	2.200	343.305	Feb-2026	1	-	343.305	
200	134530179600	PR/ PASAR USANG	JL. PANGKALAN	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
201	134530179618	PR/ TALAGO	JL. TALAGO	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
202	134530290280	PR/ PARIT DALAM TAEH 1	DK TAEH	P3	2.200	467.371	Feb-2026	1	-	467.371	
203	134530290298	PR/ PARIT DALAM TAEH 2	DK TAEH	P3	2.200	474.169	Feb-2026	1	-	474.169	
204	134530290316	PR/ PARIT PANJANG	DK TAEH BARUAH	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
205	134530290302	PR/ SARILAMAK	DK SARILAMAK	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
206	134530290344	PR/ PARIT DALAM TAEH 3	DK TAEH	P3	2.200	433.380	Feb-2026	1	-	433.380	
207	134530290328	PR/ PARIT DALAM TAEH 4	DK TAEH	P3	2.200	229.437	Feb-2026	1	-	229.437	
208	134530290310	PR/ BALAJ	DK TAEH BARUAH	P3	2.200	311.014	Feb-2026	1	-	311.014	
208		TOTAL ULP 50 KOTA						208	100.000	328.117.834	-



TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN FEBRUARI 2026
WILAYAH KERJA PLN ULP PAYAKUMBUH

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
1	132300000083	PENERANGAN JALAN	XX PAKAN RABAA	P3	450	2.263.774	Feb-2026	1	-	2.263.774	
2	132300000105	PJU	XX PILADANG	P3	450	2.263.774	Feb-2026	1	-	2.263.774	
3	132300000121	PJU	XX BATU HAMPAR	P3	450	2.263.774	Feb-2026	1	-	2.263.774	
4	132300000154	PJU PK SABTU MUNGO	XX PAKAN SABTU MUNGO	P3	450	2.263.774	Feb-2026	1	-	2.263.774	
5	132300000162	PJU BT TABIT	XX BATANG TABIT	P3	450	2.263.774	Feb-2026	1	-	2.263.774	
6	132312100353	PJU	XX KT BARU SIMALANGGANG	P3	450	2.263.774	Feb-2026	1	-	2.263.774	
7	132312145990	PJU KT BR SIMALANGGANG II	KL KOTO BARU-KT BR SIMALANGGANG	P3	10.600	23.383.834	Feb-2026	1	10.000	23.393.834	
8	132312148789	PJU SEI BERINGIN	DS SEI BERINGIN	P3	6.600	1.240.657	Feb-2026	1	-	1.240.657	
9	132342294252	PJU PILADANG	KL PILADANG-KT TOH BATU HAMPAR	P3	10.600	41.106.532	Feb-2026	1	10.000	41.116.532	
10	132352528022	PJU	XX SITURUH BATU	P3	900	4.529.247	Feb-2026	1	-	4.529.247	
11	132352535009	PJU	XX SI 7 BANDAR DALAM	P3	450	2.263.774	Feb-2026	1	-	2.263.774	
12	132362814357	PJU LAREH SAGO HLJ	XX PAKAN RABAA	P3	10.600	36.670.759	Feb-2026	1	10.000	36.680.759	
13	132362828609	PJU	KL GALO GADANG-ANDALEH	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
14	134202155370	PENERANGAN JALAN UMUM	DS BKJKT APT	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
15	134202156476	PENERANGAN JALAN UMUM	DS BONCAH SUGIRAN	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
16	134202295644	PJU	KL BATU HAMPAR	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
17	134202552780	PJU	DS SITURUH BATU	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
18	134202830420	PJU	DS PAKAN SABTU MUNGO	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
19	134232551992	PJU TUNGGAR	DS TUNOKA DALAM NAGARI	P3	4.400	299.117	Feb-2026	1	-	299.117	
20	134520023748	PJU BATU PAYUNG	JL BATU PAYUNG	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
21	134520030404	PJU SIMPANG SUGIRAN	DS SIMPANG SUGIRAN	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
22	134520046352	PJU SEI KEMUYANG	DS SEI KEMUYANG KAB 50 KOTA	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
23	134520047570	PJU SIMALANGGANG	DS SIMALANGGANG	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
24	134520048109	PJU LAREH NAN PANJANG	DS NAGARI BATU PAYUNG	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
25	134520051454	PJU PROBANG	DK PROBANG 50 KOTA	P3	6.600	1.255.953	Feb-2026	1	-	1.255.953	
26	134520051488	PJU BATU NAN LIMO	DS JORONG BATU NAN LIMO LAMPASI	P3	3.500	237.934	Feb-2026	1	-	237.934	
27	134520051496	PJU BALAI RUPH SMLO	DS BALAI NAGARI SIMALANGGANG	P3	3.500	237.934	Feb-2026	1	-	237.934	
28	134520056909	PJU DPN SMP 1 KEC PYK	DN DEPAN SMP 1 KEC PAYAKUMBUH	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
29	134520057579	PJU SUNGAI BALANTIAK	DN SUNGAI BALANTIAK	P3	6.600	448.676	Feb-2026	1	-	448.676	
30	134520057587	PJU JORONG TANGAH BT AMPA	DN KT TANGAH BATU AMPA NAGARI	P3	6.600	715.502	Feb-2026	1	-	715.502	
31	134520124801	PJU NAGARI BALAI PANJANG	DK BALAI PANJANG	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
32	134520124827	PJU NAGARI MUNDO	DK MUNDO	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
33	134520124906	PJU NAGARI LABUAH GUNUNG	DK LABUAH GUNUNG	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
34	134520124930	PJU NAGRI SUNGAI KAMUYANG	DK SUNGAI KAMUYANG	P3	1.300	135.962	Feb-2026	1	-	135.962	
35	134520125023	PJU SIAMANO BRNYI	DK SIAMANO BRNYI	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
36	134520125031	PJU NAGARI SARIK LAWEH	DK SARIK LAWEH	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
37	134520125056	PJU NAGARI SUAYAN	DK SUAYAN	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376	
38	134520125334	PJU SEI KAMUYANG	DK JORONG TABING	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
39	134520134314	PJU BALAI PANJANG	DK BALAI PANJANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	
40	134520134322	PJU BUKIK SIKUMPA	DK BUKIK SIKUMPA	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559	



PT. PLN (PERSERO)
UJED SUMATERA BARAT
UP3 PAYAKUMBUH

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN FEBRUARI 2026
WILAYAH KERJA PLN ULP PAYAKUMBUH

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET	
41	134520188820	PJU DISHUB 50 KOTA	DK KOTA MALINTANG BL. PANJANG	P3	4.400	299.117	Feb-2026	1	-	299.117		
42	134520188838	PJU DISHUB 50 KOTA	DK BALAI MALENTANG SITANANO	P3	4.400	2.933.389	Feb-2026	1	-	2.933.389		
43	134520188846	PJU DISHUB 50 KOTA	DK LABUAH GUNUNG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559		
44	134520189672	PJU SEI KAMUNYANG	DK SEI JAMUNYANG	P3	1.300	88.376	Feb-2026	1	-	88.376		
45	134520189680	PJU PADANG MANGATEH	DK PADANG MANGATEH	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559		
46	134520192600	PJU SUAYAN	DK SUAYAN TINGKAI	P3	900	61.183	Feb-2026	1	-	61.183		
47	134520194576	PJU PAKAN RABAA	DK BATU NAN LIMO SIMALANGANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559		
48	134520208444	PJU JR. PDO CUBADAK	DK BUKIK SIKUMPA	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559		
49	134520208451	PJU RAGEH	DK BUKIK SIKUMPA	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559		
50	134520208469	PJU TAROK NAGARI ANDALEH	DK ANDALEH	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559		
51	134520208477	PJU TAROK	DK ANDALEH	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559		
52	134520209495	JORONG SUBARANG AIE	DK LAREH BAGO HALABAN	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559		
53	134520209509	PJU KAPALO LABUAH	DN KAPALO LABUAH	P3	2.200	188.648	Feb-2026	1	-	188.648		
54	134520209517	PJU MANANG KODOK 2	DN MANANG KODOK	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559		
55	134520209525	PJU JORONG SIBALADUANG	DN SIBALADUANG	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559		
56	134520209533	PJU JORONG TEMBOK HALABAN	DN TEMBOK	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559		
57	134520209541	PJU MANANG KODOK 1	DN MANANG KODOK	P3	2.200	193.746	Feb-2026	1	-	193.746		
58	134520209558	PJU TARATAK	DN TARATAK	P3	2.200	193.446	Feb-2026	1	-	193.446		
59	134520209566	PJU KUBANG RASAU 1	DN KUBANG RASAU	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559		
60	134520209574	PJU KUBANG RASAU 2	DN KUBANG RASAU	P3	2.200	149.559	Feb-2026	1	-	149.559		
61	134530179045	PJU JORONG GURUAK	RL SUNGAI BERINGIN KOTA	P3	2.200	572.742	Feb-2026	1	-	572.742		
61	TOTAL ULP PAYAKUMBUH								61	30.000	138.978.484	
269	GRAND TOTAL (ULP 50 KOTA + ULP PAYAKUMBUH)								269	130.000	467.096.318	

Payakumbuh, 02 Februari 2026

MANAGER



YESSINDRA

Nomor : 0009/AGA.04.02/F09030000/2026
Lampiran : 1 Set
Sifat : Segera - Terbatas
Hal : Tagihan Rekening Listrik PJU Beban
Pemkab Lima Puluh Kota Bulan Januari
2026

6 Januari 2026

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kab. 50 Kota

Dengan hormat,
Terlampir disampaikan Daftar Tagihan Rekening Listrik beban Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bulan Januari 2026 :

URAIAN	TAGIHAN	TERBILANG
REKENING LISTRIK BULAN JANUARI 2026	Rp 466.402.902,-	"Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah"

Agar saudara dapat melakukan verifikasi terhadap data tagihan PJU terlampir, dan demi kelancaran proses administrasi, pembayaran rekening listrik tersebut dapat disetorkan ke :

- Nama Bank : BANK TABUNGAN NEGARA
- Nomor Rekening : 9999801345300100
- Nama Rekening : LPJU PEMDA 50 KOTA

Diharapkan pembayaran rekening listrik PJU tersebut dapat disetor sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari pemutusan aliran listrik, dan juga dapat kami sampaikan bahwa PLN telah menyetorkan Pajak Penerangan Jalan bulan Januari s.d November 2025 ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp 13.709.703.454,- (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MANAGER UNIT PELAKSANA
PELAYANAN PELANGGAN
PAYAKUMBUH,



Tembusan:

1. Bupati Lima Puluh Kota
2. Sekretaris Daerah Kab. Lima Puluh Kota
3. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lima Puluh Kota

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN JANUARI 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
1	13280000013	P.J.U	XX SULIKI	P3	320	899.051	Jan-2026	1	-	899.051	
2	13280000021	P.J.U	XX DANGUNG DANGUNG	P3	320	899.051	Jan-2026	1	-	899.051	
3	13280000047	PENERANGAN JALAN	XX MUNGKA	P3	450	1.398.713	Jan-2026	1	-	1.398.713	
4	13280000054	PENERANGAN JALAN	XX PANGKALAN	P3	450	1.398.713	Jan-2026	1	-	1.398.713	
5	13280000062	PENERANGAN JALAN	XX LIMBANONG	P3	450	1.398.713	Jan-2026	1	-	1.398.713	
6	13280000070	PJU	XX TARAM	P3	450	1.398.713	Jan-2026	- 1	-	1.398.713	
7	13280000088	PJU	XX PK RABAA SMI.G	P3	450	1.398.713	Jan-2026	1	-	1.398.713	
8	13280000096	PJU	XX TAEH BARUH	P3	450	1.398.713	Jan-2026	1	-	1.398.713	
9	13280000118	P.J.U	XX KT TENOGH SULIKI	P3	900	2.797.426	Jan-2026	1	-	2.797.426	
10	13280000134	PJU GOR	XX KETINGGIAN	P3	10.600	35.877.078	Jan-2026	1	10.000	35.887.078	
11	13280000167	PJU GUNTUNG	XX GUNTUNG SULIKI	P3	450	1.398.713	Jan-2026	1	-	1.398.713	
12	13280000175	PJU ANDING	XX ANDING	P3	2.200	6.932.383	Jan-2026	1	10.000	6.942.383	
13	13280000204	PJU GARDU 105	XX KETINGGIAN	P3	6.600	516.677	Jan-2026	1	-	516.677	
14	13280000212	PJU GARDU 143	XX HARAU	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
15	13280000220	PJU GARDU 78	XX SARILAMAK	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
16	13280000238	PJU GARDU 294	XX KANDANG LAMU	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
17	13280000246	PJU GARDU 47	XX KOMPLEK KORDIM	P3	7.700	523.435	Jan-2026	1	-	523.435	
18	13280000253	PJU GARDU 283	XX TANJUNG PATI	P3	7.700	902.430	Jan-2026	1	-	902.430	
19	13280000309	PJU KEC HARAU GD 182	XX PULUTAN TANJUNG PATI	P3	4.400	681.512	Jan-2026	1	-	681.512	
20	13280000317	PJU KEC HARAU GD 77	XX SIMPANG TANJUNG PATI	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
21	132800068542	PJU HARAU-DEPAN POLRES	DS H A R A U	P3	10.600	720.601	Jan-2026	1	-	720.601	
22	132800072244	PJU PASAR TARAM	DS PASAR TARAM	P3	10.600	23.664.256	Jan-2026	1	10.000	23.674.256	
23	132800073693	PJU OBJEK WISATA LEMBAIH H	DS LEMBAIH HARAU	P3	10.600	23.664.256	Jan-2026	1	10.000	23.674.256	
24	132800074248	PJU BUKIT LIMBUKU	DS BUKIT LIMBUKU	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
25	132800074255	PJU BATU BALANG	DS BATU BALANG	P3	10.600	23.664.256	Jan-2026	1	10.000	23.674.256	
26	132811029865	PJU PAUH ANOK	DS PAUH ANOK PANGKALAN	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
27	132811029873	PJU PASAR MANGGILANG	DS PSR MANGGILANG	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
28	132821283154	PJU PASAR KOTO BANGUN	DS KOTO BANGUN	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
29	132821562892	PJU PSR DANGUNG DANGUNG	DS DANGUNG-DANGUNG	P3	10.600	23.664.256	Jan-2026	1	10.000	23.674.256	
30	132841806851	PJU PASAR SBLIKI	DS SULIKI	P3	10.600	23.664.256	Jan-2026	1	10.000	23.674.256	
31	132841809244	PJU ANDANG	DS ANDING	P3	10.600	720.601	Jan-2026	1	-	720.601	
32	132852009177	PJU TANJUNG BALIKRIMBO D	DS TI BALIK RIMBO DATA	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
33	132862310616	PJU MUNGKA TENGAH	DS MUNGKA TENGAH	P3	10.600	23.784.922	Jan-2026	1	10.000	23.794.922	
34	132862315094	PJU PAKAN RABAA SIMALANG	DS PAKAN RABAA SIMALANGGANG	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
35	134300079241	PJU KANTOR BUPATI	DS SARILAMAK	P3	23.000	50.836.144	Jan-2026	1	10.000	50.836.144	
36	134300080734	PJU SIPATAI-TARAM	DS SIPATAI-TARAM	P3	4.400	1.148.882	Jan-2026	1	-	1.148.882	
37	134300080767	PJU KANTOR BUPATI	DS SARILAMAK	P3	5.500	1.048.610	Jan-2026	1	-	1.048.610	



PT. PLN (PERSERO)
 UD SUMATERA BARAT
 UP3 PAYAKUMBUH

PLN

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN JANUARI 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
										627.127	
38	134300087875	PJU SIMP 4 TJ PATI	DS SIMP 4 TJ PATI	P3	6.600	627.127	Jan-2026	1	-	627.127	
39	134310012307	PJU PANOKALAN	XX PANGKALAN KOTO BARU	P3	10.600	720.601	Jan-2026	1	-	720.601	
40	134321286223	PJU PASAR MUARO PAITI	DS PASAR MUARO PAITI	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
41	134321291716	PJU	DS LUBUK ALAI	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
42	134321291724	PJU	DS MUARO PAITI	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
43	134331568609	PJU MESIED KUBANG	DS KUBANG	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
44	134331568617	PJU PASAR LIMBANANG	DS LIMBANANG	P3	10.600	23.664.256	Jan-2026	1	10.000	23.674.256	
45	134341819674	PJU KTR CAMAT KOTO TINGGI	DS KOTO TINGGI	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
46	134352010150	PJU PASAR R-DATA	DS PASAR RIMBO DATA	P3	4.400	299.117	Jan-2026	1	-	299.117	
47	134341817791	PJU KTR CAMAT GUNTUNG	DS GUNTUNG	P3	10.600	720.601	Jan-2026	1	-	720.601	
48	134530007081	PJU	DS SIANGKANG TARANTANG	P3	10.600	720.601	Jan-2026	1	-	720.601	
49	134530014042	PJU LUBUK ALAI	DS LUBUK ALAI	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
50	134530014520	PJU MDN BAPANEH TARANTANG	DS TARANTANG	P3	10.600	720.601	Jan-2026	1	-	720.601	
51	134530018480	PJU GANTIANG TARAM	DS GANTIANG TARAM	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
52	134530020735	PJU KOTO LAMO	DS KOTO LAMO	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
53	134530021400	PJU GUNUNG MALINTANG	DS GUNUNG MALINTANG	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
54	134530031411	PJU PASAR BARUAH GUNUNG	DS BARUAH GUNUNG BKT BARISAN	P3	3.500	237.934	Jan-2026	1	-	237.934	
55	134530033437	PJU TANJUNG BUNGO	DS TANJUNG BUNGO KOTO LAMO	P3	3.500	237.934	Jan-2026	1	-	237.934	
56	134530034099	PJU KOTO ALAM	DS KOTO ALAM	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
57	134530035889	PJU KOTO TUO HARAU	DS KOTO TUO HARAU	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
58	134530036483	PJU LUBUK ALAI	DS LUBUK ALAI	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
59	134530036596	PJU PURWAJAYA	DS PURWAJAYA	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
60	134530037892	PJU KURANI	DS KURANI	P3	3.500	237.934	Jan-2026	1	-	237.934	
61	134530037906	PJU GUGUAK	DS GUGUAK	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
62	134530037963	PJU TIKAH GUGUAK	DS TIKAH GUGUAK	P3	3.500	237.934	Jan-2026	1	-	237.934	
63	134530038725	PJU KOTO TUO MUNGKA	DS KOTO TUO MUNGKA	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
64	134530039203	PJU TJ BARULAK KUBANG	DS TANJUNG BARULAK KUBANG	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
65	134530039689	PJU JOPANG MANGANTI	DS JOPANG MANGANTI	P3	3.500	900.751	Jan-2026	1	-	900.751	
66	134530042779	PJU JORONG KOTO KOZIAK	DS KOTO KOZIAK	P3	6.600	1.662.140	Jan-2026	1	-	1.662.140	
67	134530043038	PJU BELUBUS	DS JORONG BELUBUS	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
68	134530043706	PJU BANJA LAWEH	DS BANJA LAWEH	P3	3.500	508.159	Jan-2026	1	-	508.159	
69	134530063044	PJU JOBONG KOTO TANGAH	DS NAGARI KOTO LAMO	P3	3.900	237.934	Jan-2026	1	-	237.934	
70	134530065638	PJU NAGARI SUNGAI ANTIUAN	DS MUNGKA	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
71	134530066312	PJU NAGARI KOTO BANGUN	DS KOTO BANGUN MUARO PAITI	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
72	134530066934	PJU KOTO ALAM	DS KOTO ALAM	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
73	134530067219	PJU TANJUNG PAUH	DS TANJUNG PAUH	P3	10.600	720.601	Jan-2026	1	-	720.601	

TAGIHAN REKENDING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN JANUARI 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
74	134530067243	PJU MANGGILANG	DS MANGGILANG	P3	6.000	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
75	134530088036	PJU TAEH BUKIK I	DS TALAGO TAEH BUKIT	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
76	134530088044	PJU SIALANG I	DS SIALANG	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
77	134530088051	PJU GN MALENTANG II	DS GN MALINTANG	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
78	134530088069	PJU TARATAK SARILAMAK	DS TARATAK SARILAMAK	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
79	134530088077	PJU SIALANG III	DS SIALANG	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
80	134530088085	PJU GN MALENTANG I	DS GN MALINTANG	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
81	134530088107	PJU TAEH BARUAH	DS KUBU GADANG TAEH BARUAH	P3	1.300	217.540	Jan-2026	1	-	217.540	
82	134530088115	PJU TAEH BUKIK II	DS BUKIT TAPUANG TAEH BUKIK	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
83	134530088123	PJU BANJARANAH	DS BANJARANAH PANGKALAN	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
84	134530088149	PJU SIALANG II	DS SIALANG	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
85	134530088284	PJU KOTO TANGAH SMLGG	DS KOTO TANGAH SIMALANGGANG	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
86	134530088363	PJU GUGUAK	DS GUGUAK	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
87	134530088371	PJU TARATAK	DS TARATAK KUBANG	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
88	134530088389	PJU NAGARI TARAM	DS TARAM	P3	1.300	144.460	Jan-2026	1	-	144.460	
89	134530088397	PJU MAEK	DS SULIKI	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
90	134530109649	PJU SIALANG ATAS - BAWAH	DS SIALANG	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
91	134530109656	PJU SIMP SMPN 2 SIALANG	DS SIALANG	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
92	134530109664	PJU LUBUK ALAI	DS LUBUK ALAI	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
93	134530143957	PJU NAGARI SIALANG I	DS SIALANG	P3	2.200	294.019	Jan-2026	1	-	294.019	
94	134530143965	PJU NAGARI SIALANG V	DS SIALANG	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
95	134530143973	PJU NAGARI SIALANG II	DS SIALANG	P3	4.400	299.117	Jan-2026	1	-	299.117	
96	134530143981	PJU NAGARI SIALANG IV	DS SIALANG	P3	2.200	192.047	Jan-2026	1	-	192.047	
97	134530143999	PJU NAGARI SIALANG III	DS SIALANG	P3	2.200	297.418	Jan-2026	1	-	297.418	
98	134530146510	PJU TARATAK	DS TARATAK	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
99	134530146528	PJU PILUBANG	DS PILUBANG	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
100	134530146536	PJU KANDANG LAMO	DS KANDANG LAMO	P3	1.300	197.145	Jan-2026	1	-	197.145	
101	134530146544	PJU PURWAJAYA	DS PURWAJAYA	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
102	134530147994	PJU KP TANGAH TI MAUR	DS KP TANGAH MAUR	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
103	134530148004	PJU TAEH BARUAH	DS TAEH BARUAH	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
104	134530148158	PJU LABUJAH LINTANG	DS SEI ANTUAN	P3	2.200	253.230	Jan-2026	1	-	253.230	
105	134530148166	PJU MAEK	DS MAEK	P3	900	61.183	Jan-2026	1	-	61.183	
106	134530154436	PJU TAEH BUKI	DS TAEH BUKIK	P3	2.200	207.343	Jan-2026	1	-	207.343	
107	134530166007	PJU JLN LINGKAR HARAU II	DS JLN LINGKAR HARAU	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
108	134530166015	PJU JLN LINGKAR HARAU I	DS JLN LINGKAR HARAU	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
109	134530166144	PJU KOTO TANGAH 2	DS JORONG DATAR	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN JANUARI 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
110	134530166151	PJU KOTO TANGAH 3	DS JORONG DATAR	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
111	134530166169	PJU KOTO TANGAH	DS JORONG DATAR	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
112	134530166185	PJU LABUAH LINTANG 1	DS JORONG LABUAH LINTANG	P3	2.200	183.540	Jan-2026	1	-	183.540	
113	134530166193	PJU KOTO PUJI 2	DS JORONG KOTO PUJI	P3	2.200	394.291	Jan-2026	1	-	394.291	
114	134530166206	PJU TAEH BARUAH	DS JORONG PADANG PARIK PANJA	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
115	134530166214	PJU SUNGAI ANTUAN	DS JORONG SUNGAI ANTUAN	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
116	134530166222	PJU LABUAH LINTANG 2	DS JORONG LABUAH LINTANG	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
117	134530166230	PJU GUGUAK VIII KOTO	DS JORONG GUGUAK VIII KOTO	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
118	134530166248	PJU KOTO PUJI 1	DS JORONG KOTO PUJI	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
119	134530166335	PJU GALUGUA	DS GALUGUA	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
120	134530166343	PJU LUBUK ALAI 1	DS JORONG SUKA KARYA	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
121	134530166350	PJU GUNUNG MALINTANG 2	DS JORONG SUNGAI PIMPING	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
122	134530166368	PJU LUBUK ALAI 2	DS JORONG RUMBAI	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
123	134530166376	PJU GUNUNG MALINTANG 1	DS JORONG BUKIT TALAU	P3	2.200	321.211	Jan-2026	1	-	321.211	
124	134530167282	PJU HARAU 2 PADANG TAROK	DS PADANG TAROK	P3	2.200	1.815.098	Jan-2026	1	-	1.815.098	
125	134530167290	PJU TAEH BUKIT PABATUANGA	DS PABATUANGAN TAEH BUKIK	P3	2.200	256.629	Jan-2026	1	-	256.629	
126	134530167304	PJU BULUH KASOK	DS BULUH KASOK	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
127	134530167312	PJU HARAU 1 PADANG TAIROK	DS PADANG TAIROK	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
128	134530178856	PJU TRAN LUBUK ALAI I	JL LUBUK ALAI	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
129	134530178864	PJU ATER KOTO	JL ATER KOTO	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
130	134530178872	PJU BALAI CUBADAK TARAM	JL BALAI CUBADAK TARAM	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
131	134530178880	PJU BALAI TALANG	JL BALAI TALANG	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
132	134530178898	PJU PANGKALAN III	JL LUBUK JANTAN	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
133	134530178902	PJU BANJALAWEH	JL BANJALAWEH	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
134	134530178910	PJU BELUBUS GUGUAK NUNANG	JL BELUBUS GUGUAK NUNANG	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
135	134530178928	PJU PANGKALAN II	JL PANGKALAN	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
136	134530178936	PJU TRAN LUBUK ALAI III	JL LUBUK ALAI	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
137	134530178944	PJU MAEK II	JL MAEK	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
138	134530178951	PJU SUNGAI TALANG	JL SUNGAI TALANG	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
139	134530178969	PJU KALUDAN	JL KALUDAN	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
140	134530178977	PJU LIMBANANG II	JL LIMBANANG	P3	2.200	154.657	Jan-2026	1	-	154.657	
141	134530178985	PJU PARIK PANJANG	JL PARIK PANJANG	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
142	134530178993	PJU JORONG TALAWI	JL MELABO PAITI	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
143	134530179003	PJU KUBANG TUNGKEK I	JL KUBANG TUNGKEK	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
144	134530179011	PJU PERUM PTPN VI	JL GUNUANG MALINTANG	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
145	134530179029	PJU SMPN 3 LUBUK ALAI	JL LUBUK ALAI	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN JANUARI 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
146	134530179037	PJU KAMPUNG DURI	JL. MUARO PATTI	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
147	134530179052	PJU TIGO ALUR	JL. TIGO ALUR	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
148	134530179060	PJU LUBUK GODANG II	JL. LUBUK GODANG	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
149	134530179078	PJU BINTUNGAN SAKTI	JL. BINTUNGAN SAKTI	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
150	134530179086	PJU MUDIAK LIKI	JL. MUDIAK LIKI	P3	2.200	171.653	Jan-2026	1	-	171.653	
151	134530179094	PJU TIGO BALAI	JL. TIGO BALAI	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
152	134530179108	PJU KUBANG TUNGKEK II	JL. KUBANG TUNGKEK	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
153	134530179116	PJU SULIKI BARUAH	JL. SULIKI BARUAH	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
154	134530179124	PJU KURAYA	JL. LUBUK BANGKUI	P3	2.200	892.253	Jan-2026	1	-	892.253	
155	134530179132	PJU CINTA MAJU	JL. DURIAN TINGGI	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
156	134530179140	PJU DURIAN TINGGI	JL. DURIAN TINGGI	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
157	134530179157	PJU TANJUNG ATEH TARAM I	JL. TANJUNG ATEH TARAM	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
158	134530179165	PJU KAMPUNG DALAM	JL. KAMPUNG DALAM	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
159	134530179173	PJU LUBUK BANGKUI	JL. LUBUK BANGKUI	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
160	134530179181	PJU SD 02 DURIAN TINGGI	JL. DURIAN TINGGI	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
161	134530179199	PJU SOLOK BIO-BIO	JL. SOLOK BIO-BIO	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
162	134530179202	PJU KOTO LAMO	JL. KOTO LAMO	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
163	134530179210	PJU TARANTANG DALAM	JL. TARANTANG DALAM	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
164	134530179228	PJU LIMBANANG	JL. LIMBANANG	P3	2.200	805.577	Jan-2026	1	-	805.577	
165	134530179236	PJU TANJUNG ATEH TARAM II	JL. TANJUNG ATEH TARAM	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
166	134530179244	PJU LUBUK NAGO	JL. LUBUK NAGO	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
167	134530179251	PJU MAEK III	JL. MAEK	P3	2.200	186.948	Jan-2026	1	-	186.948	
168	134530179269	PJU TRAN LUBUK ALAI II	JL. LUBUK ALAI	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
169	134530179277	PJU PANGKALAN I	JL. PPU PANGKALAN I	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
170	134530179293	PJU LUBUK GODANG I	DK. LUBUK GODANG	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
171	134530179307	PJU BALAI TINGGI	JL. BALAI TINGGI	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
172	134530179315	PJU PANGKALAN IV	JL. GUNUNG MALINTANG	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
173	134530179331	PJU SUBARANG TARAM I	JL. PPU SUBARANG TARAM I	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
174	134530179349	PJU KURAI	JL. KURAI	P3	2.200	856.563	Jan-2026	1	-	856.563	
175	134530179356	PJU PULUTAN	JL. PULUTAN	P3	2.200	156.357	Jan-2026	1	-	156.357	
176	134530179364	PJU PADANG LAWEH	JL. PADANG LAWEH	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
177	134530179372	PJU TANJUNG ATEH TARAM II	JL. TANJUNG ATEH TARAM	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
178	134530179380	PJU SUBARANG TARAM II	JL. SUBARANG TARAM	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
179	134530179398	PJU JORONG PASAR USANG PA	JL. PASAR USANG PANGKALAN	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
180	134530179401	PJU KURANJI SIMP. BILUBUS	JL. KURANJI	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	
181	134530179419	PJU LIMBANANG I	JL. LIMBANANG	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559	

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN JANUARI 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Materai	TOTAL TAGIHAN	KET	
182	134530179427	PJU KAMPUNG BARU	JL. KAMPUNG BARU	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
183	134530179435	PJU KANDANG LAMO	JL. KANDANG LAMO	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
184	134530179443	PJU PASAR DURIAN TINOGI	JL. DURIAN TINOGI	P3	2.200	275.324	Jan-2026	1	-	275.324		
185	134530179450	PJU MAEK IV	JL. MAEK	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
186	134530179468	PJU LUBUK JANTAN HARAU	JL. LUBUK JANTAN	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
187	134530179476	PJU BUNDA MOTOR	JL. PANGKALAN	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
188	134530179484	PJU PINTU KOTO	JL. PINTU KOTO	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
189	134530179492	PJU TABEK PANJANG	JL. TABEK PANJANG	P3	2.200	618.629	Jan-2026	1	-	618.629		
190	134530179506	PJU PASAR LUBUK ALAI	JL. LUBUK ALAI	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
191	134530179514	PJU KOTO BANGUN	JL. KOTO BANGUN	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
192	134530179522	PJU KAMPUNG PANJANG	JL. KAMPUNG PANJANG	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
193	134530179530	PJU SUNGAI RIMBANG	JL. SUNGAI RIMBANG	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
194	134530179548	PJU BUKIK LIMBUKI	JL. BUKIK LIMBUKI	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
195	134530179555	PJU PADANG AMBACANG	JL. PADANG AMBACANG	P3	2.200	207.343	Jan-2026	1	-	207.343		
196	134530179563	PJU KOTO KOCLAK	JL. KOTO KOCLAK	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
197	134530179571	PJU LABUHAH TIMBUN	JL. LABUHAH TIMBUN	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
198	134530179589	PJU MAEK I	JL. MAEK	P3	2.200	338.206	Jan-2026	1	-	338.206		
199	134530179597	PJU MAEK	JL. MAEK	P3	2.200	380.695	Jan-2026	1	-	380.695		
200	134530179600	PJU PASAR USANG	JL. PANOKALAN	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
201	134530179618	PJU TALAGO	JL. TALAGO	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
202	134530290280	PJU PARIT DALAM TAEH 1	DK. TAEH	P3	2.200	489.465	Jan-2026	1	-	489.465		
203	134530290298	PJU PARIT DALAM TAEH 2	DK. TAEH	P3	2.200	411.286	Jan-2026	1	-	411.286		
204	134530290336	PJU PARIK PANJANG	DK. TAEH BARUAH	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
205	134530290302	PJU SARILAMAK	DK. SARILAMAK	P3	2.200	149.559	Jan-2026	1	-	149.559		
206	134530290344	PJU PARIT DALAM TAEH 3	DK. TAEH	P3	2.200	433.380	Jan-2026	1	-	433.380		
207	134530290328	PJU PARIT DALAM TAEH 4	DK. TAEH	P3	2.200	232.836	Jan-2026	1	-	232.836		
208	134530290310	PJU BALAI	DK. TAEH BARUAH	P3	2.200	311.014	Jan-2026	1	-	311.014		
208		TOTAL ULP 50 KOTA							208	100.000	328.668.474	

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN JANUARI 2026
WILAYAH KERJA PLN ULP PAYAKUMBUH

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
1	13230000083	PENERANGAN JALAN	XX PAKAN RABAA	P3	450	2.263.774	Jan-2026	1	-	2.263.774	
2	13230000105	PJU	XX PILADANG	P3	450	2.263.774	Jan-2026	1	-	2.263.774	
3	13230000121	PJU	XX BATU HAMPAR	P3	450	2.263.774	Jan-2026	1	-	2.263.774	
4	13230000154	PJU PK.SABTU MUNGO	XX PAKAN SABTU MUNGO	P3	450	2.263.774	Jan-2026	1	-	2.263.774	
5	13230000162	PJU BT TABIT	XX BATANG TABIT	P3	450	2.263.774	Jan-2026	1	-	2.263.774	
6	132312160753	P.J.U	XX KT.BARU SIMALANGGANG	P3	450	2.263.774	Jan-2026	1	-	2.263.774	
7	132312145990	PJU KT BR SIMALANGGANG II	KL KOTO BARIU-KT BR SIMALANGGANG	P3	10.600	21.843.799	Jan-2026	1	10.000	21.853.799	
8	132312148789	PJU SEI BERINGIN	DS SEI BERINGIN	P3	6.600	1.269.549	Jan-2026	1	-	1.269.549	
9	132342294252	PJU PILADANG	KL PILADANG-KT TGH BATU HAMPAR	P3	10.600	41.116.532	Jan-2026	1	10.000	41.116.532	
10	132352128022	P.J.U	XX SITULUH BATUR	P3	900	4.529.247	Jan-2026	1	-	4.529.247	
11	132352139009	PJU	XX SE 7 BANDAR DALAM	P3	450	2.263.774	Jan-2026	1	-	2.263.774	
12	132362814357	PJU LARUH SAGO HLB	XX PAKAN RABAA	P3	10.600	36.670.799	Jan-2026	1	10.000	36.680.799	
13	132362828609	P.J.U	KL GALO GADANG-ANDALEH	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
14	134202153370	PENERANGAN JALAN UMUM	DS BUKIT APT	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
15	134202156476	PENERANGAN JALAN UMUM	DS BONCAH SUGIRAN	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
16	134202299644	P.J.U	KL BATU HAMPAR	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
17	134202352740	P.J.U	DS SITULUH BATUA	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
18	134202350420	P.J.U	DS PAKAN SABTU MUNGO	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
19	134232551992	PJU TUNGKAR	DS TUNGA DALAM NAGARI	P3	4.800	299.117	Jan-2026	1	-	299.117	
20	134520023748	PJU BATU PAYUNG	DL BATU PAYUNG	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
21	134520030404	PJU SIMPANG SUGIRAN	DS SIMPANG SUGIRAN	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
22	134520046752	PJU SEI KEMUYANG	DS SEI KEMUYANG KAB 50 KOTA	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
23	134520047970	PJU SIMALANGGANG	DS SIMALANGGANG	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
24	134520048109	PJU LAJEH NAN PANJANG	DS NAGARI BATU PAYUNG	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
25	134520051454	PJU PROBANG	DK PROBANG 50 KOFA	P3	6.600	1.318.835	Jan-2026	1	-	1.318.835	
26	134520052488	PJU BATU NAN LIMO	DS JORONG BATU NAN LIMO LAMPASI	P3	3.500	237.934	Jan-2026	1	-	237.934	
27	134520051496	PJU BALAI RUPH SMLG	DS BALAI NAGARI SIMALANGGANG	P3	3.500	237.934	Jan-2026	1	-	237.934	
28	134520059909	PJU DPN SMP 1 KEC PYK	DN DEPAN SMP 1 KEC PAYAKUMBUH	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
29	134520057579	PJU SUNGAI BALANTIAK	DN SUNGAI BALANTIAK	P3	6.600	448.676	Jan-2026	1	-	448.676	
30	134520057587	PJU JORONG TANGAH BT AMPA	DN KT TANGAH BATU AMPA NAGARI	P3	6.600	747.793	Jan-2026	1	-	747.793	
31	134520124801	PJU NAGARI BALAI PANJANG	DK BALAI PANJANG	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
32	134520124827	PJU NAGARI MUNGO	DK MUNGO	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
33	134520128906	PJU NAGARI LAMBAH GUNUNG	DK LABUAH GUNUNG	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
34	134520134930	PJU NAGRI SUNGAI KAMUYANG	DK SUNGAI KAMUYANG	P3	1.300	156.357	Jan-2026	1	-	156.357	
35	134520128023	PJU SIAMANG BUNYI	DK SIAMANG BUNYI	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
36	134520128031	PJU NAGARI SARIKALAWEH	DK SARIKALAWEH	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
37	134520128056	PJU NAGARI SUYAN	DK SUYAN	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376	
38	134520152534	PJU SEI KAMUYANG	DK JORONG TABING	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
39	134520154314	PJU BALAI PANJANG	DK BALAI PANJANG	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	
40	134520154322	PJU BUKIK SIKUMPA	DK BUKIK SIKUMPA	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599	

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN JANUARI 2026
WILAYAH KERJA PLN ULP PAYAKUMBUH

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET	
41	134520188820	PJU DISHUB 50 KOTA	DK KOTA MALINTANG BL PANJANG	P3	4.400	299.117	Jan-2026	1	-	299.117		
42	134520188838	PJU DISHUB 50 KOTA	DK BALAI MALINTANG SITANANG	P3	4.400	2.933.389	Jan-2026	1	-	2.933.389		
43	134520188846	PJU DISHUB 50 KOTA	DK LABUAH GUNUNG	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599		
44	134520189672	PJU SEI KAMUNYANG	DK SEI JAMUNYANG	P3	1.300	88.376	Jan-2026	1	-	88.376		
45	134520189680	PJU PADANG MANGATEH	DK PADANG MANGATEH	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599		
46	134520192600	PJU SUAYAN	DK SUAYAN TINGGI	P3	900	61.183	Jan-2026	1	-	61.183		
47	134520194576	PJU PAKAN RABAA	DK BATU NAN LIMO SIMALANGGANG	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599		
48	134520208444	PJU JR. PDG CUBADAK	DK BUKIK SIKUMPA	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599		
49	134520208451	PJU RAGEN	DK BUKIK SIKUMPA	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599		
50	134520208469	PJU TAROK NAGARI ANDALEH	DK ANDALEH	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599		
51	134520208477	PJU TAROK	DK ANDALEH	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599		
52	134520209495	JORONG SUBARANG AIE	DK LAREH SAGO HALABAN	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599		
53	134520209509	PJU KAPALO LABUAH	DN KAPALO LABUAH	P3	2.200	202.244	Jan-2026	1	-	202.244		
54	134520209517	PJU MANANG KODOK 2	DN MANANG KODOK	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599		
55	134520209525	PJU JORONG SIBALADUANG	DN SIBALADUANG	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599		
56	134520209533	PJU JORONG TEMBOK HALABAN	DN TEMBOK	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599		
57	134520209541	PJU MANANG KODOK 1	DN MANANG KODOK	P3	2.200	178.451	Jan-2026	1	-	178.451		
58	134520209558	PJU TARATAK	DN TARATAK	P3	2.200	202.244	Jan-2026	1	-	202.244		
59	134520209566	PJU KUBANG RASAU 1	DN KUBANG RASAU	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599		
60	134520209574	PJU KUBANG RASAU 2	DN KUBANG RASAU	P3	2.200	149.599	Jan-2026	1	-	149.599		
61	134530179045	PJU JORONG GUOUAK	JL SUNGAI BERINGIN KOTA	P3	2.200	717.202	Jan-2026	1	-	717.202		
61	TOTAL ULP PAYAKUMBUH								61	30.000	137.734.428	
269	GRAND TOTAL (ULP 50 KOTA + ULP PAYAKUMBUH)								269	130.000	466.402.902	

Payakumbuh, 06 Januari 2026



Nomor : 0081/AGA.04.02/F09030000/2026
Lampiran : 1 Set
Sifat : Segera - Terbatas
Perihal : Tagihan Rekening Listrik PJU Beban
Pemkab Lima Puluh Kota Bulan Januari,
Februari dan Maret 2026

04 Maret 2026

Kepada :

Kepala Dinas Perhubungan
Kab. 50 Kota
Di
Tanjung Pati

Dengan hormat,

Terlampir disampaikan Daftar Tagihan Rekening Listrik beban Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2026 :

URAIAN	TAGIHAN	TERBILANG
REKENING LISTRIK BULAN JANUARI 2026	Rp 466.402.902,-	<i>"Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah"</i>
REKENING LISTRIK BULAN FEBRUARI 2026	Rp 467.096.318,-	<i>"Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah"</i>
REKENING LISTRIK BULAN MARET 2026	Rp 461.136.066,-	<i>"Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Puluh Enam Rupiah"</i>
TOTAL TAGIHAN	Rp 1.394.635.286,-	<i>"Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah"</i>

Agar saudara dapat melakukan verifikasi terhadap data tagihan PJU terlampir, dan demi kelancaran proses administrasi, pembayaran rekening listrik tersebut dapat disetorkan ke :

- Nama Bank : BANK TABUNGAN NEGARA
- Nomor Rekening : 9999801345300100
- Nama Rekening : LPJU PEMDA 50 KOTA

Sehubungan dengan tagihan rekening listrik PJU beban Pemkab Lima Puluh Kota telah memasuki 3 bulan (lembar) maka diharapkan agar segera menyelesaikan pembayaran rekening listrik PJU tersebut sebelum tanggal 20 untuk menghindari pembongkaran rampung aliran listrik dan berhenti sebagai langganan PLN. Dapat kami sampaikan bahwa PLN telah menyetorkan Pajak Penerangan Jalan bulan Januari 2026 ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp 1.379.238.699,- (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

MANAGER UNIT PELAKSANA
PELAYANAN PELANGGAN
PAYAKUMBUH



Tembusan :

1. Bupati Lima Puluh Kota
2. Sekretaris Daerah Kab. Lima Puluh Kota
3. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lima Puluh Kota

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN MARET 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN BEK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
1	13280000013	PJU	XX SULIKI	P3	320	531.953	Mar-2026	1	-	531.953	
2	13280000023	PJU	XX DANGUNG DANGUNG	P3	320	531.953	Mar-2026	1	-	531.953	
3	13280000047	PENERANGAN JALAN	XX MUNOKA	P3	450	880.357	Mar-2026	1	-	880.357	
4	13280000054	PENERANGAN JALAN	XX PANGKALAN	P3	450	880.357	Mar-2026	1	-	880.357	
5	13280000062	PENERANGAN JALAN	XX LIMBANONG	P3	450	880.357	Mar-2026	1	-	880.357	
6	13280000070	PJU	XX TARAM	P3	450	880.357	Mar-2026	1	-	880.357	
7	13280000088	PJU	XX PK BARAA SMLG	P3	450	880.357	Mar-2026	1	-	880.357	
8	13280000096	PJU	XX TAEH BARUH	P3	450	880.357	Mar-2026	1	-	880.357	
9	13280000118	P. J. U	XX KT TINGGI SULIKI	P3	900	1.760.713	Mar-2026	1	-	1.760.713	
10	13280000134	PJU OOR	XX KETRINGGIAN	P3	10.600	23.664.256	Mar-2026	1	10.000	23.674.256	
11	13280000167	PJU GUNTUNG	XX GUNTUNG SULIKI	P3	450	880.357	Mar-2026	1	-	880.357	
12	13280000175	PJU ANDONG	XX ANDONG	P3	2.200	4.398.384	Mar-2026	1	-	4.398.384	
13	13280000204	PJU GAREU 105	XX KETRINGGIAN	P3	6.600	846.366	Mar-2026	1	-	846.366	
14	13280000212	PJU GAREU 183	XX HARAU	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
15	13280000220	PJU GAREU 78	XX BAKILAMAK	P3	6.600	710.404	Mar-2026	1	-	710.404	
16	13280000238	PJU GAREU 294	XX KANDANG LAMO	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
17	13280000246	PJU GAREU 47	XX KOMPLEK KODIM	P3	7.700	523.455	Mar-2026	1	-	523.455	
18	13280000253	PJU GAREU 283	XX TANJUNG PATI	P3	7.700	968.732	Mar-2026	1	-	968.732	
19	13280000399	PJU KEC HARAU GD 182	XX PULUTAN TANJUNG PATI	P3	4.400	620.328	Mar-2026	1	-	620.328	
20	13280000317	PJU KEC HARAU GD 77	XX SEMPANG TANJUNG PATI	P3	6.000	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
21	13280000342	PJU HARAU-DEPAN POLRES	DS H A R A U	P3	10.600	720.601	Mar-2026	1	-	720.601	
22	132800072344	PJU PASAR TARAM	DS PASAR TARAM	P3	10.600	23.664.256	Mar-2026	1	10.000	23.674.256	
23	132800073693	PJU OBJEK WISATA LEMBAH H	DS LEMBAH HARAU	P3	10.600	23.664.256	Mar-2026	1	10.000	23.674.256	
24	132800074248	PJU BUKIT LIMBUKU	DS BUKIT LIMBUKU	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
25	132800074255	PJU BATU BALANG	DS BATU BALANG	P3	10.600	23.664.256	Mar-2026	1	10.000	23.674.256	
26	132811029865	PJU PAUH ANOK	DS PAUH ANOK PANGKALAN	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
27	132811029873	PJU PASAR MANGGILANG	DS PSR MANGGILANG	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
28	1328221283154	PJU PASAR KOTO BANGUN	DS KOTO BANGUN	P3	6.600	512.347	Mar-2026	1	-	512.347	
29	132831562802	PJU PSR DANGUNG DANGUNG	DS DANGUNG-DANGUNG	P3	10.600	23.664.256	Mar-2026	1	10.000	23.674.256	
30	132841806851	PJU PASAR SULIKI	DS SULIKI	P3	10.600	720.601	Mar-2026	1	-	720.601	
31	132841809244	PJU ANDHANO	DS ANDHANO	P3	2.200	149.259	Mar-2026	1	-	149.259	
32	132853009177	PJU TANJUNG BALIKRIMBO D	DS TI BALIK RIMBO DATA	P3	10.600	23.694.847	Mar-2026	1	10.000	23.704.847	
33	132862318616	PJU MUNOKA TENGAH	DS MUNOKA TENGAH	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
34	132862315094	PJU PAKAN BARAA SIMALANG	DS PAKAN BARAA SIMALANGGANG	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
35	134300079241	PJU KANTOR BEJAPATI	DS BARILAMAK	P3	23.000	50.129.337	Mar-2026	1	10.000	50.139.337	
36	134300080734	PJU SIPATAU-TARAM	DS SIPATAU-TARAM	P3	4.400	747.793	Mar-2026	1	-	747.793	
37	134300080767	PJU KANTOR BU-PATI	DS BARILAMAK	P3	5.500	1.034.948	Mar-2026	1	-	1.034.948	

**TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TAGIHAN BULAN MARET 2026**

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Materai	TOTAL TAGIHAN	KET
38	134300087875	PIU SEMP 4 TI PAITI	DS SEMP 4 TI PAITI	P3	5.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
39	134310012107	PIU PANGKALAN	XX PANGKALAN KOTO BARU	P3	10.600	720.601	Mar-2026	1	-	720.601	
40	134321286223	PIU PASAR MUIARO PAITI	DS PASAR MUIARO PAITI	P3	5.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
41	134321291716	PIU	DS LUBUK ALAI	P3	5.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
42	134321291724	PIU	DS MUIARO PAITI	P3	5.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
43	134331568009	PIU MESIJD KUBANG	DS KUBANG	P3	5.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
44	134331568017	PIU PASAR LIMBANANG	DS LIMBANANG	P3	10.600	20.664.256	Mar-2026	1	10.000	20.674.256	
45	134341810674	PIU KTR CAMAT KOTO TENGGE	DS KOTO TENGGE	P3	5.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
46	134352010150	PIU PASAR B-DATA	DS PASAR B-DATA	P3	4.400	299.117	Mar-2026	1	-	299.117	
47	134341817791	PIU KTR-CAMAT GUNTUNGO	DS GUNTUNGO	P3	4.400	477.568	Mar-2026	1	-	477.568	
48	134330007081	PJU	DS SIWANGKANG TABANTANG	P3	10.600	720.601	Mar-2026	1	-	720.601	
49	134330014942	PIU LUBUK ALAI	DS LUBUK ALAI	P3	5.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
50	134330014529	PIU MDRN BAPANEH TABANTANG	DS TABANTANG	P3	10.600	720.601	Mar-2026	1	-	720.601	
51	134330018480	PIU GANTIANG TABAM	DS GANTIANG TABAM	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
52	134330020735	PIU KOTO LAMO	DS KOTO LAMO	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
53	134330021400	PIU GUNUNG MALENTANG	DS GUNUNG MALENTANG	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
54	134330033411	PIU PASAR BARUAH GUNUNG	DS BARUAH GUNUNG BKT BARISAN	P3	3.500	237.934	Mar-2026	1	-	237.934	
55	134330033437	PIU TANJUNG BUNGO	DS TANJUNG BUNGO KOTO LAMO	P3	3.500	237.934	Mar-2026	1	-	237.934	
56	134330034699	PIU KOTO ALAM	DS KOTO ALAM	P3	5.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
57	134330035889	PIU KOTO TUO HARAU	DS KOTO TUO HARAU	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
58	134330036483	PIU LUBUK ALAI	DS LUBUK ALAI	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
59	134330036596	PIU PURWAJAYA	DS PURWAJAYA	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
60	134330037892	PIU KURANJI	DS KURANJI	P3	3.500	237.934	Mar-2026	1	-	237.934	
61	134330037906	PIU GUGUAK	DS GUGUAK	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
62	134330037963	PIU TIKAAR GUGUAK	DS TIKAAR GUGUAK	P3	3.500	237.934	Mar-2026	1	-	237.934	
63	134330038725	PIU KOTO TUO MUNOKA	DS KOTO TUO MUNOKA	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
64	134330039303	PIU T3 BARULAK KUBANG	DS TANJUNG BARULAK KUBANG	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
65	134330039689	PIU JOPANG MANGANTI	DS JOPANG MANGANTI	P3	3.500	712.103	Mar-2026	1	-	712.103	
66	134330042779	PIU JORONG KOTO KOCLAK	DS KOTO KOCLAK	P3	6.600	1.122.389	Mar-2026	1	-	1.122.389	
67	134330043038	PIU BELLUBIS	DS JORONG BELLUBIS	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
68	134330043706	PIU BANJA LAWEH	DS BANJA LAWEH	P3	3.500	475.863	Mar-2026	1	-	475.863	
69	134330063044	PIU JORONG KOTO TAMGAH	DS NAGARI KOTO LAMO	P3	3.500	237.934	Mar-2026	1	-	237.934	
70	134330063838	PIU NAGARI SUNGAI ANTIUAN	DS MUNOKA	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
71	1343300660352	PIU NAGARI KOTO BANGUN	DS KOTO BANGUN MUIARO PAITI	P3	5.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
72	134330066934	PIU KOTO ALAM	DS KOTO ALAM	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
73	134330067219	PIU TANJUNG PAUH	DS TANJUNG PAUH	P3	10.600	20.912.717	Mar-2026	1	10.000	20.922.717	

**TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TAGIHAN BULAN MARET 2025**

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Ministrad	TOTAL TAGIHAN	KET
74	134530067263	PJU MANGGILANG	DS MANGGILANG	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
75	134530080036	PJU TAEH BUKIK I	DS TALADO TAEH BUKIT	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
76	134530080044	PJU SIALANG I	DS SIALANG	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
77	134530080051	PJU GN MALINTANG II	DS GN MALINTANG	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
78	134530080069	PJU TARATAK SARILAMAK	DS TARATAK SARILAMAK	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
79	134530080077	PJU SIALANG III	DS SIALANG	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
80	134530080085	PJU GN MALINTANG I	DS GN MALINTANG	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
81	134530080107	PJU TAEH BARUAH	DS KUBU GADANG TAEH BARUAH	P3	1.300	339.906	Mar-2026	1	-	339.906	
82	134530080115	PJU TAEH BUKIK II	DS BUKIT TARJANO TAEH BUKIK	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
83	134530080123	PJU BANJARANAH	DS BANJARANAH PANGKALAN	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
84	134530080149	PJU SIALANG II	DS SIALANG	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
85	134530080284	PJU KOTO TANGAH SIALANG	DS KOTO TANGAH SIALANG	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
86	134530080303	PJU OGUAK	DS OGUAK	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
87	134530080371	PJU TARATAK	DS TARATAK KUBANG	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
88	134530080380	PJU NAGARI TARAM	DS TARAM	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
89	134530080597	PJU MAEK	DS BUKIK	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
90	134530109649	PJU SIALANG ATAS - BAWAH	DS SIALANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
91	134530109656	PJU SMP SMPN 2 SIALANG	DS SIALANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
92	134530109964	PJU LUBUK ALAI	DS LUBUK ALAI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
93	134530145957	PJU NAGARI SIALANG I	DS SIALANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
94	134530145965	PJU NAGARI SIALANG V	DS SIALANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
95	134530145973	PJU NAGARI SIALANG II	DS SIALANG	P3	4.400	299.117	Mar-2026	1	-	299.117	
96	134530145981	PJU NAGARI SIALANG IV	DS SIALANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
97	134530145999	PJU NAGARI SIALANG III	DS SIALANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
98	134530146010	PJU TARATAK	DS TARATAK	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
99	134530146028	PJU PELUBANG	DS PELUBANG	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
100	134530146036	PJU KANDANG LAMO	DS KANDANG LAMO	P3	1.300	180.648	Mar-2026	1	-	180.648	
101	134530146044	PJU PURWALAYA	DS PURWALAYA	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
102	134530147994	PJU KP TANGAH MAUK	DS KP TANGAH MAUK	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
103	134530148004	PJU TAEH BARUAH	DS TAEH BARUAH	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
104	134530148138	PJU LABUAH LINTANG	DS BEE ANGLAN	P3	2.200	233.836	Mar-2026	1	-	233.836	
105	134530148166	PJU MAEK	DS MAEK	P3	900	61.183	Mar-2026	1	-	61.183	
106	134530154436	PJU TAEH BUKIK	DS TAEH BUKIK	P3	2.200	222.638	Mar-2026	1	-	222.638	
107	134530166007	PJU JLN LINGKAR HARAU II	DS JLN LINGKAR HARAU	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
108	134530166015	PJU JLN LINGKAR HARAU I	DS JLN LINGKAR HARAU	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
109	134530166144	PJU KOTO TANGAH 2	DS JORONG DATAR	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	

**TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TAGIHAN BULAN MARET 2026**

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
110	134530166151	PJU KOTO TANGAH 1	D8 JORONG DATAR	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
111	134530166159	PJU KOTO TANGAH	D8 JORONG DATAR	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
112	134530166185	PJU LABUAH LINTANG 1	D8 JORONG LABUAH LINTANG	P3	2.200	198.845	Mar-2026	1	-	198.845	
113	134530166193	PJU KOTO PUJI 2	D8 JORONG KOTO PUJI	P3	2.200	322.911	Mar-2026	1	-	322.911	
114	134530166206	PJU TAEH BARUAH	D8 JORONG PADANG PARIK PANJA	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
115	134530166214	PJU SUNDAI ANTIJAN	D8 JORONG SUNDAI ANTIJAN	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
116	134530166222	PJU LABUAH LINTANG 2	D8 JORONG LABUAH LINTANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
117	134530166230	PJU GUGUAK VIII KOTO	D8 JORONG GUGUAK VIII KOTO	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
118	134530166248	PJU KOTO PUJI 1	D8 JORONG KOTO PUJI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
119	134530166335	PJU GALUKUA	D8 GALUKUA	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
120	134530166343	PJU LUBUK ALAI 1	D8 JORONG SUKA KARYA	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
121	134530166350	PJU GUNUNG MAJANTANG 2	D8 JORONG SUNGAI PEMRANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
122	134530166368	PJU LUBUK ALAI 2	D8 JORONG RUMBAI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
123	134530166376	PJU GUNUNG MAJANTANG 1	D8 JORONG BUKIT TALAU	P3	2.200	312.714	Mar-2026	1	-	312.714	
124	134530167282	PJU HARAU 2 PADANG TAROK	D8 PADANG TAROK	P3	2.200	299.042	Mar-2026	1	-	299.042	
125	134530167290	PJU TAEH BUKIK PABATUANGA	D8 PABATUANGAN TAEH BUKIK	P3	2.200	338.266	Mar-2026	1	-	338.266	
126	134530167294	PJU BULUH KASOK	D8 BULUH KASOK	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
127	134530167312	PJU HARAU 1 PADANG TAROK	D8 PADANG TAROK	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
128	134530178156	PJU TRAN LUBUK ALAI I	JL LUBUK ALAI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
129	134530178164	PJU ATEH KOTO	JL ATEH KOTO	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
130	134530178172	PJU BALAI CUBADAK TARAM	JL BALAI CUBADAK TARAM	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
131	134530178180	PJU BALAI TALANG	JL BALAI TALANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
132	134530178198	PJU PANGKALAN III	JL LUBUK JANTAN	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
133	134530178202	PJU BANJALAWEH	JL BANJALAWEH	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
134	134530178210	PJU BELUBUS GUGUAK NUNANO	JL BELUBUS GUGUAK NUNANO	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
135	134530178228	PJU PANGKALAN II	JL PANGKALAN	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
136	134530178236	PJU TRAN LUBUK ALAI III	JL LUBUK ALA	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
137	134530178244	PJU MAEK II	JL MAEK	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
138	134530178251	PJU SUNGAI TALANG	JL SUNGAI TALANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
139	134530178269	PJU KALUDAN	JL KALUDAN	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
140	134530178277	PJU LIMBANANG II	JL LIMBANANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
141	134530178285	PJU PARIK PANJANG	JL PARIK PANJANG	P3	2.200	231.136	Mar-2026	1	-	231.136	
142	134530178293	PJU JORONG TALAWI	JL MUAJO PAITI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
143	134530179603	PJU KUBANG TUNGEREK I	JL KUBANG TUNGEREK	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
144	134530179611	PJU PERUM PTPN VI	JL GUNJANG MALINTANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
145	134530179629	PJU SMPN 5 LUBUK ALAI	JL LUBUK ALAI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN MARET 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
146	134530179037	PJU KAMPUNG DURI	JL MUARO PAITI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
147	134530179032	PJU TIGO ALUR	JL TIGO ALUR	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
148	134530179060	PJU LUBUK GODANG II	JL LUBUK GODANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
149	134530179078	PJU BINTUNGAN SAKTI	JL BINTUNGAN SAKTI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
150	134530179086	PJU MUDAQ LIKI	JL MUDAQ LIKI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
151	134530179094	PJU TIGO BALAI	JL TIGO BALAI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
152	134530179108	PJU KUBANG TUNGGOK II	JL KUBANG TUNGGOK	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
153	134530179116	PJU SULIK BARUAH	JL SULIK BARUAH	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
154	134530179124	PJU KURAYA	JL KURAYA	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
155	134530179132	PJU CINTA MARU	JL DURIAN TINGGI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
156	134530179140	PJU DURIAN TINGGI	JL DURIAN TINGGI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
157	134530179157	PJU TANJUNG ATEH TARAM I	JL TANJUNG ATEH TARAM	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
158	134530179165	PJU KAMPUNG DALAM	JL KAMPUNG DALAM	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
159	134530179173	PJU LUBUK BANGKULU	JL LUBUK BANGKULU	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
160	134530179181	PJU SD-02 DURIAN TINGGI	JL DURIAN TINGGI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
161	134530179199	PJU SOLOK BIO-BIO	JL SOLOK BIO-BIO	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
162	134530179202	PJU KOTO LAMO	JL KOTO LAMO	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
163	134530179210	PJU TARANTANG DALAM	JL TARANTANG DALAM	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
164	134530179228	PJU LIMBANANG	JL LIMBANANG	P3	2.200	1.006.122	Mar-2026	1	-	1.006.122	
165	134530179236	PJU TANJUNG ATEH TARAM II	JL TANJUNG ATEH TARAM	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
166	134530179244	PJU LUBUK NAGO	JL LUBUK NAGO	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
167	134530179251	PJU MAEK III	JL MAEK	P3	2.200	205.643	Mar-2026	1	-	205.643	
168	134530179269	PJU TRAN LUBUK ALAI II	JL LUBUK ALAI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
169	134530179277	PJU PANGKALAN I	JL PUI PANGKALAN I	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
170	134530179293	PJU LUBUK GODANG I	DK LUBUK GODANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
171	134530179307	PJU BALAI TINGGI	JL BALAI TINGGI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
172	134530179315	PJU PANGKALAN IV	JL GUNUNGO MALINTANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
173	134530179331	PJU SUBARANG TARAM I	JL PUI SUBARANG TARAM I	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
174	134530179349	PJU KURAI	JL KURAI	P3	2.200	703.305	Mar-2026	1	-	703.305	
175	134530179356	PJU KULITAN	JL KULITAN	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
176	134530179364	PJU PADANG LAWEH	JL PADANG LAWEH	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
177	134530179372	PJU TANJUNG ATEH TARAM II	JL TANJUNG ATEH TARAM	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
178	134530179380	PJU SUBARANG TARAM II	JL SUBARANG TARAM	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
179	134530179398	PJU JORONG PASAR USANG PA	JL PASAR USANG PANGKALAN	P3	2.200	149.139	Mar-2026	1	-	149.139	
180	134530179401	PJU KURANG SIMP BELUBUB	JL KURANG	P3	2.200	149.139	Mar-2026	1	-	149.139	
181	134530179419	PJU LIMBANANG I	JL LIMBANANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	

**TAGIHAN REKENING LISTRIK PJJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 TAGIHAN BULAN MARET 2026**

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
182	134330179427	PE/ KAMPUNG BARU	JL. KAMPUNG BARU	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
183	134330179435	PE/ KANDANG LAMJO	JL. KANDANG LAMJO	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
184	134330179443	PE/ PASAR DUBIRAN TINGGI	JL. DUBIRAN TINGGI	P3	2.200	219.239	Mar-2026	1	-	219.239	
185	134330179450	PE/ MAEK IV	JL. MAEK	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
186	134330179468	PE/ LUBUK JANTAN HARAU	JL. LUBUK JANTAN	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
187	134330179476	PE/ BUNDA MOTOR	JL. PANGKALAN	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
188	134330179484	PE/ PINTU KOTO	JL. PINTU KOTO	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
189	134330179492	PE/ TABEK PANJANG	JL. TABEK PANJANG	P3	2.200	234.515	Mar-2026	1	-	234.515	
190	134330179506	PE/ PASAR LUBUK ALAI	JL. LUBUK ALAI	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
191	134330179514	PE/ KOTO BANGUN	JL. KOTO BANGUN	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
192	134330179522	PE/ KAMPUNG PANJANG	JL. KAMPUNG PANJANG	P3	2.200	198.845	Mar-2026	1	-	198.845	
193	134330179530	PE/ SUNGAI RIMBANG	JL. SUNGAI RIMBANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
194	134330179548	PE/ BURUK LIMBUKU	JL. BURUK LIMBUKU	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
195	134330179555	PE/ PADANG AMBACANG	JL. PADANG AMBACANG	P3	2.200	207.343	Mar-2026	1	-	207.343	
196	134330179563	PE/ KOTO KOCAK	JL. KOTO KOCAK	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
197	134330179571	PE/ LABUAH TIMBLIN	JL. LABUAH TIMBLIN	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
198	134330179589	PE/ MAEK I	JL. MAEK	P3	2.200	241.333	Mar-2026	1	-	241.333	
199	134330179597	PE/ MAEK	JL. MAEK	P3	2.200	280.422	Mar-2026	1	-	280.422	
200	134330179600	PE/ PASAR UBANGI	JL. PANGKALAN	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
201	134330179618	PE/ TALAKO	JL. TALAKO	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
202	134330296280	PE/ PARIT DALAM TAEH 1	DK TAEH	P3	2.200	411.286	Mar-2026	1	-	411.286	
203	134330296298	PE/ PARIT DALAM TAEH 2	DK TAEH	P3	2.200	577.840	Mar-2026	1	-	577.840	
204	134330296336	PE/ PARIK PANJANG	DK TAEH BARUAH	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
205	134330296362	PE/ SARI AMAK	DK BARILAMAK	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
206	134330296344	PE/ PARIT DALAM TAEH 3	DK TAEH	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
207	134330296328	PE/ PARIT DALAM TAEH 4	DK TAEH	P3	2.200	209.042	Mar-2026	1	-	209.042	
208	134330296310	PE/ BALAJ	DK TAEH BARUAH	P3	2.200	312.714	Mar-2026	1	-	312.714	
208		TOTAL ULP 50 KOTA						208	100.000	325.539.647	

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN MARET 2026
WILAYAH KERJA PLN ULP PAYAKUMBUH

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Meteral	TOTAL TAGIHAN	KET
1	13240000083	PENERANGAN JALAN	XX PAKAN KABAA	P3	450	2.267.173	Mar-2026	1	-	2.267.173	
2	13240000105	PJU	XX PILADANO	P3	450	2.267.173	Mar-2026	1	-	2.267.173	
3	132500000121	PJU	XX BATU HAMPAR	P3	450	2.267.173	Mar-2026	1	-	2.267.173	
4	132500000154	PJU PK. SABITU MUNDO	XX PAKAN KABTU MUNDO	P3	450	2.267.173	Mar-2026	1	-	2.267.173	
5	132400000162	PJU BT TABIT	XX BATANG TABIT	P3	450	2.267.173	Mar-2026	1	-	2.267.173	
6	132112100353	PJU	XX KT BARI SIMALANGGANO	P3	450	2.267.173	Mar-2026	1	-	2.267.173	
7	132112145990	PJU KT BR SIMALANGGANO II	KL KOTO BARU-KT BR HIMALANGGANO	P3	10.600	24.427.345	Mar-2026	1	10.000	34.427.345	
8	132312148789	PJU SEI BEHINDIN	DS SEI BEHINDIN	P3	6.600	995.925	Mar-2026	1	-	995.925	
9	132542294252	PJU PILADANO	KL PILADANO-KT TUH BATU HAMPAR	P3	10.600	36.079.759	Mar-2026	1	10.000	46.079.759	
10	132352528022	PJU	XX SETURUH BATUK	P3	960	6.336.045	Mar-2026	1	-	6.336.045	
11	132352535009	PJU	XX SE 7 BANDAR DALAM	P3	450	2.267.173	Mar-2026	1	-	2.267.173	
12	132362814357	PJU LAKEH SAKO HELR	XX PAKAN KABAA	P3	10.600	36.079.759	Mar-2026	1	10.000	46.079.759	
13	132362828609	PJU	KL GULO GADANG-ANDALEH	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
14	134202155370	PENERANGAN JALAN UMUM	DS BUKIT APIT	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
15	134202154476	PENERANGAN JALAN UMUM	DS BONGAI BUBIRAN	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
16	134202259644	PJU	KL BATU HAMPAR	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
17	134202252780	PJU	DS BITURUH BATUA	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
18	1342023830420	PJU	DS PAKAN KABTU MUNDO	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
19	134232519992	PJU TUNBAR	DS TUNOKA DALAM NAGARI	P3	4.460	299.117	Mar-2026	1	-	299.117	
20	134520023748	PJU BATU PAYUNG	JL BATU PAYUNG	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
21	134520030404	PJU SEMPANO BUBIRAN	DS BIMPANO BUBIRAN	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
22	134520046352	PJU SEI KEMUYANG	DS SEI KEMUYANG KAB SO KOTA	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
23	134520047570	PJU SIMALANGGANO	DS SIMALANGGANO	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
24	134520048109	PJU LAKEH NAN PANJANG	DS NAGARI BATU PAYUNG	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
25	134520051454	PJU PIRIBANG	DK PIRIBANG SO KOTA	P3	6.600	1.312.037	Mar-2026	1	-	1.312.037	
26	134520051488	PJU BATU NAN LIMO	DS JORONG BATU NAN LIMO LAMPAR	P3	3.500	237.934	Mar-2026	1	-	237.934	
27	134520051496	PJU BALAI RUPUH SIBLO	DS BALAI NAGARI SIMALANGGANO	P3	3.500	237.934	Mar-2026	1	-	237.934	
28	134520055909	PJU DPN SMP 1 KEC PTK	DS DEPAN SMP 1 KEC PAYAKUMBUH	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
29	134520057579	PJU SUNGAI BALANTIAK	DS BUNDAI BALANTIAK	P3	6.600	448.676	Mar-2026	1	-	448.676	
30	134520057587	PJU JORONG TANDAR BT AMPA	DS KT TANDAR BATU AMPA NAGARI	P3	6.600	644.122	Mar-2026	1	-	644.122	
31	134520124801	PJU NAGARI BALAI PANJANG	DK BALAI PANJANG	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
32	134520124827	PJU NAGARI MUNDO	DK MUNDO	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
33	134520124906	PJU NAGARI LABIAH ORUNDO	DK LABIAH GUNUNG	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
34	134520124930	PJU NAGARI SUNGAI KAMUYANG	DK BUNDAI KAMUYANG	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
35	134520125023	PJU BIAMANG BINYI	DK BIAMANG BINYI	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
36	134520125031	PJU NAGARI BARIAK LAWEH	DK BARIAK LAWEH	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
37	134520125056	PJU NAGARI BLAYAN	DK BLAYAN	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
38	134520152534	PJU SEI KAMUYANG	DK JORONG TABINO	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
39	134520154314	PJU BALAI PANJANG	DK BALAI PANJANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
40	134520154322	PJU BUKUK SIBUMPA	DK BUKUK SIBUMPA	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	

TAGIHAN REKENING LISTRIK PJU BEBAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAGIHAN BULAN MARET 2026
WILAYAH KERJA PLN ULP PAYAKUMBUH

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP PTL	BULAN REK	LBR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
41	134520188820	PIU DISHUB 50 KOTA	DK KOTA MALINTANG BL PANJANG	P3	4.400	206.117	Mar-2026	1	-	299.117	
42	134520188818	PIU DISHUB 50 KOTA	DK BALAU MALINTANG BETANANG	P3	4.400	2.902.797	Mar-2026	1	-	2.902.797	
43	134520188846	PIU DISHUB 50 KOTA	DK LABUHAH GUNUNG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
44	134520189672	PIU SEI KAMUNYANG	DK SEI JAMUNYANG	P3	1.300	88.376	Mar-2026	1	-	88.376	
45	134520189680	PIU PADANG MANGATEH	DK PADANG MANGATEH	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
46	134520192600	PIU SUAYAN	DK SUAYAN TENGGI	P3	900	61.183	Mar-2026	1	-	61.183	
47	134520194576	PIU PAKAN RABAA	DK BATU NAN LIMO SIMALANGGANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
48	134520208444	PIU JR. PDO CUBADAK	DK BURUK SIKUNIPA	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
49	134520208451	PIU RAOEH	DK BURUK SIKUNIPA	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
50	134520208469	PIU TAROK NAGARI ANDALEH	DK ANDALEH	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
51	134520208477	PIU TAROK	DK ANDALEH	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
52	134520209493	JOMBONG SUBARANG AIE	DK LAUREH SAGO HALABAN	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
53	134520209509	PIU KAPALO LABUHAH	DN KAPALO LABUHAH	P3	2.200	178.451	Mar-2026	1	-	178.451	
54	134520209517	PIU MANANG KODOK 2	DN MANANG KODOK	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
55	134520209525	PIU JORONG SIBALDUANG	DN SIBALDUANG	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
56	134520209533	PIU JORONG TEMBOK HALABAN	DN TEMBOK	P3	2.200	371.042	Mar-2026	1	-	371.042	
57	134520209541	PIU MANANG KODOK 1	DN MANANG KODOK	P3	2.200	173.352	Mar-2026	1	-	173.352	
58	134520209558	PIU TARATAK	DN TARATAK	P3	2.200	154.657	Mar-2026	1	-	154.657	
59	134520209560	PIU KUBANG BASAU 1	DN KUBANG BASAU	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
60	134520209574	PIU KUBANG BASAU 2	DN KUBANG BASAU	P3	2.200	149.559	Mar-2026	1	-	149.559	
61	134530179045	PIU JORONG GUKUJAK	JL SUNGAI BERINGIN KOTA	P3	2.200	540.451	Mar-2026	1	-	540.451	
61		TOTAL ULP PAYAKUMBUH						61	30.000	135.596.419	
269		GRAND TOTAL (ULP 50 KOTA + ULP PAYAKUMBUH)						269	130.000	461.136.066	

Payakumbuh, 02 Maret 2026
 MANAGER



Nomor : **0031** /AGA.04.02/F09030200/2026
Sifat : Penting
Hal : Tagihan Rekening Listrik bulan April 2026

06 April 2026

Kepada Yth:
Kepala Kantor Dinas Pehubungan
Kab. 50 Kota
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan tagihan Listrik Kantor Dinas Pehubungan bulan April tahun 2026 (daftar terlampir).

Total tagihan : **Rp. 8.389.824,-**
Terbilang : **Delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah ,-**

Besar harapan kami agar tagihan rekening listrik tersebut dapat dilakukan pembayaran sebelum tanggal 20 April 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MANAGER

RAVI FERNANDES

Tembusan :
PLN UP3 Payakumbuh

Paraf _____

TAGIHAN REKENING LISTRIK BEBAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. LIMA PULUH KOTA
 BULAN APRIL 2026

NO	IDPEL	NAMA	ALAMAT	TARIF	DAYA	RP TAGIHAN	EULAN DEK	LQR	Biaya Material	TOTAL TAGIHAN	KET
1	12280000191	WARNOING LIGHT	XX SIMPANG POLITANI NO 0	P3	1300	88.376	APRIL	1	-	88.376	
2	122800015678	KANTOR LLAJR	XX TANJUNG PANT NO 0	P1	6000	956.835	APRIL	1	-	956.835	
3	122800072677	WARNOING LIGHT SIMP TIGA II	DS SIMPANG TIGA BARAU NO 0	P3	1300	88.376	APRIL	1	-	88.376	
4	122802314848	WARNOING LIGHT SIMP TIGA	DS MUNGKA NO 0	P3	1300	88.376	APRIL	1	-	88.376	
5	124310000337	WARNOING LIGHT	XX SIMPANG PANGKALAN NO 0	P3	1300	88.376	APRIL	1	-	88.376	
6	124330000349	WARNOING LIGHT	XX SIMPANG KUBANG NO 0	P3	1300	88.376	APRIL	1	-	88.376	
7	124530014950	WARNOING LIGHT	JL KAMPUNG DALAM SELING NO 0	P3	900	61.183	APRIL	1	-	61.183	
8	122800069288	BHNDKAS LLAJR	XX TANJUNG PANT NO 0	B3	2200	127.134	APRIL	1	-	127.134	
9	124530001889	DINAS PERHUBUNGAN	TANJUNG PANT JML 7	P1	82500	5.608.449	APRIL	1	10.000	5.618.449	
10	1231214261	WARNOING LIGHT	KOTO BARU LK BR SIMALANGGANGI	P3	1300	88.376	APRIL	1	-	88.376	
11	122802809112	WARNOING LIGHT	HAJANG TAJUT	P3	900	61.183	APRIL	1	-	61.183	
12	124520180041	WARNOING LIGHT BK SIKUMPA	BK SIKUMPA	P1	1300	54.548	APRIL	1	-	54.548	
13	122800015724	KANTOR LLAJR	TANJUNG PANT	P1	2200	180.236	APRIL	1	-	180.236	
14	1428099544	WARNOING LIGHT SIMP 4 TI	TANJUNG PANT - KOTO TUDU	P3T	1300						PRADAYAR
15	8601528284	WARNOING LIGHT	LABEH SAGOTILABAN	P3T	1300						PRADAYAR
JUMLAH TOTAL TAGIHAN						8.379.874		13	10.000	8.389.874	

Tanjung Paut, 06 April 2026

RAVI FERNANDES





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya Negara KM 10 Sarilamak Telp. (0752) 7750551 Fax. (0752) 7750554

Website : <http://www.limapuluhkota.go.id> e-mail: limapuluhkota@telkom.net

Sarilamak, 10 Januari 2026

Nomor : 500/3/Pereko/2026
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Pembaruan Progres Penerbitan Surat Rekomendasi dengan XSTAR dan Implementasi XSTAR 100%**

Kepada Yang Terhormat
Perangkat Daerah (Daftar Terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Direktur Bahan Bakar Minyak pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor T-305/MG.05/DBBM/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Pembaharuan Progres Penerbitan Surat Rekomendasi dengan XSTAR dan Implementasi XSTAR 100%, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah yang sudah melakukan aktivasi akun *email* aplikasi XSTAR untuk Penerbitan Surat Rekomendasi namun belum menerbitkan Surat Rekomendasi melalui aplikasi XSTAR sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat ini, kami harapkan agar segera menerbitkan Surat Rekomendasi secara *online* dengan menggunakan aplikasi XSTAR;
 2. Perangkat Daerah yang sudah menyampaikan Data Penerbit Surat Rekomendasi namun belum menerbitkan Surat Rekomendasi secara *online* dengan menggunakan aplikasi XSTAR **dikarenakan tidak ada konsumen pengguna** yang mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi dapat menyampaikan surat kepada BPH Migas untuk **menonaktifkan** akun perangkat daerah tersebut;
 3. Penerbit Surat Rekomendasi **wajib menyampaikan laporan rekapitulasi** Penerbitan Surat Rekomendasi kepada Badan Pengatur dengan tembusan kepada Kepala Daerah, atasan Penerbitan Surat Rekomendasi dan Badan Usaha Penugasan, yang disampaikan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan format rekapitulasi tercantum dalam lampiran IV huruf A Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023;
 4. Sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi, dihimbau kepada Penerbit Surat Rekomendasi agar melakukan evaluasi atas kebutuhan JBT Minyak Solar dan/atau JBKP Peralite yang disampaikan oleh Pemohon Surat Rekomendasi dalam surat permohonan;
 5. BPH Migas telah melakukan implementasi Penerbitan Surat Rekomendasi melalui aplikasi XSTAR secara 100% pada 52 Kabupaten /Kota, dan akan diperluas pada Kabupaten/Kota lainnya. Lebih lanjut, Badan Usaha Penugasan **menonaktifkan** sistem melayani pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Peralite menggunakan Surat Rekomendasi secara manual;
 6. Badan Usaha Penugasan melalui Penyalur yang ditunjuk, agar hanya melayani Pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP Peralite dengan menggunakan Surat Rekomendasi yang diterbitkan melalui XSTAR pada daerah yang sudah diaktivasi XSTAR sebagaimana daftar terlampir;
 7. Apabila diperlukan *helpdesk* penjelasan lebih lanjut dan terdapat kendala dalam pelaksanaannya, Saudara dapat menghubungi BPH Migas melalui *chat WhatsApp* (0812-3000-0136)
- Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota,



HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197309131993111001

Tembusan:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan).
2. Inspektur Daerah Kab. Lima Puluh Kota.

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 500/3/Pereko/2026

Tanggal : 10 Januari 2026

Perihal : Pembaruan Progres Penerbitan Surat Rekomendasi
dengan XSTAR dan Implementasi XSTAR 100%

Daftar Penerima Surat

1. Kepala Dinas Sosial
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Kepala Dinas Perikanan
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
7. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
8. Kepala Dinas Perhubungan
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 500/3/Pereko/2026

Tanggal : 10 Januari 2026

Perihal : Pembaruan Progres Penerbitan Surat Rekomendasi dengan XSTAR dan Implementasi XSTAR 100%

Daftar Perangkat Daerah yang Sudah Aktivasi Akun XSTAR dan Menerbitkan Surat Rekomendasi Melalui Aplikasi XSTAR

KAB/ KOTA	SEKTOR	PERANGKAT DAERAH	EMAIL PERANGKAT DAERAH	STATUS	IMPLEMEN- TASI XSTAR
Kabupaten Lima Puluh Kota	Pelayanan Umum	Dinas Sosial	dinsos.kab50kota@gmail.com	Aktif	Belum
	Pelayanan Umum	Dinas Kesehatan	dinaskesehatan50kota@gmail.com	Aktif	Belum
	Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	dtplimapuluhkota@yahoo.co.id	Aktif	Sudah
	Usaha Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	disnaklpk@gmail.com	Aktif	Belum
	Usaha Perikanan	Dinas Perikanan	dinasikan50kota@gmail.com	Aktif	Belum
	Pelayanan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	badankesbangpol50kota@gmail.com	Aktif	Belum
	Usaha Mikro	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	disperdagkopukm50kotakab@gmail.com	Aktif	Sudah
	Usaha Mikro	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	disperinaker50kota@gmail.com	Aktif	Belum
	Transportasi Air Motor Tempel	Dinas Perhubungan	dishub50kota@gmail.com	Aktif	Belum



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota

SURAT EDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya, serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

A. Perencanaan

1. Setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, maka Perangkat Daerah segera menyusun dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merinci langkah-langkah dan tahapan-tahapan, yang disertai dengan target fisik dan keuangan untuk kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a, serta target fisik dan keuangan untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b, sehingga dengan perencanaan yang matang, diharapkan pada akhir tahun realisasi dapat tercapai sesuai rencana. Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat tanggal 24 April 2026 dan *softcopy* dikirimkan melalui email: admpemb.50kotakab@gmail.com.

2. Setiap kegiatan/sub kegiatan dan/atau pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang telah disusun sesuai huruf A angka 1 diatas, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta aturan lain yang mengikat dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif dan ekonomis.
3. Jika ada pembangunan fisik di Perangkat Daerah, dokumen perencanaannya agar dikoordinasikan dan dikonsultasikan oleh Perangkat Daerah Pelaksana dengan Perangkat Daerah Pengguna serta Perangkat Daerah Teknis.
4. Terhadap penyampaian dokumen perencanaan, Perangkat Daerah Pelaksana terlebih dahulu harus memastikan status kepemilikan lahan dalam penetapan lokasi, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan fisik tidak terjadi hal-hal yang dapat menghambat realisasi pekerjaan di lapangan.
5. Dalam hal Perangkat Daerah Pelaksana yang dalam melaksanakan pekerjaan memerlukan pembongkaran/penghapusan aset milik daerah, agar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan/aset daerah dan/atau instansi terkait.

B. Pelaksanaan

1. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat Pembuat Komitmen agar melakukan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pemilihan penyedia barang dan jasa.
3. Kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun-tahun sebelumnya agar dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2026, dan Perangkat Daerah mengantisipasi kendala dan permasalahan, antara lain belum siapnya Kerangka Acuan Kerja dan/atau Rencana Anggaran Biaya, masih dilakukannya penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri, adanya perubahan nama paket, adanya kesalahan dalam rekening belanja serta belum siapnya lahan.
4. Batas akhir waktu kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik agar diupayakan paling lambat minggu terakhir November 2026, guna memberikan kesempatan pada masing-masing pihak pelaksana pekerjaan dapat memenuhi hak dan kewajiban secara optimal, kecuali bagi kegiatan yang dianggarkan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
5. Proses Registrasi Tahap I:
 - a. Setiap kontrak pengadaan barang dan jasa dengan bentuk kontrak: Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Surat Pesanan harus diregistrasi oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan mengantarkan dokumen kontrak bermaterai ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja setelah Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Surat Pesanan ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

- b. Khusus untuk Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 5 huruf a, yang akan diregistrasi adalah Pengadaan Barang dan Jasa melalui *E-Purchasing* dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - c. Lembaran Registrasi Tahap I digunakan pada saat Penyedia Barang dan Jasa mengajukan permintaan pembayaran uang muka atau pembayaran untuk tahap awal. Lembaran Registrasi Tahap I termasuk salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Proses Registrasi Tahap II:
- a. Setiap Adendum Kontrak yang terakhir (apabila dilakukan adendum), dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan harus diregistrasi oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan mengantarkan dokumen-dokumen tersebut setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bermaterai ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - b. Lembaran Registrasi Tahap II digunakan pada saat Penyedia Barang dan Jasa mengajukan permintaan pembayaran tahap akhir. Lembaran Registrasi Tahap II termasuk salah satu persyaratan pengajuan pencairan dana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah agar meminta Perangkat Daerah melampirkan Lembaran Registrasi Tahap I (pembayaran uang muka atau tahap awal) dan Lembaran Registrasi Tahap II (pembayaran tahap akhir) saat pengajuan pencairan dana untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan bentuk kontrak Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Surat Pesanan.
8. Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen di Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas isi dan legalitas Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Surat Pesanan/Adendum Kontrak/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah diregistrasi.

C. Evaluasi dan Pelaporan

1. Perangkat Daerah agar menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Laporan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya kepada Sekretaris Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota c.q Bagian Administrasi Pembangunan dan *softcopy* dikirimkan melalui email: minbang50kota@gmail.com.

2. Untuk kegiatan/sub kegiatan yang realisasi fisik dan keuangannya lebih rendah dari target pada Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan/atau memang mengalami kendala dan/atau hambatan, Perangkat Daerah wajib mengisi kolom permasalahan dan kolom upaya penyelesaian pada Laporan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan.
3. Perangkat Daerah agar menyampaikan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q Bagian Administrasi Pembangunan dan *softcopy* dikirimkan melalui email: admpemb.50kotakab@gmail.com.
4. Khusus untuk Laporan Pengadaan Barang dan Jasa Akhir Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.b, disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q Bagian Administrasi Pembangunan dan *softcopy* dikirimkan melalui email: admpemb.50kotakab@gmail.com paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
5. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan evaluasi dan monitoring internal yang intensif terhadap pelaksanaan masing-masing kegiatan/sub kegiatan, serta segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait bila ditemukan kendala dan/atau hambatan yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
6. Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah difasilitasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan rapat yang membahas capaian Relisasi Fisik dan Keuangan serta memetakan permasalahan yang dialami oleh Perangkat Daerah. Data pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis ini berdasarkan pada Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan Perangkat Daerah setiap bulan.
7. Rapat Koordinasi Teknis pada huruf C angka 6 diatas dilaksanakan paling tidak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yang harus dihadiri langsung oleh Kepala Perangkat Daerah tanpa diwakilkan.
8. Setelah tahun anggaran berakhir, Pengguna Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Pekerjaan Yang Tidak Selesai Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan/Pekerjaan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.a serta Berita Acara Serah Terima Hasil Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.b dan menyampaiakannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota c.q Bagian Administrasi Pembangunan.

D. Pengendalian

1. Tim Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, untuk melakukan monitoring, pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Akan dilaksanakan Rapat-rapat Koordinasi Terbatas yang dihadiri oleh Tim sesuai huruf D angka 1 di atas, dan jika perlu menghadirkan Kepala Perangkat Daerah.
3. Rapat-rapat Koordinasi Terbatas tersebut sebagaimana huruf D angka 2 akan difasilitasi oleh Bagian Administasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Anggota Tim sesuai huruf D angka 1 di atas mengumpulkan data dan informasi terkait kendala dan/atau hambatan dalam hal pelaksanaan program pembangunan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai tugas pokok masing-masing anggota Tim. Jika anggota Tim menemukan adanya kendala dan/atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau pekerjaan, dapat mengusulkan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Terbatas, sehingga cepat dalam mengantisipasi kendala dan/atau hambatan.
5. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengusulkan diadakan Rapat Koordinasi Terbatas, berdasarkan data Laporan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana huruf C angka 3, dengan menghadirkan seluruh tim dan Kepala Perangkat Daerah.
6. Khusus untuk Proyek Strategis Nasional, Proyek Strategis Daerah dan Program Unggulan, jika ada permasalahan pada kegiatan dan/atau pekerjaan, maka Tim akan turun penuh, disertai oleh pihak Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan/atau pekerjaan tersebut.
7. Untuk kegiatan dan/atau pekerjaan lain, jika ada permasalahan pada kegiatan dan/atau pekerjaan, maka Bagian Administasi Pembangunan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa akan turun bersama-sama, disertai oleh pihak Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan/atau pekerjaan tersebut.

E. Pengawasan

Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 19 Februari 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



2. Bab II Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Indikator Kinerja: menyediakan ukuran untuk menilai keberhasilan kegiatan/sub kegiatan.
- b. Masukan/Input: berisi uraian tentang unsur-unsur yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, antara lain jumlah sumberdaya manusia dan sarana-prasarana yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan dimaksud sesuai yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan/sub kegiatan.
- c. Keluaran/Output: berisi hasil atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan/sub kegiatan, bisa berupa barang atau jasa, dan diukur dengan satuan fisik atau kuantitas.
- d. Hasil/Outcome: berisi dampak atau hasil yang dicapai dari penggunaan output, bisa bersifat positif atau negatif, serta bisa diukur dengan satuan kualitatif.
- e. Anggaran: berisi rincian biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.
- f. Target Fisik dan Keuangan: menetapkan target untuk setiap tahap-tahap kegiatan. Untuk target keuangan, dapat mengikuti aliran kas yang disusun untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan/sub kegiatan.

3. Bab III Penutup

Tempat dan tanggal
Kepala Perangkat Daerah

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

LAMPIRAN II.b : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 7 TAHUN 2026
 TANGGAL : 19 Februari 2026
 TENTANG : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

**RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
 TARGET FISIK DAN KEUANGAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Perangkat Daerah : _____

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana ¹⁾	Nama PPTK	Persentase	Rencana / Target bulan ke- (dalam %)												Ket.						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
I.	Program:																							
a.	Kegiatan:																							
1.	Sub Kegiatan:																							
	Pekerjaan:																							
	1.					% Fisik																		
	2.					% Keu																		
	3. dst					% Fisik																		
						% Keu																		

Tempat dan tanggal
 Kepala Perangkat Daerah

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP

Catatan:
 1. Sumber Dana yang dipilih: DAK Fisik/DAK Non Fisik/DAU/DAU Diharapkan/BLUD/Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya/Hibah/Transfer, dll
 2. Pekerjaan hanya diisi untuk pekerjaan yang berkontrak dengan bentuk Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Surat Resonansi

LAMPIRAN III : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 7 TAHUN 2026

TANGGAL : 19 Februari 2026

TENTANG : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

**LAPORAN BULANAN
 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
 PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Perangkat Daerah :
 Bulan :
 Jumlah Program :
 Jumlah Kegiatan :
 Jumlah Sub Kegiatan :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Bobot Perangkat Daerah	Realisasi						Kut.							
				s.d Bulan Lalu			Bulan ini				s.d Bulan ini						
				Keuangan	% Keu	% Fisik	Keuangan	% Keu	% Fisik		Keuangan	% Keu	% Fisik	NT	NT	NT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
i	Program:																
a	Kegiatan:																
	1	Sub Kegiatan:															
	dst...																

Tempat dan tanggal

Kepala Perangkat Daerah

Nama

Pangkat/Golongan

NIP

Catatan:

1. Format akan disiapkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan

LAMPIRAN IV : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 7 TAHUN 2026

TANGGAL : 19 Februari 2026

TENTANG : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah :
Bulan : 2026

No	Kegiatan/Pekerjaan	Masalah	Upaya Penyelesaian	Usul/Saran
1	2	3	4	5

Tempat dan tanggal
Kepala Perangkat Daerah

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

Catatan:
1. Wajib di isi oleh Perangkat Daerah dengan kegiatan/sub kegiatan yang realisasi fisik dan keuangannya lebih rendah dari target pada RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN dan/atau memang mengalami keterlambatan dan/atau hambatan dalam pelaksanaan

LAMPIRAN V.a : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 7 TAHUN 2026

TANGGAL : 17 Februari 2026

TENTANG : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
 TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah :2026
 Bulan :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Sumber Dana ¹⁾	Nilai Pagu Anggaran (Rp.)	Nilai Kontrak (Rp.)	Lokasi	Jenis Pengadaan Barang dan Jasa ²⁾	Metode pemilihan Penyedia ³⁾	Nama Pengelola Kegiatan		Kontrak			Ket		
								PPK	PPTK	Nomor	Tanggal	Masa Pelaksanaan (hari)		Pelaksana	Kemajuan Pekerjaan Minggu Terakhir (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Program:														
	Kegiatan:														
	Sub Kegiatan:														
	Pekerjaan:														
	1.														
	2. dst														

Tempat dan tanggal
 Kepala Perangkat Daerah

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP

Catatan:

- Sumber Dana yang dipilih
 - Jenis Pengadaan Barang dan Jasa dipilih
 - Metode pemilihan Penyedia dipilih
 - Kemajuan Pekerjaan Minggu Terakhir
- (Laporan Pengadaan Barang dan Jasa ini merupakan pembahasan dari Laporan Data Kontrak)

DAK Fisik/DAK Non Fisik/DAU/DAU Diarekan/BLUD/Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya/Hban/Transfer, dll
 Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi Non-Konstruksi/Jasa Lainnya
 E-Purchasing/Pengadaan Langsung/Perunjukan Langsung/Tender/Seleksi/Tender Cepat/Seleksi Cepat
 Bobot kemajuan pekerjaan pada minggu terakhir bulan yang dilaporkan

LAMPIRAN V b : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 7 TAHUN 2026

TANGGAL : 19 Februari 2026

TENTANG : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN PENGADAAN BARANG DAN JASA AKHIR TAHUN
 TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah :
 Bulan : Desember 2026

No	Program/Kegiatan/Subsumber Kegiatan/Pekerjaan	Nilai Pagu Anggaran (Rp.)	Nilai Kontrak (Rp.)	Lokasi	Jenis Pengadaan Barang dan Jasa ¹⁾	Metode pemilihan Penyedia ²⁾	Nama		Kontrak				Adendum ³⁾		Tanggal Ket Selesai				
							PPK	PPTK	Nomor	Tanggal Pelaksanaan (hari)	Masa Pelaksanaan (hari)	Pelaksanaan	Bobot Akhir (%)	Nomor		Tanggal	Nilai		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	Program:																		
	Kegiatan:																		
	Sub Kegiatan:																		
	Pekerjaan:																		
	1.																		
	2.																		
	3. dst.																		

Tempat dan tanggal
 Kepala Perangkat Daerah

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP

Catatan:
 1. Sumber Dana yang dipilih
 2. Jenis Pengadaan Barang dan Jasa dipilih
 3. Metode pemilihan Penyedia dipilih
 4. Adendum
 : DAK Fisik/DAK Non Fisik/DAU/DAU Dirahtakan/BLUD/Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya/Hibah/ Transfer, dll
 : Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Konstruksi/Jasa Konsultansi Non-Konstruksi/Jasa Lainnya
 : E-Purchasing/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung/Tender/Seleksi/Tender Cepat/Seleksi/Cepat
 : Disisi apabila dilakukan adendum/CCO. jika ada lebih dari 1 kali adendum, maka yang disikan adalah adendum terakhir

LAMPIRAN VI : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 7 TAHUN 2026
 TANGGAL : 19 Februari 2026
 TENTANG : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

LAPORAN PEKERJAAN YANG TIDAK SELESAI
 PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Perangkat Daerah :

No.	Program/Kegiatan/Belanja/Pekerjaan	Dana (Rp)	Realisasi			Sisa			Ket.	
			Keuangan (Rp)	% Keu	% Fisik	NT	Keuangan (Rp)	% Keu		% Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program:									
	Kegiatan:									
	Sub Kegiatan:									
	Pekerjaan:									
	1.									
	2.									
	3. dst									

Tempat dan tanggal
 Kepala Perangkat Daerah

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP

LAMPIRAN VII.a : SURAT EDARAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 3 TAHUN 2026
TANGGAL : Februari 2026
TENTANG : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN/PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : 900.1.6.4/ /Bag.AP-LK/I-2027

Pada hari ini tanggal bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Kedudukan dalam :
Pengelolaan Anggaran :
Diangkat berdasarkan SK : Nomor :
Bupati Lima Puluh Kota : Tanggal :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Kedudukan dalam : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Tahun
Pengelolaan Anggaran : Anggaran 2026
Alamat : Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Sarilamak

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA hasil Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026 pada dengan anggaran seluruhnya sebesar Rp.....-
(.....Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.....-
(.....Rupiah) dengan sisa dana sebesar Rp.....-
(.....Rupiah) sesuai dengan rincian Kegiatan sebagaimana terlampir.
2. PIHAK KEDUA selanjutnya berkewajiban dalam penentuan penggunaan dan pemanfaatan hasil program tersebut.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan/Pekerjaan Tahun Anggaran 2026 dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sarilamak, tanggal tersebut di atas

Yang Menerima :
PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
Selaku Koordinator Pengelola Keuangan
Daerah

Yang Menyerahkan :
PIHAK PERTAMA
Kepala Perangkat Daerah
Selaku Pengguna Anggaran

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP.19730913 199311 1 001

NAMA
Pangkat / Golongan
NIP

No	Program/ Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)			Aset (Sarana/Prasarana/Barang) Yang Diserahkan					
		Dokumen Pelaksanaan Anggaran Awal	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Lebih	Nama Aset/Barang	Jenis/Merk/ Type	Volume (Unit/Bh)	Spesifikasi	Nilai Aset (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Kegiatan ;									
a.	Sub Kegiatan ;									
b.	Sub Kegiatan ;									
JUMLAH										

Tempat dan tanggal

Kepala Perangkat Daerah

Nama
Pangkat/Golongan
NIP



BUPATI LIMA PULUH KOTA

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 2. Staf Ahli Bupati
 3. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
 4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lima Puluh Kota
 5. Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota

SURAT EDARAN

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

TRANSFORMASI BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka mendukung program efisiensi nasional, dipandang perlu menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung percepatan transformasi budaya kerja ASN yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN melalui kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi, yaitu :
 - a. tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO); dan
 - b. tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili pegawai Aparatur Sipil Negara (work from home/WFH).
2. Melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan pola kerja WFH sebanyak 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu yaitu setiap hari Jum'at;

3. Mengatur jadwal kerja WFH dan WFO, dengan komposisi dan proporsi ASN yang melaksanakan WFH dan WFO secara berimbang (1 : 1).
4. Mendorong penguatan layanan digital penyelenggaraan pemerintah daerah berupa e-office, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan layanan digital lainnya;
5. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien dan ASN wajib melakukan presensi melalui aplikasi Absen Online dengan memilih opsi Absensi di luar kantor sesuai aturan jam kerja yang berlaku pada saat itu.
6. Bagi unit pelayanan publik langsung agar tetap melaksanakan WFO, sedangkan unit pendukung dapat melaksanakan WFH secara selektif dengan memastikan target dan indikator kinerja ASN tercapai serta tidak terjadi penurunan kualitas pelayanan publik;
7. Mengutamakan pelaksanaan rapat, bimbingan teknis, seminar, konferensi dan lain-lain dilaksanakan secara *hybrid/daring*, dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Membatasi/mengurangi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sebanyak 50% dan perjalanan dinas luar negeri sebanyak 70%, dan/atau mengurangi frekuensi serta mengurangi jumlah rombongan yang melakukan perjalanan dinas;
9. Membatasi/mengurangi penggunaan kendaraan dinas jabatan maksimal 50%;
10. Bagi pejabat berikut dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap melaksanakan WFO yaitu :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Jabatan Administrator (Eselon III);
 - c. Camat dan Wali Nagari beserta perangkat nagari;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Mal Pelayanan Publik (MPP);
 - j. Petugas pelayanan kesehatan pada RSUD dr. Achmad Darwis, Puskesmas, UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten;
 - k. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SLTP) sederajat; dan
 - l. Unit layanan publik lainnya yang melaksanakan layanan langsung kepada masyarakat.
11. Melaksanakan penghitungan penghematan anggaran daerah sebagai dampak dari kebijakan transformasi budaya kerja yang lebih efektif dan efisien terutama penghematan biaya operasional pegawai, listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), Air, Telepon, dan lain-lain;
 12. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati, pada tautan https://bit.ly/laporanwfh_50kota paling lambat tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 08 April 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau, Jl. Raya Negara KM.10 Sarilamak

Sarilamak, 15 Januari 2026

Nomor : 400.2.4.1/051/DPPKBP3A-LK/2026
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Undangan Pertemuan

Kepada Yth
Saudara/i (daftar terlampir)
di -
Tempat

Dalam rangka pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kabupaten Layak Anak dan menjamin keberlanjutan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota, diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mengatur peran, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah.

Sebagai bagian penting dari proses penyusunan Ranperda tersebut, diperlukan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, indikator, serta target capaian yang terukur dan terintegrasi antar perangkat daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, akan dilaksanakan "Pertemuan Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai Dasar Penyusunan Ranperda Kabupaten Layak Anak" pada :

Hari/ Tanggal : Rabu/ 21 Januari 2026
Jam : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Aula Bappelitbangda Kab.Lima Puluh Kota

Diharapkan kepada Saudara untuk dapat hadir dalam kegiatan dimaksud sebagaimana daftar peserta terlampir dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan diharapkan Saudara dapat mengisi lembar lampiran matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak tahun 2026-2030.

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
HERMAN AZMAR, AP. M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19730913 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai Laporan)

Lampiran : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor : 400.2.4.1/esi / DPPKBPP3A-LK/ I / 2026
Tanggal : 15 Januari 2026

Yang terhormat :

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
3. Kepala Bappelitbangda
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Kepala Dinas Kesehatan
6. Kepala Dinas Sosial
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
15. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pemukiman
17. Kepala Dinas Perhubungan
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19. Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
21. Kepala Bagian Hukum
22. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
23. Camat se-Kab.Lima Puluh Kota
24. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Lima Puluh Kota
25. Kepala Kantor Pengadilan Agama Kab.Lima Puluh Kota
26. Kepala LPKA Kelas II Payakumbuh
27. Kepala Badan Pusat Statistik Kab.Lima Puluh Kota
28. Kepala Badan Keuangan
29. Kepala PDAM Kab.Lima Puluh Kota
30. Kepala UPTD PPA Kab.Lima Puluh Kota
31. Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II
32. Ketua PKK Kab.Lima Puluh Kota
33. Ketua LKAAM Kab.Lima Puluh Kota
34. Ketua Persatuan Wali Nagari Kab.Lima Puluh Kota
35. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV (SMA/ SMK)
36. Ketua Forum Anak Daerah Kab.Lima Puluh Kota
37. Dunia Usaha
38. Ketua FK-KPAN
39. Ketua P2TP2A Luak Nan Bonsu

Kepala DPPKBPPPA
Kab.Lima Puluh Kota



WILDA REFLITA, S.ST, M.M
NIP.19690717 198912 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jln.Jend Sudirman No. 1 Telp. 0752-92418 Fax. 0752-92172 Kota Payakumbuh
e-mail: dinaskesehatan50kota@gmail.com

Payakumbuh, 22 Februari 2026

Nomor : 000/42/Diskes.1/SRK/2026
Sifat : BIASA
Lampiran :-
Hal : Undangan Forum Dinas Kesehatan
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i
(Daftar Undangan Terlampir)
Di

Tempat

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 136 Ayat 1, maka salah satu tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Forum Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara/i untuk menghadiri Forum Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027, secara hybrid pada:

Hari/ Tanggal : Rabu / 25 Februari 2026
Jam : 09.00 WIB – Selesai
Link Zoom : <https://bit.ly/ForumDinkes2026>
Tempat : Aula Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota
Agenda : Pemaparan dan Pembahasan Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Tahun 2027

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kesehatan,



dr. Budi Andri, MKM
Pembina TK.I / (IV/b)
Nip. 197201022001121001

Lampiran Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Perihal : Undangan Forum Dinas Kesehatan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN
A.	Unsur Perangkat Daerah
1	Inspektorat Daerah
2	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Dinas Perhubungan
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Dinas Sosial
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
13	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
16	Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
18	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
21	Dinas Perikanan
22	Dinas Pangan
23	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
24	Kecamatan Kapur IX
25	Kecamatan Pangkalan
26	Kecamatan Harau
27	Kecamatan Payakumbuh
28	Kecamatan Guguk
29	Kecamatan Mungka
30	Kecamatan Bukit Barisan
31	Kecamatan Suliki
32	Kecamatan Gunung Omeh
33	Kecamatan Lareh Sago Halaban
34	Kecamatan Luak
35	Kecamatan Situjuh
36	Kecamatan Akabiluru
37	RSUD Dr. Achmad Darwis
38	Instalasi farmasi
39	UPTD Puskesmas Se Kabupaten Lima Puluh Kota
B.	Unsur Lainnya
1	Ketua PKK Kabupaten Lima Puluh Kota
2	Badan Pusat Statistik Kab. Lima Puluh Kota
3	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kemendes
4	Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Lima Puluh Kota

NO.	PEMANGKU KEPENTINGAN
5	Ketua Forum Anak Kabupaten Lima Puluh Kota
6	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh
7	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Lima Puluh Kota
8	Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Kabupaten Lima Puluh Kota
9	Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Lima Puluh Kota
10	Ketua Persatuan Wali Nagari Lima Puluh Kota (Perwanaliko)
11	Ketua Baznas
12	Ketua MUI
13	Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Lima Puluh Kota
14	Duta Genre Kabupaten Lima Puluh Kota
15	Ketua PGRI Kabupaten Lima Puluh Kota